



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK**

TESIS

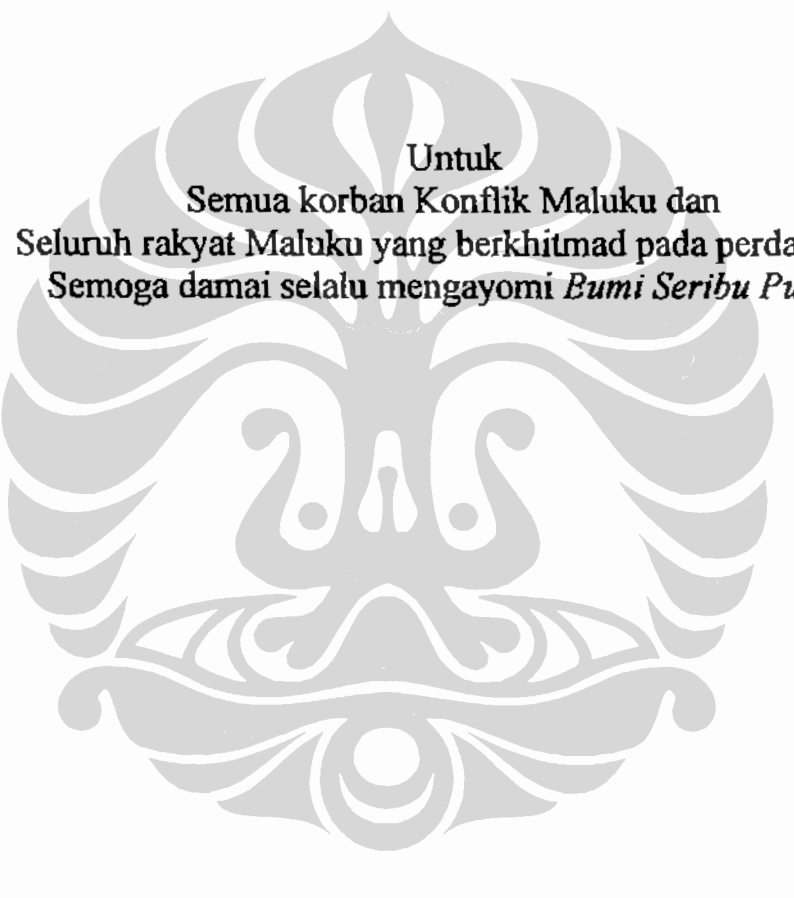


**PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO
DAN PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.**

**Oleh:
SAIDIN ERNAS
Nomor Pokok : 690321035X**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar
Magister Sains (M.Si) Ilmu Politik
Jakarta, 2006**

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**



Untuk
Semua korban Konflik Maluku dan
Seluruh rakyat Maluku yang berkhitmad pada perdamaian
Semoga damai selalu mengayomi *Bumi Seribu Pulau*.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

LEMBAR PPERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : SAIDIN ERNAS
NPM : 690321035X
Judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO DAN PENYELESAIAN
KONFLIK MALUKU

Jakarta, Juni 2006
Pembimbing

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : SAIDIN ERNAS
NPM : 690321035X
Judul : PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO DAN PENYELESAIAN
KONFLIK MALUKU

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana
Magister Ilmu Politik pada tanggal 8 Juni 2006 dan telah dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji:

Ketua Sidang

Dr. Isbodroini Suyatno, MA.



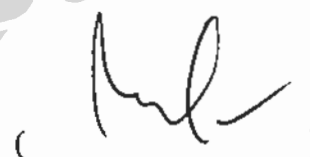
Sekretaris

Drs. Lili Ramli, M.Si



Pembimbing

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.



Penguji Ahli

Dr. Jayadi Nas, M.Si



UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAMME OF POLITICAL SCIENCE

ABSTRACT

SAIDIN ERNAS
690321035X

THE IMPLEMENTATION OF MALINO AGREEMENT AND THE RESOLUTION OF CONFLICT IN MOLUCCA

222 pages

Bibliography: 36 books, 5 journals, 6 daily newspapers, 1 website, 12 articles, and 13 documents

This thesis examines the implementation process of Malino Agreement and analyse its impact to conflict resolution in Molucca. In this research, the method of descriptive qualitative is applied. Data is collected from informants, who are main actors of the agreement, such as delegation members from Islam and Christian sides, mediator, observer and certain competence people who oppose the implementation of the agreement. Theory which is used is theory of conflict, especially the theory of primordial from Clifford Geertz that explains the sources of conflict. Related to the conflict resolution, the theory of conflict resolution from John Borton and the theory of conflict and consensus from Maswadi Rauf are applied in this thesis.

The conclusions of the research are 1) Malino Agreement has proceeded in discursive, peaceful and democratic situation. The actors involved in the agreement have achieved 11 items of peace agreement because of forceful eagerness to end up the conflict; 2) positive impact of the agreement is the decrease of conflict escalation and anarchism in Molucca, yet nowadays the conflict has completely stopped. There are three factors which contribute to that condition, which are the accomplishment of the returning of Laskar Jihad and the dismissal of FKM/RMS, the success of law enforcement, and the ability to restore social economic life. However, this research found that the agreement has several serious weak points because it does not affect basic problems of the root of the conflict. For example of the basic problems are religion sentiment, social economic discrepancy and political and bureaucratic conflict elite.

Theoretically, this research is strengthen the theory of primordialism initiated by Geertz that primordial sentiment is interfered by other external factors such as politics, economic, and provocation that endorse greater conflict. To resolve social conflict in Molucca, hence the approach of consensus theory is not enough, hence transformative conflict resolution is needed to guarantee permanent harmony.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

Nama : SAIDIN ERNAS
NIM : 690321035X

PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO
DAN PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU

(169 halaman, bibliografi: 36 buku, 5 Jurnal, 6 Surat Kabar Harian, 1 Situs
Internet, 12 Makalah dan 13 Dokumen)

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang proses pelaksanaan Perjanjian Malino dan menganalisis dampaknya terhadap penyelesaian konflik Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh Perjanjian Malino, yakni anggota Delegasi Islam dan Kristen, Mediator, Peninjau dan tokoh tertentu yang dianggap kompeten. Para informan juga diambil dari tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan dan hasil-hasil Perjanjian Malino. Teori yang digunakan adalah teori-teori konflik, khususnya teori sentimen primordial dari Clifort Geertz yang menjelaskan tentang sumber konflik. Berkenaan dengan proses penyelesaian konflik, digunakan teori resolusi konflik (*conflict resolution*) dari Jhon Borton dan teori konflik dan konsensus yang diperkenalkan oleh Maswadi Rauf.

Kesimpulan penelitian ini adalah *pertama*, Perjanjian Malino telah berlangsung dalam suasana dialogis, damai dan demokratis. Para pihak yang bertikai berhasil menandatangani 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk menghentikan konflik di Maluku. *Kedua*, dampak positif Perjanjian Malino adalah berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku, bahkan saat ini konflik sudah berhenti sama sekali. Ada tiga hal yang menyumbangkan kepada kondisi tersebut. 1) Keberhasilan memulangkan Laskar Jihad dan pembubaran FKM/RMS, 2) Keberhasilan melakukan penegakan hukum dan keamanan, dan 3) Keberhasilan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Perjanjian Malino masih menyimpan beberapa kelemahan yang cukup serius, sebab perjanjian tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar yang menjadi akar persoalan konflik Maluku. Seperti menguatnya sentimen keagamaan, kecemburuan sosial dan ekonomi serta konflik elit politik dan birokrasi.

Secara teoritis penelitian ini memperkuat teori primordialisme-Geertz bahwa sentimen primordial yang disusupi oleh faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi dan provokasi akan melahirkan konflik yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikan konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku, maka pendekatan teori konsensus belumlah mencukupi, sehingga diperlukan langkah-langkah resolusi konflik yang bersifat transformatif, untuk menjamin perdamaian secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Teriring syukur kepada Allah, penulisan tesis ini akhirnya rampung juga. Di tengah segala keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang datang menghadang, Allah SWT masih berkenan memberikan rahmat dan kekuatan-Nya kepada saya untuk menyelesaikan tugas penulisan Tesis ini. Bagi saya, ini merupakan karunia dan anugrah yang tak terbilang.

Secara formal, penulisan tesis ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Politik. Namun lebih dari itu, saya harus mengakui bahwa sejak lama saya telah memiliki obsesi pribadi untuk meneliti lebih jauh tentang konflik Maluku. Pengalaman pribadi ketika terlibat dalam konflik dan menjadi korban konflik Maluku telah mengkonstruksi kesadaran pribadi saya bahwa konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku hanya melahirkan nestapa kemanusiaan yang tak terperikan. Kesadaran itu secara tidak sadar sering melahirkan pertanyaan dalam pikiran saya tentang apa sebenarnya yang telah menyebabkan konflik yang sedemikian dahsyat sehingga penyelesaiannya begitu sulit dan berlarut-larut. Penulisan tesis ini selain untuk kepentingan akademis, juga menjadi bagian dari pencarian saya untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Selama mengikuti studi di Program Pascarsarjana Ilmu Politik UI, maupun selama menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini, saya telah dibantu oleh banyak orang yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas jasa-jasa mereka, walaupun saya sangat menyadari ucapan terimakasih belumlah sebanding dengan bantuan yang telah saya terima.

Terimakasih kepada Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik UI Dr. Isbodroini Suyatno, MA, dan Sekretaris PPs. Ilmu Politik Nurul Nurhandjati, S.IP, M.Si, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar di PPs. Ilmu Politik adalah *moment* yang tak terlupakan. Kepada Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, Ketua Departemen Ilmu Politik UI sekaligus dosen perwalian saya, atas bimbingan dan arahan-arahannya selama penulisan tesis ini. Berinteraksi dengan beliau, saya belajar tentang banyak hal, khususnya tentang keniscayaan bahwa seorang ilmuwan politik bisa saja salah, namun dilarang untuk melakukan kebohongan.

Terimakasih juga kepada para penguji, Dr. Lili Ramli, Dr. Jayadi Nas, atas kritik dan masukan-masukannya yang sangat berharga sehingga semakin menambah bobot dan kesempurnaan tesis ini, meski saya sadar sepenuhnya bahwa penyempurnaan yang saya lakukan tentunya belum memuaskan. Demikian juga kepada dosen-dosen saya Dr. Ahmad Suhelmi, Dr. Chusnul Mar'iyah, Dr. Burhan Djabir Magenda dan staf pengajar lainnya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Juga kepada staf di PPs Ilmu Politik, Mba Hera, Mba Romlah, Mba Retno, Mas Deni serta yang lainnya yang selalu saya repotkan dengan berbagai keluhan, khususnya ketika menjelang waktu registrasi dan pembayaran SPP.

Kepada para informan saya, Bapak Tamrin Elly yang selalu menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Demikian pula Dr. Faried B. Husein, Letjen (Pur) Suadi Marasabessy, Dr. Saleh Latuconsina, Pendeta Dr. Jhon Ruhulesin (Ketua Sinode GPM), Pendeta Jacky Manuputy, Bung Toni Pariela, Kanda Irwan Patty, Bapak Hasyim Marasabessy, Bapak Bambang W. Suharto dan Abang Hasbullah Toisuta. Informasi yang telah diberikan melalui wawancara yang sangat bersahabat, sungguh telah membantu penulisan tesis ini.

Kepada teman-teman sekelas; Bung Holmes (teruskan program doktormu), Nasih (partner dikusi yang baik), Ibu Dewi Coryati, Yudistira, Chumaidi, Muhammad Anwar, Bang Ruslan, Bung Victor dan rekan-rekan lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kehangatan dan interaksi keilmuan selama belajar bersama mereka di UI telah membantu memperluas pengetahuan saya. Juga buat rekan-rekan di Asrama Mahasiswa Wisma Rini UI; Nasih Jawa, Musthafa Medan, Haris Bima, Tri Makassar, Jufri Bone, Mba Titi Padang, Faisal Lombok, Zulfan Aceh dan lain-lain atas pertemanannya yang baik selama di Wisma Rini.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada sahabat saya, Bung Abraham Pakel dan keluarga atas bantuan dan perhatiannya, khususnya di saat-saat sulit ketika penulis memerlukan banyak biaya untuk menyelesaikan penelitian ini. Demikian juga kepada Abang Malik Rumlatur, Abang Ongen Rumadaul, Abang Yusuf Rumatoras, Abang Kemal, Abang Ramli Kamidin, Abang Ismail Tomagola, Bang Maksum, Bang Idris, Mas Yudi, Musafi, Mail dan Baim serta semua sahabat sejati yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Untuk semua kebaikan dari semua pihak yang telah saya terima, saya hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa membalasnya dengan balasan yang terbaik.

Akhirnya kepada orang-orang terdekat, Ayah dan Bunda tercinta, atas ketulusan cinta dan do'a keduanya selingga menjadikan semua mimpi anaknya menjadi kenyataan. Untuk Junaidah Ernas, istri tercinta yang banyak berkorban untuk suaminya yang terus ingin maju (terimakasih sayang). Juga untuk ananda tersayang Gilbanisa Palnesia Ernas (Caca), yang telah kehilangan sentuhan kasih dari ayahnya selama studi dan penulisan tesis ini. Kepadanya tesis ini saya dedikasikan.

Sebagai karya ilmiah, saya sungguh mengharapkan agar tesis ini mendapatkan masukan dan kritik untuk penyempurnaan, sehingga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan masyarakat luas.

Wisma Rini Otista, Akhir Juni 2004

Saidin Ernas

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	ii
Lembar Persetujuan Tesis	iii
Lembar Pengesahan Tesis	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis	11
1. Dasar-dasar Teoritik tentang Konflik	11
2. Sentimen Primordial Sebagai Sumber Konflik	14
3. Teori Resolusi Konflik dan Konsensus	17
E. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Teknis Pengumpulan Data	26
F. Sistematika Penulisan	29

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK MALUKU.

A. Deskripsi Singkat tentang Maluku	31
1. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan	34
2. Kehidupan Keagamaan	43
3. Dinamika Politik Lokal	49
a. Konteks Politik	49
b. Birokrasi Pemerintahan	50
B. Anatomi Konflik Maluku	52
1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik di Maluku	54
a. Sentimen Keagamaan	55
b. Konflik Elit Politik	59
c. Kecemburuan Sosial dan Ekonomi	67
2. Faktor-faktor Pemicu Konflik Maluku	71
a. Efek Kasus Ketapang dan Keterlibatan TNI	72
b. Peristiwa Perkelahian antara Pemuda	74
C. Dampak Konflik Maluku	76

BAB III. PERJANJIAN MALINO SEBAGAI SUATU USAHA PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.

A. Upaya Penyelesaian Konflik Maluku	79
B. Kebijakan Darurat Sipil untuk Maluku	81
C. Gagasan tentang Perjanjian Malino	84
1. Inspirasi dari Perjanjian Malino I	84
2. Peran Yusuf Kalla dan Gagasan Pelaksanaan Malino II untuk Maluku	85
D. Pra Kondisi Perjanjian Malino	89
1. Sosialisasi Rencana Perjanjian Malino	89
2. Penyusunan Delegasi	92
3. Pertemuan Pendahuluan	96
E. Dinamika Pelaksanaan Perjanjian Malino	98
1. Metode Perundingan	98
2. Rancangan Agenda Pertemuan	100
3. Aspirasi dan Usulan Delegasi Islam	102
4. Aspirasi dan Usulan Delegasi Kristen	105
5. Dinamika Pertemuan Hari Kedua	112
6. Tarik Menarik Isu Laskar Jihad dan FKM/RMS	113
7. Kesepakatan Perundingan	117
8. Perjanjian Malino Sebagai Model Resolusi Konflik	123

BAB IV. DAMPAK PERJANJIAN MALINO TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.

A. Respon Masyarakat Maluku terhadap Perjanjian Malino	126
B. Sosialisasi dan Implementasi Perjanjian Malino	132
1. Sosialisasi Perjanjian Malino dan Komitmen Anggaran	132
2. Pembentukan Tim Independen dan Tim Pemantau	135
3. Implementasi di Tingkat Daerah	138
C. Dampak Perjanjian Malino; Penghentian Konflik dan Kekerasan	139
1. Pembubaran Laskar Jihad dan FKM	142
2. Penegakan Hukum dan Keamanan	145
3. Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi	147
D. Penghentian Konflik dan Agenda Perdamaian Selanjutnya	149

BAB V. P E N U T U P

A. Kesimpulan	155
B. Implikasi Teori	157
C. Saran dan Rekomendasi	159

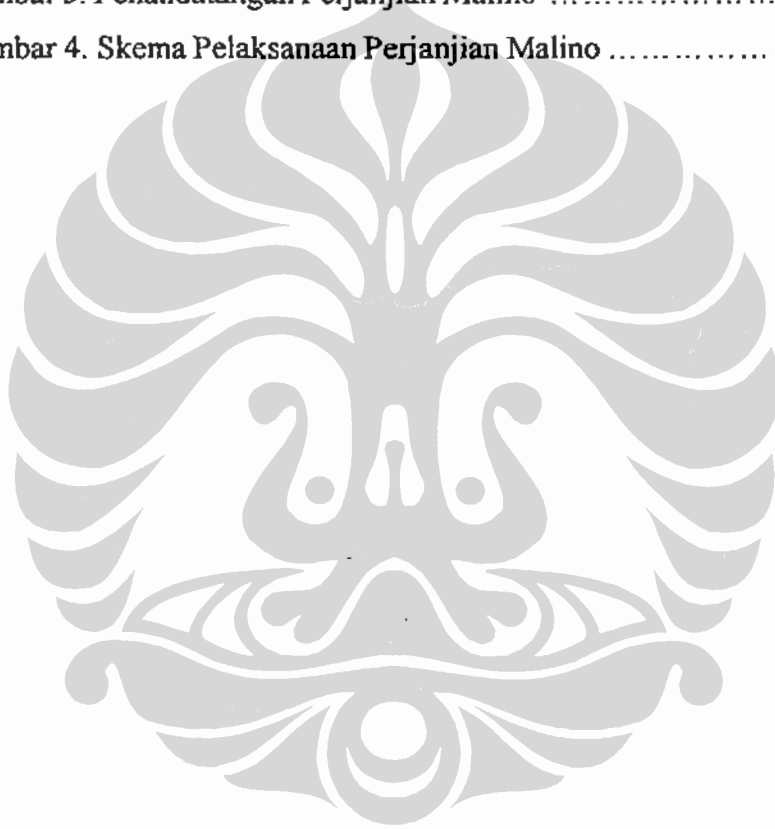
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	167

Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Informan	27
Tabel 2. Jumlah Penduduk Maluku Dirinci Per-Kabupaten/Kota	34
Tabel. 3. Persentasi Pemeluk Agama Menurut Kab/Kota di Maluku	47
Tabel. 4 Perimbangan Penduduk Kota Ambon Menurut Agama (Tahun 1996-2000)....	48
Tabel. 5 Daftar Pejabat Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekwilda Maluku	65
Tabel. 6 Isu sampai dengan 26-27 Januari 2002	91
Tabel. 7 Daftar Delegasi Kristen ke Malino	93
Tabel. 8 Daftar Delegasi Islam ke Malino	95
Tabel. 9 Mediator Malino	99
Tabel. 10 Peninjau Malino.....	100
Tabel. 11 Usulan Agenda Untuk Komisi	101
Tabel. 12 Penjabaran Agenda Perundingan (Ususlan Delegasi Islam)	107
Tabel. 13 Usulan Pemecahan Delegasi Islam	111
Tabel. 14 Anggaran Koordinasi, Pemantauan dan Rehabilitasi pasca Malino	134
Tabel 15 Intensitas Konflik Pasca Malino	140
Tabel 16 Rekap Pengungsi Prov. Maluku Tahun 2004	148

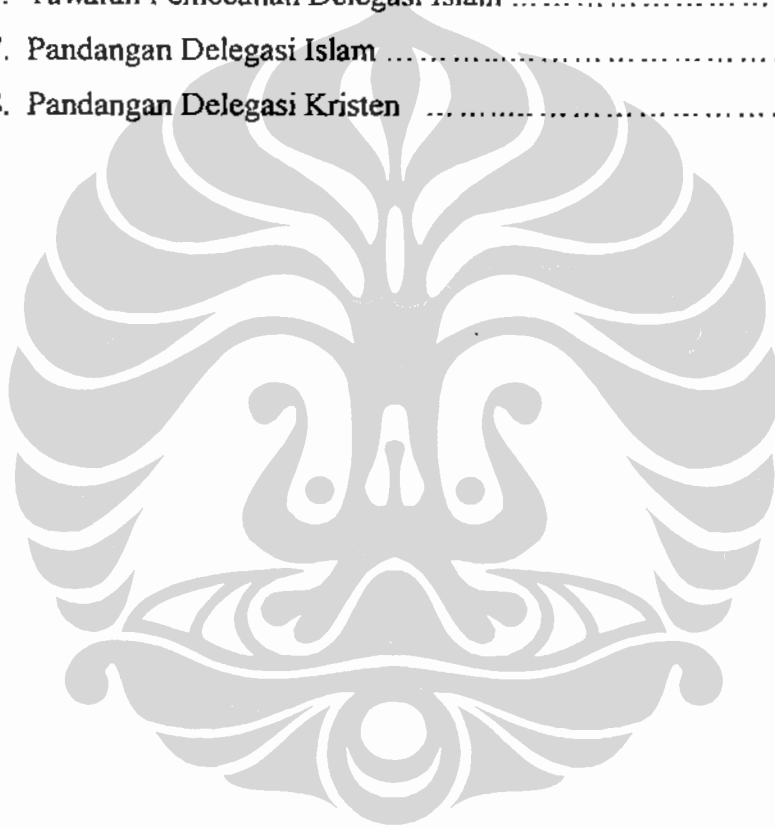
Daftar Gambar

1. Gambar 1. Teori <i>Zeru-Sum</i>	24
2. Gambar 2. Contoh Hubungan <i>Pela</i> di Maluku Tengah	37
3. Gambar 3. Penandatanganan Perjanjian Malino	122
4. Gambar 4. Skema Pelaksanaan Perjanjian Malino	126



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara	167
Lampiran 2. Panduan Pertemuan untuk Maluku	196
Lampiran 3. Naskah Perjanjian Maluku di Malino	207
Lampiran 4. Notulen Hasil Pertemuan 26-27 Januari 2002	212
Lampiran 5. Notulen Hasil Pertemuan 30 Januari 2002	213
Lampiran 6. Tawaran Pemecahan Delegasi Islam	214
Lampiran 7. Pandangan Delegasi Islam	215
Lampiran 8. Pandangan Delegasi Kristen	222



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Di penghujung abad XX, Indonesia diguncang oleh sejumlah konflik dan kerusuhan, salah satu diantaranya terjadi di Maluku. Konflik dan kerusuhan komunal yang terjadi di Maluku mewujud dalam aksi-aksi kekerasan kolektif dengan simbol-simbol agama yang kental, dan telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Azumardi Azra menyebut konflik Maluku sebagai konflik komunal bernuansa agama yang paling dahsyat dalam sejarah Indonesia moderen.¹

Tragedi Maluku yang pecah menjadi konflik massal pada tanggal 19 Januari 1999 telah menggoreskan catatan kelam yang paling memilukan dan tragis. Data resmi Pemerintah menyebutkan lebih dari 3.080 orang meninggal dunia, 4204 orang mengalami luka-luka, 281.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah dan kampung halamannya. Ratusan ribu rumah penduduk, gedung perkantoran dan sarana-prasarana fisik lainnya hancur dan terbakar.² Kerugian itu belum termasuk kehancuran moral dan nilai-nilai lokal yang harus ditanggung oleh masyarakat Maluku.

Konflik di Maluku adalah contoh yang lengkap tentang bagaimana suatu konflik berkembang dari tahapannya yang paling sederhana. Konon dari pertikaian antara dua individu dengan isu tunggal, lalu dengan cepat meningkat menjadi pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan isu beragam (SARA) yang menjalar ke berbagai kawasan di Maluku dengan melibatkan semakin banyak orang, bahkan juga orang luar, sampai kemudian menjadi krisis nasional yang mengundang reaksi-reaksi internasional.

¹ Azumardi Azra, *Muslim and Christian Relation in Contemporary Indonesia*, makalah pada Komprensi tentang "Christian and Muslim in The Commonwealth". Windsor, Inggris, 6-9 Juli 2000.

Eskalasi konflik Maluku yang demikian “sempurna”, membuat langkah-langkah penyelesaiannya menjadi begitu sulit dan berlarut-larut. Luka sosial yang ditimbulkan konflik Maluku, seperti kebencian, dendam, saling curiga, tentu lebih sulit lagi untuk disembuhkan. Suasana bertambah sulit, ketika konflik telah menggunakan simbol-simbol keagamaan, sehingga menyulut solidaritas dari luar Maluku bahkan mengundang keprihatinan dunia internasional.

Dalam periode 2000-2002 nuansa konflik semakin mengalami pergeseran konteks, dari konflik sosial bernuansa SARA kepada konflik baru yang mulai memunculkan gesekan-gesekan politik sehingga membuat persoalan konflik semakin rumit. Pada tanggal 6 April 2000 *Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Waljamaah* (FKASWJ) menyelenggarakan Tablik Akbar di Senayan Jakarta, sekaligus mendeklarasikan berdirinya Laskar Jihad. Satu bulan kemudian Laskar Jihad secara bergelombang mulai masuk ke berbagai daerah konflik di Maluku. Seakan merespons kondisi Maluku yang semakin memburuk, pada tanggal 18 Desember 2000, sekelompok tokoh Maluku yang mayoritas beragama Kristen mendeklarasikan berdirinya Front Kedaulatan Maluku (FKM) dengan agenda politik, memperjuangkan kemerdekaan “Bangsa Maluku” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Riak-riak politik yang kian mewarnai konflik Maluku menjadikan konflik semakin sulit diselesaikan. Model-model penyelesaian kultural seperti konsep *pela-gandong*, *masohi/maren* ataupun *larful ngabal* yang sebelumnya cukup ampuh untuk meredam konflik sosial di Maluku, semakin kehilangan daya rekat. Bahkan secara kontras terlihat bahwa nilai-nilai tersebut –dengan berbagai alasan– semakin mengalami “pelunturan ketaatan” dari berbagai lapisan masyarakat di Maluku.

² Lihat laporan *Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi di Maluku*

Awalnya banyak pihak menyerukan agar penyelesaian konflik Maluku diselesaikan sendiri oleh masyarakat Maluku. Namun hal tersebut nampaknya tidak efektif lagi, karena konflik sudah semakin ekstrim dan melibatkan faktor-faktor eksternal yang tidak mampu dijangkau oleh instrumen-instrumen kultural. Bahkan seruan itu sendiri mengundang perdebatan karena negara dianggap melepaskan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Jika dicermati sejak pertama kali terjadinya konflik pada tanggal 19 Januari 1999³, sudah cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik Maluku. Seperti pembentukan berbagai tim⁴, baik formal maupun informal hingga pemberlakuan Darurat Sipil di Maluku. Semua kebijakan yang dilakukan belum banyak menunjukkan hasil yang memuaskan, untuk tidak mengatakan gagal.

Melihat upaya-upaya menciptakan perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai di Maluku belum banyak membuahkan hasil yang maksimal, bahkan secara umum *trend* konflik semakin meningkat dan meluas dari waktu ke waktu, muncul gagasan pemerintah melalui Menkokesra Yusuf Kalla untuk mempertemukan para pihak yang berkonflik kedalam sebuah perundingan yang lebih luas cakupannya, melibatkan semua unsur dan pihak-pihak yang selama ini bertikai di lapangan dan mengikatnya dalam sebuah tanggung jawab bersama. Gagasan ini akhirnya

(KPM), 18 Desember 2000.

³ Ada berbagai versi tentang kapan pertama kali konflik meletus, karena sebelumnya sudah terjadi beberapa bentrokan di beberapa tempat dalam skala yang lebih kecil, seperti di Dobo-Maluku Tenggara, Air Bah dan beberapa daerah lainnya.

⁴ Dalam catatan resmi, terdapat tujuh tim yang telah dibentuk, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian konflik Maluku. Lihat Eko Prasetyo, *Memahami Wajah pembela Agama, Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Arus Global*, (Yogyakarta: Insist, 2002) Lihat pula catatan Harian Umum Republika, *Info Seribu TIM*, 23 Juni 2003.

dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Februari 2002 dan dikenal dengan Perjanjian Maluku di Malino atau Perjanjian Malino II⁵

Perjanjian Malino merupakan suatu upaya perdamaian yang monumental bagi masyarakat Maluku. Karena di dalam perjanjian tersebut pihak Islam maupun Kristen dengan jumlah delegasi sebanyak 70 orang (belum termasuk tim peninjau) untuk pertama kalinya duduk semeja membicarakan berbagai usaha dan kesepakatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik Maluku secara damai, beradab dan bermartabat.

Di pegunungan Malino yang berhawa sejuk, mereka berdialog dalam suasana yang cukup alot dan menegangkan, sebab masing-masing pihak datang dengan tuntutan dan kepentingan yang berbeda. Ada tuntutan dan pandangan kedua delegasi yang memiliki kesamaan, seperti keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Namun ada juga masalah-masalah yang membawa kedua delegasi kedalam perdebatan yang cukup serius dan menegangkan. Dua isu yang mengundang perdebatan serius adalah *pertama*, tuntutan delegasi Kristen agar pemerintah mengambil tindakan hukum yang keras terhadap Laskar Jihad (LJ) karena dianggap sebagai salah satu faktor dominan yang melanggengkan konflik di Maluku. Bagi delegasi Kristen lolosnya Laskar Jihad ke Maluku adalah sebuah ironi dan irrasionalitas dalam kehidupan bernegara.⁶ Negara dianggap tidak mampu berbuat banyak dalam mengantisipasi kehadiran laskar Jihad. Pihak Islam menganggap tudingan itu terlalu berlebihan karena kelompok Laskar Jihad datang ke Ambon setelah konflik meletus

⁵ Disebut Perjanjian Malino II untuk membedakannya dengan Perjanjian Malino I yang juga dilakukan di Malino untuk menyelesaikan konflik sosial benuansa SARA di Poso Sulawesi Tengah. Malino adalah sebuah tempat berhawa sejuk di Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Daerah tersebut telah sering digunakan sebagai tempat perundingan oleh berbagai pihak, bahkan sejak kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya dalam tulisan ini hanya akan disebut Perjanjian Malino.

hampir setahun, bahkan Laskar Jihad dianggap sebagai “dewa” penolong bagi kalangan Islam, ketika aparat keamanan dianggap tidak mampu membela hak-hak mereka selama kerusuhan. Menurut delegasi Islam, keberadaan Laskar Jihad harus diperlakukan sama dengan kelompok sosial lain (LSM nasional maupun asing) yang banyak berdatangan ke Ambon selama konflik berlangsung.

Kedua, tentang kecaman yang disampaikan oleh delegasi Islam terhadap keberadaan FKM/RMS yang dianggap sebagai reinkarnasi Republik Maluku Selatan (RMS), yang di masa lalu merupakan sebuah gerakan pemberontakan dan separatisme di Maluku. Bagi delegasi Islam, FKM dan RMS adalah salah satu penyebab yang cukup dominan dalam konflik Maluku. Komunitas Kristen dituduh telah melindungi gerakan berbau separatis tersebut karena tidak pernah menunjukkan kutukan atau kecaman secara terbuka terhadap keberadaan FKM. Padahal FKM selalu merayakan secara rutin ulang tahun RMS yang jatuh pada tanggal 25 April, sehingga selalu memprovokasi dan memicu konflik dan gejolak di tengah masyarakat.⁷ Namun delegasi Kristen berpendapat bahwa FKM hanya sebuah gerakan sosial yang berakar pada kekecewaan yang mendalam terhadap kebijakan-kebijakan sosial dan politik yang dijalankan pemerintah pusat. Karena sifatnya yang merupakan gerakan sosial politik, maka FKM harus dibedakan, misalnya dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mewujudkan perjuangan politiknya dalam bentuk perjuangan bersenjata. Ataupun dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga melakukan perjuangan politik bersenjata sehingga mesti disebut sebagai gerakan separatis.

⁶ *Suara Maluku*, 15 Februari 2001

⁷ Tulisan Rustam Kastor yang cukup provokatif, *Selamatkan Maluku dari Ancaman Ideologi Separatis RMS*, (Jakarta: Komite Penyelamat Maluku, 2004), memperlihatkan bagaimana sebagian orang-orang Islam Maluku memandang eksistensi RMS dan FKM sebagai sesuatu yang mengancam selama konflik.

Di tengah kuatnya tarik menarik kedua isu tersebut serta teror yang diterima dari sejumlah pihak yang masih menolak Malino, akhirnya perundingan Malino dapat merumuskan 11 butir kesepakatan yang kemudian dikenal dengan **Perjanjian Maluku di Malino**. Sebelas butir kesepakatan tersebut adalah:

1. Mengakhiri semua konflik dan kekerasan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, aparat hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.
3. Menolak, menentang dan menindas segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS.
4. Sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah propinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan mentaati budaya setempat serta menjaga keamanan dan ketertiban.
5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau lasykar yang bersenjata tanpa izin di Maluku, dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Lasykar Jihad, Laskar Kristus, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demi tegaknya hukum.

7. Mengembalikan pengungsi ke tempat semula tanpa paksaan dengan hak-hak keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana ekonomi, dan sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan seluruh masyarakat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, kekompakan dan ketegasan TNI/Polri sesuai fungsi dan tugas masing-masing, mutlak perlu. Sejalan dengan itu berbagai fasilitas TNI/Polri harus dibangun, dilengkapi dan difungsikan kembali.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk agama di Maluku, segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus tetap menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.
11. Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama, karena itu sistem rekrutment dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dengan memenuhi syarat kualitas yang telah ditentukan.

Tampaknya sebelas butir konsensus yang dicapai di atas belum memuaskan berbagai pihak, khususnya mereka yang sejak awal menunjukkan sikap kontra dengan ide pelaksanaan Perjanjian Malino. Di Ambon, kelompok penentang ini menyebut dirinya kelompok 11 lalu mengorganisasikan sejumlah demonstrasi untuk menentang perjanjian Malino. Demikian pula dengan Laskar Jihad dan FKM yang memandang

sinis terhadap hasil-hasil yang dicapai di Malino. Mereka menganggap Perjanjian Malino tidak mengikat bagi mereka, karena mereka tidak dilibatkan dalam perundingan tersebut. Penentangan juga dilakukan oleh berbagai kelompok yang mengekspresikan kekecewaannya dengan membakar kantor Gubernur Maluku.⁸ Situasi pasca Malino bahkan masih menegangkan karena munculnya teror, pembunuhan dan pengeboman di berbagai tempat di kota Ambon dan sekitarnya. Teror dan pengeboman tersebut dilakukan secara seporadis oleh sejumlah oknum yang kemudian diidentifikasi sebagai oknum tentara atau orang-orang sipil yang diperintahkan oleh oknum-oknum aparat kemanan untuk melakukan kekacauan. Situasi ini sekaligus memperkuat pandangan bahwa tidak dilibatkannya militer dalam perjanjian Malino telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mereka. Padahal militer adalah pihak yang paling berkompeten dalam implementasi perjanjian tersebut di lapangan.

Pelaksanaan Perjanjian Malino adalah sebuah peristiwa nasional yang menarik dan patut untuk diteliti lebih lanjut, setidaknya karena tiga hal. *Pertama*, Pelaksanaan perjanjian Malino merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang cukup sukses mengurangi eskalasi konflik Maluku, bahkan saat ini dapat dikatakan konflik Maluku sudah berhenti sama sekali. Dalam konteks sebuah kebijakan, perjanjian Malino memiliki peluang untuk dijadikan model penyelesaian konflik sosial di Indonesia. *Kedua*, perjanjian Malino telah menjadi forum dialog yang beradab dan demokratis bagi para pihak yang bertikai di Maluku untuk membangun kesepakatan perdamaian di antara mereka. *Ketiga*, Sepanjang penulis ketahui, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pelaksanaan perjanjian

⁸ Tentang pembakaran kantor gubernuran tersebut banyak juga yang menduga dilakukan oleh oknum kekuasaan untuk menutupi jejak-jejak korupsi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap dana-dana bantuan kemanusiaan.

Malino dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Khususnya mengenai inisiatif pelaksanaannya, dinamika dalam perjanjian tersebut hingga dampak pelaksanaan Perjanjian Malino terhadap penyelesaian konflik Maluku. Pembahasan tentang hal ini baru ditemukan dalam beberapa artikel atau makalah, serta beberapa buku tentang konflik Maluku yang menyinggung secara sepintas peristiwa tersebut. Selain motif akademik di atas, penulis juga memiliki obsesi pribadi sebagai putra daerah Maluku, untuk mengangkat berbagai peristiwa lokal di Maluku sebagai bahan kajian untuk dipelajari secara akademis.

B. Permasalahan.

Di atas telah disebutkan bahwa kesepakatan Perjanjian Malino telah menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi masyarakat Maluku dalam usahanya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. Meskipun proses pelaksanaan perundingan tersebut berlangsung dengan alot, namun perundingan tersebut akhirnya dapat mencapai kesepakatan terhadap sejumlah masalah krusial yang selama ini dianggap telah melanggengkan konflik di Maluku.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa kebijakan penyelesaian konflik Maluku dengan model Perjanjian Malino memiliki sejumlah kelemahan, sehingga sangat berpengaruh dalam proses implementasinya di lapangan. *Pertama*, inisiatif perdamaian yang ada di Menkokesra untuk sebuah urusan yang seharusnya menjadi tugas Menkopolkam, sehingga hal ini berakibat pada marginalisasi peran unsur jajaran polkam, yakni TNI dan Kepolisian.⁹ *Kedua*, tidak tersedianya waktu yang cukup bagi kedua umat untuk melakukan konsolidasi internal sehingga banyak tokoh-tokoh lapangan yang tidak terlibat secara maksimal. *Ketiga*, tidak jelas sistem monitoring atas

proses pemeliharaan perdamaian. *Keempat*, hasil-hasil perjanjian tersebut belum menyentuh berbagai persoalan substansial yang menjadi akar persoalan konflik Maluku.

Namun terlepas dari kelemahan tersebut, secara faktual Perjanjian Malino telah memberikan arah baru dalam penanganan konflik Maluku, yakni suatu proses penyelesaian konflik yang dapat dilakukan secara demokratis dan damai dengan melibatkan pemerintah dan pihak-pihak yang bertikai. Oleh karena itu, Perjanjian Malino tetap merupakan sebuah prestasi yang patut mendapatkan penghargaan dan perhatian.

Tentu saja terdapat banyak pertanyaan yang mesti diajukan untuk menyingkap pelaksanaan perjanjian tersebut, namun penulis berpendapat bahwa permasalahan utama yang mesti diajukan dalam penelitian ini adalah “mengapa Perjanjian Malino menguentikan konflik Maluku?”. Pertanyaan seperti itu sangat penting, karena situasi Maluku pasca Malino semakin mengarah kepada kondisi yang sangat kondusif dan aman. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Perjanjian Malino hingga konsensus yang dicapai oleh kedua belah pihak (Islam dan Kristen) dalam perjanjian tersebut.
2. Bagaimana dampak hasil-hasil perjanjian Malino terhadap proses penyelesaian konflik di Maluku.

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian.

Konflik Maluku adalah konflik komunal yang menghimpun berbagai potensi konflik (politik, sosial, ekonomi dan budaya). Injeksi energi yang diterima oleh konflik Maluku telah menjadikannya begitu ekstrim, meluas dan masif dengan korban jiwa dan

⁹*Kompas*. 16 Februari 2002.

materi yang sangat besar. Penelitian ini merupakan bagian dari studi kebijakan penyelesaian konflik SARA di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Perjanjian Malino dengan berbagai dinamikanya hingga dicapainya konsensus bagi kedua pihak yang bertikai sebagaimana tercermin dalam 11 butir perjanjian Malino.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak Perjanjian Malino terhadap penyelesaian konflik Maluku.

Selain itu, secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khasanah kajian politik lokal, khususnya yang berkaitan dengan konflik-konflik sosial bernuansa SARA yang sering muncul dalam wujud yang sangat beragam. Kajian semacam itu akan menjadi masukan ilmiah yang sangat berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan yang diperlukan khususnya bagi pemerintah dalam menangani konflik sosial bernuansa SARA yang akhir-akhir ini sering terjadi di tanah air.

D. Tinjauan Teoritik

1. Dasar-dasar Teoritik tentang Konflik

Secara teoritis konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari fenomena sosial dan perubahan.¹⁰ Konflik muncul sebagai konsekuensi adanya perbedaan yang sudah merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku pada semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Hakekat perbedaan watak dan kecenderungan manusia itulah yang

¹⁰ Lihat tulisan Taufik Abdullah, *Peran Nilai-nilai Budaya dan Struktur Sosial Terhadap Integrasi Nasional*, dalam *Timur dan Barat di Indonesia Perspektif Integrasi Baru*, (Jakarta: The Go Institute, 2000), hal. 112.

sering mengakibatkan terjadinya konflik¹¹. Para teoritis Marxian menganggap konflik dibutuhkan -bahkan perlu diciptakan- agar terjadi proses dialektika untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Konflik dalam kehidupan manusia pada dasarnya adalah fenomena yang sangat alamiah. Persoalannya terletak pada masalah apakah ia menimbulkan kekerasan atau tidak. Kekerasan dapat dilihat sebagai manifestasi dari suatu konflik yang tidak terlembaga (*un-institutionalized conflict*). Sementara keadaan sebaliknya, yaitu konflik yang terlembaga dengan baik (*institutionalized conflict*), akan dapat diselesaikan dengan cara-cara damai dan demoratis.¹²

Dalam International Dictionary, konflik didefinisikan sebagai "*Clash, competition, or mutual interference or incompatible, force or qualities (as idea, interest, will)*". Bahwa konflik memiliki cakupan yang cukup luas meliputi pertentangan atau bentrokan, persaingan atau gangguan oleh kelompok secara fisik atau benturan antara kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikan atau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentingan-kepentingan atau kehendak-kehendak.¹³ Dengan pengertian seperti itu, menjadikan pembahasan teoritik tentang konflik dipenuhi oleh banyak paradigma (sudut pandang).

Para sosiolog biasanya memahami konflik dalam paradigma fakta.¹⁴ Yaitu sebuah pemahaman yang mempercayai bahwa manusia pada prinsipnya tunduk dan mengikuti fakta sosialnya. Pandangan seperti ini menyoroti bahwa wewenang dan posisi dalam fakta sosial merupakan sumber pertentangan sosial, karenanya merupakan

¹¹ Ahmad S. Imail, *Akar konflik. Teror dan Ekstrim* (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna), hal. 16

¹² Anthony Gidens, "Negara-Bangsa dan Kekerasan", dalam *Teori-teori Kekerasan*, Thomas Santoso, (penyunting), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 116.

¹³ Lihat, *International Dictionary*, Meriam – Webster Inc. Publisher, 1993)

sentral dari teori konflik. Menurut teori ini, ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang otomatis akan menempatkan masyarakat pada posisi yang saling berbeda. Perbedaan posisi itu pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat.

Ide-ide pokok dari teori konflik, Menurut Ritzer dapat dirinci menjadi tiga, yaitu *pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh adanya pertentangan terus menerus di antara unsur-unsurnya. *Kedua*, Setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. *Ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkausa. Perspektif sosiologis ini berbeda dengan perspektif strukturalis yang bersandar pada tiga pemikiran pokok. *Pertama*, masyarakat berada dalam kondisi statis atau bergerak dalam kondisi keseimbangan. *Kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. *Ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.¹⁵

Ted Robert Gur, menyebut empat (4) persyaratan yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat disebut sedang mengalami konflik. Ia merincikan sebagai berikut :

1). Ada dua atau lebih pihak yang terlibat, 2). mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, 3). mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai dan menghalang-halangi lawannya, dan 4). Interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan lebih mudah oleh para pengamat independen.¹⁶

¹⁴ Robert A. Levine dan Donald T. Campbell, *Etnocentrism: Theories of Conflict, Etnic Attitudes, Group Behavior*, (New York: Jhon Williams and Sons Inc, 1972), hal. 17

¹⁵ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992)

¹⁶ Dalam Maswadi Rauf, *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Teoritik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional, 2000), hal. 7

Dengan menggunakan pendekatan Ted Gur kita bisa memotret kekerasan di Maluku sebagai bagian dari konflik. Semua persyaratan di atas dapat ditemui dengan mudah dalam konflik Maluku. Konflik Maluku adalah konflik sosial yang memperhadapkan komunitas Muslim di satu pihak, dan komunitas Kristen di pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan yang kental. Konflik Maluku juga terjadi dalam bentuk yang terbuka dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena itu pemerintah mencoba mencari jalan keluar dan membangun konsensus perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai dengan menyelenggarakan perjanjian Malino.

3. Sentimen Primordial Sebagai Sumber Konflik.

Faktor-faktor yang menjadi sumber sebuah konflik sosial bisa bermacam-macam. Menurut Pelly (1993), paling tidak terdapat 3 (tiga) sumber ketidak serasian sosial yang menjadi sumber konflik di dalam masyarakat, yaitu:

"pertama, perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi; kedua, perluasan kelompok sosial budaya; ketiga, benturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Konflik pertama merupakan sumber konflik yang paling sering terjadi, sedangkan konflik kedua timbul sebagai akibat perbedaan tradisi, bahasa dan hukum ketika terjadi interaksi sosial. Konflik ketiga, yaitu adanya benturan kepentingan politik, ideologi dan agama sebagai manifestasi dari benturan struktur kelompok yang telah matang dengan yang baru berkembang".¹⁷

Sejalan dengan Pelly, penguatan dan perluasan kelompok sosial dan etnik yang semakin meningkatkan sentimen primordial suatu kelompok juga dipandang oleh

¹⁷ Usman Pelly, *Pengukuran Intensitas Potensi Konflik Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: jurnal Analisis CSIS, tahun XXII, No. 3, 1993), hal. 189-190.

Clifort Gertz sebagai sumber konflik yang potensial di negara-negara berkembang. Dalam tulisannya yang berjudul "*Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara Baru*"¹⁸ sebagaimana dikutip Maswadi Rauf¹⁹, Geertz mengetengahkan konsep *sentimen primordial*, sebagai salah satu sumber konflik sosial dan politik yang paling potensial yang banyak ditemukan di berbagai negara berkembang. Kenyataan sosiologis dan antropologis bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku dan agama ternyata cukup berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik. Kebijakan yang keliru terhadap perbedaan-perbedaan kultural tersebut ternyata telah mempertebal ikatan-ikatan primordial di tengah kehidupan masyarakat. Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* (yang telah terbentuk dan diterima sebagaimana adanya tanpa campur tangan orang yang bersangkutan) yang disebabkan oleh hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku bahasa, asal daerah dan adat istiadat.

Menurut Geertz, ikatan primordial akan membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat sesama anggota kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar suku/ras ditimbulkan oleh adanya persamaan nilai-nilai budaya yang membuat mereka mempunyai cara hidup, pola pikir dan kepentingan yang sama. Semua persamaan menghasilkan solidaritas yang amat kuat di antara anggota yang membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun. Dalam kelompok primordial atas dasar agama, solidaritas

¹⁸ Tulisan Gertz ini dimuat di dalam *Old Society and New States. The Quest for Modernity in Asia and Africa*. Clifford Gertz (penyunting), (New York: The Free Press. 1963). Hal. 105-157. Karya ini juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara Baru*". Dimuat dalam *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Juwono Sudarsono (penyunting), (Jakarta: Garmedia, 1976), hal. 15-30.

¹⁹ *op.cit.* hal. 8

ditimbulkan oleh persamaan keimanan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh agama. Keyakinan akan kebenaran ajaran agama menghasilkan solidaritas di antara penganut agama yang bersangkutan yang menimbulkan kerelaan untuk membela agama tersebut dari ancaman kelompok lain dengan pengorbanan apapun.²⁰

Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme, yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Fanatisme ini memperkuat integrasi kelompok, namun pada saat yang sama mempermudah terjadinya konflik dengan orang lain di luar kelompok primordial. Karena kelompok primordial memandang kelompok lain sebagai ancaman, maka benturan tidak akan terelakkan. Bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primordial akan membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati, bahkan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu pengorbanan, baik harta benda maupun nyawa dapat saja terjadi, dan itu dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.

Konflik Maluku secara jelas menunjukkan fakta tentang bahaya sentimen primordial yang digambarkan Geertz di atas. Kelompok yang bertikai begitu mudah menghancurkan dan membunuh kelompok lain tanpa sedikitpun merasa bersalah, karena apa yang dilakukan dianggap sebagai kewajiban sebagai anggota suku, ras atau agama. Dalam analisis terhadap konflik kelompok, seperti yang digambarkan Geertz, perlu dijelaskan lebih lanjut berbagai faktor yang menyebabkan semakin menebalnya sentimen primordial atau kesetiaan primordial suatu kelompok sehingga

²⁰ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik*, *Ibid.*, hal. 62

menkondisikan orang berperilaku bukan hanya agresif akan tetapi mengarah terhadap tindak kekerasan. Misalnya mengapa ikatan primordial agama di Maluku yang dari dulu berjalan dengan cukup baik dapat berkembang begitu ekstrim sehingga menimbulkan konflik sosial yang dahsyat.

Dalam studi yang dilakukan oleh Forum Rektor terhadap berbagai konflik agama dan etnik yang terjadi di Indonesia, ditemukan adanya berbagai faktor eksternal yang secara kuat memprovokasi sentimen keagamaan dan etnik. Faktor politik menduduki peringkat pertama, disusul kemudian oleh faktor ketidakadilan sosial-ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan yang paling akhir baru soal perbedaan etnik dan agama itu sendiri.²¹

Oleh karena itu, kajian lebih lanjut terhadap berbagai faktor eksternal seperti pengaruh politik, faktor sosial-ekonomi ataupun intervensi pihak luar (provokator) dengan berbagai kepentingannya patut dilakukan untuk menambah penjelasan teoritik seperti yang dijabarkan Geertz. Dalam kasus Maluku, faktor kesenjangan ekonomi, pengangguran, pergesekan politik lokal, transisi politik di aras nasional serta berbagai provokasi diyakini oleh banyak pihak, sebagai faktor determinan yang ikut mendorong sentimen primordialisme ke arah yang lebih destruktif.

3. Teori Resolusi Konflik dan Teori Konsensus

Pada bagian sebelumnya telah ditegaskan bahwa konflik adalah suatu keniscayaan yang selalu hadir (*omni present*), dan realitasnya sungguh tidak bisa

²¹ Zafir, MA. Pontoh, (edit.) *Laporan Akhir Sosial Conflict Resolution*. (Bandung: Forum Rektor Indonesia, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2000), hal IV-119. Lihat juga tulisan Muhammad Zulfan Tadjoddin, *Anatomi Kekerasan dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-2001*. Laporan Penelitian (Jakarta: UNDP-UNSFIR, 2002)

dihindari. Oleh karena itu, membendung konflik, apalagi dengan tindakan yang *koersif* bukanlah pilihan yang bijaksana. Di masa Orde Baru kebijakan untuk menangani berbagai potensi konflik di Indonesia, bahkan konflik itu sendiri, dilakukan dengan cara-cara represif dengan mengedepankan pendekatan keamanan (*security aproach*) yang sangat ketat. Orianasi pada stabilitas keamanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong rezim Orde Baru memerangi semua konflik di tengah masyarakat dengan mengandalkan kekuatan militer. Pendekatan *security aproach* ala Orde Baru relatif mampu menekan tumbuhnya konflik, namun dalam kurun waktu yang cukup lama justru memelihara berbagai potensi konflik tersebut. Akhirnya ketika muncul tuntutan reformasi dan keterbukaan dalam politik nasional, kita seperti menyaksikan terbukanya sebuah “kotak Pandora” yang memunculkan konflik-konflik berskala masif dengan berbagai motif dan latar belakang. Oleh karena itu diperlukan kebijakan atau tindakan penyelesaian konflik (*conflic resolution*) yang tepat sehingga potensi konflik yang bersifat negatif dapat dikelola dengan baik dan kreatif sehingga menghasilkan energi positif yang dapat dijadikan modal sosial yang bermanfaat bagi perubahan sosial dan pembangunan.

Demokrasi yang telah kita pilih secara sadar untuk mengatur sistim politik nasional, pada dasarnya memberikan toleransi yang besar kepada tumbuhnya konflik yang moderat. Bahkan konflik dalam demokrasi diperlukan untuk melahirkan dan mengukur kualitas tertentu. Oleh karena itu, tantangan bagi negara-negara demokrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan pengelolaan konflik yang tepat agar tidak menimbulkan instabilitas politik.²² Penyelesaian konflik, khususnya konflik bernuansa

²² Penggambaran tentang hubungan konflik dan demokrasi dapat dibaca dalam tulisan Peter Haris dan Ben Reily (edit). *Democracy and deep-Rooted Conflict: Option for Negotiator*. (International IDEA, 2000).

SARA harus didasarkan atas adanya perubahan pandangan semua pihak yang terlibat dalam konflik sehingga tidak ada lagi pertentangan di antara mereka dalam suatu interaksi kehidupan kemasyarakatan.

a. Teori Resolusi Konflik (*Conflict Resolution*)

Salah satu teori yang sering digunakan dalam kebijakan penyelesaian konflik ada teori resolusi konflik (*conflict resolution*). Teori ini dikembangkan oleh Jon Burton. Dalam sebuah tulisannya Burton menulis,

Resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar 'manajemen' atau 'settlement', mengacu pada hasil yang, dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah".²³

Jadi resolusi konflik merupakan suatu teori yang memberikan penekanan penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan untuk melihat perdamaian dalam jangka panjang. Secara konseptual, jika telah terjadi konflik dan aksi-aksi kekerasan yang massif, maka resolusi konflik dapat dilakukan dalam empat tahap kebijakan. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi antara kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai, tahapan ini biasanya dicirikan dengan dialog dan perundingan antar pihak-pihak yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk

²³ Jon Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*, (New York: St. Martin's Press, 1990). Telaah terhadap teori ini juga dilakukan oleh El Fatih A. Abdel Salam, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik* Associate Professor, Department of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia dalam (www.groups.yahoo.com/group/sosiologi_profetik), diakses pada tanggal 12 September 2005.

menerapkan *problem-solving approach*. Tahap terakhir memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng.

Lebih lanjut penjabaran tahapan proses resolusi konflik menurut Andi Wijayanto, dibuat untuk empat alasan. *Pertama*, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. *Kedua*, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. *Ketiga*, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial apalagi yang didasarkan atas motif-motif politik harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. *Keempat*, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.²⁴

Menurut Maa'rif Muin, ada tujuh pendekatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian konflik. Sejumlah pendekatan itu adalah: (1) Negosiasi, (2) Fasilitasi, (3) Rekonsiliasi, (4) Mediasi, (5) Arbitrasi, (6) Ajudiakasi dan Litigasi, dan (7) Represi.²⁵ Berbeda dengan Barton, Muin menempatkan tindakan represi dengan

²⁴ Andi Wijayanto, *Resolusi Konflik*, dalam (www.groups.yahoo.com/group/sosiologi_profetik), diakses pada tanggal 12 September 2005.

²⁵ Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi: Resolusi Konflik Etik dan Agama*, (Surakarta: Ciscore, 1999).

menurunkan kekuatan militer pada tahapan yang paling terakhir. Menurut penulis, pendekatan tersebut dimungkinkan jika konflik yang terjadi adalah konflik dalam skala kecil. Jika dalam konflik dan kekerasan bersenjata berskala besar seperti yang terjadi di Maluku, maka model pendekatan yang dikemukakan Barton lebih tepat untuk digunakan dalam kebijakan penyelesaian konflik.

b. Teori Konflik dan Konsensus

Maswadi Rauf (2001), memperkenalkan teori konflik dan konsensus dalam sebuah kebijakan untuk menyelesaikan konflik sosial dan politik. Menurutnya, konflik adalah setiap pertentangan atau perbedaan yang melibatkan individu dan kelompok, maka konsensus adalah suatu situasi dimana tidak terjadi lagi konflik yang ekstrim.²⁶ Konflik dan konsensus dalam pandangan Maswadi Rauf merupakan gejala-gejala sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Hubungan antara konflik dan konsensus adalah hubungan yang saling meniadakan. Artinya jika terjadi konflik, maka tidak ada lagi konsensus di antara individu atau kelompok yang berkonflik, demikian juga sebaliknya.

Dalam teori tentang konsensus, Maswadi Rauf menyebutkan dua cara yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik, yaitu:

*"pertama, penyelesaian konflik secara persuasif (persuasive) dan kedua, penyelesaian secara kekerasan atau koersif (coorsive). Demikian pula konsensus dapat terjadi bila tercapai kesepakatan dalam hubungan antara dua orang/pihak atau lebih. Bila konsensus tercapai berarti penyelesaian konflik telah tercapai dengan baik. Oleh karena itu, konsensus adalah substansi dari penyelesaian konflik (conflic resolution) itu sendiri."*²⁷

²⁶ Maswadi Rauf, *op.cit.*, hal. 02.

²⁷ *ibid.*, hal. 13-14.

Penyelesaian konflik dengan cara kekerasan atau aksi militer terkadang diperlukan pada situasi konflik yang telah menjurus pada peperangan bersenjata. Namun kebijakan yang mengedepankan aksi-aksi militer seringkali hanya menyelesaikan konflik pada level permukaan dan bukan tidak mungkin memelihara potensi munculnya kembali konflik yang lebih hebat di masa-masa yang akan datang. Pelaksanaan Darurat Sipil atau Militer misalnya, hanya dapat mengendalikan kekerasan bersenjata. Karena itu, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengusahakan negosiasi antara elit dan kelompok yang bertikai untuk mencari kesepakatan atau konsensus guna menghentikan konflik dan kekerasan dan selanjutnya menciptakan perdamaian.

Salah satu persyaratan penting dalam tercapainya konsensus adalah tawar-menawar (*bargaining*), yaitu kesediaan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengurangi tuntutan sendiri dan menerima bagian-bagian tertentu dari tuntutan pihak lain.²⁸ Dengan terciptanya konsensus maka tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik, baik antara orang-perorang maupun antara kelompok, pihak-pihak yang berkonflik berhasil mencapai titik temu sehingga tidak ada lagi masalah dalam hubungan sosial.

Menurut Maswadi Rauf,²⁹ ada beberapa kemungkinan konsensus (kompromi) yang bisa dicapai dalam proses penyelesaian konflik, baik yang dilakukan melalui perantara (*mediator*) maupun tidak (secara langsung dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai). Model Pertama, adalah konsensus yang merupakan gabungan dari butir-butir pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Model ini mengandaikan perlunya

²⁸ *Ibid.*, hal. 15

²⁹ *Ibid.*, hal. 17

musyawarah untuk mencari butir-butir pendapat yang dianut oleh pihak-pihak yang berkonflik yang dapat disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam proses tersebut akan terjadi tawar menawar (*bargaining*) berupa kesediaan satu pihak untuk menerima butir-butir pendapat tertentu dari pihak lain dengan ketentuan bahwa pihak lain juga harus menerima butir-butir tertentu dari pihaknya.

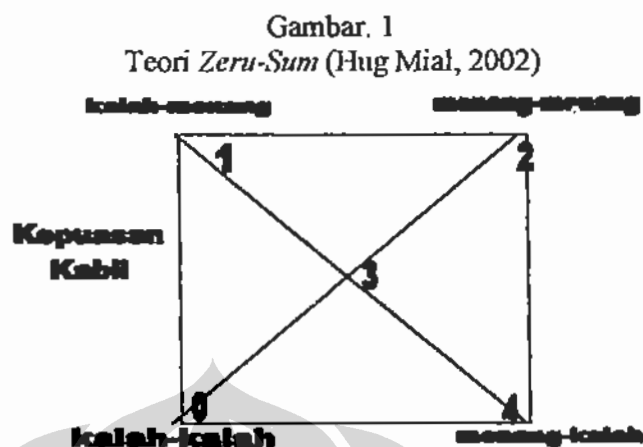
Model kedua, memiliki kemiripan dengan model pertama. Bedanya terletak pada disepakatinya butir-butir pendapat dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Model ini disebut sebagai konsensus kelompok dominan. Model ini biasanya terjadi dalam sebuah konflik yang melibatkan lebih dari dua kelompok.

Model ketiga adalah konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak lain, bukan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik. Pihak lain itu bisa mediator, atau pihak lain dalam masyarakat. Digunakan pendapat luar disebabkan adanya kesulitan-kesulitan dari pihak-pihak yang bertikai untuk menerima pendapat lawan masing-masing.

Model keempat adalah konsensus gabungan. Model ini merupakan gabungan dari beberapa model konsensus yang dibahas di atas. Dalam model ini digunakan butir-butir pendapat tertentu dari pihak-pihak yang terlibat konflik, disamping itu butir-butir pendapat lain yang berasal dari pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik.

Penjelasan Maswadi memiliki kesamaan dengan teori *zero-sum* yang dikemukakan Hugh Mial. Teori ini diinspirasi dari cerita klasik dua putera Nabi Adam yang konon saling membunuh. Dalam pendekatan *zero-sum* setiap kelompok diberi pesan bahwa kemenangan yang dicapai dalam sebuah perundingan mungkin merupakan kekalahan yang diderita oleh lawannya. Kondisi ini dalam jangka panjang bukan merupakan sesuatu yang baik, sebab dapat menimbulkan gejolak baru. Yang

terbaik adalah *non-zero-sum*, yakni kedua belah pihak dapat memperoleh hasil yang baik.³⁰



Menurut Mail, gambar ini menunjukkan hasil yang mungkin dicapai dalam konflik antara Cain dan Abel. Titik mana saja yang menuju ke kanan lebih baik bagi Abil, sedangkan setiap titik yang menuju ke atas lebih baik bagi Cain. Dalam Injil, yang menang adalah yang dibantu Tuhan. Cain melihat situasinya sebagai konflik *zeru-sum*: pada poin 1 (hasil terbaiknya) dia memperoleh perkenan Tuhan, pada poin 2, (hal paling jelek pada dirinya) Tuhan berpihak pada Abel. Semua kemungkinan terbaik terletak pada garis 1 sampai 2 dimana Tuhan membagi perkenan-Nya, kurang lebih sama antara dua saudara ini. Poin 3 menggambarkan sebuah posisi kompromi yang mungkin terjadi. Namun terdapat diagonal lain, menggambarkan hasil bukan *zeru-sum*, yang lebih menarik jika ditinjau dari perspektif perundingan penyelesaian konflik, kerugian bersama yang sebenarnya bisa terjadi, pada titik 0, ketika Abel dibunuh dan Cain kehilangan pertolongan Tuhan, dan mereka tidak memperoleh keuntungan

³⁰ Hugh Mial, (edit), *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation on Deadly Conflicts*, diterjemahkan dengan judul "Resolusi Damai dan Konflik Kontempore: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik, Bersumber Politik, Agama dan Ras". Tri budi Sastrio (penterjemah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 10.

bersama. Pada poin 4 masing masing menjadi pelindung bagi saudaranya sendiri. Pesan Mail lewat cerita klasik ini sangat jelas, dalam perspektif penyelesaian konflik kompromi yang mesti dilakukan adalah memenangkan semua pihak. Tidak boleh ada yang merasa menang sendirian karena pasti ada yang kalah dan sebaliknya.

Tahap akhir dalam sebuah konflik yang tajam mungkin merupakan sebuah akhir yang paling menyulitkan, namun semua pihak dituntut kesediaannya untuk saling mengurangi tuntutan dan kepentingannya sehingga tercipta konsensus. Dalam konteks konflik Maluku, usaha pemerintah untuk mengajak kelompok-kelompok yang bertikai kedalam meja perundingan menunjukkan usaha persuasif untuk memberikan kesempatan kepada komunitas Muslim maupun Kristen yang bertikai untuk melakukan tawar menawar kepentingan masing-masing secara damai dan demokratis dalam Perjanjian Malino. Konsensus atau kesepakatan yang terbangun di antara kelompok-kelompok yang bertikai akan mengarah kepada usaha-usaha penyelesaian konflik secara komprehensif sehingga tercipta kembali perdamaian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan dua pendekatan; *pertama*, metode atau pendekatan kualitatif.³¹ Penggunaan metode kualitatif dibuat untuk beberapa pertimbangan, yakni pendekatan ini lebih membantu peneliti dalam menghadapi kenyataan yang kompleks dan metode ini juga dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan kasus atau masalah yang akan diteliti.

³¹ Untuk jenis penelitian kualitatif ini dapat dibaca penjelasan L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal. 5

Kedua, pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah studi yang dalam penelaahannya mencoba mencermati suatu kasus secara spesifik, sistematis, intensif, mendalam dan komprehensif.³² Oleh karena pendekatan ini bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksplanasi, maka pemilihan permasalahan ini sangat berkaitan dengan subyek penelitian. Hal ini bertujuan agar ada pemahaman secara mendalam tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus yang akan diteliti dapat dilakukan.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Data-data yang diperlukan untuk mengkonstruksi penelitian ini dikumpulkan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Untuk melakukan pendalaman terhadap objek penelitian, maka dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna mendapatkan data primer (*primary data*) dengan teknik wawancara tidak terukur. Pemilihan teknik tersebut diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam mengembangkan pertanyaan terhadap *informan* (tokoh-tokoh dan pelaku) yang terlibat maupun tidak terlibat secara langsung, namun memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan Perjanjian Malino.

Para *informan* adalah orang-orang yang dianggap memiliki kompetensi dan/atau memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti. Sebagai pembanding juga dilakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh tertentu untuk mendapat penggambaran yang seimbang.

³² Faisal Sanapia, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 22

Tabel. 1
Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan dan Peran di Perjanjian Malino	Tujuan Wawancara	Waktu & Tempat Wawancara
1.	Dr. M. Saleh Latuconsina	Gubernur Maluku/ Mediator Malino	Sosialisasi dan Implementasi Perjanjian Malino	Jakarta, 24-01-2006, 10.00-12.00 WIB
2.	Dr. Farid W. Husein	Deputi II Menkokesra / Peninjau dan Fasilitator	Informasi tentang metode perundingan, metode pengambilan keputusan dan dinamika perundingan.	Jakarta, 10-02-2006, 08.00-09.00, WIB
3.	Tamrin Elly, SH	Ketua Delegasi Muslim	Data dan informasi tentang aspirasi dan usulan delegasi Muslim dalam Perjanjian Malino	Jakarta, 15-02-2006, 2006, 16.00-19.30 WIB
4.	Drs. Toni Pariella, M.Si	Ketua Delegasi Kristen	Data dan informasi tentang aspirasi dan usulan delegasi Kristen dalam Malino	Ambon, 2-01-2006 13.00-14.00 WIT (via telpon)
5.	Drs. Hasbullah Toisuta, M.Ag	Anggota delegasi Muslim	Informasi tentang sikap delegasi muslim khususnya tentang isu-isu krusial.	Ambon, 21-12-2005, 18.00-22.00 WIT
6.	Pdt. Dr. Jhon Ruhulesin, MA	Ketua Sinode GPM Maluku, anggota Delegasi Kristen	Informasi tentang sikap delegasi Kristen	Ambon, 20-12-2005, 15.00-17.00 WIT
7.	Pendeta Jack Manuputi, S.Th	Anggota Delegasi Kristen	Informasi tentang sikap delegasi Kristen	Ambon, 20-12-2005, 15.00-17.00 WIT
8.	Mahmud Rengifurwaren, SE	Anggota Delegasi Islam	Informasi tentang Sikap Delegasi Islam	Jakarta, 19 April 2006, 19.00-21.00 WIB
9.	Drs. Irvan Patty, M.Si	Ketua Iksamuni, penentang Malino	Alasan menentang Perjanjian Malino	Ambon, 17-12-2005, 19.00-23.00 WIT
10.	Adnan Hatata, SE	Ketua GPI Maluku	Alasan menentang Perjanjian Malino	Ambon, 18-12-2005, 09.00-09.30 WIT
11.	Drs. Hasyim Marassabessy.	Kakanwil Agama Maluku	Klarifikasi beberapa isu keagamaan khususnya tentang pengalihan Agama secara paksa di Maluku.	Ambon, 22-12-2005, 10.00-12.00 WIT
12.	Jendral (Purn) Suadi Marasabessy.	Mantan Ketua TIM 19	Keterlibatan Militer dalam penyelesaian konflik Maluku.	Jakarta, 17-01- 2006, 19.00-22.30 WIB
13.	Bambang W. Suharto	Mantan Wakil Ketua Tim Investigasi Nasional untuk Kasus Maluku	Hasil penelitian Tim Independen.	Jakarta,

b). Pengamatan (*observasi*)

Metode ini merupakan salah satu instrumen dalam pengumpulan data, metode pengamatan menjadi penting, terutama dalam penelitian jenis studi kasus. Khususnya pengamatan terhadap kondisi Ambon setelah dilaksanakannya Perjanjian Malino, sehingga dapat diukur efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik secara keseluruhan.

c). Studi Kepustakaan dan dokumentasi.

Pengumpulan data juga menggunakan studi kepustakaan terutama dokumen-dokumen penting khususnya kertas kerja Tim Mediator dan sejumlah laporan dari delegasi muslim dan Kristen selama Perjanjian Malino. Demikian pula dengan kajian-kajian komprehensif tentang konflik Maluku, dan perbandingannya dengan konflik di berbagai daerah, media massa dan dokumen resmi maupun pribadi yang dapat digunakan sebagai sumber data yang bersifat sekunder (*secondary data*), terutama data-data yang berkaitan dengan kronologis peristiwa konflik Maluku hingga perjanjian Malino dilakukan.

3. Pengolahan dan Analisis Data.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: *pertama*, data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. *Kedua*, data yang terkumpul berupa dokumen dan hasil wawancara dibuat transkripnya dan dikelompokkan. *ketiga*, selanjutnya data dianalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang telah dituangkan dalam rumusan masalah..

F. Sistematika Penulisan.

Secara sistimatis, tulisan ini akan dibagi lima bab, dan setiap bab dijelaskan secara singkat dan sederhana dengan maksud memberikan uraian terinci berupa garis besar tentang apa yang akan disajikan dalam setiap bab.

BAB I. Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memberikan gambaran tentang mengapa penulis mengambil topik dimaksud sebagai bahan penelitian. Pada bagian ini juga akan dirumuskan masalah-masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, demikian juga tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik terhadap kasus yang diteliti juga implikasi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, disajikan pula landasan teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian ini.

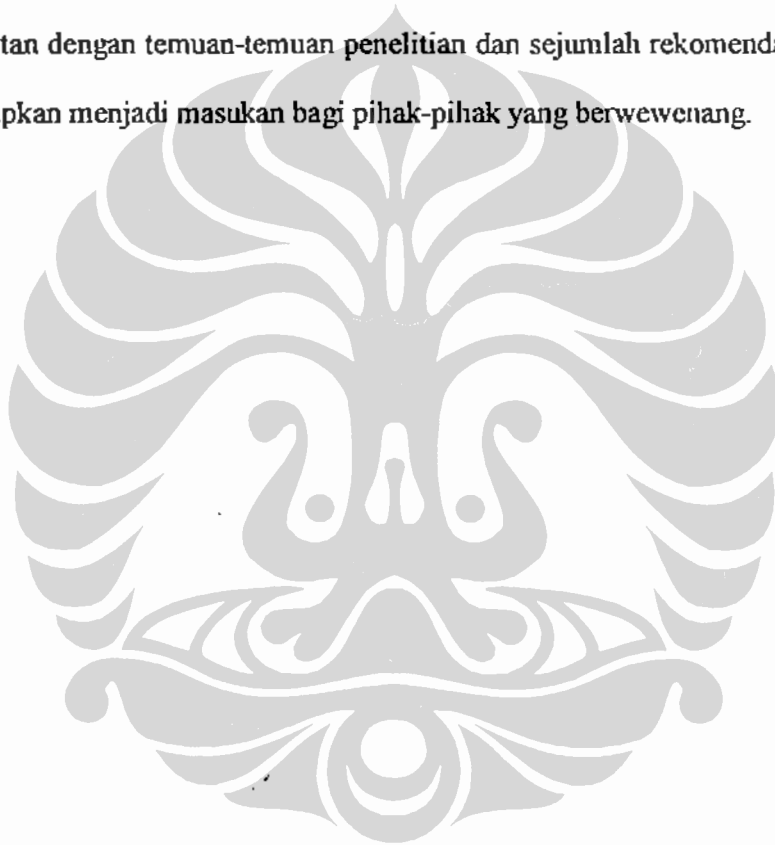
Bab II. Gambaran Umum tentang Konflik Maluku. Dalam Bab ini, dideskripsikan tentang profil wilayah Maluku yang ditinjau dari berbagai aspek; yaitu kehidupan keagamaan, kehidupan sosial ekonomi dan budaya serta dinamika politik lokal. Disajikan pula tentang anatomi konflik Maluku, yang terdiri dari faktor penyebab (laten) yang menjadi akar konflik dan faktor (manifest) yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Disajikan pula data-data yang berkaitan dengan dampak konflik Maluku.

Bab III. Perjanjian Malino Sebagai Suatu Usaha Penyelesaian Konflik Maluku. Pada bab ini berisi penjelasan dan penggambaran tentang upaya penyelesaian konflik Maluku, pelaksanaan darurat sipil, gagasan tentang pelaksanaan Perjanjian Malino, persiapan sebelum Perjanjian Malino, dinamika yang terjadi selama perundingan serta kompromi yang dicapai delegasi Islam dan Kristen dalam perjanjian tersebut. Di bagian akhir dari Bab ini akan disajikan analisis tentang Perjanjian Malino sebagai model resolusi konflik.

BAB IV. Dampak Perjanjian Malino terhadap Penyelesaian Konflik Maluku

Dalam bab ini penulis akan membahas respon masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino, sosialisasi dan implementasi hasil-hasil Perjanjian Malino, dampak Perjanjian Malino terhadap penyelesaian konflik Maluku dan analisis atas pelaksanaan Perjanjian Malino serta proyeksi terhadap perdamaian di Maluku.

BAB V. Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan yang berkaitan dengan dua masalah pokok yang menjadi permasalahan penelitian ini, implikasi teoritik yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian dan sejumlah rekomendasi penelitian yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK MALUKU.

A. Deskripsi Singkat tentang Maluku.

Propinsi Maluku terletak di jantung Kawasan Timur Indonesia, atau tepatnya di antara Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Maluku merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari 1.000 pulau besar dan kecil, sehingga sering disebut Propinsi Seribu Pulau.

Menurut sejarawan L.Z. Leirisa nama atau istilah “Maluku” mengandung tiga makna.³³ *Pertama*, pengertian yang berasal dari kerajaan-kerajaan yang terdapat di sana sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. *Kedua*, nama yang diberikan oleh VOC. *Ketiga*, nama atau sebutan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pengertian yang pertama agaknya tidak terlepas dari asal usul istilah Maluku. Beberapa literatur menyebut “Maluku” berasal dari istilah “jazirah al-Mulk” (Arab: semenanjung raja-raja). Istilah ini ditujukan kepada beberapa kerajaan di Maluku, seperti empat kesultanan di Maluku Utara yang dikenal dengan Moluku Keiraha. Nama yang kedua diberikan oleh pihak organisasi dagang Belanda pada tahun 1683 terhadap beberapa wilayah di Maluku Utara yang disebut *Gouvernement van Moluken*. Pada masa VOC daerah lain seperti Maluku Tengah disebut *Gouvernement van Amboina* dan Maluku Tenggara disebut *Gouvernement van Banda*. Jadi ada tiga Gubernur di daerah yang sekarang kita kenal dengan Maluku. Tidak ada keterangan yang jelas mengapa

³³ L.Z. Leirisa, “Tiga Pengertian Istilah Maluku dalam Sejarah”, dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku (I)*, Lembaga Penelitian sejarah Maluku, (Jakarta: 1973), hal. 1-7

ketiga daerah tersebut dibedakan satu dengan yang lainnya. Pengertian Maluku yang ketiga diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari pengertian yang diberikan oleh VOC. Namun pada tahun 1817 Hindia Belanda menyatukan tiga *Gouvernement* yang dibentuk VOC menjadi "*Gouvernement der Molukken*" yang berpusat di Ambon. Ketika itu Sulawesi Utara dan Irian Jaya masih masuk dalam wilayah *Gouvernement* ini. Barulah pada Abad IX dan XX kedua daerah tersebut dipisahkan dari Maluku.³⁴

Popularitas Maluku sebagai pulau rempah-rempah (terutama cengkeh dan pala yang harganya sangat tinggi di pasar internasional), telah memikat pendatang dan pedagang dari Eropa, Timur Tengah dan Cina. Keharuman bunga Cengkeh dan Pala selain mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Maluku, juga pada saat yang sama mengundang keserakahan bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris untuk menguasai kepulauan rempah-rempah tersebut. Kekuatan-kekutan asing itu secara bergiliran bersaing menguasai dan menjajah Maluku selama bertahun-tahun. Namun kolonialisme Belanda tercatat sebagai kekuatan asing yang paling lama bercokol dan menjajah di Maluku.

Setelah era kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia, Maluku tercatat sebagai satu di antara delapan propinsi yang paling awal dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1950 di Maluku pernah muncul gerakan separatis yang memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Namun gerakan RMS dengan cepat dapat diatasi karena kurang mendapatkan dukungan yang signifikan di Maluku. Setahun setelah peristiwa tersebut sekitar 12.000 tentara Maluku beserta keluarga

³⁴ Zaim Ukhrawi (edit), *Merajut Damai di Maluku, Telaah Konflik antar Umat 1999-2000*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Umat dan MUI, 2000) hal. 2

mereka dipindahkan ke Belanda. Selanjutnya selama tahun 1960-an, mantan tokoh-tokoh RMS mendirikan pemerintah pengungsian di Belanda. Keberlanjutan eksistensi dan pengaruh RMS menjadi sumber kontroversi di Maluku hingga saat ini.³⁵

Sebelum dipecah menjadi dua propinsi (Maluku dan Maluku Utara) dan beberapa kabupaten baru, kepulauan Maluku secara administratif terbagi menjadi lima wilayah. Kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku Tengah (pernah di sebut Maluku Selatan), Kabupaten Maluku Tenggara serta Kotamadya Ambon. Namun setelah terjadi pemekaran Prpinsi Maluku Utara pada tahun 1999, Kabupaten/Kota di Maluku tinggal empat; Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Pulau Buru dan Kodya Ambon. Pada tahun 2004 terjadi pemekaran lagi dan muncul Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Bagian Seram Barat, sehingga saat ini Propinsi Maluku memiliki delapan daerah Kabupaten/Kota.³⁶

Komposisi penduduk Maluku sangat heterogen. Selain penduduk asli, Maluku juga dihuni oleh imigran domestik maupun asing. Pendatang domestik berasal dari berbagai suku daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendatang asing meliputi Cina, Arab, Filipina,

³⁵ Anonymous, *Peace and Development Analysis, Provincial workshop Proceeding*, (Jakarta: UNDP, 2004), hal. 9

³⁶ Selanjutnya yang dimaksud dengan Maluku dalam tulisan ini adalah Propinsi Maluku dan tidak termasuk Propinsi Maluku Utara. Maluku Utara hanya akan disinggung untuk mendukung informasi yang diperlukan.

Jepang dan Eropa. Pendetang asing datang ke Maluku karena motif sosial dan ekonomi.³⁷

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Maluku Dirinci Per-Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	1971	1980	1990	1995	2000	Ket
1	Maluku Tenggara Barat	-	116.166	120.998	138.559	149.790	Data pendudukan Kab. SBT dan SBB masih dimasukkan kedalam Kab. Maluku Tengah. Sedangkan Data Kab. Aru masuk Kab. Maluku Tenggara.
2	Maluku Tenggara	221.224	128.887	158.250	168.672	192.953	
3	Maluku Tengah	352.460	379.992	495.003	556.971	526.071	
4	Pulau Buru	-	64.014	97.672	109.889	125.097	
5	Ambon	139.704	208.098	276.955	311.974	206.210	
6	Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	
7	Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	
8	Kepulauan Aru	-	-	-	-	-	

Sumber: Maluku dalam Angka, BPS Propinsi Maluku, 2000

Penyebaran penduduk di Maluku antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat tidak merata. Umumnya penduduk lebih banyak mendiami pulau-pulau yang lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar. Hal ini bisa disaksikan di pulau Ambon atau Kotamadya Ambon dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Sebaliknya wilayah Kabupaten Maluku Tengah khususnya di Pulau Seram yang wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya justru sangat sedikit dengan tingkat kepadatan yang cukup rendah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan keagamaan, kehidupan sosial-Ekonomi serta dinamika politik lokal di Maluku, maka berikut akan dideskripsikan secara singkat ketiga hal tersebut.

1. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Kemasyarakatan.

Masyarakat Maluku terdiri dari beragam etnis. Penelitian *Summer Institute of Linguistik* (SIL), menyebutkan bahwa etnik dan sub etnik di Maluku berjumlah 100,

³⁷ Maluku Dalam Angka, 1998

sedangkan bahasa di Maluku terdiri dari 117 macam bahasa.³⁸ Banyaknya suku bangsa dengan beragam bahasa yang terdapat di Maluku, selama berabad-abad tidak banyak menimbulkan masalah, karena masyarakat Maluku memiliki persekutuan-persekutuan adat yang memiliki pondasi yang kokoh. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama (*Siwalima*). Kesatuan pandangan tentang asal mula ini diyakini oleh banyak pengamat,³⁹ menjadi perekat hubungan sosial antar warga sehingga dalam waktu yang cukup lama mereka dapat hidup dalam toleransi yang cukup tinggi. Dengan perekat tersebut masyarakat Maluku juga dapat hidup secara damai meskipun mereka menganut agama yang berbeda-beda.

Pada masyarakat tradisional Maluku, perbedaan agama sering dikalahkan oleh kuatnya ikatan dalam kekerabatan yang menganut garis *patrelinial* atau garis keturunan dari ayah. Umumnya setiap anggota kekerabatan menganut agama tertentu, namun tidak sedikit juga yang menganut agama yang berbeda-beda dan masing-masing dapat beribadah menjalankan keyakinannya secara damai. Kesatuan keluarga ini disebut *matrumah* atau *fam*. Umumnya komunitas suatu *fam* merupakan penganut agama tertentu, namun ada juga yang menganut agama secara berbeda, seperti Hehanusa, dan Watimena dan Pelupesy.

Tradisi persaudaraan secara adat pada masa lampau yang dikenal dengan sebutan *pela* juga merupakan faktor penting dalam membangun kerukunan di Maluku. *Pela* adalah hubungan persaudaraan antara dua negeri atau lebih. Jalinan adat ini sudah

³⁸ Laporan *Summer Institute of Linguistik* ini dapat dilihat dalam tulisan Abidin Wakano, *Menyikapi Keberagaman di Maluku*, Jurnal Kanjoli Edisi Juli-September 2005.

³⁹ Lihat tulisan L. Z. Leirisa, *Tiga Pengertian Istilah Maluku dalam Sejarah*, dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku (I)*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, 1973), hal. 1-7

berlangsung sejak nenek moyang rakyat Maluku. Latar belakang terjadinya *pela*, menurut sejarah dan kenyataan terjadinya berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Bartels, sebagaimana dikutip Edi Rusdi Tumagor menyebutkan beberapa alasan terjadinya hubungan *pela*:

- a. Hubungan *pela* sebagai balas jasa dari negeri yang satu kepada negeri yang lain yang pernah membantu baik dalam lapangan politik (peperangan) maupun dalam ranah sosial (bencana alam, pertolongan di laut, dll).
- b. Hubungan *pela* sebab adanya hubungan persaudaraan di masa lalu antara negeri yang bersangkutan menurut serita dari *datuk-datuk* mereka bahwa mereka adalah saudara kandung.
- c. Hubungan *pela* yang terjadi karena sebab yang luar biasa, seperti *pela* yang terjadi antara negeri Latuhalat di Nusaniwe dengan negeri Alang di Tanjung Alang yang konon disebabkan oleh kisah cinta.⁴⁰

Dalam pelaksanaan tradisi *pela* ini, ada beberapa hal yang harus dipatuhi bersama yaitu antara lain:

- a. Antara sesama negeri yang ber-*pela* diwajibkan untuk saling membantu jika ada yang terancam atau mengalami bencana (perang, bencana alam, dsb) baik diminta maupun tidak.
- b. Saling membantu dalam hal pembangunan untuk kemaslahatan bersama, baik itu pembangunan masjid, gereja atau fasilitas umum lainnya.
- c. Jika ada seseorang yang berkunjung ke suatu negeri yang mempunyai hubungan *pela*, maka negeri yang didatangi tersebut wajib menjamu dengan baik dan membiarkan pengunjung (saudara se-*pela*) membawa pulang hasil tanah atau buah-buahan apapun yang dia suka meskipun tanpa izin.
- d. Antara pihak yang ber-*pela* sudah saling menganggap sebagai saudara sedarah, maka dari itu saudara se-*pela* dilarang keras untuk saling menikah.⁴¹

Biasanya hubungan *pela* diikrarkan bersama berdasarkan perjanjian yang kemudian diperkuat dengan “angkat sumpah”. Sanksi yang akan terjadi apabila larangan-larangan (yang ditabukan dilanggar), diyakini oleh masyarakat akan berakibat berat bagi yang melanggar. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional setempat orang-

⁴⁰ Edi Rusdi Tumagor, *Pela-Gandong. Potret Tradisi Damai yang Terkoyak*. (Jakarta: LEMLIT dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

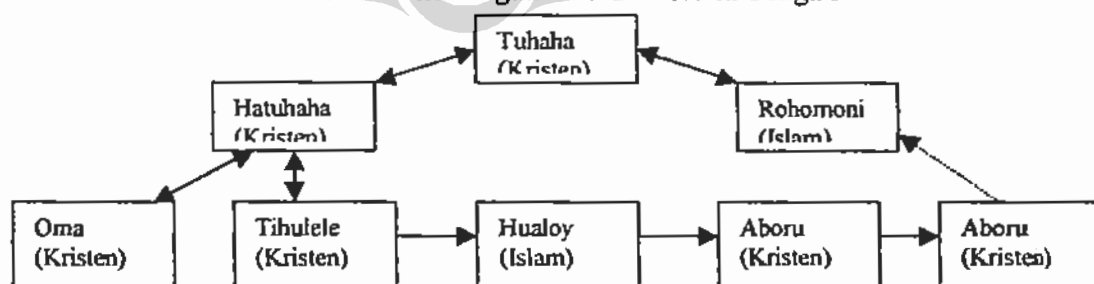
⁴¹ Dieter Bartels, *Hubungan Pela di Maluku Tengah dan Nederland*. (Arizona: Yavapai College, 2001), hal 23

orang yang melanggar norma-norma di atas akan mengalami akibat yang sangat pahit. Dengan kata lain, mereka akan mendapatkan musibah baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu mereka juga dikucilkan dari komunitas masyarakat setempat.

Ada beberapa negeri Ambon dan Maluku Tengah-Lease yang mempunyai hubungan *pela*. Seperti negeri Amat dengan Soahuku, negeri Kariu dengan Boi, negeri Aboru dengan Hualoi, negeri Anakota Kaibobo dengan 12 negeri di Gunung Seram, *pela* antara masyarakat Seram Timur dan masyarakat Kei di Maluku Tenggara dan beberapa negeri lainnya.

Jika dicermati, pola hubungan *pela* antar negeri di Ambon dan Maluku Tengah tidaklah bersifat *mono-relationship*, dimana suatu negeri/desa hanya mempunyai hubungan *pela* dengan satu desa lainnya seperti negeri Amet dengan Soahuku. Namun ada juga hubungan *pela* yang bersifat *multirelationship* yang memungkinkan suatu negeri/desa mempunyai hubungan *pela* dengan lebih dari satu negeri lainnya. Misalnya hubungan *pela* antara negeri Tuhaha dengan negeri Rohomoni dan negeri Hatuhaha. Pada saat yang sama negeri Hatuhaha juga ber-*pela* dengan beberapa negeri lainnya, seperti negeri Tuhaha, negeri Oma dan negeri Tihulele.

Gambar. 2
Contoh hubungan *Pela* di Maluku Tengah



Maka jika dilihat lebih jauh dari perspektif jaringan (*networking*), sesungguhnya negeri-negeri di Ambon masih dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jika meminjam perspektif tentang modal sosial (*social capital*), dimana unsur keterhubungan (jaringan) menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya integrasi sosial yang kokoh, maka konflik yang terjadi di Maluku khususnya di Ambon dan Maluku Tengah –dimana masyarakatnya mempunyai pranata jaringan sosial yang kuat- patut mendapatkan pengamatan yang lebih cermat untuk menelisik akar persoalannya. Mengingat kerusuhan yang terjadi dalam waktu yang lama, dengan korban jiwa dan material yang cukup besar, bukan hanya bertentangan dengan prinsip integrasi sosial, namun juga kontradiktif dengan norma sosial budaya masyarakat setempat.

Selain budaya *pela*, ada juga budaya *gandong*. *Gandong* adalah ikatan persaudaraan dalam pertalian darah antara satu negeri dan negeri lainnya. Desa-desa dalam ikatan *gandong* awalnya adalah satu, namun karena terpisah karena perbedaan agama. Dalam ikatan *gandong*, dilarang saling memusuhi bahkan dalam kehidupan masyarakat tradisional dilarang juga saling mengawini. Tradisi kebijaksanaan lokal di Maluku juga mengenal konsep kegotongroyongan yang disebut *masohi/maren*. Budaya ini adalah cara hidup gotong royong yang sangat menonjol di antara negeri dan komunitas. Misalnya dalam membangun tempat-tempat ibadah; masjid dan gereja, hampir selalu dikerjakan secara bersama-sama dengan umat agama lain. Demikian juga dalam membantu keperluan seorang warga, misalnya membangun rumah, atau memanjat Cengkeh dari warga yang tidak memiliki anak laki-laki. Budaya *masohi/maren* tumbuh subur di daerah-daerah pedesaan dan hingga saat ini masi

banyak negeri yang mempertahankannya, namun mulai banyak ditinggalkan masyarakat di daerah-daerah perkotaan.

Secara umum pranata-pranata kultural tersebut akhir-akhir ini mulai dirasakan semakin memudar. Banyak pihak mendorong agar kearifan-kearifan lokal tersebut kembali dihidupkan dan direvitalisasi sesuai dengan kondisi-kondisi kekinian yang semakin dinamis.⁴² Salah satu usulan menarik yang sempat muncul adalah bagaimana memunculkan konsepsi baru tentang *pela* atau *gandong* yang mengikat pula negeri-negeri *orang dagang*, sehingga mereka juga memiliki tanggung jawab dan status kultural yang sama dalam kehidupan kemasyarakatan.

Usulan seperti itu sangat terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut. Karena pada dasarnya kebudayaan Maluku bukanlah kebudayaan yang tertutup, sejak lama kebudayaan Bertempat sudah berinteraksi dengan budaya luar. Diantaranya budaya Arab dan Timur Tengah sebagai wujud pengaruh agama Islam yang berpengaruh pada aneka tarian daerah, juga kebudayaan Eropa sebagai hasil interaksinya dengan kolonialisme yang cukup lama bercokol di Maluku. Selain kebudayaan asing, budaya Maluku juga mengadopsi berbagai unsur budaya lain di Nusantara, seperti kebudayaan Melayu, Jawa, Bugis, Buton dan Makassar. Sosiolog Tamrin Amal Tomagola menyebut budaya Maluku sebagai "budaya hybrida", yang tumbuh dari proses interaksi tradisi-tradisi lokal dengan berbagai kebudayaan besar dan kecil yang pernah hadir di Maluku.⁴³

Berbagai etnis di Nusantara juga sudah sering mendatangi Maluku, kebanyakan berasal dari etnis Bugis-Makassar, Buton dan Jawa. Proses migrasi ketiga kelompok

⁴² *Masi Ampukah Budaya Pela dan Gandong?*, Republika, 12 Juli 1999

⁴³ Makalah, *Konflik Maluku dan Poso*, 2003 (tidak diterbitkan)

etnik besar tersebut ke Maluku sebagian besar melalui jalur informal dan ada pula yang melalui jalur formal seperti transmigrasi yang disponsori pemerintah. Di Maluku, para etnis pendatang ini disebut *orang dagang*, yang bermakna bahwa mereka adalah kaum pendatang yang patut diberikan penghormatan dan kesempatan yang sama.⁴⁴ Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akibat arus migrasi dan tidak diikuti dengan kebijakan tata ruang yang baik menjadikan beberapa daerah di Maluku khususnya kota Ambon memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, sehingga sangat rawan terhadap berbagai konflik sosial.

Di Maluku para pendatang umumnya bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan sektor informal. Mereka dikenal sangat ulet dalam bekerja sehingga banyak yang sukses dalam bidang usahanya. Sedangkan masyarakat asli, banyak yang memilih bekerja di birokrasi pemerintahan sebagai pegawai negeri atau menjadi tentara. Lapangan pekerjaan sebagai pegawai negeri yang semakin sulit dan sedikit dari waktu ke waktu, merupakan tantangan tersendiri bagi penduduk asli. Apalagi akhir-akhir ini banyak pula kelompok pendatang yang mulai masuk kedalam sistem birokrasi daerah. Hal ini menimbulkan banyak pengangguran bagi warga masyarakat lokal di Maluku dan menimbulkan masalah tersendiri. Sering terjadi bentrok dan perkelahian kecil antara penduduk lokal dengan kaum pendatang di terminal dan pasar-pasar tradisional.

Menguatnya ketimpangan sosial ekonomi, telah mengakibatkan perubahan pola hubungan sosial pada kelompok masyarakat di Maluku, yaitu dari pola hubungan yang berbasis budaya tolong menolong dan saling menghormati sesuai dengan kewajiban sosial, kultural dan ritual, ke pola hubungan yang lebih berorientasi pada kepentingan

⁴⁴ M.Y Papilaya, "Persepsi Lokal tentang Konflik dan Kekerasan di Ambon", dalam *Timur dan Barat di Indonesia, Perspektif Integrasi Baru*, Ignas Kleden, (editor), (Jakarta: The GO-Institute, 2001), hal. 38-57

ekonomi. Perubahan pola hubungan sosial ini semakin menebalkan solidaritas kelompok yang berbasis agama, etnik dan negeri, sehingga mempertajam potensi konflik di Ambon bahkan juga Maluku secara keseluruhan.

Menyimak pergeseran hubungan sosial tersebut, dapatlah dikatakan kehidupan masyarakat mulai ~~mulai~~ mulai menyimpan potensi konflik. Negeri-negeri terpolah oleh perbedaan-perbedaan kelompok, baik terikat oleh teritori maupun agama, yaitu *negeri Sarani* (Nasrani), ~~dan~~ *negeri Salam* (Islam) dan komunitas *orang dagang*. Pemisahan sosial dalam bentuk kelompok negeri ini menimbulkan solidaritas primordial yang kuat di kalangan anggota kelompok.

Dalam perkembangan kemasyarakatan dan kebangsaan, potensi konflik antar kelompok masyarakat, baik di Maluku maupun wilayah-wilayah lainnya di Indonesia sering tidak dikelola dengan kebijakan yang baik. Akibatnya masyarakat tidak tahu bagaimana seharusnya menghargai realitas objektif, yakni kebinekaan yang ada, sehingga sikap politik masyarakat tidak pernah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai untuk berdemokrasi. Perjalanan berbangsa dan bernegara selama ini menunjukkan bahwa manajemen pembangunan pemerintah Orde Baru gagal memfasilitasi perkembangan pluralisme dari tahap awal, yakni pluralisme primordial menuju pluralisme liberal.⁴⁵ Hal ini disebabkan oleh pendekatan stabilitas yang didominasi oleh ideologi seragam dan keseragaman, yang sengaja menihilkan kebinekaan, sehingga tertib sosial dan politik yang ingin dicapai hanya mencerminkan

⁴⁵ Pluralisme primordial adalah sebuah konsep pluralisme dimana loyalitas kultural dan emosional seseorang atau sekelompok orang terkait erat dengan sentimen SARA. Sedangkan pluralisme liberal adalah tahapan pluralisme yang ditandai dengan berkurangnya peran kelompok-kelompok primordial, dimana tidak ada individu yang diidentifikasi sepenuhnya dengan afiliasi tertentu, terutama yang berbau SARA tetapi lebih rasional. Lihat tulisan Harold Coward, *Pluralism: Challenge Toward Religions*, (New York: 1985), hal. 3

integrasi sosial politik yang semu, karena nilai-nilai apresiatif terhadap realitas kemajemukan tidak melembaga di dalam berbagai kelompok, baik komunitas etnis, agama, maupun antar-golongan. Sebagai contoh intervensi tersebut adalah proses birokratisasi desa melalui undang-undang No. 5 tahun 1979.⁴⁶ Kebijakan tersebut menyamakan dan menyeragamkan desa di Jawa dan *negeri* di Ambon dan Maluku Tengah. Padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. *Negeri* adalah sebuah persekutuan adat dan teritori yang sangat otonom yang dipimpin oleh seorang Raja secara turun temurun dan memiliki posisi kultural dan spiritual yang kuat dalam masyarakat. Sehingga dengan menundukkannya dalam struktur birokrasi pemerintahan maka mendistorsi peran-peran kharismatis yang dimiliki oleh seorang raja. Implikasi lebih jauh, dapat disaksikan dalam konflik Maluku, dimana para raja tidak lagi memiliki kharisma yang kuat untuk melarang atau melerai rakyatnya yang berkonflik.

Banyak sekali nilai-nilai kultural masyarakat Maluku, yang membuat masyarakat hidup dinamis dalam keragaman mulai terdegradasi. Kehancuran nilai dan kearifan lokal (*local wisdom*) di Maluku telah mengakibatkan masyarakat semakin terkotak-kotak, sehingga timbul rasa superioritas suatu golongan atas golongan yang lain.

Kondisi seperti itu semakin mempertajam polarisasi dan jurang antar kelompok, etnik dan agama di Maluku. Isu agama sebagai salah satu sarana pembinaan solidaritas dan sentimen kelompok menjadi pilihan yang strategis untuk menggalang kekuatan massa, sehingga agama menjadi kekuatan politik yang efektif untuk mencapai tujuan-

⁴⁶ Tri Ratnawati, "Mencari Perdamaian di Maluku", dalam WAI. Stockol, dkk., *Konflik otonal di Indonesia*, (Jakarta: INIS Universitas Leiden bekerjasama dengan IAIN Jakarta, 2003), hal. 12

tujuan politik sempit. Hal ini terjadi di Maluku dan umumnya di Indonesia, membuat budaya lokal terpengaruh dan terus melemah, sehingga hampir tidak ada lagi katup pengaman untuk menetralkan konflik sosial yang memang sudah potensial.

2. Kehidupan Keagamaan

Ada sedikit perdebatan tentang agama apa yang pertama kali masuk ke Maluku, sebagian kalangan mengatakan agama Hindu dan Budha, sebagaimana juga di Pulau Jawa. Pendapat ini mungkin benar, namun pengaruh Hindu-Buda di Maluku tidak terlalu signifikan, karena jejak peradabannya sangat sulit dijumpai sebagaimana lazimnya di daerah lain di Indonesia. Jika merujuk kepada beberapa literatur sejarah yang ada, maka agama yang kemudian masuk dan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Maluku adalah agama Islam lalu kemudian agama Kristen (Katolik dan Protestan).⁴⁷

Menurut Taufik Adnan Amal, agama Islam telah masuk ke Maluku sekitar abad ke-15 atau hampir bersamaan dengan masuknya Islam di beberapa wilayah utama di Nusantara, seperti Pasai di Aceh dan Demak di Pulau Jawa. Pada saat itu sudah muncul Kerajaan Islam Ternate dan Tidore yang sangat berpengaruh di Maluku bagian utara, dengan pengaruh yang juga meluas hingga ke tengah dan selatan, seperti di Pulau Seram, gugusan Kepulauan Gorom, hingga di Kepulauan Kei di bagian tenggara. Bahkan masuk pula hingga ke *Onin* atau Papua saat ini.⁴⁸ Pengaruh agama Islam di

⁴⁷ Lihat "Peta Masuknya Islam, Katolik dan Protestan di Maluku abad XIV-XVII" dalam, *Maluku; Profil Provinsi Republik Indonesia*. Tim Depdagri (editor), (Jakarta: Yayasan Bhakti Nusantara, 1992), hal. 8

⁴⁸ Adnal Amal, "Sejarah Islama-Kristen di Galela dan Tobelo", dalam *Damai yang Terkoyak*, Kasman Hi. Ahmad dan Herman Oesman, (Jakarta: Kelompok Studi LPAM Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara dan Madani Press, 2000), hal. 7

Maluku cukup kuat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Ia menjadi nilai yang ikut menentukan berbagai perkembangan dan perubahan sosial dan politik di Maluku.

Agama kedua yang juga sangat kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat Maluku adalah Agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Katolik umumnya disebarkan oleh para Misionaris dan Zending dari Portugis antara tahun 1523-1546. Portugis tiba di Ternate pada tahun 1512. Mereka –sesuai dengan tugas yang dibebankan Raja Portugis- mempunyai dua tugas; *menguasai jalur rempah-rempah* dan *menyiarkan agama Katolik*.⁴⁹ Sedangkan Protestan diperkenalkan oleh misionaris dari Belanda. Agama ini menyebar ke Ambon, Kepulauan Banda, Tual dan Kepulauan Aru.

Sejarah hubungan Agama Islam dan Kristen di Maluku sejak awal telah menyimpan potensi konflik dan ketegangan akibat povokasi kaum kolonial. Dalam usaha memperkuat pengaruhnya di Maluku, pemerintah kolonial Belanda mempraktekkan politik *divide et impera*, yakni merangkul sebagian masyarakat dan memarginalkan sebagian yang lain. Politik pecah belah ini menurut L.Z Leirisa, telah membawa dampak yang mendalam terhadap struktur sosial masyarakat Maluku. Dalam bidang pendidikan misalnya, lebih banyak diutamakan bagi masyarakat beragama Kristen. Hal ini berdampak pada ketersediaan kelompok terdidik di Maluku yang sebagian besar beragama Kristen. Sehingga mereka banyak yang menjadi pegawai-pegawai di pemerintahan.⁵⁰ Sedangkan kelompok Islam karena banyak yang kurang memiliki pendidikan formal yang memadai maka berprofesi menjadi pedagang atau petani.

⁴⁹ Tim Depdagri, *op.cit.*, h. 8

⁵⁰ L.Z Leirisa, *op.cit.* hal. 20

Politik pecah belah ini menimbulkan segregasi di kalangan masyarakat Islam dan Kristen di Maluku. Belanda sepertinya ingin menciptakan dua kutub politik, sehingga setiap saat dapat dibenturkan untuk mengamankan kepentingan kolonialnya. Misalnya dalam banyak hal Belanda seolah-olah menunjukkan pembelaan terhadap masyarakat Kristen, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru di benak sebagian masyarakat Islam Maluku bahwa pihak Belanda menganakemaskan orang Kristen. Padahal ini tidak sepenuhnya benar, karena dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, banyak tokoh-tokoh Maluku beragama Kristen yang berjuang di garis terdepan dalam perjuangan melawan kolonialisme, khususnya penjajahan Belanda.⁵¹

Hubungan keagamaan yang menyimpan kecurigaan itu telah mendorong nenek moyang bangsa Maluku untuk menjembatani kondisi tersebut sehingga tidak berkembang menjadi konflik horisontal. Sejak beberapa abad yang lampau, mereka menciptakan berbagai model perekat kultural seperti *Pela-Gandong*, *kaka* (saudara tertua), *bongso* (saudara termuda), dan *larvul ngabal* yang dikenal di Maluku bagian tenggara.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, *pela-gandong* adalah perekat sosial yang mengikat hubungan sosial antara dua *negeri* (desa) atau lebih yang berbeda secara adat istiadat maupun agama. Pada tingkat tertentu, nilai-nilai *pela* dan *gandong* diyakini memiliki kekuatan supranatural yang mempengaruhi kelompok masyarakat yang terikat di dalamnya. Wujud keterikatan budaya ini secara praktis terlihat dari sifat kegotongroyongan antara kedua negeri yang mempunyai hubungan *pela* atau *gandong*.

⁵¹ Lihat tulisan Jon Pires, *op.cit.* hal. 206-222

Sifat kegotongroyongan ini masuk hingga ke wilayah identitas sensitif suatu kelompok, misalnya dalam hal pembangunan sebuah rumah ibadah. Lazimnya *negeri-negeri Sarani*⁵² merasa berkewajiban untuk ikut menyiapkan bahan bangunan (biasanya kayu) dan bersama-sama membangun mesjid. Demikian sebaliknya, *negeri-negeri Salam* berkewajiban menyiapkan bahan bangunan untuk membangun gereja. Kewajiban ini didasari atas rasa kewajiban sosial, moral, dan ritual yang sama sekali tidak mengurangi ataupun mengganggu kepatuhan terhadap ajaran agama yang dianut oleh anak negeri yang berbeda agama ini.

Agama Islam di Maluku banyak dianut oleh masyarakat di Maluku bagian utara dan tengah. Sedangkan agama Kristen (Katolik dan Protestan) banyak dianut masyarakat bagian selatan dan tenggara. Sebelum dimekarkan menjadi dua propinsi (Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara), komposisi pemeluk agama Islam dan Kristen di Maluku menempatkan Islam sebagai agama mayoritas di Maluku. Data sensus nasional tahun 1995 menunjukkan bahwa persentasi perbandingan antara pemeluk Islam dan Kristen adalah 58,81% berbanding 45,70%. Angka tersebut kemudian mengalami pergeseran secara signifikan, ketika Maluku Utara dimekarkan sebagai propinsi baru yang terpisah dari Maluku. Komposisi pemeluk agama antar Islam dan Kristen lalu berubah secara drastis dengan menempatkan Kristen sebagai agama mayoritas dengan perbandingan 57,94% pemeluk Kristen dan 42,76 pemeluk Islam. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemeluk Agama Islam di Maluku lebih

⁵² *Sarani* dan *Salam* adalah sebutan kultural terhadap komunitas pemeluk Kristen dan Islam di Maluku. Didalam kosa idiomatik tersebut terkandung nilai-nilai rekonsiliatif, toleransi dan egalitarianisme, (lihat tulisan A. Walloly, *Budaya Lokal Sebagai Perikat Hubungan antar Umat Beragama di Maluku*, dalam Jurnal Kanjoli, edisi Juli-september 2005, hal. 4)

banyak tersebar di wilayah Maluku bagian utara sedangkan Kristen lebih banyak menempati wilayah Maluku bagian selatan.

Tabel. 3
Persentasi Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota
Di Propinsi Maluku Tahun 2004.

Kab/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maluku Tenggara Barat	1,60	78,21	20,14	0,02	0,03	0,00	100,00
Maluku Tenggara	32,35	46,04	21,25	0,34	0,02	0,00	100,00
Maluku Tengah	55,00	44,49	0,36	0,08	0,07	0,00	100,00
Buru	54,91	42,84	0,86	1,02	0,37	0,00	100,00
Ambon	37,66	57,45	4,64	0,14	0,11	0,00	100,00
Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	-	-
Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Aru	-	-	-	-	-	-	-
Total	42,76	50,18	6,76	0,21	0,09	0,00	100,00

Sumber: *Kanwil Departemen Agama Propinsi Maluku (Kab. SBT dan SBB, datanya masih masuk dalam Kab. Maluku Tengah. Sedangkan Kab. Kepulauan Aru, datanya masuk kedalam Kab. Maluku Tenggara).*

Pemukiman penduduk di Maluku secara teritori lebih banyak berdasarkan suku dan identitas keagamaan. Desa-desa tradisional atau yang dikenal dengan “negeri”⁵³ terbagi atas negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Kristen. Menurut Suadi Marasabessy (seorang putera Maluku yang pernah menjabat Kasum TNI pada tahun 2000) pembagian wilayah yang seperti itu merupakan produk politik kolonialisme Belanda untuk mendukung hegemoninya di Maluku.⁵⁴ Dengan memisahkan umat Islam dan Kristen pada suatu tempat yang berbeda selain akan menghindari bentrokan, juga memudahkan dalam pengawasan. Ironisnya warisan kolonialisme tersebut tetap terpelihara hingga saat ini seperti terlihat secara jelas pada pemukiman-pemukiman penduduk di kota-kota di Maluku.

⁵³ Negeri adalah bentuk pemerintahan di Maluku yang sama dengan Desa, namun Negeri memiliki derajat otonom yang tinggi. Negeri dipimpin oleh seorang raja yang setingkat dengan Kepala Desa. Hubungan persaudaraan, budaya. Pela gandung mengikat masyarakat di antara dua negeri yang terpisah.

⁵⁴ Wawancara dengan Letjen (purn) Suadi Marasabessy, Jakarta 18 Januari 2006

Pulau Ambon, tempat dimana kota Ambon berada terdiri dari 72 kelurahan/desa. Kodya Ambon terdiri dari 50 kelurahan, yakni di Kecamatan Baguala (beribukota Paso) ada 19 kelurahan, di Kecamatan Sirimau (beribukota Karang Panjang) ada 19 Kelurahan, dan di kecamatan Nusaniwe (ibukota Amahusu) ada 13 kelurahan. Jazirah Hitu yang wilayahnya luas (sebagian wilayahnya masuk kota Ambon), mayoritas penduduknya Islam. Di sini ada 28 negeri (kelurahan/desa), 19 di antaranya adalah negeri Muslim yang penduduknya cukup padat. Jazirah Leitimor (seluruhnya masuk wilayah Kodya Ambon), terdapat 26 negeri, yang hampir semuanya beragama Kristen, dengan penduduk kurang padat.

Sensus penduduk tahun 1998 menunjukkan bahwa komposisi penduduk di Pulau Ambon menempatkan Kristen sebagai agama mayoritas yakni 51,90 %. Sedangkan Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak kedua 42,22 %, dengan menunjukkan trend meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Peningkatan populasi pemeluk agama Islam ini sebagian besar disumbang oleh arus migrasi penduduk dari beberapa daerah lain di Indonesia, khususnya yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Data penduduk, khusus di dalam Kotamadya Ambon yang wilayahnya sebagian besar masuk ke dalam jazirah Leitimur, komposisi penduduk berdasarkan pemeluk agama menempatkan Kristen sebagai agama mayoritas.

Tabel. 4
Perimbangan Penduduk kota Ambon Menurut Agama
Dari Tahun 1996-2000

Tahun	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
2000	82.348	112.881	13.588	298	198	209.301
1999	114.043	142.680	8.616	296	155	265.830
1998	128.886	168.415	16.515	328	273	314.417
1997	127.449	166.548	16.374	308	242	310.921
1996	126.614	165.459	16.268	250	153	308.744

Sumber: Kota Ambon Dalam Angka, 2000

3. Dinamika Politik Lokal

a. Konteks Politik

Membaca kehidupan politik di Maluku sekali lagi tidak bisa dilepaspisahkan dari pengaruh keagamaan. Identitas keagamaan merupakan pijakan penting bagi masyarakat di kawasan itu dalam memandang masalah-masalah politik. Keadaan ini berbeda dengan kecenderungan di banyak tempat lain di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Lazimnya faktor agama lebih ditempatkan sebagai unsur tradisional dengan pendekatan yang konservatif, sehingga agama lebih menunjukkan dimensi sipiritualnya. Dalam kehidupan beragama sehari-hari di Maluku, dimensi politik lebih menonjol dibanding dimensi spiritual.

Keterkaitan secara langsung antara masalah agama dan politik tersebut tampak pada berbagai hasil pemilihan umum (pemilu). Pada pemilu 1955, dua partai agama, Masyumi dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia), mendominasi sebagian besar suara masyarakat Maluku. Saat itu keseluruhan partai politik beraliran keagamaan di Maluku menguasai 82,1 persen suara. Partai-partai Kristen merebut 40,9 persen suara, Masyumi 37,6 persen serta PSII dan Perti 3,6 persen.⁵⁵

Pemilu pertama pada masa Orde Baru yang ditandai dengan intervensi rezim yang sangat kuat terhadap parpol, Parmusi dan "kawan-kawan"-nya meraih total suara 24,92 persen. Partai-partai Kristen (Partai Katolik dan Parkindo) meraih 22,46 persen. Golkar yang didukung penuh pemerintah, ketika itu meraih 22,46 persen. Pada masa kebijakan fusi partai yang dibuat oleh rezim Orde Baru, keunikan preferensi agama itu tidak lagi menonjol.⁵⁶

⁵⁵ Tim Depdagri, *op.cit.*, hal. 12

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 13

Ketika pemilu 1999 menggunakan kembali sistem multi partai, semangat masyarakat Maluku untuk memilih partai berdasarkan basis agama kembali muncul, meski kebangkitannya tidak langsung menyamai kondisi 1955. Dari sepuluh besar parpol pemenang Pemilu di Maluku, tercatat tujuh di antaranya berbasis agama. Parpol-parpol itu adalah PPP, PDKB (partai Demokrasi Kasih Bangsa), Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Krisna (Kristen Indonesia) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Hasil-hasil pemilu itu setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa peranan agama sebagai *word view* dalam kehidupan politik di Maluku sangatlah kuat. Sayang sekali, hubungan erat agama dan politik itu berjalan timpang karena sering terjadi *politiking* terhadap agama. Dalam realitas politik yang sebenarnya, agama lebih sering dimanfaatkan untuk kepentingan mobilisasi politik ketimbang untuk penguatan nilai dan moral politik. Pendeta senior J. Ospara mengungkap realitas tersebut:

Di Maluku agama telah memberi atau menambah legitimasi kepada penguasa atau untuk melegitimasi usaha perebutan kekuasaan. Agama mudah dimanfaatkan karena mampu memberi atau bahasa Magnis Suseno "mengangkat" motivasi tinggi. Pemanfaatan tersebut biasanya berlangsung dengan menggunakan pertimbangan religius, misalnya umat perlu mendukung politisi yang memperjuangkan agamanya.⁵⁷

b. Birokrasi Pemerintahan.

Sebagaimana lazimnya daerah yang belum berkembang, birokrasi pemerintahan memiliki posisi sentral di Maluku. Jabatan di birokrasi sangat diperebutkan masyarakat. Menjadi pegawai negeri, atau polisi dan tentara di Maluku lebih bergensi dan menawarkan prestise yang lebih dibanding pekerjaan lain. Orang Maluku melihat

⁵⁷ J. Ospara, *Agama, Politik dan Budaya Lokal*, dipublikasikan dalam Jurnal Kanjoli, Edisi Juli-September 2005, hal. 23

pekerjaan sebagai pegawai negeri lebih terhormat dibanding pekerjaan lain yang mungkin menawarkan nilai ekonomi yang lebih menguntungkan. Mentalitas *ambtenar* ini sering memicu pertikaian horisontal, lantaran persaingan kelompok masyarakat untuk memperebutkan posisi dalam birokrasi atau kesempatan untuk menjadi pegawai negeri.

Secara historis -sejak zaman penjajahan bahkan hingga masa awal kemerdekaan- kehidupan politik dan birokrasi di Maluku, lebih banyak dikontrol oleh elit beragama Kristen dan anak-anak dari keluarga Raja (baik Muslim maupun Kristen) yang mendapat *privilage* dari pemerintah kolonial. Hal ini dapat dimaklumi karena sejak masa kolonial, kelompok masyarakat Maluku yang mengenyam pendidikan mayoritas beragama Kristen, yang sebagian besar berdomisili di dalam kota atau pulau-pualu di sekitar kota Ambon. Ketertinggalan komunitas Islam dalam bidang pendidikan pada saat itu lebih didasarkan pada ketakutan bahwa belajar di sekolah-sekolah Belanda dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan akidah keislaman.⁵⁸ Tidaklah mengherankan jika setelah Indonesia merdeka, pucuk-pucuk birokrasi dan institusi politik yang penting banyak dijabat oleh elit lokal beragama Kristen.

Menurut Nur Tawainela⁵⁹, kondisi ini mulai mengalami perubahan pada akhir dekade 1970-an, ketika banyak generasi muda Islam di Maluku mulai mengenyam pendidikan tinggi dan mencoba masuk ke dalam institusi pemerintahan, politik dan militer. Terjadi pergeseran di elit brokrasi dan politik lokal, dari sebelumnya didominasi oleh elit Kristen menjadi lebih seimbang dengan munculnya elit baru yang

⁵⁸ Smith Alhadar, *Kekerasan di Maluku: Produk Sejarah Kolonial*, Republika, 27 September 1999

⁵⁹ M. Nur Tawainela, *Motivasi dan Partisipasi Generasi Muda dalam Pembangunan Bangsa*, Makalah tidak dipublikasikan, 2005

beragama Islam. Untuk memperkuat posisinya itu, para elit -baik Islam maupun Kristen- mulai menggunakan isu agama sebagai tameng untuk memperkuat kekuasaannya. Jika elit Kristen berusaha mempertahankan jabatannya selama ini dengan menggunakan isu-isu agama, maka elit Islam juga menggunakan isu yang sama sebagai instrumen untuk mengantarkannya pada posisi-posisi penting. Inilah awal petaka, dimana agama digunakan sebagai alat legitimasi politik untuk memperkuat posisi tawar dalam memperoleh hak-hak politik dan kekuasaan. Isu dan intrik yang dimainkan dengan menarik simbol-simbol keagamaan dalam pergumulan kekuasaan, telah menarik sentimen massa dari kedua komunitas yang secara “lugu” menyederhanakannya sebagai persoalan agama. Implikasinya adalah identifikasi ideologi dan agama bagi masyarakat Maluku menjadi jauh lebih penting dan populer dalam promosi seorang pejabat didalam birokrasi daerah. Perhatian yang kuat pada identitas keagamaan seorang pejabat membuat masyarakat sering tidak peduli jika pejabat yang dipromosikan memiliki *track record* yang buruk. Persyaratan standar dalam sebuah sistem birokrasi seringkali dikalahkan oleh sentimen keagamaan ini. Hal tersebut tercermin dalam berbagai suksesi kepemimpinan, baik di level birokrasi dan politik, dari tingkat terendah hingga ke tingkat yang paling tinggi di Maluku. Agama selalu menjadi alat legitimasi dan mobilisasi dukungan politik yang paling menjanjikan bagi kepentingan elit.

B. Anatomi Konflik Maluku

Ada beberapa versi tentang kapan konflik Maluku pertama kali muncul. Perbedaan itu terjadi karena sebelum peristiwa tanggal 19 Januari 1999, yang disebut-sebut sebagai awal konflik di Maluku, telah terjadi sejumlah kerusuhan dan kekerasan

yang menimbulkan korban jiwa di beberapa tempat. Seperti peristiwa di dusun Air Bah dan beberapa insiden kerusuhan yang terjadi di Dobo-Maluku Tenggara. Menurut sejumlah pengamat dan penulis konflik Maluku, seperti Rustam Kastor dan Jon Pires, berbagai kejadian tersebut hanya merupakan pra-kondisi. Namun mereka sepakat bahwa konflik yang meledak pada tanggal 19 Januari 1999 atau bertepatan dengan Hari raya Idul Fitri 1419 H di Kota Ambon adalah yang mendorong kepada meluasnya konflik secara lebih masif di seluruh Maluku.

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa tragedi tersebut berawal dari perkelahian kecil antara dua orang supir angkot, Yoppi dan Nursalim di perbatasan desa Batu Merah dan Mardika.⁶⁰ Perkelahian dua individu yang kebetulan berbeda agama itu, disebutkan telah menyulut konflik horisontal yang lebih luas di masyarakat. Penulis yang saat itu masih berdomisili di kota Ambon sempat menyaksikan peristiwa awal yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri itu. Berdasarkan pengamatan, sungguh tidak meyakinkan untuk mengatakan bahwa perkelahian tersebut yang menjadi sumber konflik yang berkembang menjadi ekstrim. Karena perkelahian seperti itu merupakan kejadian kriminal biasa yang sering terjadi di kota Ambon. Dengan demikian pemahaman yang komprehensif terhadap situasi Ambon sebelum terjadinya konflik akan sangat membantu dalam memahami anatomi konflik Maluku secara lebih baik. Penulis berpendapat bahwa perkelahian kedua supir angkot tersebut hanya merupakan faktor pemicu (*trigger*) dari sejumlah faktor penyebab yang sudah terkondisikan sebelumnya.

⁶⁰ Laporan KPP HAM untuk Maluku juga menyebutkan bahwa salah satu faktor pemicu konflik adalah perkelahian anatar pemuda Batu Merah dan Mardika yang diprofokasi oleh perkelahian Yopi dan Nur Salim.

1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik di Maluku.

Jika kita menyimak gambaran singkat tentang kehidupan politik, ekonomi, agama dan sosial kemasyarakatan yang telah digambarkan di muka, maka dapat dikatakan bahwa konflik Maluku secara laten sudah terjadi sejak lama. Berbagai masalah yang saling terkait telah menyumbang kepada potensi konflik laten tersebut. Konflik laten itu kemudian manifest menjadi konflik terbuka sejak 19 Januari 1999. Sejak saat itu, konflik terbuka terus berlangsung dalam beberapa episode. Akar konflik Maluku sebenarnya ada pada konflik laten itu. Ibarat ombak laut, gelombang konflik manifest itu adalah ombaknya sedangkan konflik latennya adalah arus pusaran laut yang lebih dahsyat di dasar samudra.

Pemetaan seperti itu sangat diperlukan, karena konflik terbuka berskala massal dengan penggunaan kekerasan yang masif bukanlah peristiwa yang dengan serta merta terjadi, mesti ada tahapan atau fase-fase yang mendahului. Konflik seperti itu hanya bisa terjadi kalau ada prakondisi yang memungkinkan dan mencukupi bagi terjadinya konflik terbuka. Prakondisi konflik yang demikian umumnya merupakan hasil dari proses ketidakpuasan dalam jangka waktu yang lama (*evolusi*). Begitu mendapatkan pemicu yang tepat maka konflik yang bersifat laten atau potensial tersebut dengan mudah berkembang menjadi konflik terbuka/terwujud (*manifest*) dengan skala massal dan bersifat destruktif.

Di Maluku, masyarakat pada berbagai komunitas juga mengalami perubahan-perubahan evolusioner yang menyebabkan ketidakpuasan, frustrasi dan kecurigaan kolektif yang terus terakumulasi. Kontestasi realitas (agama, sosial ekonomi, politik

dan budaya) yang sudah dijelaskan di depan perlu dibedah lagi secara mendalam guna menemukan faktor-faktor penting yang berperan dalam konflik Maluku.

Jika kita merujuk kepada beberapa temuan lapangan, misalnya temuan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku, Komnas HAM, LIPI atau Pusat Studi Konflik Universitas Gajah Mada, maka terungkap setidaknya ada tiga hal, yaitu: 1) konflik elit politik (pembagian kekuasaan politik lokal yang dinilai tidak "adil"), 2) adanya sentimen keagamaan yang mulai mengental sejak tahun 1980-an, dan 3) kesenjangan ekonomi yang memicu kecemburuan sosial yang luas di tengah masyarakat.⁶¹

a. Sentimen Keagamaan.

Seperti yang sudah diulas di muka, kehidupan keagamaan yang berlangsung di Maluku telah mewarisi konflik politik sejak lama sebagai akibat dari provokasi kaum kolonial. Potensi konflik yang pernah hadir dalam sejarah tersebut terus diwariskan dari waktu ke waktu hingga meletusnya konflik Maluku. Dimensi kesejarahan seperti itu, sering tidak disadari oleh kebanyakan rakyat Maluku. Berbagai diskusi, pidato politik bahkan juga karya-karya ilmiah justru mempromosikan harmoni kehidupan keagamaan di Maluku sebagai contoh toleransi antara umat beragama di Indonesia. Mantan Menteri Agama pada masa Orde Baru Tarmizi Taher, sering menggambarkan kehidupan keagamaan di Maluku sebagai miniatur Indonesia.⁶²

⁶¹ Lambang Trijono, *Konflik Tidak, Rujukpun Tidak*, Makalah, tidak dipublikasikan, 2001.

⁶² Lihat tulisan Muhammad Budyatna, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Masalah Maluku*, (Makalah, Jakarta 19 Juni 2002)

Namun Marcus Mietzner,⁶³ sejarawan Australia yang pernah meneliti kehidupan keagamaan di Ambon selama periode 1920-1950-an justru menyatakan pendapat sebaliknya dan ia mengatakan tidak terkejut melihat pertikaian berdarah di Ambon. Berdasarkan pengalaman dan temuan selama penelitiannya, latar belakang persaingan antar kelompok Muslim dan kelompok Kristen di Ambon tampak jelas. Kisah keharmonisan hubungan antar agama yang dulu banyak dikemukakan, disebutkan sebagai sekedar mitos politik pada zaman Orde Baru. Di belakang retorika itu sesungguhnya tersembunyi potensi konflik yang sangat besar, yang sewaktu-waktu dapat meletus.

Menurut Maryam Lestaluhu, konteks historis konflik agama Islam dan Kristen di Maluku dapat dilacak dalam sejumlah perang besar yang pernah terjadi di Maluku. Berdasarkan penelusuran Maryam hampir semua perang besar di Maluku, kecuali perang Pattimura (1817), kesemuanya bernuansa perang agama. Perang besar tersebut antara lain; perang Hitu (1520-1605), perang Banda (1609-1621), perang Huamual (1625-1656), perang Alaka (1625-1637), perang Wawane (1633-1656), perang Kapaha (1636-1646) dan perang Iha (1632-1651).⁶⁴ Dengan demikian konflik bernuansa agama bukan merupakan hal yang baru di Maluku.

Balapan agama –meminjam istilah Azumardi Azra– untuk mendapatkan pengaruh politik dan juga pemeluk yang lebih besar seperti digambarkan di atas, sudah sejak lama diingatkan oleh seorang sarjana Belanda, Schrieke (1955-1957) tentang "*the race between Islam and Christianity*".⁶⁵ Meski teori Schrieke ini telah dikritik banyak

⁶³ Lihat wawancara dengan Marcus Mietzner, *Tekad*, 1 Februari 1999.

⁶⁴ Maryam Lestaluhu, *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hal. 34-219.

⁶⁵ Azumardi Azra, Pengantar dalam buku *Merajut Damai di Maluku (Telaah Konflik Antar Umat 1999-2000)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Yayasan Pustaka Umat, 2000), hal. xi

sarjana lainnya, karena mengandung kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi nuansa “balapan” untuk mendapatkan pemeluk dan pengaruh lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat – khususnya di bidang politik- sulit dibantah. Dalam kasus Maluku, Meilink Roelofsz dan Anthony Reid menyimpulkan bahwa persaingan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat laten sebagai bagian dari politik kolonialisme dan pertunjukan pengaruh dari beberapa kesultanan di Maluku.⁶⁶

Argumen Reid ini menyiratkan bahwa, secara historis “balapan keagamaan” terjadi dan meningkat sejak kedatangan kaum kolonial. Karena tidak terdapatnya *modus vivendi* yang stabil di antara kekuatan-kekuatan yang secara langsung atau tidak langsung dipandang mewakili Kristen, seperti Portugis, Spanyol dan kemudian Belanda dengan kekuatan Muslim seperti Sultan Ternate –khususnya Sultan Babullah (1570-1583). Sultan Babullah, sebagaimana diketahui tidak saja berhasil mengusir Portugis, tetapi juga menciptakan momentum bagi Islamisasi di Maluku secara keseluruhan. Namun dengan berakhirnya kekuasaan Babullah dan datangnya Belanda pada tahun 1600, maka struktur *idegereus* lokal pun lenyap, yang pada gilirannya hanya memperkuat loyalitas keislaman di satu pihak karena rasa terancam terhadap Belanda. Dan sebaliknya meningkatnya loyalitas Kekristenan pada pihak lain karena munculnya perasaan “proteksi” dari Belanda terhadap mereka. Pergeseran loyalitas ini semakin meningkat karena struktur sosi-kultural masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin terpilah-pilah.⁶⁷ Situasi inilah yang menurut pendeta Semy Titaley, telah

⁶⁶Ulasan lebih lengkap tentang masalah ini bisa di lihat dalam tulisan Azumardi Azra, *Muslim and Christian Relation in Contemporary Indonesia*, makalah pada Komprensi tentang “*Christian and Muslim in The Commonwealth*”, Windsor, Inggris, 6-9 Juli 2000.

⁶⁷ Zaim Ukhrowi (edit), *Merajut damai di Maluku, Telaah Konflik antar Umat 1999-2000*. (Jakarta; PT. Intermisa, 2000), hal. 55-56.

mengakibatkan terjadinya segregasi berdasarkan agama di Maluku dalam waktu yang cukup lama.⁶⁸

Selain faktor kesejarahan tersebut, hubungan Islam dan Kristen di Maluku pada dua dekade terakhir terasa semakin berat ketika pengaruh eksternal membuat masyarakat semakin tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menaunginya. Kebijakan nenek moyang bangsa Maluku lewat berbagai perekat kultural seperti *pela-gandong*, *masohi/maren* ataupun *larvul ngabal* yang telah memberi spirit bagi ikatan kemanusiaan dan persaudaraan antara masyarakat beragama di Maluku, kini semakin memudar. Padahal pranata-pranata lokal tersebut -dalam waktu yang cukup lama- relatif mampu menjembatani perbedaan-perbedaan sekaligus meredam dan mengeliminir potensi konflik, sehingga masyarakat bisa hidup dengan harmonis.

Sentimen keagamaan yang semakin menebal di Maluku akhir-akhir ini didorong oleh akumulasi berbagai faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah intervensi politik terhadap kehidupan keagamaan di Maluku. Menebalnya sentimen keagamaan yang dipupuk oleh pengaruh politik itu mulai berlansung sekitar 1980-an, ketika konflik di tingkat elit dalam memperebutkan berbagai kekuasaan politik mulai merangsang disharmonitas di kalangan masyarakat. Dalam pandangan Pendeta J. Ospara, sejak saat itu agama mulai dimanfaatkan demi tujuan-tujuan politik. Pemanfaatan tersebut sering ditunjukkan dengan kata-kata, misalnya, "*mari katong pilih dan mendukung orang kita (mendukung seorang politisi yang seiman)*".⁶⁹ Forum

⁶⁸ Sammy Titaley, Suatu "Keanehan" yang Nyata, dalam Suadi Marasabessy, (edit) *Maluku Baru, Suatu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca Konflik*, (Jakarta: Abadi, 2003), hal. 28.

⁶⁹ J. Ospara, *op.cit.*, hal. 23

kampanye menjelang pemilu sering menjadi momen mobilisasi politik dengan mengumandangkan tema-tema sektarian semacam itu.

Menebalnya semangat keagamaan di Maluku juga diperkuat oleh meningkatnya politik aliran di tingkat Nasional. Menurut Jhon Pires, menguatnya perjuangan penegakan syariat Islam oleh beberapa partai politik, telah menimbulkan kekhawatiran kalangan minoritas. Khususnya kalangan Kristen di Maluku, yang sejak awal kemerdekaan sangat berkeberatan dengan dimasukkannya diktum kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Bangkitnya kembali ideologi politik Islam dengan segala orientasi politiknya dirasakan sebagai sebuah gugatan terhadap eksistensi berbangsa dan bernegara.⁷⁰

Faktor kedua adalah sejak muncul kesemarakannya keagamaan di Maluku berkaitan dengan berkembangnya kelompok-kelompok keagamaan yang berhaluan *puritanisme*. Fenomena keagamaan yang semestinya meningkatkan *kesalehan* keagamaan masyarakat tersebut, ternyata tidak mempertimbangkan secara bijaksana kemajemukan yang telah menjadi realitas sosial di Maluku. Pengembangan sistem keagamaan lebih menonjolkan formalitas ajaran daripada substansi ajaran itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Azumardi Azra, untuk Maluku yang sangat majemuk, model keberagamaan yang perlu dikembangkan adalah *inklusifisme*, *pluralisme* dan *egalitarianisme*.⁷¹ Nilai-nilai tersebut terkandung dalam substansi hampir semua ajaran agama Abrahamik. Dalam pandangan Azumardi Azra, substansi ajaran suatu agama akan lebih mudah bertemu dalam kepelbagaian dengan substansi ajaran agama lain. Sementara formalisme ajaran justru seringkali membangun jarak di

⁷⁰ Jhon Pires, *op.cit*

⁷¹ Azumardi Azra didalam Zainudin Maliki (edit), *Agama Kerakyatan*, (Jakarta:1998)

antara para penganut agama. Apalagi jika formalisme itu disusupi dengan isu-isu politik, maka semakin mudah menebalkan sentimen keagamaan di antara penganut Agama.

Dalam konteks Maluku, kemunculan kelompok keagamaan, seperti *Jamaah Tabliq*, *Kristen Evengils* yang cenderung eksklusif dan puritan justru semakin memperlebar jurang perbedaan di antara penganut keagamaan di Maluku. Sebabnya adalah kelompok yang mengusung misi pemurnian agama ini, cenderung meunjukkan perilaku keagamaan yang agresif khususnya dalam meyebarkan paham-paham keagamaan sehingga sering memicu ketegangan di antara kelompok Islam dan Kristen.⁷² Perhelatan acara-acara keagamaan yang berskala nasional juga sering menjadi medan persaingan. Di tahun 1996 pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke-12 Tingkat Nasional dilaksanakan di kota Ambon. Hanya satu bulan berikutnya pada tahun yang sama juga diselenggarakan Pesparawi Tingkat Nasional di Kota Ambon. Walaupun dalam penyelenggaraan dua acara keagamaan berskala nasional itu melibatkan kedua komunitas (Islam dan Krsiten) untuk memeriahkan acara serimonialnya, namun Tim Penyelidik Independen untuk Konflik Maluku menemukan adanya beberapa insiden dan pelemparan kepada sejumlah kafilah dan kontingen.⁷³

b. Konflik Elit Politik.

Ada beberapa teori yang dibangun tentang pengaruh politik terhadap konflik Maluku. Pengamat sosial politik seperti Tamrian Amal Tomagola, atau Jorge Yunus

⁷² Wawancara dengan Kakanwil Agama Maluku, Drs. Hasyim Marasabesy, SH, MH di Ambon, 22 Desember 2005. Informasi yang sama juga dapat dibaca dalam Hasyim Marasabesy, *Kebijakan Departemen Agama tentang Kerukunan Umat Beragama di Maluku*, Makalah, tidak diterbitkan, (Ambon, 2004)

⁷³ Tim Penyelidik Independen, *op.cit.*

Adicondro meyakini bahwa konflik Maluku tidak bisa dilepaspisahkan dari perubahan politik di aras nasional. Pergeseran politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan penting dalam struktur kekuasaan dan ketatanegaraan. Sejumlah institusi yang sangat *powerfull* secara politik di masa Orde Baru tiba-tiba kehilangan pengaruh kekuasaannya. Kondisi transisi ini telah mengakibatkan berbagai pergolakan dan kerusuhan akibat tuntutan-tuntutan politik yang sering saling bertentangan. Kelompok militer dituduh sebagai salah satu elemen penting yang ikut mewarnai pergolakan-pergolakan tersebut.

Ada dua skenario hipotetik yang sering dikaitkan dengan kepentingan TNI dalam konflik etnik dan agama di Indonesia beberapa waktu lalu.⁷⁴ *Pertama*, skenario TNI merekayasa dan memanfaatkan kerusuhan. Tindakan rekayasa yang diciptakan TNI dapat dilakukan dalam bentuk memprovokasi dan mengadu domba antar etnis dan antar agama yang berbeda. Jika TNI berhasil membenturkan antar kelompok dan masyarakat, maka pihak elit TNI akan mengambil langkah kebijakan pengamanan, sehingga akan terbangun *image* di masyarakat bahwa keberadaan TNI masih tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila upaya ini dapat dilaksanakan dan berhasil, maka ini merupakan suatu prestasi bagi para elit TNI, dan merupakan kredit point bagi mereka dalam promosi karier menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Kedua, Skenario TNI membiarkan konflik berlarut-larut. Dengan kata lain TNI memanfaatkan pertikaian dan konflik antar etnik yang terjadi dan membiarkan berlarut-larut sampai terjadi *chaos*, maka sasaran sorotan publik, baik nasional maupun internasional adalah pada kegagalan dari pemerintahan sipil di Indonesia. Kondisi ini

⁷⁴ Analisis seperti ini sering digunakan oleh para pengamat dalam melihat kepentingan TNI dalam konflik SARA di Indonesia. Sebagai gambaran dapat dilihat pada hasil penelitian Tim Peneliti PSPK UGM, *Pertikaian Antar etnik dan Keberadaan TNI*, (Jakarta: 25 Mei 2000).

akan dimanfaatkan TNI mengambil posisi kepemimpinan puncak untuk mengendalikan pemerintahan.

Namun pandangan seperti itu memiliki kelemahan metodologis, karena sangat sulit menunjukkan bukti-bukti faktual yang dapat dinilai secara hukum. Kelemahan-kelemahan inilah yang digunakan oleh kelompok militer untuk menyerang balik para pengkritiknya. Mantan Kasum TNI, Letjen Suadi Marasabessy, menolak tuduhan seperti itu karena selain tidak bisa dibuktikan, juga cenderung mendiskreditkan individu-individu tertentu dari militer.⁷⁵ Polemik antara sejumlah petinggi militer yang dimotori Wiranto dengan para pengamat konflik seperti Tamrin Amal Tomagola harus dilanjutkan di meja pengadilan, karena Wiranto dan rekan-rekannya tidak menerima tuduhan Tamrin. Sampai saat ini perkembangan kasus tersebut masih terus ditangani oleh Mahkamah Agung.

Pandangan lain tentang pengaruh politik dalam konflik Maluku adalah dengan mengungkap dinamika politik dan hubungannya dengan agama dan konflik elit lokal. Sebagaimana telah digambarkan di muka, selama beberapa dasawarsa institusi politik dan birokrasi di Maluku secara umum dikontrol oleh elit-elit Kristen dan sebagian keluarga Raja-raja Maluku baik Kristen maupun Islam. Kondisi ini terjadi karena umumnya kelompok terdidik dan terpelajar berasal dari masyarakat Kristen. Sesuatu yang dianggap normal karena sejak zaman kolonial sebagian besar umat Islam menganggap bersekolah di sekolah-sekolah Belanda dapat mengancam iman keislaman seseorang. Oleh karena itu, tidak banyak orang Islam yang berminat untuk bersekolah di sekolah-sekolah formal yang dibangun pemerintah kolonial Belanda di Maluku.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Letjen (Purn) Suadi Marasabessy, Jakarta, 16 Januari 2006

⁷⁶ Richard Cahuvel, *Nationalists, Soldier, and Separatists*, (Leiden: KITLV Press, 1990), hal 2

Dalam catatan sejarawan L.Z. Leirisa, hingga awal abad IX hanya ada seorang putera Muslim bernama Abdullah Sukur Pelu (putera Raja Hitu) yang berhasil mengikuti pendidikan tinggi hingga ke negeri Belanda.⁷⁷

Rupanya kesan masa lalu itu bertahan hingga zaman kemerdekaan. Tidak banyak putra Maluku beragama Islam yang menyentuh pendidikan tinggi. Kampus Universitas Pattimura masih banyak didominasi oleh dosen dan mahasiswa beragama Kristen. Karena itu menjadi sesuatu yang wajar, jika posisi penting di pemerintahan, politik dan militer didominasi oleh kalangan terdidik yang beragama Kristen. Namun seiring dengan semakin mudahnya akses pendidikan bagi rakyat, kesadaran untuk bersekolah mulai tumbuh dan semakin banyak pula generasi muda beragama Islam yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini secara politik menaikkan posisi tawar dan mendorong mereka untuk merambah masuk ke dalam sistem politik dan birokrasi lokal. Mobilitas politik di pusat-pusat kekuasaan lokal ini menimbulkan persolan baru yang sangat mengkhawatirkan, karena masing-masing pihak menggunakan isu agama sebagai instrumen untuk mendukung mobilitas strukturalnya. Elit Kristen menggunakan isu agama sebagai “tameng” untuk mempertahankan posisinya dari ancaman pendatang (elit) baru yang beragama Islam, demikian pula dengan elit Islam yang juga menggunakan isu yang sama untuk masuk ke dalam pusat-pusat kekuasaan lokal. Menurut Jhon Pires, persaingan ini semakin terasa ketika Maluku dipimpin oleh dua orang gubernur terakhir, yaitu Muhammad Aqib Latuconsina (1992-1997) dan Muhammad Saleh Latuconsina (1997-2002) yang keduanya beragama Islam.⁷⁸

⁷⁷ L.Z. Leirisa, *op.cit*

⁷⁸ Jhon Pieres, *op.cit.*, hal. 28

Langkah-langkah yang dilakukan Aqib maupun Shaleh, khususnya dalam pengangkatan pejabat-pejabat publik di pemerintahan, telah dianggap sebagai sebuah proses “penghijauan” yang sangat mengancam kepentingan dan eksistensi elit Kristen. Pertentangan antar elit itu seringkali menarik massa pada lapisan bawah untuk saling memberikan dukungan kepada pejabat tertentu atas nama kesamaan agama. Hal ini membuat kehidupan politik lokal di Maluku terbelah ke dalam fragmentasi agama Islam dan Kristen yang bernuansa ideologis dan politis.

Situasi semakin buruk karena diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat yang sentralistik dan sering mengintervensi dan mendikte berbagai kehidupan politik dan birokrasi di daerah-daerah. Untuk kasus Maluku, setelah masa kepemimpinan Gubernur Latuharihari (1950-1955), pemerintah pusat mulai mengintervensi dengan “mendropping” pejabat-pejabat dari pusat untuk berbagai jabatan strategis di Maluku, termasuk jabatan gubernur. Selama masa Orde Baru hanya ada dua gubernur Maluku yang beragama Kristen, yaitu G.J Latumahina (1965-1968) dan S. Soekoso (1987-1992). Nama-nama seperti M. Josan, M. Padang, Sumitro dan Hasan Slamet mencerminkan kuatnya lobi pemerintah pusat.

Munculnya dua orang gubernur terakhir yang merupakan putera daerah Maluku beragama Islam, Muhammad Aqib Latuconsina dan Muhammad Saleh Latuconsina, juga lebih dianggap sebagai cerminan kuatnya lobi pemerintah pusat ketimbang aspirasi daerah. Padahal setelah kepemimpinan Aqib Latuconsina, masyarakat Kristen berharap seorang tokoh Kristen yang mendapat kesempatan berikutnya.⁷⁹ Saat itu ada dua calon Gubernur beragama Kristen; Fredy Latumahina dan Ety Sahubarua yang menjadi calon

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 45

kuat, namun yang terjadi justru sebaliknya, Muhammad Saleh Latuconsina yang mantan Kepala Dinas PU dan Ketua Bappeda Maluku yang dipromosikan sebagai Gubernur.

Tabel. 5
Daftar Pejabat Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekwilda Maluku

No	Gubernur	Agama	Masa Jabatan	Sekwilda	Agama	Masa Jabatan	Wakil Gubernur	Agama	Masa Jabatan
1	Mr. J. Latuharhari	Protestan	1950 – 1955	Mr. Chr. Soplanit	Protestan	1950 – 1955	-	-	-
2	M. Djosan	Islam	1955 – 1960	Manlow	Protestan	1955 – 1960	-	-	-
3	M. Padang	Islam	1960 – 1965	M.K. Souliisa	Islam	1960 – 1965	-	-	-
4	G. J. Latumahina	Protestan	1965 – 1968	J.J.G. Sahetapy	Protestan	1965 – 1971	-	-	-
5	Soemitro	Islam	1968 – 1973	M. K. Souliisa	Islam	1971 – 1976	-	-	-
6	Soemero	Islam	1973 – 1976	Drs. G.A. Engko	Protestan	1976 – 1983	-	-	-
7	H. Slamet	Islam	1976 – 1987	Drs. J.M.E. Soukoto	Protestan	1983 – 1987	Drs. G.A. Engko	Protestan	1983 – 1987
8	S. Sockoso	Kristen	1987 – 1992	Drs. M. Akib Latuconsina	Islam	1987 – 1991	Drs. M. Akib Latuconsina	Islam	1991 – 1992
9	Drs. M. Akib Latuconsina	Islam	1992 – 1997	1. Drs. L. H. Tanasale 2. Drs. S. Akyuen	Protestan Protestan	1991 – 1995 1995 – 1997	R. S. Soeranto	Islam	1993 – 1998
10	DR. Ir. M.S. Latuconsina	Islam	1997 – 2002	Drs. H. Souliisa	Islam	1997 – 2003	1. Dm. Paula. B. Renyaan 2. Drs. S. Akyuen	Katolik Protestan	1998 – 2003 1998 – 2003
11	Sinyo Sarundajang. (Caretaker)	Kristen	2002 – 2003	Drs. H. Souliisa	Islam	2003 – 2004			
12	K.A. Ralahalu	Kristen	2003 – skr	Drs. B. Assnagaf	Islam	2003 – skr	Drs. M. Latuconsina	Islam	2003 – skr

Sumber: Pemda Prop. Maluku, 2003

Pergantian beberapa pejabat penting di birokrasi pemerintahan pada masa Gubernur Aqib Latuconsina dan Saleh Latuconsia khususnya pada *level* eselon I dan II secara tidak seimbang, dicurigai oleh elit-elit Kristen sebagai usaha “penghijauan” birokrasi yang akan mengancam posisi mereka. Hal ini tampak dari komposisi pegawai pemerintah yang beragama Islam sejak tahun 1990-an yang terus meningkat. Pada

tahun 1999 sekitar 74% pegawai eselon I golongan IVA sampai IV E di tingkat propinsi yang beragama Islam. Sedangkan eselon II, jumlah pegawai yang beragama Islam mencapai angka 53%.⁸⁰ Kondisi ini kian mengurangi pengaruh orang Ambon Kristen yang secara tradisional kuat dalam struktur politik dan birokrasi propinsi dan kabupaten. Sebagian pengamat, termasuk juga mantan Presiden Abdurrahman Wahid menuduh kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Maluku telah memfasilitasi proses “penghijuan” tersebut berjalan sangat cepat.⁸¹

Dalam pandangan Jhon Pires, penguasaan posisi-posisi penting di birokrasi pemerintahan oleh elit Islam, justru telah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Hasan Slamet. Saat itu posisi penting seperti Ketua DPRD dipegang oleh Ruswan Latuconsina, Rektor UNPATTI (pertama dalam sejarah perguruan tinggi tersebut) dijabat oleh seorang Muslim Prof. Muhammad Lestaluhu, SH. Ketika Muhammad Aqib Latuconsina menjabat gubernur, Ketua Bappeda dijabat oleh Muhammad Saleh Latuconsina dan Kepala Biro Pembangunan dijabat oleh Abdullah Latuconsina. Data ini menurut Pires, belum termasuk sejumlah Kakanwil, Kepala Biro dan Kepala Dinas yang dikuasai oleh elit Islam. Bahkan juga dipertanyakan adalah mengapa sejak dahulu hingga sekarang Kepala Kanwil Agama Maluku selalu dijabat oleh seorang Muslim. Padahal persentasi umat beragama di Maluku cukup berimbang, bahkan saat ini telah menempatkan Kristen lebih unggul dari Islam. Dengan komposisi seperti itu pembangunan bidang keagamaan di Maluku sangat merugikan umat Kristen, karena ternyata anggaran pembangunan agama Islam jauh melebihi anggaran yang didapat

⁸⁰ Disarikan dari Lambang Triyono, *Keluar dari Kemelut Maluku*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 14-27. lihat juga tulisan Gerry Van Klinken, *The Maluku Wars. Bringing Society Back In* (The Indonesi, No. 17 April 2001)

⁸¹ *Kompas*, 14 Juli 2000

pihak Kristen. Salah satu indikator penting menurut Jhon Pires, dapat dilihat pada pengangkatan guru-guru agama pada mata pelajaran agama Islam yang jauh melebihi yang diangkat untuk pelajaran agama Kristen.⁸²

Kecurigaan dan pergesekan politik yang semacam itu semakin memperkuat persaingan antara elit kedua belah pihak dalam perebutan kekuasaan di Maluku. Hal ini membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi dan politisasi isu-isu keagamaan untuk kepentingan politik. Menurut Suadi Marasabessy, pergesekan politik menjelang pemilu 1999 yang melibatkan PDIP, PPP dan GOLKAR dan sejumlah partai baru, juga menaikkan tensi konflik di Maluku. Jika ditelaah lebih jauh, konflik Maluku yang telah menyebabkan eksodusnya ratusan ribu umat Islam dari Maluku telah menguntungkan kelompok politik tertentu, terutama PDIP.⁸³

c. Kecemburuan Sosial dan Ekonomi

Hal lain yang dapat diidentifikasi sebagai sumber penyebab terjadinya konflik Maluku adalah meningkatnya kecemburuan sosial yang bersumber pada ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kondisi seperti ini memang menjadi fenomena sosial yang bersifat umum yang terjadi di semua lapisan masyarakat yang tidak mampu mengelola kesenjangan dan ketimpangan struktur masyarakatnya. Hal ini juga diakui oleh Pelly (1993) yang menyebutkan bahwa masalah yang sering menjadi sumber konflik sosial dalam masyarakat adalah perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan

⁸²Jhon Pires, *op.cit.*, hal.47

⁸³ Wawancara dengan Suadi Marasabessy di Jakarta Timur, 17 Januari 2006

kesempatan ekonomi. Demikian pula dengan perluasan kelompok sosial budaya yang dirasakan sebagai ancaman bagi kelompok lain.⁸⁴

Penjelasan teoritik tersebut membantu dalam memahami struktur masyarakat dan kehidupan sosial di kota Ambon, tempat dimana konflik pertama kali terjadi. Kota Ambon sebagai pusat aktifitas ekonomi, politik, pemerintahan, maupun sosial, sama seperti kota-kota lainnya di Maluku Tengah dan wilayah lain manapun, menjadi pusat konsentrasi manusia dari berbagai latar belakang etnik, budaya, maupun agama dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai pusat seluruh kegiatan, termasuk pusat pendidikan, kota Ambon memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari berbagai penjuru desa yang ada di Maluku, maupun di luar Maluku. Karena itu, proses migrasi secara seponatan terjadi ke kota Ambon mulai permulaan abad ke-17.⁸⁵

Para migran lokal beragama Kristen datang ke kota Ambon pada umumnya untuk kepentingan pendidikan dan pegawai pemerintah, sedangkan migran Islam datang ke kota ini lebih untuk kepentingan ekonomi yakni sebagai pedagang, dan sedikit sekali yang datang untuk kepentingan pendidikan maupun sebagai pegawai pemerintah. Secara umum para migran dari luar Maluku bermigrasi ke kota Ambon semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

Para migran dari daerah pedesaan yang memasuki kota Ambon lalu membentuk komunal terpisah-pisah berdasarkan latar belakang agama sesuai dengan komunal teritorial mereka di pedesaan. Sebaliknya para pendatang dari wilayah-

⁸⁴ Usman Pelly, *op.cit.*

⁸⁵ M.Y. Papilaya, *Persepsi Lokal Tentang Konflik dan Kekerasan di Di Ambon –Persepsi Protestan*, dalam Ignas Kleden, *Timur dan Barat di Indonesia, Perspektif Integrasi Baru*, (Jakarta: The Go-East Institute, 2000), hal. 43.

wilayah luar Maluku, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan pulau Jawa, membentuk komunal-komunal tersendiri berdasarkan latar belakang etnik. Pola pemukiman yang demikian dengan masyarakat yang semakin homogen membentuk sentimen kelompok dalam berbagai latar belakang, yaitu *sentimen kelompok agama, ikatan negeri (desa)*, maupun *etnik*, yang rawan konflik.⁸⁶

Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kelompok Ambon Islam yang bergerak dibidang ekonomi lebih berorientasi kerja sektor ekonomi berskala kecil. Pendatang suku bangsa Cina dan Arab, yang pada dasarnya mendatangi Maluku karena benar-benar untuk kepentingan ekonomi, menguasai sektor ekonomi berskala menengah dan besar. Sedangkan para pendatang dari Sulawesi Selatan bekerja pada sektor ekonomi berskala kecil, dan pendatang dari Sulawesi Tenggara bekerja pada sektor pertanian tanaman pangan. Keuletan dalam bekerja dan mengais rejeki di kota Ambon telah memberikan peluang ekonomi yang sangat baik bagi komunitas migran dari Bugis, Makasar dan Buton sehingga secara bertahap mereka mulai menguasai sektor ekonomi dan perdagangan di Maluku.

Perkembangan kota Ambon yang demikian pesat, dengan proses migrasi yang tinggi, dan tidak diimbangi kebijakan kependudukan yang berbasis pada daya dukung pulau mengakibatkan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Hal ini membuat ruang gerak warga kota semakin sempit, dan akses terhadap peluang-peluang kerja dan ekonomi juga semakin sulit.

Komposisi penduduk berdasarkan agama pun mengalami perubahan. Jika pemeluk agama di Ambon pada tahun 1990 antara Islam dan Kristen adalah sekitar 70

⁸⁶ *ibid.*, hal. 44

% : 30 %. Kemudian pada tahun 1998 berubah secara signifikan menjadi 52% - 48%.⁸⁷

Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan persaingan secara ekonomi terhadap ruang (*tanah*) maupun lapangan kerja, semakin ketat, sehingga potensi konflik antar masyarakat semakin tinggi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi –terutama dengan semakin terpuruknya harga cengkeh, akibat kebijakan tataniaga cengkeh yang monopolistik sekitar akhir era pemerintahan Orde Baru- kehidupan ekonomi masyarakat Maluku semakin terpuruk dari tahun ke tahun. Hal ini semakin diperburuk dengan krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak paruh tahun 1997. Masyarakat Kristen yang selama ini tidak berbakat di sektor ekonomi dan perdagangan, mencoba mengalihkan aktifitas ekonomi keluarga pada sektor ini. Pada saat memasuki dunia kerja yang baru, sudah ada *barrier*, yaitu kelompok masyarakat lain, yakni orang *dagang* (pendatang) baik yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Tenggara, Cina, maupun Arab dan sebagian kecil masyarakat Islam asli Maluku yang sudah mapan dalam berbagai bidang usaha. Di sisi lain pada sektor publik (birokrasi) yang selama ini didominasi oleh masyarakat beragama Kristen, perlahan tapi pasti mulai didominasi oleh para pendatang maupun masyarakat Islam Maluku. Kekecewaan ini semakin diperparah lagi oleh pola rekrutmen calon pegawai birokrasi yang cenderung mengambil pendekatan koneksitas. Akibatnya, terjadi hambatan sosial-ekonomi di kalangan para pencari kerja yang miskin koneksi di jajaran birokrasi.⁸⁸

⁸⁷ Data Kependudukan Kota Ambon tahun 1998.

⁸⁸ M.Y. Papilaya, *op.cit.*, hal. 45

Kondisi tersebut melahirkan ketimpangan sosial-ekonomi yang memicu munculnya kecemburuan sosial. Sebelum terjadi konflik pada 19 Januari 1999, mulai ada gesekan-gesekan kecil di masyarakat, yang diidentifikasi sebagai bermotif kecemburuan sosial. Fakta tersebut semakin menemukan pembenaran, jika kita mengamati gejala konflik yang muncul pada periode pertama kerusuhan. Isu yang menonjol adalah “Usir BBM (Bugis, Buton Makasar)” yang dianggap sebagai pihak yang lebih menguasai kehidupan perekonomian. Orang-orang Bugis, Makassar dan Buton yang selama ini menguasai pasar dan ekonomi menengah dijadikan sasaran kemarahan dan pelampiasan kekecewaan. Dibeberapa pemukiman Bugis-Makassar atau Buton yang telah dibakar, sering ditemui berbagai tulisan *grafitti* di dinding rumah yang melukiskan ekspresi kemarahan terhadap etnis tersebut.

Namun seiring dengan semakin bertambahnya “energi” konflik, mulai terjadi pergeseran isu secara signifikan, yakni ketika konflik juga telah menghancurkan simbol-simbol keagamaan yang sangat sensitif seperti mesjid dan gereja. Pada tingkat ini terjadi politisasi agama, sehingga konflik pada episode berikutnya secara total mengambil bentuk konflik identitas agama Islam lawan Kristen, yang melibatkan masyarakat secara luas.

2. Faktor Pemicu (*Triggering Factor*).

Jika faktor penyebab yang diuraikan di atas adalah sesuatu yang lebih mendasar dan menjadi akar permasalahan dari konflik Maluku, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa peristiwa yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pemicu terjadinya konflik.

a. Efek Kerusuhan Ketapang dan Keterlibatan TNI.

Pada tanggal 21 November 1998 di Jakarta terjadi kerusuhan di Ketapang (di belakang Gajahmada Plaza) yang melibatkan sejumlah pemuda asal Maluku. Sekelompok masyarakat dan aktifis Islam yang dipimpin Habib Rizik, bentrok dengan petugas keamanan yang menjaga rumah judi (C & C) di jalan Ketapang. Aparat keamanan sipil itu disuruh bosnya untuk membantu penjaga keamanan yang terdesak di Ketapang. Karena kalangan masyarakat yang marah jauh lebih banyak maka preman-preman yang berasal dari Maluku ini terdesak bahkan beberapa orang diantaranya tewas mengenaskan. Sebagian besar dari mereka dievakuasi aparat keamanan, entah di bawah kemana.⁸⁹ Beberapa hari setelah peristiwa yang juga mendapatkan perhatian nasional itu, diadakan penyisiran dan pemeriksaan identitas terhadap sejumlah pemuda asal Ambon yang berada di Jakarta.

Menurut hasil penelusuran jurnalis senior Sinansariecep⁹⁰, mereka yang selamat dari bentrokan di Ketapang dan diidentifikasi sebagai “bermasalah” dipulangkan dan dibawah ke Ambon. Dalam daftar penumpang KM. Dobonsolo dan KM. Lambelu yang membawa penumpang “khusus” itu ada 183 orang yang dicurigai sebagai preman, jumlah itu sebenarnya lebih banyak lagi. Mereka tiba di Ambon pada tanggal 26 November 1998. Kelompok ini juga menunjukkan foto dan data rekan-rekannya yang menjadi korban konflik Ketapang kepada masyarakat setempat. Kegiatan para pemuda ini di Ambon tidak terpantau sepenuhnya. Padahal menurut laporan Tim Penyelidik

⁸⁹ Sinansari Ecep. *Bila Cengkeh tak Berbunga. Membuka Rusuh Ambon* (Jakarta: Cahaya Timur, 2003), hal. 10

⁹⁰ *Ibid.* hal. 34

Indipenden Nasional untuk Konflik Maluku menyebutkan kelompok “preman” banyak terlibat di lapangan sebagai mobilisator massa di awal-awal konflik.⁹¹

Bukti keterlibatan para preman ini mulai terungkap secara jelas ketika terjadi pengeboman secara seporadis di beberapa tempat di kota Ambon di pertengahan tahun 2002. Para pelaku yang ditangkap dan akhirnya diajukan ke meja hijau adalah sejumlah komplotan preman yang tergabung dalam komunitas “Geng Coker” (Cowok Keren) yang dipimpin oleh Berty Loupatty, seorang preman yang telah *malang melintang* dalam berbagai aksi premanisme di Jakarta, Surabaya dan Ambon. Berti disinyalir merupakan orang yang dimanfaatkan oleh kelompok militer untuk mengacaukan Ambon.⁹² Dalam pemeriksaan di pengadilan, Berty dan anak buahnya membuat pengakuan yang mencengangkan bahwa keterlibatan mereka khususnya dalam penyerangan ke kantong-kantong komunitas Kristen karena disuruh oleh oknum tentara.

Indikasi tentang keterlibatan militer secara institusional dalam memproduksi konflik Maluku memang sangat *debatable*. Sebabnya adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjelaskan keuntungan seperti apa yang diperoleh oleh militer. Jika merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, misalnya hasil penelitian Tim Peneliti PSPK UGM yang mencoba menganalisis keterlibatan militer dalam memicu konflik, maka minimal ada tiga hal yang dianggap menguntungkan militer dengan terjadinya konflik Maluku. *Pertama*, kepentingan untuk pembentukan Kodam Pattimura yang diyakini akan memperluas dan menambah pos-pos jabatan strategis di lingkungan TNI, semenjak kehadirannya pada jabatan-jabatan publik mulai ditolak gerakan reformasi.

⁹¹ lihat Laporan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku, hal.12

⁹² Analisis tentang hal ini dapat dilihat dalam tulisan Jorge Junus Adicondro, *Orang-orang Jakarta di Balik Kerusuhan Ambon*, Makalah, 2002

Kedua, berkaitan dengan proyek-proyek TNI. Hal ini menurut Tim PSPK akan menjadi legitimasi bagi pencairan dana senilai Rp. 14 triliun yang didrop pemerintah kepada institusi TNI sejak 5 Mei 1998. Dalam pengelolaannya, dana tersebut hanya bisa dipertanggungjawabkan manakala ada konflik dan kerusuhan. Dan *Ketiga*, persaingan elit TNI di tingkat lokal yang ditengarai melibatkan dua Jenderal asal Maluku, Max Tamaela yang ditokohkan oleh kelompok Kristen dan Suadi Marasabessy yang ditokohkan oleh kelompok Islam. Persaingan keduanya dalam memperoleh berbagai jabatan strategis di lingkungan Angkatan Darat disebut-sebut telah memprovokasi massa pendukungnya di lapangan.⁹³

Menurut penulis, kesimpulan yang dirilis dari sejumlah hasil penelitian tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Sebab kelemahan mendasar dari bangunan teori konspirasi yang sering digunakan dalam mencermati keterlibatan militer dalam konflik, adalah kesulitan untuk mempertanggungjawabkan data-data dan hasil temuan tersebut secara ilmiah dan hukum, karena kesimpulan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan secara factual kejadian yang terjadi di lapangan. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dalam konteks konflik Maluku, cukup banyak oknum TNI-Polri yang terlibat dalam konflik. Keterlibatan mereka sebagian besar dipicu oleh alasan psikologis karena sebagian dari mereka juga merupakan korban konflik.

b. Peristiwa Perkelahian antara Pemuda.

Peristiwa kedua yang sering disebut oleh pihak keamanan dan sejumlah pengamat konflik Maluku sebagai pemicu konflik adalah perkelahian yang melibatkan sejumlah pemuda di desa Batu Merah (Islam) dan Mardika (Kristen) pada hari kejadian

⁹³ Tim Peneliti PSPK, *Pertikaian Antaretnik dan Keberadaan TNI (Kasus Ambon-Maluku)*, Laporan Penelitian, Jakarta, 2000

19 Januari 1999, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Awal pertikaian adalah perkelahian antara dua supir angkot, yaitu Yopy dan Nursalin yang berasal dari dua desa yang saling berbatasan di kota Ambon, yakni Batu Merah dan Mardika.

Kejadian perkelahian tersebut bermula dari perkelahian antara Yopy dan Nur Salim di sebuah pasar tradisional. Yopy yang terdesak lari ke desa Mardika dan kembali bersama rekan-rekannya dan kemudian terjadi perkelahian massal. Singkat cerita, tanpa diketahui siapa yang mengkomandoi, pada pukul 15.00 sudah terjadi konsentrasi massa di beberapa tempat dan mulai melakukan pembakaran dan penyerangan hingga malam hari.

Pada hari berikutnya, 20 Januari 1999, terdapat isu dan provokasi yang diterima oleh kedua belah pihak. Umat Islam yang sedang bersilaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, mendengar informasi bahwa sedang ada usaha dan ~~dan~~ pergerakan massa yang akan membakar Masjid Raya Al-fatah (Mesjid yang menjadi simbol Islam di kota Ambon). Hal tersebut mendorong massa umat Islam yang berada di pinggiran kota bergerak menuju Masjid Al-fatah. Demikian pula di kalangan komunitas Kristen juga mendapat informasi bahwa Gereja Maranata yang terletak di jantung Kota Ambon yang menjadi pusat aktifitas keagamaan umat Kristen, juga sudah dibakar oleh orang-orang Islam. Massa Kristen yang marah itu mulai melakukan aksi-aksi penyerangan dan pembakaran terhadap beberapa rumah etnis Bugis dan Makassar.

Menurut temuan Tim Penyelidik Independen untuk Konflik Maluku, Isu-isu yang menyesatkan itu banyak disebarkan melalui telepon di rumah-rumah penduduk dan melalui *handytalk*. Kesimpangsiuran informasi sebagaimana yang terjadi pada peristiwa tanggal 19 Januari 1999 merupakan salah satu sumber kontroversi hingga saat ini. Hal ini juga sekaligus memperkuat dugaan hampir semua informan yang diwawancarai dalam

penelitian ini, bahwa konflik Maluku merupakan desain kelompok kepentingan tertentu yang tidak mampu diungkap secara jelas hingga saat ini.⁹⁴

Desain besar seperti itu mesti dibuktikan karena tidak mungkin hanya karena perkelahian kecil yang merupakan peristiwa kriminal biasa dapat memicu konflik yang demikian dahsyat. Hal ini semakin terbukti ketika dalam sidang di pengadilan negeri Ambon, Nursalim yang diduga sebagai pemicu kerusuhan dinyatakan bersalah, namun tidak dikait-kaitkan dengan peristiwa penyerangan dan kerusuhan tersebut.⁹⁵ Oleh karena itu penulis berpendapat, peristiwa perkelahian antara Nursalim dan Yopi hanya menjadi faktor pemicu (*trigger*) yang meledakkan berbagai potensi konflik dan kekecewaan yang selama ini telah menjadi potensi laten dalam konflik Maluku. Andai saja aparat keamanan, bisa bertindak lebih cepat dan taktis maka konflik masih bisa dihentikan sejak dini. Namun sayang, sebagaimana dilaporkan Komnas-HAM, aparat keamanan cenderung lamban dalam merespon konflik dan cenderung tidak bersikap netral, sehingga eskalasi konflik semakin sulit dihentikan.

C. Dampak Konflik Maluku

Lamanya konflik yang terjadi di Maluku telah mengakibatkan banyak kerugian materi yaitu hancurnya harta benda masyarakat, dan terlebih lagi tidak berfungsinya infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik. Data dari Kompas misalnya, menyebutkan bahwa selama konflik Maluku, tercatat paling tidak 29,414 unit rumah

⁹⁴ Lihat *Resume Hasil Penyelidikan TPIN, Kelompok I s.d V, Periode Tanggal 15 Agustus 2002*.

⁹⁵ Lihat, *Pokok-pokok Pikiran dalam Rangka Proses Penghentian Pertikaian di Maluku*, yang dikeluarkan Gereja Protestan Amboina dan Keuskupan Amboina, tidak dipublikasikan (Ambon, 2000)

penduduk, 251 rumah ibadah, 129 unit sarana perkantoran, 636 unit pertokoan, kios dan pasar yang hancur, terbakar dan dijarah.⁹⁶

Hingga saat ini banyak pihak juga masih memperdebatkan tentang jumlah korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi di Maluku pada umumnya atau di Ambon pada khususnya.⁹⁷ Dari pelbagai data yang ada dapat diambil rata-rata jumlah korban kerusuhan di Maluku kurang lebih antara 4000-8000 jiwa –dari mulai Januari 1999 hingga 2004. Diperkirakan 40 persennya merupakan korban yang ada di Maluku tengah. Ketidakpastian tersebut diakibatkan karena banyak korban jiwa yang meninggal bersama tenggelamnya kapal mereka di laut, korban hangus terbakar, maupun korban tak dikenal lainnya yang langsung dikubur secara massal.

Konflik Maluku juga menyebabkan paling tidak sekitar 860.000 jiwa mengungsi, 280.000 tinggal di tempat-tempat penampungan di Maluku bagian selatan, dan sekitar 78.000 di Maluku Utara.⁹⁸ Eksodus pengungsi yang terjadi sangat tidak menentu, dalam arti banyak pengungsi yang keluar dari Ambon dan banyak juga yang masuk ke Ambon. Tetapi yang jelas pergerakan pengungsi ini cenderung memusat pada komunitas masing-masing agama, khususnya para pengungsi yang mencari perlindungan di kepulauan Maluku saja. Sedangkan etnis pendatang banyak yang keluar dari Maluku, seperti pengungsi yang merupakan etnis pendatang Bugis dan

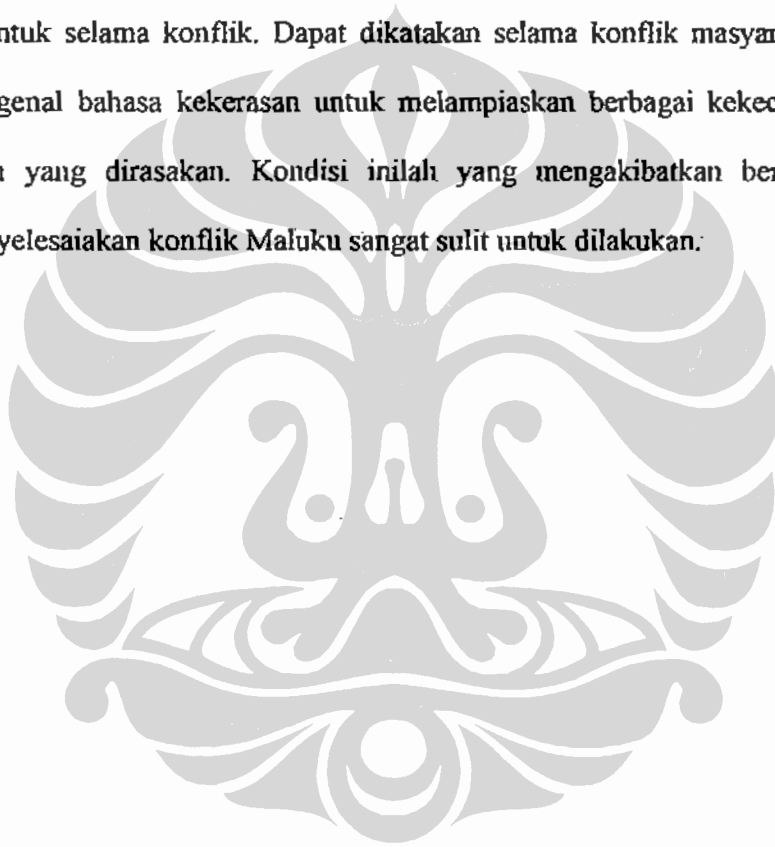
⁹⁶ *Maluku Pascakonflik, Layak Memperoleh Bantuan Khusus*, *Harian Kompas*, 5 september 2003.

⁹⁷ Khusus mengenai jumlah korban jiwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara versi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan laporan beberapa LSM.

⁹⁸ Dari sumber resmi didapatkan bahwa jumlah pengungsi di seluruh Propinsi Maluku sejak Januari 1999 – juni 2000 (sebelum pemberlakuan Darurat Sipil) ada 104.186 jiwa. Setelah pemberlakuan Darurat Sipil (1 Juli 2000) terjadi penambahan pengungsi sebesar 110.926 jiwa, sehingga total pengungsi adalah 215.061 jiwa. kemudian sejak bulan September – Oktober 2000, terdapat penambahan sebanyak 10.000 pengungsi baru lagi, setelah penyerangan desa Suli, Hative Besar, Iha, Pia, dan Sirisori Amalatu. Data diambil dari URL: http://www.Geocities.com/chosye/Themes/Prahara_Maluku_1.htm.

Makassar yang kembali ke daerah asalnya, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan pengungsi Kristen banyak yang menuju Sulawesi Utara (16.293 jiwa). Di Maluku hanya ada dua lokasi penampungan pengungsi yang menampung campuran penduduk (Kristen dan Islam) yaitu markas Angkatan Laut Halong dan Rindam (Pusat Pendidikan Militer) Suli.

Dampak lain dari konflik adalah masalah-masalah psikologis, dendam dan pelembagaan kekerasan yang melekat pada berbagai laskar dan milisi sipil yang dibentuk selama konflik. Dapat dikatakan selama konflik masyarakat Maluku hanya mengenal bahasa kekerasan untuk melampiaskan berbagai kekecewaan dan suasana batin yang dirasakan. Kondisi inilah yang mengakibatkan berbagai usaha untuk menyelesaikan konflik Maluku sangat sulit untuk dilakukan.



BAB III.
PERJANJIAN MALINO
SEBAGAI SUATU USAHA PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.

A. Upaya Penyelesaian Konflik Maluku

Sejak konflik meletus pada tanggal 19 Januari 1999 di kota Ambon, banyak langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi eskalasi konflik. Namun belum ada kebijakan bisa dikatakan berhasil menghentikan konflik. Langkah awal dilakukan oleh Mabes TNI dengan mengirim sejumlah prajurit untuk diperbantukan di Korem Pattimura. Namun keberadaan TNI, khususnya Kostrad yang berasal dari Komando Daerah Militer (KODAM) Wirabuana Ujung Pandang, dinilai oleh banyak pihak, khususnya di kalangan komunitas Kristen sering bertindak tidak netral. Kecurigaan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar prajurit Kostrad itu berasal dari etnis Bugis dan Makassar yang kebetulan warganya banyak menjadi korban pada kerusuhan awal di Ambon. Hal ini terkait dengan isu yang mengemuka di awal konflik yaitu "usir BBM" (Bugis, Buton, Makassar). Prajurit-prajurit tersebut dianggap tidak mampu menjaga netralitasnya dan cenderung memihak kepada masyarakat sukunya sendiri.

Menanggapi keluhan tersebut, pada bulan Maret 1999, Panglima TNI Wiranto kembali membentuk sebuah tim yang disebut Tim 19. Sesuai dengan namanya tim tersebut terdiri dari 19 orang perwira tinggi dan menengah asal Maluku yang dipimpin oleh (Mayjend) Suadi Marasabessy yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam Wirabuana Ujung Pandang. Menurut analisis Tim Pusat Studi Politik dan Kebijakan

(PSPK) Universitas Gajah Mada Jogjakarta⁹⁶, kinerja Tim 19 tidak banyak berarti karena pendekatan militeristik yang digunakan. Hasil kinerja tim ini hanya memberikan keuntungan politik kepada kelompok militer. Terbukti dengan suksesnya rekomendasi tentang perlunya peningkatan status Korem Pattimura menjadi Kodam. Pemerintah akhirnya benar-benar mewujudkan rekomendasi tersebut, dengan meningkatkan status Korem Pattimura menjadi Kodam.

Pemerintah Daerah Maluku juga mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik. Pada tanggal 13 Februari 1999, Gubernur Maluku membentuk tim penyelesaian konflik yang dikenal dengan Tim 6. Tim tersebut kemudian dikembangkan lebih luas dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dari kedua pihak yang bertikai dalam Pusat Rujuk Sosial (PRS). Namun dalam perjalanannya, tim ini juga tidak berhasil melakukan apa-apa dan konflik justru kembali berkobar. Menurut pendeta Jhon Ruhulesin, yang pernah menjadi anggota Pusat Rujuk Sosial, tim ini tidak berhasil dengan baik karena tidak didukung konsistensi penegakan hukum (*law inforcement*) yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyulut pertikaian.⁹⁷

Melihat perkembangan situasi di Ambon yang semakin tidak menentu, pada 14 Maret 1999 Presiden Habibie kembali mengirim sebuah tim pencari fakta, yang dikenal dengan Tim 20 yang terdiri atas 10 orang tokoh Islam dan 10 orang tokoh Kristen. Namun kinerja tim tersebut juga tidak jelas. Komnas HAM juga tidak ketinggalan mengirimkan utusannya untuk memantau isu pelanggaran HAM di Ambon. Utusan Komnas HAM terdiri dari Albert Hasibuan dan Benyamin Mangkudilaga. Mereka bertugas selain memantau pelanggaran HAM dan kekerasan juga ditugaskan untuk

⁹⁶ Lihat Laporan Penelitian Tim PSPK, *Pertikaian Antar Etnik dan Keberadaan TNI (Kasus Ambon-Maluku)*, Jakarta, 25 Mei 2002.

⁹⁷ Wawancara dengan Pendeta Jhon Ruhulesin di Ambon, 20 Desember 2005

melakukan mediasi antar para pihak yang terlibat konflik. Bersamaan dengan kedatangan utusan Komnas HAM, DPR RI juga mengirim Tim Mediasi dan Investigasi pada 18 Februari 1999 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR/MPR Letjen (Purn) Hari Sabarno. Namun hasil kinerjanya juga tidak jelas.⁹⁸

B. Kebijakan Darurat Sipil untuk Maluku.

Berbagai kebijakan penanggulangan konflik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama kurun waktu 1999 hingga pertengahan tahun 2000, ternyata tidak mampu mengurangi eskalasi konflik di Maluku. Bahkan sebaliknya, sejak periode tersebut konflik Maluku justru berkembang semakin ekstrim dan mulai memperlihatkan riak-riak politik. Deklarasi Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang mendukung misi kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) yang pernah eksis di masa lalu menambah bobot politik pada konflik. Demikian juga dengan kedatangan Laskar Jihad semakin memperuncing ketegangan dan akhirnya membuat konflik semakin rumit dan *complicated*, sehingga sulit untuk dipadamkan. Para pihak yang bertikai bukan saja menggunakan senjata tradisional *parang* dan tombak, namun ada juga yang mulai menggunakan senjata-senjata organik. Senjata organik yang beredar di tangan masyarakat, sebagian merupakan hasil curian dari markas Brimob Polda Maluku (yang berhasil dibobol para perusuh) dan sebagian didapatkan dari pihak luar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa senjata-senjata ilegal tersebut dipasok dari pulau Jawa dan dari daratan Philipina.⁹⁹ Kondisi ini membuat konflik Maluku seperti benang kusut yang membuat pemerintah semakin sulit bahkan bahkan kebingungan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

⁹⁸ Eko Prasetyo, *op.cit.*, hal. 20

⁹⁹ *Ibid.*

Dalam kekalutan phisikologis dan kekacauan yang tidak terkendali itu, Presiden Abdurahman Wahid memutuskan untuk mengeluarkan Kepres No. 88 Tahun 2000 yang menetapkan status Darurat Sipil di Maluku dan Maluku Utara. Pemberlakuan darurat sipil berdasarkan pertimbangan bahwa perluasan fungsi dan peran militer yang disertai dengan payung hukum yang pasti atas setiap tindakan yang diambil, akan memberi ruang yang cukup bagi militer untuk bertindak cepat dan tegas dalam menghentikan konflik.¹⁰⁰ Kebijakan ini kemudian dieskpresikan melalui gelar pasukan tambahan dalam jumlah yang sangat signifikan.

Dalam periode awal pemberlakuan darurat sipil kondisi keamanan di Maluku dilaporkan untuk sementara waktu cukup kondusif. Namun darurat sipil tidak bertahan lama karena konflik kembali bergolak. Bahkan dalam realitas yang sebenarnya korban kekerasan cenderung semakin meningkat. Ironisnya mereka merupakan korban tindak kekerasan yang secara agresif dilakukan oleh aparat keamanan. Atas nama Darurat Sipil, satuan-satuan khusus yang dikirim secara bergelombang ke Maluku melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat, baik Muslim maupun Kristen.¹⁰¹

Kasus yang sangat terkenal dan banyak mengundang protes para penggiat HAM nasional dan internasional adalah aksi kekerasan yang dilakukan oleh satuan-satuan khusus TNI (Marinir, Kopasus, Kostrad dan Paskhas). Satuan-satuan TNI yang tergabung dalam Batalyon Gabungan (YON GAB) melakukan kekerasan dalam *sweeping* terhadap rumah-rumah warga di wilayah Kebun Cengkeh Kotamadya Ambon. Aksi tersebut menimbulkan korban meninggal dari masyarakat sebanyak 20

¹⁰⁰ lihat Saiful Ahmad, *Dinamika Politik Lokal dan Pemberlakuan Darurat Sipil di Maluku Utara*, Tesis pada Prodran Magister Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, FISIP-Universitas Indonesia Jakarta, 2004. (Tidak Diterbitkan).

¹⁰¹ *Ibid.*

orang dan ratusan orang lainnya luka-luka dan cedera.¹⁰² Anggota Yon Gab juga menyerang sebuah poliklinik milik Laskar Jihad yang dipenuhi pasien yang sedang dalam perawatan. Tindakan anarkis aparat keamanan ini diprotes secara keras oleh berbagai pihak termasuk Palang Merah Internasional.

Perkembangan konflik Maluku pasca Darurat Sipil semakin memanas, kunjungan Presiden Abdurahman Wahid pada Desember 2000, dan Wapres Megawati beberapa bulan berikutnya tidak berhasil meredam konflik. Ketika Megawati menjabat sebagai Presiden, Ia juga melakukan kunjungan ke Maluku namun kehadirannya tidak berhasil menghentikan konflik. Bahkan hanya beberapa saat setelah Ia meninggalkan Ambon, konflik justru berkobar kembali. Untuk kedua kalinya Komnas HAM ~~untuk~~ kembali mengirim sebuah tim yang cukup serius yang dikenal dengan KPP HAM Maluku dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komnas HAM, Bambang W. Suharto. Tim tersebut cukup lama melakukan investigasi di Maluku. Namun menurut Bambang W. Suharto, rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM, tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten.¹⁰³

Dalam situasi seperti itu, muncul gagasan untuk mempertemukan pihak Muslim dan Kristen dalam sebuah pertemuan yang hasilnya mengikat seperti perjanjian yang dilakukan pemerintah dalam konflik Poso. Gagasan tersebut disambut positif oleh berbagai pihak di Maluku, karena diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan dan pertikaian yang masih terus berlangsung di seluruh Maluku.

¹⁰² *Suara Maluku*, 2 Juli 2001

¹⁰³ Wawancara dengan Bambang W. Suharto, Jakarta 8 Maret 2006. Lihat juga makalah, Bambang W. Suharto, *Informasi, Data dan Fakta tentang Konflik Maluku dan Maluku Utara*. (Jakarta: 9 Juni 2002)

C. Gagasan tentang Perjanjian Malino.

1. Inspirasi dari Perjanjian Malino I

Konflik Maluku yang bernuansa SARA ternyata telah mendorong munculnya konflik serupa di tempat lain. Salah satu daerah di luar Maluku yang juga terkena imbas konflik Maluku adalah Poso, Sulawesi Tengah. Konflik Poso memiliki kemiripan dengan konflik yang terjadi di Maluku. Konflik Poso berlangsung dalam bentuk perang sipil di antara warga masyarakat yang berbeda agama, Islam dan Kristen. Pada 20 Desember 2001, pemerintah melalui Menkokesra Yusuf Kalla berhasil memfasilitasi perundingan antara kelompok-kelompok yang bertikai di Poso. Perundingan yang diadakan di Malino itu, akhirnya berhasil “menelurkan” 10 butir kesepakatan yang isinya sebagai berikut:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak pemberlakuan keadaan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran kepada semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari RI, karena itu setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai serta menghormati adat istiadat setempat.

7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan *syari'at* agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan mentaati segala aturan yang disetujui baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁰⁴

Sejak pelaksanaan Perjanjian Malino I, situasi keamanan di Poso dilaporkan semakin membaik dan kehidupan sosial kembali normal bagi sejumlah besar warga di Sulawesi Tengah. Kondisi ini memungkinkan para pengungsi dapat kembali ke tempat asalnya, termasuk ke daerah-daerah dengan komposisi penduduk beragama yang beragam.¹⁰⁵ Pelaksanaan Perjanjian Malino I yang dianggap sukses memberikan inspirasi bagi pemerintah untuk menggunakan model perjanjian yang sama dalam menyelesaikan konflik Maluku.

2. Peran Yusuf Kalla dan Gagasan Perjanjian Malino II untuk Maluku.

Kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Maluku selama tiga tahun pertama konflik tersebut, mempertegas kritik bahwa sesungguhnya pemerintah belum memiliki sistem kebijakan yang jelas dan terarah dalam menyelesaikan konflik-konflik bernuansa SARA di Indonesia. Kebijakan yang diambil cenderung bersifat reaksioner, tidak sistemik dan terencana. Hal ini dapat disaksikan dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani konflik Maluku. Sejak konflik meletus pada tanggal 19

¹⁰⁴ Lihat, *Deklarasi Malino untuk Poso*, (Kementerian Menkokesra, 2001)

¹⁰⁵ UN. OCHA: Notes (June 2004), hal. 8

Januari 1999, pemerintah telah membentuk berbagai tim, baik yang resmi maupun tidak resmi untuk menyelesaikan konflik. Namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Upaya mediasi dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah selama beberapa kali juga tidak mencapai titik temu perdamaian. Bahkan dapat dikatakan pemerintah sesungguhnya sedang mengalami kebingungan dalam menyelesaikan konflik Maluku. Hal itu tercermin dari pernyataan-pernyataan pemerintah seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid bahwa konflik Maluku hanya bisa diselesaikan oleh rakyat Maluku sendiri, padahal kondisi konflik seperti itu sudah sedemikian rumitnya. Himbauan pemerintah agar masyarakat menyelesaikan konfliknya sendiri, menunjukkan pemerintah ingin “cuci tangan” atau “lari” dari tanggung jawab. Padahal dalam realitas konflik yang sebenarnya, kekerasan bukan saja dilakukan oleh-oleh pihak-pihak yang bertikai, tetapi secara jelas juga diproduksi oleh negara lewat tangan-tangan aparat keamanan yang bertugas di lapangan.

Ide tentang Perjanjian Malino yang digagas oleh Menkokesra Yusuf Kalla, pada dasarnya lebih menunjukkan visi personal seorang Yusuf Kalla ketimbang sebuah kebijakan pemerintah yang baku. Atau dengan kata lain, jika bukan karena Yusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Menkokesra, maka dapat dipastikan penyelesaian konflik dengan model perundingan seperti Perjanjian Malino tidak akan terlaksana. Dengan demikian keberadaan Yusuf Kalla dapat disebut sebagai aktor penting dalam pelaksanaan Perjanjian Malino untuk Maluku.

Setelah sukses menyelenggarakan Perjanjian Malino untuk Poso (Perjanjian Malino I), Yusuf Kalla kemudian melakukan lobi dengan berbagai pihak di Maluku, khususnya di Ambon yang masih bergolak untuk menjajaki perlunya dilakukan sebuah perundingan antara para pihak yang bertikai. Perundingan tersebut direncanakan akan

melibatkan semua komponen masyarakat Maluku untuk mencari kesepakatan dan jalan perdamaian guna menyelesaikan konflik Maluku yang berlarut-larut.

Yusuf Kalla menjadi figur yang sangat berperan dalam proses-proses tersebut, Ia melobi secara langsung sejumlah tokoh di Ambon agar segera mencari titik temu untuk berdamai. Langkah ini bagi banyak pihak di Maluku dianggap cukup berani, karena selama konflik berlangsung, kata “damai” merupakan idiom yang sangat berbahaya untuk diucapkan, bisa mengakibatkan seseorang dikucilkan oleh komunitasnya sendiri, bahkan juga “dihabisi”, karena orang tersebut dianggap telah mengkhianati perjuangan kelompoknya. Fenomena yang sama berlaku di kalangan Islam maupun Kristen, namun Yusuf Kalla yang juga seorang pengusaha itu tetap melanjutkan usaha-usahanya secara serius.

Menurut Kalla, hanya ada tiga alternatif dalam penyelesaian konflik Maluku. *Pertama*, konflik akan terus berlangsung dalam bentuk perang gerilya, teror dan pembakaran sehingga berakibat semakin meningkatkan korban jiwa dan penderitaan pada masing-masing kelompok. Demikian juga perekonomian menjadi *mandek* dan pasti menambah kemiskinan. *Kedua*, Polri dan TNI akan bertindak keras dan represif lagi, sehingga menimbulkan korban yang banyak pada awalnya dan selanjutnya menurun tetapi konflik tetap berjalan dengan skala kecil. *Ketiga*, penyelesaian damai dengan masing-masing kelompok duduk berunding dan mencari solusi dan kemudian semua kelompok mematuhi semua hasil perundingan. Dalam kondisi seperti ini, maka para pengungsi dapat pulang ke rumah dan pemerintah akan membantu merehabilitasi sarana umum dan rumah-rumah ibadah.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Panduan Pertemuan untuk Maluku*, 10 Januari 2002

Yusuf Kalla mendesak agar rakyat Maluku memilih alternatif ketiga sebagai pilihan yang paling rasional. Jika itu tidak dilakukan, maka rakyat Maluku akan menjadi bangsa *paria* karena keterbelakangan ekonomi dan kemiskinan akibat konflik. Ia optimis konflik yang menelan ribuan korban tewas dapat diselesaikan dengan baik seperti halnya yang dilakukan dalam konflik poso. Pihaknya bersama Menkopolkam akan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak yang bertikai sebelum menggelar pertemuan.

Langkah Kalla direspon positif berbagai kalangan di Maluku. Namun ada juga yang menolak gagasan perdamaian tersebut. Sebagian lainnya menyayangkan kenapa langkah tersebut baru dilakukan belakangan, padahal korban jiwa dan harta benda sudah sangat banyak. Beberapa pengamat juga mengkritik langkah-langkah Yusuf Kalla. Seperti kritik Jorge Yunus Adicondro, dosen dan pengamat dari Monash University Australia yang mencurigai aksi-aksi Yusuf Kalla ketika itu. Ia menyebut dua hal yang menjadi dasar kecurigaannya. *Pertama*, ia menghawatirkan langkah yang diambil Kalla hanya untuk sekedar mengamankan kondisi pasar dari imperium bisnis Haji Kalla yang dipimpinnya. Menurut Adicondro, konflik yang berlangsung terus menerus di Indonesia Timur, telah mengganggu aktifitas bisnis Kalla Grup yang memang menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar utama dari imperium bisnisnya. *Kedua*, ada agenda tersembunyi (*hidden agenda*) yang berkaitan dengan konsolidasi menuju pemilu yang dikemudian hari mampu mendudukkan duet “pasangan Malino”, SBY dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰⁷ Tentu saja tuduhan tersebut masih sangat lemah karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkrit.

¹⁰⁷ Jorge Yunus Adicondro, *Membedah Kembar Siam Politik dan Ekonomi di Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2002).

D. Prakondisi Perjanjian Malino.

1. Sosialisasi Rencana Perjanjian Malino.

Wacana tentang pelaksanaan sebuah perjanjian perdamaian untuk Maluku seperti yang dilakukan pemerintah untuk Poso semakin menguat. Pada tanggal 17 Januari 2002 Walikota Ambon Yopy Papilaya dan Ketua DPRD Kota Ambon Lucky Watimuri, secara resmi menemui Ketua DPR Akbar Tanjung dan meminta bantuan DPR untuk mendesak pemerintah pusat menyelesaikan konflik Maluku.

Selain pembicaraan dan lobi-lobi formal, pemerintah daerah juga melakukan diskusi dan pembicaraan informal dengan sejumlah tokoh Maluku. Gubernur Maluku Muhammad Saleh Latuconsina yang diminta Yusuf Kalla untuk mengadakan peninjauan dengan sejumlah tokoh Muslim dan Kristen di Ambon menceritakan;

“Ide tentang Malino memang muncul setelah pelaksanaan Perjanjian Malino untuk Poso. Dan saya lihat cukup efektif. Secara diam-diam saya panggil tokoh-tokoh Islam maupun Kristen satu persatu untuk diskusi di kediaman gubernur. Biasanya saya panggil tengah malam untuk menghindari saling curiga antar mereka. Saya bilang bagaimana ini, apa bisah kita lakukan proses perdamaian seperti kasus Poso. Dari hasil diskusi itu saya simpulkan mereka mau, tapi sebagian masih malu-malu untuk mengatakannya secara terus terang. Mungkin mereka takut jangan sampai diketahui massa yang lagi renan bahwa mereka ingin berdamai. Saya mengerti hal itu. Nah pada suatu hari saya di telpon Menko Kesra Yusuf Kalla, beliau bilang “Pak Saleh, apa bisa kita buat proses perdamaian seperti di Poso”. Karena saya sudah pendekatan sebelumnya saya langsung bilang “bisa pak”. Lalu beliau datang ke Ambon dan saya pertemukan beliau dengan tokoh-tokoh dari Muslim maupun Kristen”.¹⁰⁸

Sementara perundingan dipersiapkan, pemerintah pusat yang diwakili Menkokesra Yusuf Kalla dan pemerintah daerah mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat. Pada tanggal 16 Januari 2006, Yusuf Kalla dengan didampingi oleh Menkopolkam dan Kapolri serta staf melakukan pertemuan intensif secara terpisah

¹⁰⁸ Wawancara dengan M. Saleh Latuconsina (mantan gubernur Maluku periode 1997-2002) di Jakarta, Januari 2006

dengan tokoh-tokoh Muslim maupun Kristen di kediaman resmi gubernur Maluku. Pada pagi hari mereka bertemu dengan 150 orang perwakilan Kristen dan siang harinya dilanjutkan pertemuan dengan komunitas Islam dengan jumlah yang sama, masing-masing pertemuan kurang lebih 2 jam 20 menit. Menurut Hasbullah Toisuta,¹⁰⁹ seorang akademisi yang ikut hadir mewakili umat Islam, dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak berbicara dengan luapan emosi yang sangat tinggi, bahkan disertai marah-marah dan caci maki. Masing-masing mengaku dianiaya lawannya dan merasa kalah. Dengan kata-kata yang tidak sama, dapat disimpulkan bahwa mereka sebenarnya sudah lelah berkelahi.

Menkopolkam dan Kapolri kemudian balik ke Jakarta, sedangkan Yusuf Kalla tetap tinggal di Ambon bersama gubernur dan dua orang staf Menkokesra Farid Hussein dan Hamid Awaludin. Menurut Tamrin Elly, pada malam harinya pertemuan diteruskan dengan peserta yang semakin sedikit, masing-masing 10 orang dan diadakan secara terpisah. Hasil pertemuan itu melahirkan kesimpulan bahwa kedua pihak mau berdamai dan akan mensosialisasikan kepada kelompoknya masing-masing.¹¹⁰ Ada yang mengusulkan perundingan damai dilakukan di Ambon karena tempat peristiwanya di Ambon. Adapula yang mengeluhkan besarnya biaya kalau perundingan diselenggarakan di luar Ambon.¹¹¹ Namun menurut Yusuf Kalla, semua perundingan perdamaian diadakan diluar tempat kejadian. Jika perundingan dilakukan di tempat yang sama maka diawatirkan akan mendapat tekanan, demo atau semacamnya dari pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian¹¹². Keesokan harinya pertemuan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Hasbullah Toisuta di Ambon, 21 Desember 2005

¹¹⁰ Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, Maret 2006

¹¹¹ Sinansari Ecep, *op.cit.*, hal. 178

¹¹² Dengan demikian usulan tempat perundingan di Malino Sulawesi Selatan, merupakan petunjuk Yusuf Kalla. Ia juga menyanggupi bahwa pemerintah akan menanggung semua biaya perundingan, yang dikeluhkan para peserta dalam pertemuan tersebut. Secara berguyon Kalla

kembali dilanjutkan dan pesertanya juga diperkecil, tinggal masing-masing lima orang dan mereka setuju untuk bertemu lagi di Makassar dan Malino.

Waktu dan proses sosialisasi kesepakatan-kesepakatan dengan Menkokesra di kediaman gubernur tersebut memang sangat terbatas. Pihak muslim dan Kristen mengaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat kelompoknya. Menurut Tamrin Elly, waktu sosialisasi yang demikian pendek (hanya kurang dari satu bulan) telah menimbulkan salah tafsir di masyarakat bahwa Perjanjian Malino hanya merupakan desain elit dan mencerminkan kuatnya lobi Yusuf Kalla, padahal kami semua terlibat dalam merancang pertemuan tersebut. Jadi Perjanjian Malino dapat dikatakan sebagai inisiatif bersama.¹¹³

Tabel. 6
Isu sampai dengan 26-27 Januari 2002

Persamaan Muslim-Kristen	Hal-hal Khusus (yang menjadi perbedaan)	
	MUSLIM	KRISTEN
1. Sepakat konflik diakhiri dengan dialog	1. Pembicaraan dalam Kerangka NKRI	1. Negara tidak mampu selesaikan konflik
2. Hukum ditegakkan secara adil	2. Usut tuntas RMS/FKM	2. Issue RMS hanya alternatif apabila negara tidak mampu menyelesaikan konflik
3. Pengembalian pengungsi	3. Teliti peristiwa 19 Januari 1999	3. Ada konspirasi Pusat
4. Rehabilitasi ekonomi dan sarana	4. Penyelesaian dengan Jujur	4. Lasykar Jihad yang datang harus dipulangkan
5. Selesaikan situasi internal TNI/POLRI	5. Perbaikan pendidikan agama dan guru	5. Ada islamisasi di beberapa tempat
	6. Lasykar Jihad Mengabdikan pada pendidikan dan kesehatan	6. Tim Investigasi Independen Nasional untuk RMS, LJ dan Peristiwa 19 Januari
	7. Kembalikan hak-hak perdala dari pengungsi	7. Penyelesaian dengan dasar kemanusiaan, hukum, demokrasi dan kebudayaan.
	8. Rehab UNPATTI dengan keseimbangan	8. Asrama Tantui agar dibangun kembali.
	9. SPN Passo diaktifkan di daerah Netral	
	10. Relokasi wilayah pemukiman	

Sumber: Notulen Pertemuan Pendahuluan 26-27 Januari 2002

mengatakan "Paling-paling Biayanya hanya 400 juta. Bandingkan dengan harga Ruko tig lantai yang isinya penuh dengan barang dangangan habis dibakar, harga bisa-bisa melebihi 400 juta". (lihat sinansari Ecep,

¹¹³ Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, 1 Desember 2004.

Pendapat Tamrin sejalan dengan kritik para penentang Malino seperti yang diwakili oleh ketua Iksamuni Irwan Patty¹¹⁴. Ia menyatakan Perjanjian Malino adalah cerminan keinginan Yusuf Kalla semata, karena tidak didasarkan atas proses dialog dan sosialisasi awal yang intens dengan berbagai kelompok di masyarakat. Penentang Malino lainnya, Adnan Hatala (Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Wilayah Maluku), mengatakan mereka tidak bisa berbicara mewakili masyarakat yang menjadi korban konflik, sebab mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan dan mendengar apa saja keinginan masyarakat yang harus diperjuangkan di Malino. Karena itu ia memastikan bahwa aspirasi yang dibawa delegasi Muslim merupakan ekspresi keinginan para tokoh tersebut.¹¹⁵ Kelompok penentang juga mengkritik pemilihan Malino sebagai lokasi pertemuan perdamaian. Menurut mereka, pilihan untuk melaksanakan pertemuan di luar Maluku menunjukkan sebuah fakta bahwa pemerintah sangat takut diawasi secara langsung oleh masyarakat.

2. Penyusunan Delegasi

Salah satu proses yang cukup kritis menuju Perjanjian Malino adalah penyusunan delegasi. Tahapan ini hampir saja menggagalkan berbagai tahapan yang sudah dilalui sebelumnya. Di kelompok Kristen proses rekrutmen anggota delegasi berlangsung lebih cepat, karena memanfaatkan institusi gereja yang telah memiliki sistem organisasi yang rapih. Menurut Pdt. Jhon Ruhlesin, delegasi Kristen menerapkan standar tertentu untuk menetapkan calon anggota delegasi. Delegasi Kristen diisi oleh tokoh-tokoh yang mewakili berbagai kelompok dalam

¹¹⁴ Wawancara dengan Drs. Irwan Patty M.Si di Ambon, 17 Desember 2005.

¹¹⁵ Wawancara dengan Adnan Hatala di Ambon, 12 Desember 2005

komunitas Kristen. Ada tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dan akademisi. Meski demikian, Jhon mengakui masi ada saja yang menolak, khususnya kelompok Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang dari awal tidak setuju dengan rencana Perjanjian Malino. Namun penolakan FKM dinilai tidak terlampau signifikan.¹¹⁶ Tim delegasi Kristen dipimpin oleh Toni Pariela, seorang intelektual dari Universitas Pattimura Ambon dan sebagai penasehat delegasi Kristen adalah Pendeta Dr.I.W.J. Hendriksz, Ketua Sinode Gereja Protstan Maluku (GPM).

Tabel. 7
Daftar Delegasi Kristen ke Malino

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	Pdt. Dr.I.W.J. Hendriksz	Ketua Sinode GPM	Penasihat
2	Drs. Tonny Pariela, MA	Akademisi	Ketua Delegasi
3	Pdt. S.J. Mailoa, STh	Sekum BPH Sinode GPM	Anggota
4	Mgr. P.C. Mandagi, MSc	Uskup Amboina	Anggota
5	Pdt Henry Lolain	Ketua PGPI Maluku	Anggota
6	Pdt. Ricky Hitipeuw	Ketua BPD GBI Maluku	Anggota
7	P. Simon Weneben, Pr	Sek. Keuskupan Amboina	Anggota
8	J. Maspaitella, SH	Ketua FK4M	Anggota
9	Elty Dumatubun	Ketua Presidium PMKRI Ambon	Anggota
10	Raja WARAKA	Ketua Latupati Kec. Amahai	Anggota
11	Raja Emus Dias Ema	Raja Kota Ambon	Anggota
12	Pastor Agus Ulahay, Pr	Crisis Centre Katholik	Anggota
13	Dr. Etta Hendriksz	Ketua Grk. Perempuan Peduli Maluku	Anggota
14	Raja TUHAHA	Ketua Latupati Kec. Saparua	Anggota
15	Prof.Dr. J. Ayawaila, DEA	Akademisi	Anggota
16	J. Leaternia, SH. MH	Akademisi	Anggota
17	Ipi Litaay	Akademisi	Anggota
18	O. Lavalata, SH. MH	Akademisi	Anggota
19	Fileo P. Nova, SH	Akademisi	Anggota
20	Alo Futunanembun	Tokoh Masyarakat	Anggota
21	Edy Hukunala	Tokoh Masyarakat	Anggota
22	Silas Ratuanak	Tokoh Masyarakat	Anggota
23	Sr. Brigita Renyaan, PBHK	Tokoh Perempuan	Anggota
24	Drs. John Ruhulesin, MS	Tokoh Pemuda	Anggota
25	Drs. Ferry Wattimury	Akar Rumpun	Anggota
26	Emang Nikiyuluw	Akar Rumpun	Anggota
27	Femmy Souisa	Akar Rumpun	Anggota
28	Yanes Risambessy	Akar Rumpun	Anggota
29	Elvis Talapessy	Akar Rumpun	Anggota
30	Yongki Siahaya	Akar Rumpun	Anggota
31	Kris Timisela	Akar Rumpun	Anggota
32	Pdt. Jacky Manuputty, STh	Tokoh Agama	Anggota

¹¹⁶ Wawancara dengan Pdt. Jhon Rulesin di Ambon, 21 Desember 2005.

33	Pdt. John Sahalessy	Tokoh Agama	Anggota
34	Benedictus Tawuruturun	Kepala Desa Latvuan	Anggota
35	Hengky Hattu, SH	LSM	Anggota

Sumber: *Providing Perjanjian Malino II*. 2002

Di pihak Islam proses penyusunan delegasi berlangsung alot dan menegangkan. Keinginan untuk menyusun sebuah delegasi yang benar-benar representatif dan mewakili semua elemen di kalangan komunitas Islam bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kesulitan ini cukup terasa karena konflik telah melahirkan banyak tokoh-tokoh informal baru yang merasa memiliki massa pendukung. Mereka adalah orang-orang yang selama konflik berperan dalam memimpin massa di medan pertempuran. Selain itu berbagai organisasi kemasyarakatan juga bermunculan selama konflik, seperti BIM (Badan Imarat Maluku), Iksamuni (Ikatan Keluarga Muslim Nusa Ina), FPIM (Front Pembela Islam Maluku), Satgas Amar Ma'ruf Nahyi Munkar, Ikatan Pemuda Baguala, Pemuda Seram Timur dan sejumlah Panglima Posko dari berbagai etnis dan daerah. Tamrin menolak penilaian yang menyatakan pemilihan terhadap tokoh-tokoh tertentu merupakan pesanan atau titipan dari pihak-pihak tertentu. Untuk penyusunan dan rekrutmen delegasi, pihak Muslim bahkan harus membentuk tim kecil untuk menentukan siapa-siapa yang memenuhi kriteria menjadi anggota delegasi Muslim.

Ada dua hal yang sangat kami perhatikan, *pertama*, anggota delegasi haruslah mereka yang memimpin massa rakyat. *Kedua*, calon anggota delegasi harus yang bisa berkomunikasi sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kelompoknya. Percuma *kan* kalau ada anggota delegasi yang hanya diam saja.¹¹⁷

Standar rekrutmen yang tidak jelas ternyata telah menimbulkan kekecewaan sejumlah tokoh Muslim Maluku terhadap komposisi anggota delegasi Islam. Setelah

¹¹⁷ Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, 1 Desember 2004

tersusun delegasi, Tamrin Elly dipilih sebagai pemimpin delegasi Islam. Tamrin Elly adalah seorang intelektual dan juga pimpinan Badan Imarat Muslim Maluku (BIMM) sebuah ormas yang dibentuk dalam suasana konflik Maluku. Tamrin meminta keihklasan dari calon delegasi untuk kepemimpinannya. Sedangkan sebagai penasehat dipilih Ust. H. A. Wahab Polpoke dari MUI Maluku.

Kelompok yang kecewa dengan penyusunan delegasi Islam belakangan batal berangkat ke Makassar. Mereka antara lain dimotori oleh *ustadz* Muhammad Attamini dan Irwan Patty. Menurut Irwan Patty, kelompoknya sengaja tidak mau ikut ke Malino karena kecewa dengan tahapan-tahapan yang dilalui sebelum ke Makassar. Mereka juga keberatan dengan masuknya beberapa tokoh yang diindikasikan terlibat RMS yang juga ikut ke Malino.¹¹⁸ Namun ketika ditanya tentang nama-nama tokoh yang dimaksud, Irwan enggan menyebut nama-nama mereka. Kelompok lain yang juga menolak Malino dan tidak mau ikut ke Malino adalah Laskar Jihad. Kelompok ini sengaja tidak dilibatkan sejak awal penyusunan delegasi.

Tabel. 8
Daftar Delegasi Islam ke Malino

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ustadz H. A. Wahab Polpoke	Ketua MUI Maluku	Penasehat
2.	Thamrin Ely, SH	Ketua BIMM	Ketua Delegasi
3.	Ir. M. Nasir Rahawarin	Sekjen BIMM	Anggota
4.	Drs. Idrus Tatuhey, MS	Ketua Muhammadiyah Maluku	Anggota
5.	Drs. Yakuba Karepesina	Ketua NU Maluku	Anggota
6.	Lutfi Sanaki, SH	Sek. KAHMI	Anggota
7.	Ir. Hasan Ohorella	Sek. Amar Ma'ruf Nahi Munkar	Anggota
8.	Abd. Aziz Fidmatan, S.Sos	Sekjen FPIM	Anggota
9.	Husein Toisuta	Ketua FPI	Anggota
10.	Daud Sangadji, SE	Ketua BIMM Kota Ambon	Anggota
11.	Yusuf Laisouw	Sek. BIMM Kota Ambon	Anggota
12.	Drs. Hasbullah Toisuta	Akademisi	Anggota
13.	Drs. Hadi Basalamah	Yayasan Al Hilal	Anggota
14.	M. Amin Polanunu	Raja Wakasihu	Anggota
15.	Effendy Latuconsina	Raja Hatuhaha	Anggota
16.	Abd. Razaq Oppier	Raja Liang	Anggota
17.	Abuya Rumakeling	Tokoh Seram Timur	Anggota

¹¹⁸ Wawancara dengan Irwan Patty, 17 Desember 2005

18.	Drs. Abd. Karim Rahayaan	Tokoh Air Salobar	Anggota
19.	Drs. Yunus Serang	Tokoh Banda Ety	Anggota
20.	Yusran Salmon	Tokoh Masyarakat	Anggota
21.	H.A. Latif Hatala	Tokoh Batu Merah	Anggota
22.	Djafar Tuanani	Tokoh Kailolo	Anggota
23.	Taib Madura	Tokoh Masyarakat	Anggota
24.	Husein Tapitapi	Tokoh Talake	Anggota
25.	Mahmud Rengifurwarin, SE	Tokoh Maluku Tenggara	Anggota
26.	Abubakar Hehanussa	RW Airkoning	Anggota
27.	Lapone Kasman Salamun	Posko Celebes Bersatu	Anggota
28.	Hanafi	Posko Baguala	Anggota
29.	Usman Slamet	Posko Kebon Cengkeh	Anggota
30.	Amir Kiat	Pemuda Batumerah	Anggota
31.	Jalil Wasahua	Pemuda Diponegoro	Anggota
32.	Daud Sialana	Pemuda Leihitu	Anggota
33.	Aly Salampessy	Pemuda Air Besar	Anggota
34.	Drs. Ahmad Leawara	Pemuda Salahutu	Anggota
35.	Hasan Usemahu	Pemuda Jalan Baru	Anggota

Sumber: Prosiding Perjanjian Malino II, 2002

3. Pertemuan Pendahuluan.

Titik terang mengenai Perjanjian Malino mulai terlihat dengan adanya kesediaan kedua pihak untuk hadir mengikuti pertemuan pendahuluan di Makassar. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2002. Para mediator yang terdiri dari Yusuf Kalla dan staf serta Gubernur Maluku Saleh Latuconsina melakukan pertemuan secara tertutup dengan kedua delegasi di dua tempat yang berbeda. Pertemuan dengan delegasi Islam dilakukan di Hotel Kenari Makassar, sedangkan pertemuan dengan delegasi Kristen dilakukan di Hotel Losari Makassar. Dalam pertemuan tersebut dijejaki berbagai isu dan agenda yang akan dibicarakan pada perundingan puncak di Malino yang awalnya di rencanakan akan berlangsung pada tanggal 5-7 Februari 2002.

.. Pertemuan pendahuluan ini berhasil mencatat beberapa isu yang akan dibicarakan lebih lanjut pada perundingan puncak di Malino, baik yang sudah

menemukan titik temu maupun yang masi menjadi titik perbedaan. Isu-isu yang telah menemukan titik temu sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri konflik melalui dialog.
2. Pemerintah dan aparat keamanan harus menegakkan hukum secara adil dan tegas.
3. Pemerintah harus sungguh-sungguh mengembalikan pengungsi ke tempat asalnya dengan segala hak-hak keperdataannya.
4. Pemerintah harus mempercepat rehabilitasi ekonomi dan sarana yang sangat dibutuhkan .
5. Menyelesaikan situasi internal TNI/POLRI
6. Membentuk Tim Investigasi Independen Nasional.
7. Proses penyelesaian konflik Maluku akan dilakukan dengan dengan jujur .
8. Perbaikan pendidikan agama dan guru.
9. Rehabilitasi UNPATTI dengan prinsip keadilan rekrutmen sesuai syarat kualitas yang ditetapkan.
10. SPN Passo diaktifkan secara umum.
11. Penyelesaian konflik dilakukan dengan dasar hukum, kemanusiaan, demokrasi dan kebudayaan.
12. Asrama Tantai dan fasilitas TNI/POLRI dikembalikan sesuai dengan fungsinya.
13. Perlu ada penyediaan terhadap pengalihan agama secara paksa yang terjadi di beberapa tempat.¹¹⁹

Seperti yang suda diduga sebelumnya, keberadaan Laskar Jihad dan FKM/RMS masih tetap menjadi bahan perdebatan serius bagi kedua delegasi. Atas saran Tim

¹¹⁹ Prociding Perjanjian Malino untuk MALuku, 11-12 Februari 2002.

Mediator kedua isu tersebut disepakati untuk tetap diajukan dan dibahas secara lebih mendalam dalam pertemuan puncak di Malino. Dengan kata lain untuk sementara waktu kedua pihak bersepakat untuk belum sepakat terhadap kedua isu tersebut.

Hasil pertemuan Makassar merupakan kabar gembira, karena paling tidak kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri konflik dengan dialog dan perundingan. Mengomentari hasil yang cukup menggembirakan itu, Yusuf Kalla mengatakan bahwa walaupun pertemuan pendahuluan belum dapat membahas materi perundingan secara mendalam dan mendetail, namun sudah terdapat kemajuan dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena itu pihaknya akan mendorong agar beberapa isu yang masih diperdebatkan untuk dibicarakan secara lebih mendalam di pertemuan puncak di Malino.¹²⁰

E. Pelaksanaan Perjanjian Malino; dinamika di Meja Perundingan.

1. Metode Perundingan

Untuk melihat dinamika yang terjadi dalam proses perundingan, maka perlu diketahui metode yang digunakan oleh mediator dalam menyerap aspirasi yang disampaikan oleh kedua delegasi. Menurut Faried Husein, metode perundingan sengaja dibuat secara sederhana, agar dapat mengarahkan kedua delegasi untuk menyusun sebuah kesepakatan secara mudah dan cepat.¹²¹

Dalam hal ini mediator menggunakan tiga tahap perundingan atau dialog. Tahapan *pertama* adalah pertemuan antara mediator dengan delegasi Islam. Dalam pertemuan tersebut, mediator mendengarkan dan menerima aspirasi dan harapan yang

¹²⁰ *Suara Maluku*, 1 Februari 2002.

¹²¹ Wawancara dengan Dr. Farid Husein (Mantan Deputy II Menkokesra. Sekarang menjabat sebagai Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI) di Jakarta, 14 Februari 2006

disampaikan dari pihak Islam. *Kedua*, pertemuan antara mediator dengan pihak Kristen untuk mendengarkan usulan dan aspirasi dari delegasi Kristen. *Ketiga*, Pertemuan gabungan yang melibatkan mediator dengan delegasi Islam dan Kristen. Pada pertemuan yang ketiga ini, mediator dan kedua delegasi mencoba melakukan tawar menawar (*bargaining*) dan mencari jalan keluar terhadap aspirasi, usulan dan isu yang disampaikan kedua belah pihak yang belum mendapatkan kesepakatan.¹²² Selain itu akan dibentuk juga komisi-komisi untuk mendalami berbagai aspirasi yang berkembang selama perundingan.

Posisi dan peran mediator dalam hal ini sangat penting dan menentukan, khususnya dalam menjembatani sejumlah perbedaan antara kedua delegasi. Tim Mediator yang berjumlah 10 orang dipimpin langsung oleh Menkokesra Jusuf Kalla. Para mediator bertugas untuk mengatur dan memimpin jalannya pertemuan, mengarahkan pembicaraan, mengambil keputusan bersama, dan melaksanakan hasil-hasil pertemuan.¹²³ Mereka juga bertugas untuk menegosiasikan berbagai usulan dan aspirasi dengan kedua delegasi lainnya sebelum dibawa ke pertemuan gabungan. Sekali lagi peran Yusuf Kalla sebagai ketua mediator sangat menonjol dan strategis. Ia bersama mediator lainnya menjadi penengah bagi sejumlah isu krusial seperti perdebatan tentang FKM/RMS dan Laskar Jihad.

Tabel. 9
Mediator Malino

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. M. Yusuf Kalla	Menkokesra	Ketua Mediator
2	Susilo Bambang Yudhono	Menko POLKAM	Anggota
3	Drs. Da'i Bachtiar, SH	KAPOLRI	Anggota
4	Dr. Ir. M. S Latuconsina	Gubernur Maluku	Anggota

¹²² Prociding Perjanjian Malino, 11-12 Februari 2002

¹²³ S. Sinansari Ecep, *ibid.*, hal. 134

5	Drs. Soenarko D.A	Kapolda Maluku	Anggota
6	Z. Sahubaru, SH	Ketua DPRD Maluku	Anggota
7	H.Z.B. Palaguna	Gubernur Sulsel	Anggota
8	Dra. Paula B. Renyaan	Wakil Gubernur Maluku	Anggota
9	Brigjen. Mustopo	PANGDAM Pattimura	Anggota
10	Drs. M.J. Papilaya MS.	Walikota Ambon	Anggota

Sumber: *Prociding Perjanjian Malino II, 2002*

Selain tim mediator, perundingan di Malino juga dihadiri oleh para peninjau yang terdiri atas beberapa staf ahli dari pemerintah dan beberapa pengamat dan tokoh penting, seperti tokoh agama dan anggota DPR RI. Para peninjau bertugas mengevaluasi seluruh proses pertemuan, memberikan saran-saran ke mediator dalam hal tugas-tugasnya, dan melaksanakan hasil-hasil pertemuan.

Tabel. 10
Peninjau Malino

No	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	Brigjen TNI Setya Purwaka	Staf Ahli Menko POLKAM	
2	Prof. Dr. Din Samsudin	Sekum MUI	
3	Dr. I.P Lambe	Sekum PGI	
4	Irjen Pol. Drs. S.Simatupang	Kabamitekam Polri	
5	Mayjen Bambang Sutejo	Deputi Poldagri	
6	Dr. Mulyani A. Nurhani	Dirjen Depdiknas	
7	Syamsul Huda	Deputi Sisnas	
8	Ir. Joko Kirmanto	Dirjen Perumahan dan Pemukiman	
9	Dr. Hamid Awaludin	Pengamat Politik dan Hukum	
10	Brigjen M. Ansyori Deas, SH.	Water Kasum TNI	
11	Pastor I. Ismantonop	Komisi Hak / PKR KWI	
12	Drs. H. Abduljah Sukarta	Staf Ahli Depag	
13	Arifin Tarigan	Sekjen Watanras	
14	Dr. Farid W. Husein	Deputi II Menkokesra	
15	Dr. Sumaryanti Aryoso SKM	Dijen Bansos	
16	Budi Atmadi	Deputi Bakomas PBP	
17	Muhanto	Dirjen Bina Kesbang Depdagri	
18	Soedirman	Staf Ahli Menko KESRA	
19	Drs. Arif Mudasir Mandan	Komisi I DPRRI	
20	Amir Syarifudin	Staf Khusus Wapres	

Sumber: *Prociding Perjanjian Malino II, 2002*

2. Rancangan Agenda Pertemuan

Berdasarkan hasil pertemuan pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2002 di Makassar, Tim Mediator merumuskan sejumlah isu dan agenda yang

akan didialogkan dengan kedua delegasi dalam perundingan di Malino. Agenda itu merupakan hasil yang dibawa dari pertemuan pendahuluan di Makasar dan dimasukkan ke dalam dua komisi, yaitu Komisi Keamanan dan Hukum serta Komisi Ekonomi dan Sosial Politik.

Komisi Keamanan dan Hukum membicarakan tentang penyerahan senjata, sanksi-sanksi pelanggaran, proses perdamaian di tingkat desa, penarikan kelompok-kelompok milisi sipil (seperti Laskar Jihad, FKM/RMS, Laskar Kristus, dll.) dan Tim Pengawasan dan Monitoring yang akan mengawasi implementasi hasil-hasil kesepakatan. Adapun dalam Komisi Sosial dan Ekonomi, tim mediator menawarkan sejumlah agenda yang berhubungan dengan sosialisasi hasil pertemuan Malino dan rehabilitasi fasilitas umum yang rusak selama konflik di Maluku dan pengembalian pengungsi.¹²⁴ Draft awal ini kemudian ditawarkan kepada peserta untuk didialogkan.

Tabel 11
Usulan Agenda untuk Komisi

Komisi Kemanan dan Hukum	Komisi Sosial dan Ekonomi
1. Penyerahan senjata	1. Sosialisasi hasil Perjanjian Malino.
2. Sosialisasi perdamaian tingkat desa	2. Rehabilitasi sarana perumahan
3. Penarikan kelompok-kelompok milisi sipil	3. Rehabilitasi fasilitas umum
4. Sanksi-sanksi pelanggaran	4. Pengembalian pengungsi
5. Pembentukan Tim Pengawasan	
6. Rekonsiliasi politik	

Sumber: diolah dari berbagai sumber

¹²⁴ *Panduan Pertemuan untuk Maluku*, (Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Januari 2002).

3. Aspirasi dan Usulan Delegasi Islam.

Pada hari Senin tanggal 11 Februari 1999 pukul 10.00-12.00 WITA, pertemuan pertama (pertemuan terpisah) digelar Tim Mediator dengan delegasi Islam yang berjumlah 35 orang. Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh ketua delegasi Islam Tamrin Elly, pihak delegasi Islam menegaskan bahwa konflik Maluku merupakan wujud dari konflik laten warisan kolonialisme di masa lalu. Secara historis konflik keagamaan di Maluku sudah dimulai ketika bersamaan dengan kedatangan kaum penjajah, datang pula Misionaris dan Zending yang membawa misi Kristenisasi. Inilah awal dari konflik keagamaan di Maluku. Karena itu penyelesaian konflik Maluku harus mempertimbangkan kenyataan historis tersebut.¹²⁵

Dalam teks *Pandangan umum umat Islam* dan pidato ketua delegasi Tamrin Elly, terdapat beberapa isu yang dipersoalkan delegasi Islam, yaitu:

1. Menuntut penyediaan terhadap kerusuhan tanggal 19 Januari 1999 yang bertepatan dengan Idul Fitri (Hari Raya Lebaran).
2. Menolak campur tangan politik dari dunia internasional dalam konflik Maluku. Hal ini terkait dengan tawaran pihak kristen yang bermaksud mengusulkan mediator internasional dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
3. Menolak dramatisasi yang berlebihan terhadap Laskar Jihad sebagai pengacau di Ambon. Karena sesungguhnya keberadaan mereka adalah dalam rangka memberikan bantuan sosial bagi komunitas Muslim di Maluku. Fungsi mereka

¹²⁵ Teks *Pandangan Ummat Islam Terhadap Persoalan Konflik Kekerasan di Maluku* (Disampaikan di Pertemuan Malino tanggal 11 Februari 2002)

kurang lebih sama seperti LSM dan lembaga sosial lainnya yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan selama konflik.

4. Menuntut penyediaan terhadap keterlibatan FKM/RMS dalam konflik Maluku.
5. Menuntut penyediaan terhadap keterlibatan TNI/Polri dalam konflik Maluku, baik secara institusi maupun perorangan.
6. Menolak adanya dramatisasi isu Islamisasi terhadap warga Kristen, sebagaimana dituduhkan oleh komunitas Kristen Maluku.¹²⁶

Delegasi Islam juga menegaskan bahwa proses perdamaian di Maluku sangat ditentukan oleh keberhasilan para pihak untuk menghentikan konflik. Karena itu perjanjian Malino harus mampu mengikat semua pihak agar taat kepada hal-hal yang disepakati. Setelah pandangan umum yang disampaikan oleh ketua delegasi Islam Tamrin Elly, mediator memberikan kesempatan kepada peserta dari delegasi Islam untuk memberikan pandangannya melengkapi aspirasi yang telah disampaikan oleh pimpinan delegasi.

Seorang peserta bernama Natsir Rahawarin dengan penuh emosional berkata,

Setelah peristiwa 19 Januari 1999, enam bulan kemudian kalangan Islam mampu membalas kejahatan serupa, sudah mencapai derajat kesetimpalan itu, bahkan mungkin saja melampaui kejahatan yang telah ditimpahkan kepada umat Islam. Karena itu, umat Islam perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa hari ini kita datang untuk menghentikan kekerasan itu. Yang kedua, kami ingin hari ini tidak berhenti pada kekerasan semata, tetapi mari kita catat, bahwa dalam rangka melanggengkan atau memelihara penghentian kekerasan itu, maka ada tuntunan Al-Qur'an bagaimana syarat agar penghentian kekerasan itu dapat lestari. Agama itu hanya untuk Allah. Teori lain menegaskan, orang Kristen dituntut untuk mencari Tuhannya, bukan untuk kepentingan politis apalagi separatis, maka dengan segala senang hati kami menghentikan kekerasan. Kami juga perlu mengingatkan agar Universitas Pattimura harus segera dibenahi agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif di sana. Karena selama ini Unpatti adalah salah satu produsen sumber konflik Maluku".¹²⁷

¹²⁶ *ibid*

¹²⁷ Prociding Perjanjian Malino untuk Maluku, 11-12 Februari 2002

Peserta lain bernama Abubakar Hehanusa juga menyatakan pendapatnya,

Saya minta kepada mediator untuk segera merehabilitasi mental orang-orang yang terlibat dalam konflik. Hal ini harus diutamakan dalam upaya menghentikan kekerasan. Pemerintah bisa menggunakan organisasi-organisasi keagamaan yang kebetulan juga hadir pada pertemuan kali ini, sehingga dapat menyentuh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.¹²⁸

Setelah Abubakar Hehanusa, seorang peserta bernama Idrus Tatuhey yang juga ketua Muhammadiyah Maluku juga berbicara.

Sebelum kita membicarakan hal-hal yang sifatnya teknis, kita harus sepakat dulu untuk menghentikan konflik ini. Bagaimanapun apa yang akan dibangun setelah ini, kalau tidak kita hentikan konflik, percuma saja. Saya mengajak kepada semua yang hadir di tempat ini untuk mengatakan, "Kita akhiri konflik." Insya Allah, akhirnya damai akan tercipta, sesuatu yang mustahil kita dapat memperbaiki sarana ini dan itu, kalau konflik masih juga berlangsung.¹²⁹

Selain ketiga orang itu masih ada beberapa orang lagi yang menyampaikan pendapatnya. Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan pada intinya mereka semua menginginkan agar segera dilakukan upaya untuk menghentikan konflik. Nampaknya para peserta menghindari penggunaan kata-kata damai. Hal ini menurut penuturan Hasbullah Toisuta, perdamaian hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak telah sepakat menghentikan konflik dan bersepakat terhadap sejumlah isu mendasar.¹³⁰ Pernyataan tersebut sebenarnya hanya sebuah *eufemisme* diplomasi semata, alasan yang sebenarnya adalah karena semua delegasi masih dipengaruhi kondisi lokal di Ambon yang sudah lelah dengan konflik namun masih malu-malu untuk mengatakan berdamai. Peninjau yang mengikuti pertemuan tersebut, Hamid Awaludin, mengatakan kunci persoalan memang berhentinya konflik, dan kedua pihak semakin kuat menunjukkan sikap tersebut. Menurut Hamid, hal ini merupakan pertanda bagus karena

¹²⁸ *ibid*

¹²⁹ *ibid*.

¹³⁰ Wawancara dengan Hsbullet Toisuta di Ambon, 21 Desember 2005

dengan berhentinya konflik maka perdamaian dapat diwujudkan.¹³¹ Din Syamsudin, Sekjen MUI yang juga sebagai peninjau, mengaku bangga umat Islam memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perdamaian.¹³²

4. Aspirasi dan Usulan Delegasi Kristen.

Pertemuan ke-2 antara Tim Mediator dengan Delegasi Kristen dimulai tanggal 11 Februari pukul 14.30 dan berakhir pukul 16.15. Mediator yang dipimpin langsung Yusuf Kalla melakukan pertemuan dengan pihak delegasi Kristen. Dalam pandangan umum yang diberi judul "*Visi Masyarakat Kristen Maluku tentang Penyelesaian Konflik*" yang dibacakan ketua delegasi Tony Pariela, delegasi Kristen menyampaikan aspirasinya untuk menyelesaikan konflik Maluku secara komprehensif. Menurut delegasi Kristen, dialog yang sedang dilakukan merupakan jalan yang sangat beradab, karena itu perundingan Malino ini harus diletakkan pada perjuangan moral kemanusiaan, sikap saling percaya, keterbukaan, kejujuran dan ketulusan serta semangat persaudaraan dan kekeluargaan. Pelaksanaan perundingan tersebut harus diletakkan dalam enam perspektif, yaitu perspektif kemanusiaan, perspektif solidaritas dan keadilan, perspektif persamaan hak dan keadilan, perspektif toleransi dan kebenaran, perspektif revitalisasi semangat, jiwa dan wawasan kebangsaan dan perspektif saling memaafkan.¹³³

Di akhir sambutannya Toni Pariela menyatakan bahwa delegasi Kristen sepakat menghentikan konflik dan tindak kekerasan di Maluku.

Kami sepakat menghentikan konflik dan tindak kekerasan. Karena ini merupakan prasyarat nasional untuk menciptakan proses-proses lebih jauh

¹³¹ *Detikcom*, 11 Februari 2002.

¹³² *ibid*

¹³³ *Visi Masyarakat Kristen Maluku tentang Penyelesaian Konflik Maluku* (29 Januari 2002)

seperti proses penegakan hukum, proses pemberian sanksi dan proses menuju perdamaian itu sendiri.¹³⁴

Setelah Toni Pariela menyampaikan pandangan umum delegasi Kristen, selanjutnya mediator juga mempersilahkan anggota delegasi yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Pendeta Jhon Ruhulesin lalu berbicara,

Aspek pertama yang harus kita lihat dalam pengalaman selama tiga tahun konflik Maluku, konflik ini adalah salah satu kegagalan kita untuk membangun semangat kebhinekaan. Karena itu, konflik ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bangsa ini bila tidak menghargai kebhinekaan cepat atau lambat akan runtuh. Kedua, saya mesti jujur mengatakan bahwa selama ini kita mengalami distorsi. Kelambanan kita menangani konflik adalah karena persoalan-persoalan di dalam tubuh TNI-Polri. Saya minta untuk menjadikan kesepakatan ini sebagai kesepakatan terakhir.¹³⁵

Peserta lain bernama Ipi Litaay mempertegas bahwa konflik Maluku pada dasarnya bukan merupakan konflik agama, namun konflik yang mempolitisasi isu-isu keagamaan.

Menurut kami konflik Maluku bukanlah konflik Agama, tetapi agama memang dipolitisasi. Dari awal agama dipakai untuk menghancurkan kami. Setiap hari sebetulnya antara umat Islam dan Kristen di Maluku bertemu, kalau toh terhalang itu karena dibuat sekat-sekat supaya jangan saling menghancurkan karena adanya provokasi dari para provokator dan para intelektual di Ibu Kota.¹³⁶

Seorang peserta delegasi Kristen bernama Edy Hukunala mempersoalkan stigmatisasi RMS bagi semua orang Kristen di Maluku, sehingga orang-orang Kristen di Maluku dipersepsikan sebagai pemberontak dan penghianat bangsa.

Bagi kami cap RMS yang telah diberikan selama konflik sangat menyakitkan dan telah menimbulkan korban daripada cap PKI. Di Maluku, orang yang dicap RMS habis riwayat hidupnya. Dan anak-anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa, mereka dianggap sebagai penghianat.¹³⁷

¹³⁴ Prociding Perjanjian Malino untuk Maluku. 11-12 Februari 2002

¹³⁵ *ibid.*

¹³⁶ *ibid.*

¹³⁷ *ibid.*

Henky Hatu yang mendapat kesempatan bicara berikutnya mempersoalkan keberadaan Laskar Jihad.

Soal sipil bersenjata menurut informasi yang saya dapat, ada sipil bersenjata yang memegang senjata untuk membela diri dan ada sipil bersenjata untuk melakukan penyerangan dan perusakan. Dalam realitas dilapangan, kelompok yang terakhir ini banyak menggunakan cara-cara dan simbol militer. Hal ini harus dibersihkan dan orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan di Maluku harus segera meninggalkan tanah Maluku.¹³⁸

Delegasi Kristen juga menyampaikan sejumlah agenda perundingan yang dijabarkan dalam beberapa aspek yang meliputi; aspek keamanan, sosial ekonomi, hukum dan HAM. Beberapa aspek itu diuraikan secara terperinci dalam beberapa agenda aksi yang akan dibicarakan secara intensif dalam proses perundingan. Penjabaran agenda tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel. 12
Penjabaran Agenda Perundingan (Usulan Delegasi Kristen)

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR DETERMINAN
I. Keamanan		
A. Penghentian Konflik Fisik	- Kesepakatan tidak menyerang - Tidak Melakukan Penembakan - Tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun	- Pembentukan pos patroli terpadu, TNI, Polri - Siskamling terpadu plus - Tindak tegas para perusuh
B. Non Fisik	- Penghentian segala bentuk provokasi - Eliminasi pembusukan ke/dari dalam	- Tindakan tegas terhadap sumber-sumber-sumber provokasi (media massa + mimbar agama, dll) - Penguatan Internal/eksternal komunitas
C. Penyerahan Senjata	- Kesepakatan penyerahan senjata dalam jangka waktu tertentu	- Sosialisasi - Jaminan Kekebalan dari Negara - Tim Penampung terpadu
D. Peran TNI/Polri	- Netralitas dan profesionalisme	- Pembentukan Tim pemantau/pengawas
E. Pos Patroli Terpadu Plus	- Pembentukan Pos Patroli terpadu plus di wilayah Penyekat, fasilitas publik dan jalur transportasi	- Keseriusan TNI/Polri - Dukungan aktif masyarakat
F. Lasykar Jihad & Lain-lain Lasykar	- Mengeleminir gerakan radikal dan pemulangan ke daerah masing-masing	- Sikap tegas Pemerintah - Sikap tegas TNI/Polri

¹³⁸ *ibid.*

II. Sosial Ekonomi A. Pengembalian Pengungsi	- Kepastian waktu pengembalian pengungsi ke tempat asal dengan semua hak keperdataan - Jaminan Keamanan optimal - Jaminan Kesejahteraan selama 6 bulan - Pemberdayaan ekonomi pengungsi	- Tanggung jawab negara termasuk pemberian kompensasi - Kesiapan TNI/Polri - Dukungan masyarakat sekitar - Penyediaan modal usaha dan pendampingan
B. Rehabilitasi Fisik	- Pembangunan kembali rumah penduduk, rumah ibadah dan fasilitas umum/sosial - Revitalisasi korban cacat akibat konflik - Pemberdayaan ekonomi korban cacat	- Ketersediaan dana yang memadai - Kelancaran dan keamanan pasokan bahan-bahan bangunan - Sterilisasi wilayah pemukiman dan sekitarnya - Standar rumah yang memadai - Dana, sarana dan pelayanan dari negara - Penyediaan modal usaha dan pendampingan
C. Rehabilitasi Non Fisik	- Penanganan secara terencana kerusakan mental (traumatis)	- Tersedia Trauma center yang komprehensif dan terpadu
F. Rehabilitasi sosial/kerukunan	- Terbangunnya kepercayaan di antara warga kedua komunitas.	- Revitalisasi lembaga adat melalui Perda - Revitalisasi perilaku keberagamaan - Pengakuan terhadap realitas Kemajemukan
III. Hukum A. Supremasi Hukum	- Penyelesaian masalah sesuai prosedur huku yang berkeadilan - Tertib Kehidupan masyarakat - Pencarian orang hilang - Penyelesaian pemindahan agama pemaksaan - Penyelesaian kepemilikan hak tanah/rumah individual. - Tindak tegas laskar Jihad dan lain-lain laskar. - Tindak Tegas kebenaran isu RMS	- Tersedianya Sarana dan prasarana seperti SDM - Jaminan keamanan bagi aparat hukum dan perlindungan saksi - Penegakan hukum apada tindakan kriminal murni. - Penegakan sanksi secara konsekwen dan konsisten. - Proses penyadaran masyarakat - Penertiban lalu lintas dan pasar kaget - Penertiban penduduk - Kesiapan Polri menindaklanjuti Laporan masyarakat - Kepastian jaminan pemerintah - Jaminan kebebasan dan perlindungan kehidupan beragama. - Kepastian jaminan pemerintah - Ganti rugi menurut harga dasar tanah - Perlunya tim taksiran - Sikap tegas Pemerintah - Konsistensi penegak hukum oleh aparat - Sikap tegas pemerintah

		- Konsistensi penegakan hukum oleh aparat
IV. HAM	- Penyelesaian Pelanggaran HAM - Mengungkap akar masalah sejak 19 Januari 1999	- Pembentukan Komisi Penyelidik Independen. - Peradilan Ad Hoc HAM Maluku - Pembentukan Komda HAM Maluku - Tanggung Jawab Negara - Bentuk Tim Investigasi Independen - Sikap Tegas aparat hukum.
V. SOSIAL POLITIK A. Penyelesaian Sosial Politik	- Pembentukan kesadaran berpolitik secara dmokratis - Pengembangan semangat kebangsaan dan keberamaan - Refungsionalisasi lembaga-lembaga adat. - Mendorong perhatian dalam rangka <i>special treatment</i> untuk pemulihan Maluku.	- Berfungsinya lembaga-lembaga politik secara demokratis - Revitalisasi dan redevinisi jiwa wawsan semangat kebangsaan dan keberagaan. - Mempercepat produk peraturan daerah mengenai refungsionalisasi lembaga adat - Dukungan politik yang konsisten.

Sumber: *Visi-misi masyarakat Kristen untuk Malino, 2002*

Pihak delegasi Kristen terlihat lebih siap dalam menyiapkan berbagai tawaran dan usulan. Bahkan sampai ke usulan teknis yang mesti dilakukan oleh kedua belah pihak dan pemerintah setelah Perjanjian Malino. Menurut Toni Pariela, penjabaran yang sangat mendetail tersebut karena belajar dari kegagalan pertemuan-pertemuan perdamaian sebelumnya.

Hasil perdamaian sangat dipengaruhi oleh implementasi di lapangan. Sementara indikator yang dipakai untuk menilai pelaksanaan perdamaian di lapangan tidak ada. Akhirnya masing-masing pihak, demikian juga pemerintah, cenderung berjalan sendiri-sendiri.¹³⁹

Selain sejumlah agenda yang dijabarkan di atas, Delegasi Kristen juga merekomendasikan secara khusus beberapa poin penting untuk dibicarakan dalam perundingan, yaitu:

- 1) Segera merelokalisasi pengungsi dan mempertimbangkan pemberian fasilitas yang memadai

- 2) Pemerintah harus mempertimbangkan pemberian dana khusus dalam rangka pembangunan kembali Maluku pasca konflik.
- 3) Dalam rangka meminimalkan berbagai potensi konflik, maka pemerintah didesak untuk segera mengklarifikasi beberapa isu sentral yang sangat mengganggu, seperti i) tuduhan bahwa umat Kristen yang memulai kerusuhan pada tanggal 19 Januari 1999, ii) isu Republik Maluku Selatan (RMS) yang sangat merugikan umat Kristen di Maluku, dan iii) keberadaan Laskar Jihad yang berperan dalam meningkatkan ketegangan di Maluku iii). Adanya isu tentang keberadaan jaringan terorisme di Maluku dengan melibatkan jaringan *Al-Qaeda*.

Atas berbagai usulan dan aspirasi dari kedua delegasi yang disampaikan secara terpisah, mediator kemudian mencatatnya dan berjanji akan membagikan usulan tersebut kepada masing-masing delegasi untuk segera dipelajari dan diresponi. Hal tersebut akan dilakukan sebelum pelaksanaan pertemuan gabungan pada keesokan harinya.

Segera setelah itu, mediator membagikan daftar usulan dari kedua belah pihak kepada masing-masing delegasi dan meminta untuk diresponi dan seterusnya memberikan tawaran pemecahan atau solusi. Penulis berhasil mendapatkan arsip yang dimiliki delegasi Islam, namun sayang tidak ditemukan arsip tawaran pemecahan delegasi Kristen. Dari daftar tersebut ada beberapa usulan yang disepakati, dikurangi, diperbaiki ataupun ditolak oleh masing-masing delegasi.

¹³⁹ Wawancara dengan Toni Pariela via telepon di Ambon. 24 Desember 2005

Tabel. 13
Usulan Pemecahan Delegasi Islam

No	Materi	Tuntutan D. Kristen	Tuntutan Islam	Tawaran Pemecahan
1	Laskar Jihad	Penjahat Negara/ minta keluar	Diperlukan & terbuka bagi sesama warga negara	Ite pekerja sosial
2	Lasykar Kristus	Tidak ada	Ada dan tindak tegas	Tetap
3	Separatis FKM/RMS	Jangan dikembangkan karena Kristen bukan RMS	Ada Eksistensi RMS	Tetap
4	PBB	Masuk ke Maluku sebagai alternatif terakhir	Menolak	Tetap
4	TNI / POLRI	Menolak TNI AD yang di BKO dan ganti Polri	Menerima TNI AD, menolak dikotomi TNI Polri	- Perlu netralitas dan profesionalisme - Rotasi penugasan 3-4 bulan - Gelar kekuatan merata
5	Proses Hukum	Harus berjalan	Harus berjalan	Tetap
6	Komisi Kebenaran	Tingkat PBB	Tingkat Nasional	Tetap
7	Gubernur	Diganti	Dipertahankan	Kembalikan pada konstitusi
8	Pangdam	Diganti	-	Dipertahankan/toleran
9	Tugas Pemerintah	Gagal	Berhasil/Mendukung	- Berhasil di tingkat Propinsi - Gagal di tingkat Kab/kota
10	Darurat Sipil	Dievaluasi	Dipertahankan	Tetap
11	Perbaikan sosial ekonomi	Perlu	Perlu	Tetap
12	Adat / Kultural	Pendekatan Adat Budaya/ revitalisasi struktur dan norma desa-desa adat	Perlu revitalisasi peran adat.	Tetap
13	Peranan Pokja	Menerima	Menerima untuk pra dialog	Tetap

Sumber: Data Delegasi Muslim Maluku, 2002

Dari data tersebut terlihat ada beberapa hal yang masih mengganjal bagi delegasi Islam, seperti penolakan terhadap pergantian gubernur yang dianggap tidak relevan, penolakan terhadap komisi kebenaran dari PBB dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, bagi pihak muslim dianggap berhasil sedangkan pihak Kristen mengatakan gagal. Demikian pula dengan tuduhan bahwa keberadaan RMS adalah ada dan real di Maluku. Sayang data yang sama dari delegasi Kristen tidak berhasil diperoleh selama penelitian ini. Namun menurut Pendeta Jhon Ruhulesin,

sebelum masuk pada pleno berikutnya kedua delegasi sudah sepakat terhadap hampir semua masalah kecuali keberatan tentang keberadaan Laskar Jihad dan isu FKM/RMS.¹⁴⁰

5. Dinamika Pertemuan Hari Kedua.

Perundingan Malino hari kedua mempertemukan kedua delegasi dengan Tim Mediator atau pertemuan pertama yang mempertemukan kedua delegasi secara langsung. Pertemuan ini digelar pukul 09.30 Selasa tanggal 12 Februari 2002. Sebelumnya, sejak dari Ambon, kedua delegasi belum pernah dipertemukan secara langsung dalam sebuah pertemuan resmi, bahkan tempat menginapnya pun ditempatkan secara berbeda. Banyak yang memprediksi pertemuan segitiga ini akan diwarnai dengan hujan interupsi. Ternyata hal itu tidak terjadi, bahkan pertemuan berjalan dengan cukup lancar. Menurut Tamrin, di pertemuan kedua ini tidak banyak terjadi perdebatan, karena kedua delegasi sudah banyak memiliki kesepahaman terhadap berbagai isu yang dibawa oleh masing-masing delegasi.¹⁴¹

Meski demikian, kedua delegasi yang diwakili oleh ketua delegasi masing-masing masih tetap menyoroti keberadaan sipil bersenjata di Maluku. Kalangan Kristen menilai sipil bersenjata itu adalah Laskar Jihad dan mereka mendesak agar Laskar Jihad ini segera dikeluarkan dari Maluku. Tetapi permintaan ini ditolak oleh delegasi Islam. Mereka malah meminta agar RMS yang harus diselidiki. Menurut Tamrin Elly pertemuan ini lebih banyak diisi oleh perdebatan tentang dua masalah krusial tersebut.¹⁴²

¹⁴⁰Wawancara dengan Pendeta Jhon Ruhlesin di Ambon, Desember 2005

¹⁴¹ Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, Maret 2006

¹⁴² *ibid.*

Pertemuan ini menyetujui usulan Tim Mediator untuk membentuk dua komisi yakni Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum dan Komisi Sosial Ekonomi. Anggota komisi bersama ketua-ketua delegasi dan Tim Mediator akan menyusun agenda-agenda aksi pasca perjanjian Malino.

6. Tarik Menarik Dua Isu Krusial; Laskar Jihad dan FKM/RMS

Dalam daftar kesepakatan yang diperoleh, kedua delegasi sepakat terhadap berbagai isu yang disampaikan oleh delegasi lainnya. Secara umum mereka sepakat untuk menghentikan konflik dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan pengungsi serta membangun sarana dan prasarana yang hancur selama konflik. Namun keberadaan Laskar Jihad dan FKM/RMS masih belum menemukan titik temu. Pihak Kristen tetap meminta agar Laskar Jihad yang telah mengobarkan api peperangan di Maluku harus ditindak tegas dan di usir dari Maluku sedangkan pihak Islam justru meminta agar pemerintah bertindak tegas para aktifis RMS dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap gerakan-gerakan separatisme di Maluku. Berikut akan dideskripsikan secara singkat perdebatan kedua delegasi terhadap kedua isu tersebut.

a. Tentang Laskar Jihad.

Laskar Jihad dibentuk dan dideklarasikan dalam sebuah *Tabliq Akbar* yang dikoordinir oleh Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ) pada tanggal 6 April 2000 di Stadion Utama Senayan Jakarta. Rombongan pertama Laskar Jihad tiba di Ambon pada tanggal 30 april 2000 dengan jumlah sukrelawan berjumlah 119 orang. Dalam siaran pers yang diadakan oleh Laskar Jihad disebutkan bahwa keberangkatan mereka ke Ambon adalah untuk membantu umat Islam yang sedang dizalimi dan

ditindas oleh anasir Kristen RMS. Mereka juga kecewa dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang tidak mampu menghentikan pembantaian di Ambon, sehingga umat Islam banyak yang meninggal dunia. Menurut pihak kepolisian, mereka tidak dapat ditahan karena dalam pemeriksaan tidak diketemukan adanya barang bawaan yang membahayakan atau mencurigakan.¹⁴³

Bagi delegasi Kristen, kehadiran Laskar Jihad di Maluku secara nyata telah memperparah situasi konflik. Sebab kehadiran mereka pada dasarnya adalah untuk memerangi umat Kristen Maluku dan bukan menyerang RMS ataupun gerakan separatis sebagaimana yang sering diargumentasikan. Salah seorang peserta delegasi Kristen bernama Jecky Manuputy berkata:

“Pemerintah harus bertanggung jawab karena telah membiarkan mobilisasi Laskar Jihad memasuki wilayah Maluku tanpa disertai upaya pencegahan yang serius dan nyata. Selama berada di Ambon, Laskar Jihad telah terlibat dalam berbagai kerusuhan bahkan berani menerapkan hukum lain di luar hukum positif yang berlaku”. Seperti pelaksanaan hukum rajam yang pernah dipraktekkan di Ambon. Mereka juga ikut menyebarkan sentimen keagamaan di kalangan masyarakat dan melakukan Islamisasi paksa terhadap beberapa wilayah di Maluku.¹⁴⁴

Pandangan Jecky, sejalan dengan pandangan umum delegasi Kristen, yang menyebutkan bahwa disamping meminta klarifikasi pemerintah atas kehadiran Laskar Jihad, mereka juga harus segera ditarik atau dipaksa keluar (diusir) dari seluruh wilayah Maluku.¹⁴⁵ Bahkan delegasi Kristen mensinyalir ada indikasi keterkaitan Laskar Jihad dengan jaringan terorisme internasional atau *Alqaidah*. Tuduhan ini didukung oleh fakta bahwa pernah ada tujuh orang berkebangsaan Afganistan yang mendatangi

¹⁴³ Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan*, op.cit., hal. 181.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Pendeta Jacky Manuputy di Ambon, 21 Desember 2005

¹⁴⁵ *Teks Visi misi Masyarakat Kristen tentang Penyelesaian Konflik*.

Maluku dan ketika dimintai pasportnya oleh petugas di bandara Pattimura Ambon mereka menolak menyerahkan.¹⁴⁶

Namun bagi delegasi Islam, tuduhan Delegasi Kristen itu tidak sepenuhnya benar, karena Laskar Jihad datang ke Ambon setelah konflik di Ambon dan Maluku berlangsung hampir satu tahun. Itu artinya Laskar Jihad bukan merupakan penyebab konflik Maluku, tetapi hanya sekedar akibat dari konflik. Laskar Jihad tidak akan datang ke Maluku, bila tidak terjadi konflik. Awalnya mereka datang sebagai pekerja sosial, membangun sekolah-sekolah darurat, Poliklinik dan memberikan bantuan sandang dan pangan kepada umat Islam di Maluku. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Tamrin Elly.

Kami tidak bisa memenuhi permintaan agar memulangkan Laskar Jihad. Mereka suda berada di Maluku sejak Mei dua tahun lalu. Mereka sangat membantu warga seperti memperbaiki sarana umum, memberikan pendidikan dan memperbaiki jalan-jalan. Mereka tidak berbeda dengan LSM lain yang masuk ke Maluku. Bahwa *dorang* (Laskar Jihad) juga terlihat di medan-medan pertempuran, itu hanyalah merupakan sebuah konsekwensi dari konflik.¹⁴⁷

Karena itu delegasi Islam keberatan untuk memulangkan Laskar Jihad. Tentang keberatan tersebut delegasi Kristen bahkan harus melakukan rapat tertutup selama satu jam di kamar 101 Celebes Vila, tempat mereka menginap selama pertemuan. Hasil pertemuan tersebut mereka tetap menuntut pemulangan Laskar Jihad sebagai prasyarat perdamaian.

b. Tentang FKM/RMS.

Isu kedua yang menimbulkan tarik menarik di antara kedua kubu adalah keberadaan kelompok FKM/RMS. Seperti diketahui Front Kedauletan Maluku (FKM), adalah kelompok yang dideklarasikan di Ambon pada tanggal 18 Desember 2000.

¹⁴⁶ *ibid.*,

Duduk sebagai pimpinan eksekutif adalah Dr. Alex Manuputty¹⁴⁸ yang bertindak sebagai Ketua Dewan Eksekutif dan Moses Tuanakota sebagai Sekretaris Jenderal. Bagi komunitas Islam, FKM merupakan reinkarnasi dari RMS di Maluku, keduanya tidak bisa dipisahkan. FKM harus dianggap sebagai gerakan separatis karena mendukung cita-cita RMS untuk memperjuangkan masyarakat Maluku yang lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini didukung oleh fakta bahwa dalam berbagai pernyataan dan aksi-aksi politiknya, FKM selalu memunculkan ide-ide tentang kemerdekaan Maluku. Demikian pula ketika aparat keamanan merazia kediaman sejumlah tokoh FKM ditemukan berbagai dokumen yang berisi tentang rencana FKM untuk membentuk negara sendiri. Setiap bulan April FKM juga selalu memperingati hari jadi RMS yang jatuh pada tanggal 25 April 1950, walaupun upacara serimonial itu selalu ditentang keras warga muslim dan aparat kemanan.

Anggapan dan tuduhan delegasi Islam ditepis delegasi Kristen. Pihak delegasi Kristen mensinyalir adanya penggiringan opini yang seakan-akan menempatkan umat Kristen Maluku sama dengan RMS. Sebutan "Kristen RMS" merupakan bikinan pihak tertentu untuk memperhadapkan umat Kristen dengan negara. Pihak delegasi Kristen justru menolak wacana separatisme yang diperjuangkan FKM, namun delegasi Kristen mengajak semua pihak untuk memandang fenomena FKM secara jujur dan bijaksana. Bagi komunitas Kristen FKM merupakan gerakan yang muncul sebagai usaha untuk

¹⁴⁷ *Republika*, 15 Mei 2002, Lihat juga teks Pandangan Umat Islam, *op.cit.*.

¹⁴⁸ Alex Manuputy, sebenarnya adalah seorang dokter pemerintah yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala unit Transfusi darah PMI Ambon. Ia berasal dari Serui Papua yang secara terus terang mengatakan bahwa FKM memiliki perwakilan di Amerika, Asia, Eropa dan Afrika. Ia mengatakan bahwa pendukung FKM ada sekitar puluhan ribu orang. Target penyerangan FKM adalah menegakkan Hak asasi dan meluruskan sejarah Maluku. Dikatakannya RMS berdiri pada 25 April 1950, jadi menurutnya RMS lebih dulu berdiri ketimbang negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Alex menolak FKM sarang Kristen karena ada beberapa pejabat FKM adalah orang Salami (Islam) seperti Maur Karepesina, Zacky Zakarias pengurus FKM Jakarta dan Hamim Sialana Ketua FKM New York. Alex banyak menyamakan FKM dengan GAM dan juga OPM. *Lihat, Tempo* 2 Juni 2000.

menggugat peran negara yang dianggap gagal dalam menghentikan konflik dan pembantaian. Artinya keberadaan FKM harus dilihat sebagai protes atas ketidakadilan dan kegagalan negara dalam menangani konflik Maluku. Dengan kata lain kehadiran FKM merupakan ekses yang ditimbulkan oleh konflik.¹⁴⁹ Karena itulah Alex Manuputy pada awalnya menolak kaitan antara FKM dengan RMS. Namun temuan-temuan senjata serta berbagai aktifitas FKM termasuk usahanya untuk memperingati hari jadi RMS pada setiap tanggal 25 April, walaupun sebelumnya dilarang keras aparat keamanan, mendorong kecurigaan dari komunitas Muslim bahwa FKM adalah sayap politik RMS.

Dalam Perjanjian Malino terlihat sekali keinginan delegasi Islam agar pemerintah menyatakan FKM sebagai organisasi terlarang dan segera menindak para tokohnya. Karena aktifitas FKM sudah sangat meresahkan, mereka menggugat eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama delegasi Islam juga meminta agar delegasi Kristen mengeluarkan pernyataan untuk mengecam keberadaan FKM. Sesuatu yang kemudian ditolak delegasi Kristen, karena dianggap kurang beralasan.

G. Kesepakatan di Akhir Perundingan.

Setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, dengan diselingi debat yang cukup memanas tentang keberadaan Laskar Jihad dan FKM/RMS akhirnya pertemuan diistirahatkan untuk makan siang dan lobi antara Tim Mediator dan kedua delegasi, khususnya tentang dua isu krusial yang belum menemukan kata sepakat. Menurut keterangan Tamrin Elly, ketua-ketua delegasi dan penasehat serta beberapa tokoh dari

¹⁴⁹ Wawancara dengan Jacky Manuputy di Ambon. 20 Desember 2005

kedua delegasi sempat bertemu di sela acara reha itu, untuk melakukan lobi dan negosiasi.

Dalam lobi antara mediator dan pimpinan delegasi dicapai beberapa kesepakatan. *Pertama*, pihak delegasi Kristen memperlunak sikapnya dan menyetujui adanya rumusan yang menyebutkan penolakan dan pelarangan terhadap RMS. Hal ini lalu dimasukkan kedalam butir tiga yang menyatakan tekad untuk menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI antara lain RMS. *Kedua*, delegasi Islam juga memperlunak sikapnya dan menyetujui adanya rumusan yang menyatakan larangan terhadap laskar bersenjata di Maluku termasuk Laskar Jihad. Pernyataan tersebut dituangkan kedalam butir kelima yang berbunyi segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku di larang dan wajib menyerahkan senjata. Bagi pihak-pihak luar yang menagacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku.

Kompromi berhasil dicapai karena adanya keinginan yang kuat dari kedua delegasi untuk segera menghentikan konflik, sehingga jika perdebatan tentang FKM dan Laskar Jihad diteruskan maka dapat menggagalkan semua rencana untuk mengakhiri konflik. Selain itu, pemerintah menjanjikan kepada kedua delegasi untuk segera membentuk Tim Investigasi Independen Nasional yang bertugas untuk mengusut tuntas berbagai isu konflik yang cukup sensitif dan diperdebatkan selama Perjanjian Malino, yakni peristiwa 19 Januari 1999, FKM/RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus serta isu tentang pengalihan agama secara paksa. Kompromi dan kesepakatan tersebut lalu dianggap sebagai *win-win solution* dari kedua belah pihak agar perjanjian

segera menemukan solusi.¹⁵⁰ Hasil kompromi itu lalu dibuat dalam sebelas butir kesepakatan perdamaian.

Pada pukul 15.00 (pada hari kedua), kedua delegasi maju lagi pada sidang pleno terakhir. Pertemuan terakhir ini dihadiri secara lengkap oleh semua delegasi, Tim Mediator dan Tim Peninjau. Kedua delegasi duduk dalam formasi “U” dengan suasana yang sudah sedikit mencair. Diiringi hujan gerimis di luar dan dinginnya hawa pegunungan Malino, Yusuf Kalla membuka pertemuan dengan sebuah *joke* “orang bilang hujan itu tanda kemakmuran dan kebahagiaan. Marilah kita bicara soal kemakmuran dan kebahagiaan”.¹⁵¹ Yusuf Kalla lalu membacakan secara lengkap 11 butir perjanjian yang diberi judul “Perjanjian Maluku di Malino”, yang secara lengkap sebagai berikut :

1. Mengakhiri semua konflik dan kekerasan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, aparat hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.
3. Menolak, menentang dan menindas segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS.
4. Sebagai bagian dari NKRI, masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah propinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan mentaati budaya setempat serta menjaga keamanan dan ketertiban.

¹⁵⁰ Prosiding Perjanjian Malino, *op.cit*

¹⁵¹ Sinansari Ecip, *op.cit.*, hal. 152

5. Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Lasykar Jihad, Laskar Kristus, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demi tegaknya hukum.
7. Mengembalikan pengungsi ke tempat semula tanpa paksaan dengan hak-hak keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana ekonomi, dan sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan seluruh masyarakat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka, sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, kekompakan dan ketegasan TNI/Polri sesuai fungsi dan tugas masing-masing, mutlak perlu. Sejalan dengan itu berbagai fasilitas TNI/Polri, harus dibangun, dilengkapi dan difungsikan kembali.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk agama di Maluku, segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus tetap menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.

11. Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama, karena itu sistem rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dengan memenuhi syarat kualitas yang telah ditentukan.

Selanjutnya Yusuf Kalla memberikan kesempatan kepada anggota kedua delegasi untuk menanggapi butir-butir kesepakatan tersebut. Ada beberapa peserta sempat mempertanyakan penggunaan kata-kata Kristen RMS, dan ada juga yang mempertanyakan relevansi pemulangan Laskar Jihad dengan perdamaian. Namun semua pertanyaan itu dijawab secara diplomatis oleh Yusuf Kalla. Ia mengatakan bahwa kedua kelompok tersebut sama-sama akan ditindak oleh pemerintah dan ia berjanji pemerintah akan segera membentuk Tim Investigasi Nasional sesuai butir keenam untuk menyelidiki semua persoalan tersebut. Akhirnya semua peserta menyatakan dapat menerima sebelas butir pernyataan perdamaian tersebut.¹⁵²

Mengakhiri sambutannya Kalla mengatakan hasil yang dicapai selama perundingan merupakan sesuatu yang monumental dan berharga bagi masyarakat Maluku dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan Menkopolkam Susilo Bambang Yudoyono yang didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan bahwa pertemuan Malino untuk mengakhiri konflik Maluku telah mengukir sejarah kehidupan dan sejarah kemanusiaan. "Ini merupakan langkah dan pilihan besar, mustahil dilakukan oleh orang-orang penakut. Pilihan ini hanya bisa diambil oleh orang yang berani dan bertanggung jawab. Karena itu saya minta agar perjanjian ini dijadikan sebagai sebuah kontrak tanggungjawab itu. Sebuah pilihan memiliki tantangan besar. Tidak ada opsi yang bisa memuaskan semua pihak, ini bukan soal perkara memuaskan

¹⁵² Wawancara dengan Tamrin Elly di Jakarta, 1 Desember 2004

atau tidak memuaskan, ini masalah nurani. Menyelesaikan masalah Maluku harus dengan strategi tepat di lapangan, upaya ini harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Maluku.”¹⁵³

Kelompok Islam dan Kristen Maluku yang berunding selama dua hari, akhirnya mengikat diri dalam “Perjanjian Maluku di Malino”, Yusuf Kalla mengatakan bahwa bagi pihak-pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian akan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Maluku di Malino berakhir tepat pukul 15.20. Awal penandatanganan dilakukan oleh Ustadz Abdul Wahab Polpoke dari kelompok Islam dan Pendeta Hendrik dari kelompok Kristen. Setelah penandatanganan oleh kedua tokoh agama tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan oleh masing-masing ketua delegasi, Tamrin Elly dan Toni Pariela. Lalu disusul oleh anggota kedua delegasi yang seluruhnya berjumlah 70 orang serta modiator dan peninjau yang jumlahnya 30 orang. Tepat pukul 16.20 pertemuan ditutup secara resmi oleh Menkokesra Yusuf Kalla dan kedua delegasi menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berpegangan tangan.

Gambar. 3
Penandatanganan Kesepakatan Malino



¹⁵³ S. Sinansari Ecep, *op. Cit.*, hal. 153

Kedua delegasi yang datang ke Malino dengan sejuta amarah dan perseteruan, akhirnya menunjukkan sikap yang bijaksana. Meski kecewa sebagian usulan dan aspirasinya tidak diakomodasi, namun mereka dapat menerima bahwa hasil yang dicapai di Malino merupakan konsensus yang maksimal. Pendeta muda Jacky Manuputty yang juga menjadi anggota delegasi Kristen, mengakui bahwa kesepakatan tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa pihak Muslim dan Kristen telah menempatkan kesadaran persaudaraan dan kemanusiaan sebagai bingkai utama dalam perundingan. Walaupun Muslim-Kristen cukup lama terlibat dalam konflik namun mereka sadar bahwa mereka harus berdamai, karena mereka adalah saudara yang menghuni tanah yang sama yang diwariskan dari para leluhur. Dan oleh karena itu, semua “anak negeri” mempunyai kewajiban untuk menjaga harmoni sosial di negeri seribu pulau itu.¹⁵⁴

H. Perjanjian Malino Sebagai Model Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik seperti Perjanjian Malino mungkin bukan merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Sebelumnya pemerintah telah mempertemukan sejumlah tokoh di Maluku untuk mencari jalan perdamaian. Maka dibentuklah Pusat Rujuk Sosial (PRS) yang melibatkan berbagai tokoh agama dan masyarakat Maluku. Dalam prakteknya Pusat Rujuk Sosial tidak berperan maksimal, sebab kelompok-kelompok yang terlibat sangatlah terbatas. sebagian besar merupakan tokoh-tokoh intelektual dan agama (MUI, GPM dan Keuskupan) yang legitimasinya cukup menurun selama konflik. Mereka juga tidak memiliki akses langsung terhadap masyarakat yang

¹⁵⁴ Wawancara dengan Jacky Manuputty di Ambon, 20 Desember 2005

bertikai di lapangan. Padahal akses langsung merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan kemampuan mengendalikan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah komunitas.

Dalam realitas konflik Maluku, banyak anggota masyarakat yang lebih taat kepada panglima-panglima posko dan orang-orang yang muncul sebagai tokoh-tokoh informal baru yang dotokohkan selama konflik. Proyek penyelesaian konflik yang tidak melibatkan tokoh-tokoh tersebut dipastikan tidak banyak membawa manfaat, karena merekalah yang mengontrol massa di lapangan. Salah satu keberhasilan Perjanjian Malino adalah adanya kesediaan melibatkan sebanyak mungkin tokoh-tokoh tersebut dalam proses perundingan. Mereka menjadi simbol bagi para pengikutnya dalam proses penyelesaian konflik. Meskipun harus diakui bahwa jumlah tokoh yang hadir belum cukup maksimal dalam hal keterwakilan. Sebagian malah menolak untuk ikut dengan berbagai pertimbangan.

Selain aspek legitimasi di atas, dalam kasus Pusat Rujuk Sosial, ikrar perdamaian yang dibuat tidak diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya secara bersama-sama, sehingga bila terjadi konflik baru masing-masing pihak merasa telah dihinai yang akhirnya hanya menumbuhkan saling tidak percaya.

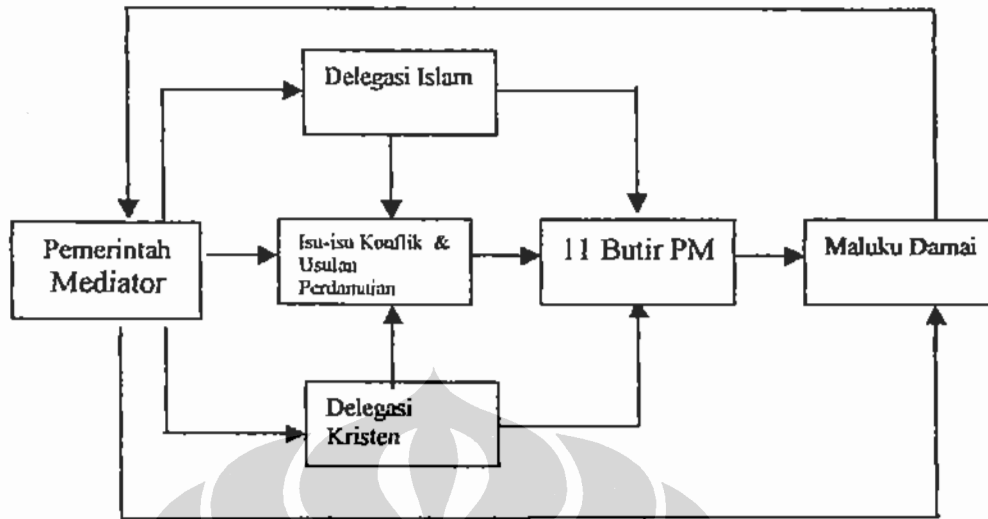
Dalam Perjanjian Malino terlihat ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan model mediasi perdamaian yang pernah dilakukan pemerintah pada waktu-waktu sebelumnya. *Pertama*, dari segi perumusan, Perjanjian Malino direncanakan dengan lebih baik, khususnya dalam mengkondisikan masyarakat, sosialisasi dan proses perundingan yang diagendakan secara sistematis dan terencana. Para pihak yang dilibatkan juga cukup besar dan berasal dari latar belakang yang beragam, seperti panglima-panglima posko, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh

masyarakat. Bahkan delegasi Kristen juga melibatkan perwakilan tokoh perempuan yang selama ini tidak diberikan peran. Partisipasi yang maksimal dari berbagai elemen yang terlibat konflik, merupakan bagian yang sangat penting dari proses resolusi konflik.

Kedua, keterlibatan pemerintah juga memegang peranan penting. Khususnya sikap *low profile* yang ditunjukkan oleh Menkokesra Yusuf Kalla yang berperan sebagai inisiator dan ketua mediator. Yusuf Kalla juga tidak segan-segan mendatangi kediaman tokoh-tokoh masyarakat untuk menjelaskan tentang pentingnya perundingan perdamaian yang akan difasilitasi pemerintah tersebut. Usaha ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, karena dianggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik.

Dalam model Perjanjian Malino, pemerintah bukan saja berperan sebagai mediator dan fasilitator, namun juga ikut menandatangani sebagai pihak yang bertanggung jawab. Artinya Perjanjian Malino adalah perjanjian *tripartit* karena melibatkan tiga pihak yang saling berekepentingan, Kelompok Islam, Kelompok Kristen dan Pemerintah. Dengan posisi seperti itu perjanjian Malino memiliki posisi yang cukup penting, karena semua pihak terlibat dan bertanggung jawab. Khususnya pemerintah perannya sangat dituntut dalam penegakan hukum dan keamanan. Itulah mengapa, ketika beberapa kali terjadi insiden pasca Malino, sejumlah anggota DPRD Kota Ambon berencana melakukan upaya hukum *Clash Action* terhadap pemerintah. Mereka berpendapat bahwa pemerintah dapat dituntut secara hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap implementasi Perjanjian Malino, sebab pemerintah adalah salah satu penandatangan kesepakatan perdamaian tersebut.

Gambar. 4
Skema Pelaksanaan Perjanjian Malino



Keterlibatan berbagai pihak di luar kelompok yang bertikai dalam perundingan Malino juga sangat positif. Kehadiran tokoh-tokoh agama seperti Din Syamsudin atau Pendeta Dr. I.P Lambe dan beberapa intelektual diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang positif kepada pihak-pihak yang berunding, apalagi di saat-saat terjadi kebuntuan dalam negosiasi.

Harus diakui, sebagai model penyelesaian konflik, Perjanjian Malino masih menyisakan sejumlah kelemahan yang perlu disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut. Seperti waktu sosialisasi dan pelaksanaan yang cukup singkat, mekanisme serta metodologi perundingan yang belum bisa mengarah kepada dialog yang lebih intensif untuk menyelami semua persoalan konflik. Demikian pula dengan konsep pengawasan dan evaluasi pasca perundingan yang belum dibuat secara terperinci sehingga tidak terukur dalam implementasi di lapangan.

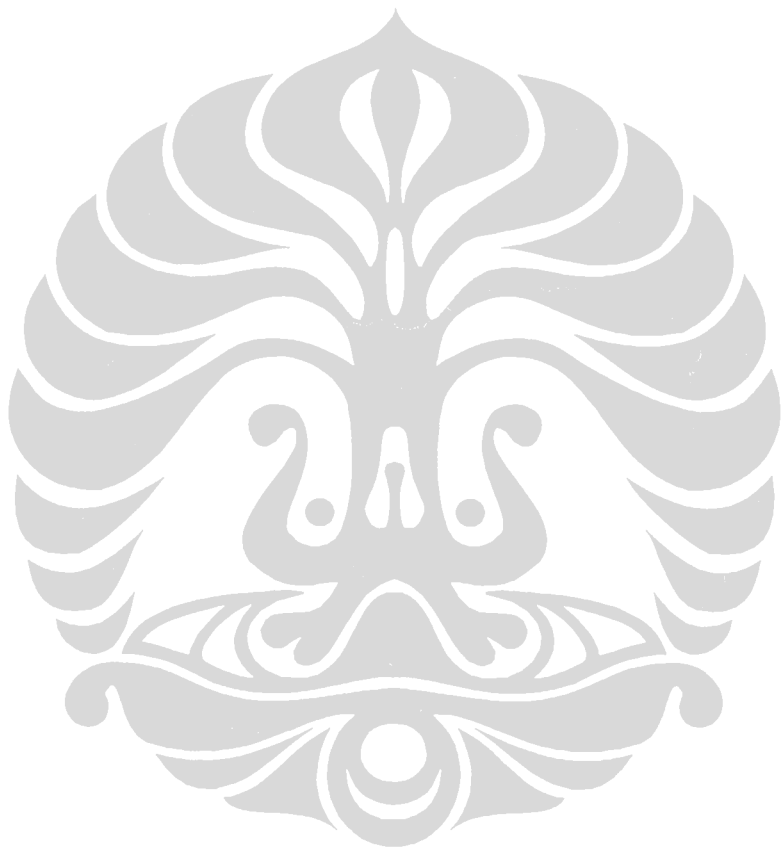
BAB IV
DAMPAK PERJANJIAN MALINO
TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK MALUKU.

A. Respon Masyarakat Maluku terhadap Perjanjian Malino

Pada tanggal 13 Februari 2002 pukul 15.00, delegasi Islam maupun Kristen tiba di kota Ambon dengan menumpang sebuah pesawat Hercules TNI AURI. Kedatangan para delegasi Perjanjian Malino ini telah menimbulkan ketegangan di Kota Ambon sejak pagi hari. Delegasi Kristen berhasil berangkat dari Bandara Pattimura menggunakan *speed boat* menuju kawasan tapal Kuda Ambon (yang berada di wilayah pemukiman Kristen) dan kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor Gubernur Maluku tanpa banyak kesulitan.

Sebaliknya anggota delegasi Islam yang berangkat dari Bandara Pattimura menggunakan kapal ALRI dan tiba di dermaga Navigasi yang berada di lokasi pemukiman Islam, mereka dihadang aksi demonstrasi dari ~~sekelompok~~ masyarakat Islam. Massa demonstran melempari anggota delegasi dengan batu dan bom molotov, namun kesigapan aparat keamanan yang telah mengawal mereka sejak dari bandara Pattimura berhasil menghalau massa. Situasi ini memberikan gambaran bahwa perjanjian Malino masih menyisakan kekecewaan di sebagian kalangan masyarakat Maluku.

Kelompok yang paling nyaring menyuarakan penolakan terhadap Perjanjian Malino adalah dari kelompok Islam. Beberapa ormas Islam seperti Satgas *Amar Maruf Nahyi Mungkar*, Pengurus Besar Ikatan Persaudaraan Muslim Nusa Ina



(PB.IKSAMUNI), Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW.GPI) Maluku, Pengurus Besar Front Pemuda Islam Maluku (PB.FPIM) dan beberapa ormas lokal seperti Front Pemuda Muslim Baguala (FPMB) menyatakan secara tegas menolak Perjanjian Malino. Kelompok ini dipimpin Ustadz Mohammad Attamimi dari Satgas *Amar Maruf Nahyi Mungkar* dan Irwan Patty dari Iksamuni. Seperti yang dijelaskan oleh Irwan Patty¹⁵⁶, ada dua hal yang mendorong kelompok 11 tetap menolak Perjanjian Malino. *Pertama*, secara metodologis, langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian Malino dinilai tidak jelas dan penuh dengan intervensi, sehingga dicurigai sebagai bentuk penggiringan kepada kepentingan kelompok tertentu. *Kedua*, substansi perjanjian Malino itu sendiri dinilai tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan umat Islam Maluku, bahkan jika ditelaah lebih jauh cenderung merugikan umat Islam. Kelompok 11 mempersoalkan kegagalan delegasi Islam dalam menangani isu Laskar Jihad, sehingga kelompok yang telah berjasa dalam membela kepentingan umat Islam itu harus didakwa sebagai penjahat dan diusir dari Maluku. Demikian pula dengan kompensasi-kompensasi yang mesti diterima kelompok Islam tidak dibahas secara maksimal. Menurut Irwan Patty, selain mempersoalkan konsep keseimbangan di Universitas Pattimura, delegasi Islam juga harus mendorong konsep yang sama di birokrasi daerah serta beberapa kantor pemerintahan yang selama ini banyak dikuasai orang-orang Kristen, seperti keseimbangan di RRI, TVRI dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hawalusi.

Penolakan kelompok 11 dilakukan dengan cukup demonstratif, sistematis dan terorganisir. Mereka melakukan demonstrasi dan membuat pernyataan bersama. Demi mempertegas penolakannya, mereka berangkat ke Jakarta untuk

¹⁵⁶Wawancara dengan Irwan Patty di Ambon, 17 Desember 2005

menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, DPR dan sejumlah tokoh nasional. Namun seperti yang diberitakan banyak media nasional, protes kelompok ini diabaikan pemerintah. Ketua MPR Amien Rais yang juga menolak bertemu dengan kelompok ini, secara diplomatis menyatakan bahwa ia menyambut positif pelaksanaan Perjanjian Malino dan meminta semua pihak untuk mengawasi implementasi perjanjian damai tersebut.¹⁵⁷

Dengan konstelasi yang demikian, gerakan kelompok ini kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga tidak mampu bertahan lama. Bahkan secara cepat satu demi satu tokoh-tokoh penentang Malino “dibungkam” oleh penguasa Darurat Sipil. Ketua PB. IKSAMUNI Irwan Patty, yang dianggap menggalang gerakan menolak Malino dalam sejumlah demonstrasi di Ambon sempat ditahan aparat keamanan, namun kemudian dilepaskan dan dipromosikan sebagai pejabat di Bappeda Propinsi Maluku. Demikian juga dengan ketua *Satgas Amar Ma'ruf Nahyi Mungkar* Mohammad Attamimi diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon pada awal tahun 2003.

Menurut ketua delegasi Islam Tamrin Ely, penolakan Irwan dan teman-temannya sulit dimengerti, karena mereka semua sudah diajak untuk ikut dalam perundingan, namun tetap menyatakan menolak perundingan perdamaian tersebut. Sebaliknya pendapat mereka agar konflik dihentikan dahulu sebelum dilakukan perundingan, juga sulit diterima. Karena tujuan utama pelaksanaan Perjanjian Malino adalah untuk membicarakan usaha-usaha penghentian konflik.¹⁵⁸

¹⁵⁷ *Republika*, 27 Maret 2002

¹⁵⁸ Wawancara dengan Tamrin Ely di Jakarta, 2 Desember 2004.

Di kalangan Kristen juga muncul suara ketidakpuasan yang ditunjukkan sebagian masyarakat di Posko Maranata.¹⁵⁹ Mereka menolak butir keenam yang menyatakan adanya keterlibatan Republik Maluku Selatan (RMS) dalam konflik Ambon-Maluku. Banyak tokoh-tokoh Kristen yang percaya bahwa Konflik Maluku adalah desain kelompok tertentu dari Jakarta dan isu RMS hanya dijadikan "kambing hitam".¹⁶⁰ Mereka juga menyayangkan dikaitkannya RMS dengan Kristen seperti penyebutan "Kristen RMS" pada butir keenam Perjanjian Malino. Menurut sejumlah kalangan Kristen sebagaimana dimuat media massa lokal, kata-kata tersebut merupakan sebuah rumusan politik yang sangat tendensius dan diskriminatif, karena mencitrakan komunitas Kristen di Maluku sebagai kelompok separatis yang membangkang terhadap negara.¹⁶¹ Jhon Pires menyebut rumusan tersebut secara nyata telah merugikan posisi moral komunitas Kristen di Maluku.¹⁶²

Namun salah satu anggota delegasi Kristen, Jacky Manuputy menyatakan bahwa penolakan sebagian komunitas Kristen terhadap beberapa butir Perjanjian Malino disebabkan mereka tidak membaca dengan seksama teks perjanjian tersebut. Kata-kata "Kristen RMS" dan "Laskar Kristus" adalah dua dari beberapa isu yang ditolak dengan keras oleh delegasi Kristen, namun dipersoalkan oleh delegasi Islam. Oleh karena itu, sebagai jalan keluarnya kedua isu tersebut bersama isu tentang Laskar Jihad diusulkan untuk diteliti lebih jauh oleh sebuah Tim Independen.¹⁶³ Jadi

¹⁵⁹ Posko Maranata adalah Pusat Informasi dan kegiatan masyarakat Kristen selama konflik Maluku. Selain di Maranata Pusat kegiatan lainnya adalah di Keuskupan Amboina.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Pendeta Jacky Manuputy di Ambon, 20 Desember 2005

¹⁶¹ *Suara Maluku*, 23 Februari 2002

¹⁶² Jhon Pires, *ibid.*, hal. 278

¹⁶³ Wawancara dengan Pendeta Jacky Manuputy di Ambon, 20 Desember 2005

penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk melegitimasi tuduhan kelompok lain tentang Kristen RMS.

Penolakan yang lebih keras, tentu saja datang dari Laskar Jihad dan FKM yang sejak awal sudah menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pelaksanaan Perjanjian Malino. Laskar Jihad dan FKM merasa tidak terlibat dalam perundingan, karena itu mereka mengatakan tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut. Bahkan mereka menyatakan akan tetap melakukan aktifitasnya masing-masing seperti sebelumnya. Ketua FKM Alex Manuputti menyatakan kegeramannya dengan Perjanjian Malino sebagai berikut:

“Perjanjian tersebut sangat tidak representatif, karena sesuatu yang representatif tidak akan menimbulkan dilematik dan polemik setelahnya, jelas negara memaksakan kehendaknya.”¹⁶⁴

Gerakan-gerakan penolakan terhadap Malino umumnya hanya berlansung di kota Ambon dan –kecuali pada saat kedatangan delegasi- hanya melibatkan sekelompok elit tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penolakan terhadap Perjanjian Malino secara umum hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Aksi-aksi penolakan sejumlah tokoh terhadap Malino ternyata tidak banyak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap masyarakat bawah (*grass root*). Secara umum masyarakat justru berharap konflik segera dihentikan agar perdamaian segera diwujudkan, sehingga mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur. Hasil penelitian Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) pada bulan Mei dan Juni 2003 yang diarahkan terhadap 1265 responden diberbagai tempat di Maluku, menunjukkan bahwa 62% responden

¹⁶⁴ *Sinar Harapan*, 27 Februari 2002

mendukung Perjanjian Malino II, 17% menyatakan tidak mendukung dan sisanya menjawab tidak tahu.

Kondisi dan situasi keamanan setelah perjanjian Malino memang belum aman sepenuhnya. Masih terdapat beberapa insiden dan bentrokan yang terjadi di kota Ambon dan sekitarnya, seperti penyerangan dan pengeboman terhadap masyarakat di kawasan Soya kota Ambon yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal. Penyerangan tersebut menimbulkan korban tewas sebanyak 8 orang. Belakangan para pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap aparat keamanan. Sebagian dari mereka adalah anggota Geng Coker, kelompok preman yang dipimpin oleh Berty Loupaty. Berty dan rekan-rekannya membuat pernyataan yang sangat mencengangkan di pengadilan bahwa aksi itu mereka lakukan karena disuruh beberapa oknum Kopasus. Kasus ini mengandung kecurigaan terhadap kelompok militer dan mestinya dapat diinvestigasi lebih lanjut, karena bagaimana mungkin Berty dan rekan-rekannya yang beragama Kristen, melakukan penyerangan terhadap kelompoknya sendiri, yakni masyarakat Kristen di desa Soya. Sangat disayangkan investigasi lebih lanjut terhadap motif kasus tersebut seakan ditutup-tutupi dan tidak jelas hingga saat ini.

Peristiwa lainnya adalah pembakaran kantor Gubernur Maluku pada tanggal 3 April 2002. Menurut penuturan para pelaku yang ditangkap, mereka membakar kantor gubernur karena marah dengan peristiwa yang terjadi di desa Soya.¹⁶⁵ Namun banyak pihak menduga pembakaran kantor gubernur tersebut memiliki motif lain

¹⁶⁵ Tim Tapak, *Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur oleh Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah*. (Jakarta: Tim Advokasi Penyelesaian Kasus (TAPAK) Ambon, hal. 78

¹⁶⁶ Wawancara dengan Adnan Hatala di Ambon, 6 Desember 2006.

yang lebih bernuansa politik yakni untuk menghilangkan jejak berbagai aksi penyelewengan dana kerusuhan yang terjadi selama konflik.¹⁶⁶ Aksi kekerasan juga menimpa Tamrin Elly, ketua delegasi Islam pada Perjanjian Malino itu rumahnya dibakar oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Yusuf Kalla yang diminta tanggapannya terhadap sejumlah aksi kekerasan tersebut mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh para provokator yang ingin membuat opini bahwa Perjanjian Malino belum dapat menghentikan konflik Maluku. Ketua MPR Amin Rais juga bereaksi keras dan meminta para pelaku kekerasan di Maluku pasca Malino untuk segera ditangkap dan diadili.¹⁶⁷

Beberapa insiden yang terjadi setelah Malino menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mewujudkan perdamaian bagi para pihak yang bertikai (Muslim dan Kristen) setelah 2 lebih tahun terlibat secara aktif dalam konflik yang menimbulkan banyak korban jiwa dan materi. Trauma psikologis, dendam, saling mencurigai dan hilangnya kepercayaan (*distrust*) antar warga masyarakat, mensyaratkan proses penyelesaian konflik harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Sehingga apa yang ingin dicapai pasca Malino dapat berhasil dengan baik.

B. Sosialisasi dan Implementasi Perjanjian Malino.

1. Sosialisasi dan Komitmen Anggaran

Ditengah gejolak dan penolakan sejumlah kelompok di Ambon terhadap Perjanjian Malino, sosialisasi butir-butir kesepakatan Perjanjian Malino dilakukan secara gencar ke berbagai kalangan masyarakat. Sosialisasi yang intensif tentu akan

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Kompas*, 15 April 2002

mengurangi salah pengertian dari masyarakat terhadap Perjanjian Malino. Delegasi Kristen yang mengikuti pertemuan di Malino mengawali sosialisasi butir-butir Perjanjian Malino di Gereja Marantha Ambon pada tanggal 14 Februari 2002. Pada hari-hari berikutnya proses sosialisasi diperluas hingga ke desa-desa.

Pada tanggal 27 Februari 2002, pihak delegasi Islam melakukan sosialisasi secara besar-besaran di Masjid Raya Alfatah Ambon yang diikuti hampir 10.000 orang dari berbagai pelosok Ambon.¹⁶⁸ Selain model *Tablig Akbar* seperti yang dilakukan di Masjid Alfatah, delegasi Muslim juga melakukan sosialisasi dalam bentuk pertemuan-pertemuan tertutup dengan para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan kepala-kepala sekolah yang bertempat di Kantor Gubernur Maluku.

Sosialisasi bersama antara delegasi Muslim dan Kristen juga dilakukan pada tanggal 28 Februari 2002. Kedua delegasi melakukan pawai damai bersama mengelilingi kota Ambon sebagai bentuk ekspresi kegembiraan setelah Perjanjian Malino, meskipun pawai damai tersebut sempat dicerai oleh sejumlah insiden. Sosialisasi yang cukup intensif, ternyata telah berhasil mengurangi eskalasi konflik secara signifikan. Dan lebih jauh lagi membuat kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya menunjukkan sikap *apriori* dan ketidaksetujuan semakin bisa menerimanya dan tidak lagi menunjukkan penolakan secara agresif terhadap Perjanjian Malino.

Selanjutnya yang ditunggu masyarakat adalah pelaksanaan butir-butir Perjanjian Malino. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya sebuah perundingan seringkali kehilangan kekuatan akibat kelambanan dalam implementasi

¹⁶⁸ Wawancara dengan Tamrin Elly, *Republika* 16 Maret 2002. Lihat juga Sinansari Ecep, *op.cit.*

di lapangan. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut Perjanjian Malino, di tingkat pusat beberapa kali dilakukan sejumlah rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah dan DPRRI. Pemerintah juga memberikan dukungan dana untuk implementasi butir-butir Perjanjian Malino. Dana dianggarkan untuk tiga hal, yaitu anggaran koordinasi dan pemantauan, anggaran sosialisasi dan anggaran rehabilitasi.

Tabel . 14
Anggaran Koordinasi, Pemantauan dan Rehabilitasi Pasca Malino

Nama Kegiatan	Jumlah
Koordinasi dan Pemantauan Rp. 607.800.000	
- Penjajagan Lapangan	36.800.000
- Pertemuan dengan para Tokoh	119.000.000
- Penyusunan bahan pertemuan	10.000.000
- Pertemuan rekonsiliasi konflik	442.000.000
Sosialisasi Rp. 973.500.000	
- Pencetakan dan pendistribusian hasil	12.500.000
- Pembuatan Leaflet	7.000.000
- Pertemuan tokoh masyarakat	60.000.000
- Akomodasi pertemuan	140.000.000
- Pembuatan Spanduk	24.000.000
- Sosialisasi Media	630.000.000
- Prog. Komunikasi Internasional	100.000.000
Rehabilitasi	
- Melalui Dep. Kesehatan	52.000.000.000
- Melalui Depdiknas	27.531.000.000
- Melalui Depag	2.385.000.000
- Melalui Depsos	61.574.000.000
- Melalui Depnakertrans	82.623.000.000
- Melalui Kimpraswil	45.000.000.000
- Kodam Pattimura	2.192.000.000
- Polda Maluku	5.900.000.000

Sumber: Diolah dari data Kantor Menkokesra, 2003

Komitmen anggaran yang sangat besar, khususnya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sarana-prasarana pasca konflik ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan yang tampak di Maluku. Masih banyak pengungsi yang menempati barak-barak pengungsian seperti di Ruko Batu Merah, Kompleks Waihaong dan Paso dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dalam evaluasi tiga tahun pasca Malino yang diadakan pada bulan Februari 2005 di Istana Wakil

Presiden, para eksponen delegasi Malino mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan Kepres No. 6 Tahun 2004 untuk mendukung pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Maluku pasca konflik.¹⁶⁹ Mereka juga menuntut agar dilakukan audit lengkap terhadap berbagai dana yang selama ini telah dikucurkan pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik Maluku.

2. Pembentukan Tim Independen dan Tim Pemantau.

Sesuai dengan butir 6 Perjanjian Malino, maka pemerintah membentuk tim investigasi independen yang bertujuan untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999 yang merupakan titik awal dari konflik Maluku, serta hal-hal yang berkaitan dengan FKM/RMS, Laskar Jihad dan hal-hal lainnya. Atas dasar itu pemerintah mengeluarkan Kepres No. 38/2002 tanggal 6 Juni 2002, tentang pembentukan TIM Investigasi Independen yang diberi nama *Tim Investigasi Nasional untuk Konflik Maluku*. Tugas utama tim ini adalah menyelidiki, mencari fakta dan menganalisa berbagai peristiwa dan isu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan. Hal-hal yang diselidiki antara lain, peristiwa 19 Januari 1999, isu tentang Republik Maluku Selatan, isu Lasykar Kristus, isu Kristen RMS, isu Forum Kedaulatan Maluku, isu Lasykar Jihad, isu tentang pengalihan agama secara paksa dan isu tentang pelanggaran HAM dan berbagai pelanggaran hukum yang terkait erat dengan kerusuhan Maluku.

Tim tersebut diketuai oleh I Wayan Karya, Bambang W. Suharto sebagai wakil ketua, Bambang Sutiarto sekretaris, dan anggota Paulus Wirotomo, Judo

¹⁶⁹ Eksponen Peserta Pertemuan Maluku di Malino. *Pokok-Pokok Pikiran Hasil Evaluasi Perjanjian Maluku di Malino*, Jakarta 25 Agustus 2005.

Purwodigdo, Roni Nitibaskoro, MDR, Jhon Likuada, S. Situmorang, Soeyono, M. Trimada Dani, Jost. F. Menko, Ichwan Syam, Atno Mufzar, dan Gede Purnawa. Kesimpulan Tim independen menyebutkan bahwa konflik Maluku yang dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 bukan disebabkan oleh pertentangan antara agama Islam dan agama Kristen, namun konflik antara sebagian warga masyarakat yang berbeda agama, yang dilandasi rasa ketidakpuasan, kecurigaan sosial dan kecemasan sosial politik, karena ketimpangan ekonomi, sosial politik dan budaya yang akut antar golongan agama di Maluku. Tim ini juga menemukan adanya indikasi agama dimanfaatkan oleh pihak lain maupun kedua kelompok itu sendiri untuk mengobarkan semangat permusuhan. Kemunculan Laskar Kristus, Laskar Jihad dan FKM memang telah menambah bobot konflik tetapi hanya merupakan eksekusi yang timbul dari konflik.¹⁷⁰

Sayang hasil investigasi lengkap tim tersebut tidak dipublikasikan sehingga masyarakat tidak mengetahui secara persis atau melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu dan peristiwa yang telah diselidik Tim Independen. Pendeta Jhon Ruhulesin mensinyalir ada beberapa fakta hasil investigasi yang jika diungkap di khawatirkan dapat memprovokasi terjadinya konflik baru.¹⁷¹ Analisis lainnya menyebutkan bahwa laporan investigasi tersebut tidak dipublikasikan karena Tim Independen tidak berhasil mengungkap “aktor utama” yang bermain dibalik konflik Maluku. Namun keterangan yang lebih jelas disampaikan oleh Faried Husen, mantan Deputy II Kesra dan Staf Ahli Menkokesra untuk Perjanjian Malino.

¹⁷⁰ Laporan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Kasus Maluku. Jakarta, 6 Mei 2003

¹⁷¹ Wawancara dengan Pendeta Jhon Ruhulesin di Ambon, 22 Desember 2005

Menurut Faried, laporan Tim Independen memang sengaja tidak dipublikasikan karena diawatirkan beberapa temuan Tim tersebut akan mengganggu kondisi perdamaian yang saat ini mulai tercipta di Maluku. Farid tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang temuan-temuan yang diawatirkan akan menimbulkan polimik tersebut. Ia hanya bisa memprediksi mungkin sepuluh atau limabelas tahun kedepan pemerintah baru akan mempublikasikan temuan-temuan Tim Independen tersebut.¹⁷² Wakil Ketua Tim Investigasi, Bambang W. Suharto juga menolak menjelaskan lebih jauh karena menurutnya hal itu merupakan otoritas pemerintah.

Selain pembentukan Tim Independen, pemerintah juga membentuk Komisi Pemantau, atas dasar keputusan bersama Menko Polkam, Menko Kesra, dan Menkoperekonomian. Dalam komisi ini, ketiga Menko bertindak sebagai pengarah dengan pelaksana, ketua I Irjen. Pol Taufikurachman Ruki, SH, Ketua II dr Farid W. Husein, Ketua III DR Dipo Alam, Sekretaris dr. Emil Agustiono, M.Kes, dan anggotanya adalah Prof. Dr. Din Syamsuddin, Dr I.P. Lambe, Pastor I. Ismantoro, S.J, Irjen Pol. Drs S. Simatupang, MSc, Prof. Dr Muljani A. Nurhadi M,Med, Dr. Sumaryati Aryoso, SKM, Ir. Djoko Kimmanto, Drs. Muhanto A.Q, MM, Abdul Syukur, SH, Brigjen. TNI M. Ansyori Deas, SH, Drs. H. Abdullah Sukarta, dan Drs. Arief Mudatsir Mandan.¹⁷³

Tim ini bertugas memantau pelaksanaan Perjanjian Malino untuk Maluku oleh masing-masing pihak yang bertikai. Mereka diberi wewenang melaporkan hasil pantauannya kepada tiga Menko setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan.

¹⁷² Wawancara dengan Farid W. Husein di Jakarta, 14 februari 2006

¹⁷³ Sinansariecip, *ibid.*, hal. 182

Dalam perkembangannya, kinerja komisi pemantau juga tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai.

3. Implementasi di Tingkat Daerah

Di tingkat daerah, pelaksanaan perjanjian Malino untuk Maluku diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Gubernur Maluku. Kedua Pokja tersebut adalah Pokja bidang sosial ekonomi dan hukum. Pokja sosial ekonomi terbagi atas empat sub pokja, yaitu sub pokja sosialisasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku bidang Kesra. Sub Pokja penanganan pengungsi dan santunan yang diketuai oleh Kadis Kesos Propinsi Maluku, Sub Pokja rehabilitasi mental/spiritual dan sosial budaya, diketuai oleh Kakanwil Agama Propinsi Maluku dan Sub Pokja rehabilitasi sarana/prasarana pengungsi diketuai oleh Kadis PU Maluku.

Pokja penegakan keamanan dan supremasi hukum terdiri atas lima sub Pokja, yaitu 1). Sub Pokja Sosialisasi yang diketuai oleh Wagub Maluku bidang Kesra, 2). Sub Pokja Penghentian Konflik diketuai oleh As. Ops Kasdam XIV Pattimura, 3). Sub Pokja Keamanan Lingkungan diketuai oleh Kadit Sabhara Polda Maluku, 4). Sub Pokja Penegakan Hukum diketuai oleh Kadit Serse Maluku, dan 5) Sub Pokja Pengawasan diketuai oleh Asintel Kodam XIV Pattimura. Dalam setiap Sub Pokja selalu diisi oleh wakil dari kelompok Islam dan Kristen masing-masing dua orang.

Langkah lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah mempersiapkan konsep penguatan perdamaian pada *level* kulutal. Mantan Gubernur Maluku

Muhammad Saleh Latuconsina mengaku pihaknya pernah mempersiapkan konsep tentang lembaga perdamaian dan rekonsiliasi untuk mendorong proses-proses perdamaian pada tingkat sosial dan kultural di semua lapisan masyarakat.¹⁷⁴ Namun konsep tersebut tidak sempat diimplementasikan karena Gubernur Saleh Latuconsina telah habis masa jabatannya dan harus diganti dengan pejabat Gubernur Sinyo Hari Sarundayang (Irjen Depdagri) pada awal tahun 2003.

C. Dampak Perjanjian Malino terhadap Penghentian Konflik dan Kekerasan

Salah satu indikator kesuksesan Perjanjian Malino adalah semakin berkurangnya intensitas konflik dan terciptanya kondisi keamanan yang semakin kondusif di Maluku. Situasi ini menjadi pertanda bahwa para pihak yang bertikai menjunjung tinggi komitmen-komitmen perdamaian yang telah diikrarkan atau ditandatangani bersama. Sejak periode Juni 2002 hingga sekarang, konflik semakin berkurang bahkan berhenti sama sekali. Memang masih terdapat beberapa insiden dan tindak kekerasan secara seporadis, namun masih dapat diatasi aparat keamanan dan eskalasinya juga tidak meluas seperti waktu-waktu sebelumnya. Terdapat tiga insiden besar yang menimbulkan korban jiwa, yaitu, 1) pembakaran kantor gubernur Maluku pada 3 April 2002, 2) penyerangan desa Soya pada 28 April 2002, dan 3) bentrokan antar kelompok FKM dan masyarakat di Jalan Diponegoro Ambon pada 25 April 2003. Hal seperti itu masih bisa dimengerti karena tidak ada proses perdamaian yang langsung jadi, namun melewati berbagai fase transisi tertentu. Namun catatan yang lebih penting adalah insiden-insiden tersebut tidak sampai mendorong masyarakat, khususnya kedua pihak yang bertikai (Muslim dan Kristen)

¹⁷⁴ Wawancara dengan Dr. Ir. Muhammad Saleh Latuconsina, Jakarta 24 Januari 2006

pada bentrokan massal dan saling serang menyerang sebagaimana yang terjadi sebelum pelaksanaan Perjanjian Malino.

Sebagian insiden kekerasan pasca Malino justru terjadi antara komunitas yang seagama. Seperti serang-menyerang antar masyarakat dua desa Islam, desa Pulau dan Kailolo yang menimbulkan beberapa korban jiwa. Demikian juga dengan pertikaian antara masyarakat desa Mamala dan Negeri Lima, yang juga merupakan desa-desa Islam. Motif pertikaian umumnya dipicu oleh perebutan tanah dan perselisihan sepele antara beberapa anggota masyarakat. Di kalangan Kristen juga terjadi saling menyerang antara dua desa Kristen, yakni desa Porto dan Haria di Pulau Saparua serta desa Passo dan Wai di Kota Ambon. Insiden-insiden tersebut memperlihatkan adanya pergeseran isu konflik yang semakin beragam yang tidak lagi memperhadapkan komunitas Muslim dan Kristen atas nama agama. Hal ini justru mempermudah aparat untuk mengidentifikasi para pelaku kriminal dan mensekat konflik sehingga tidak berkembang menjadi konflik massal yang biasanya memperhadapkan komunitas beragama sehingga sulit untuk ditangani.

Tabel. 15
Intensitas Konflik Setelah Malino

No	Konflik	Motif / Penyebab	Ket
1	Pembakaran kantor Gubernur Maluku, 3 April 2002	-Pemerintah Menuduh Kelompok separatis RMS	Korban meninggal 5 orang dan belasan orang luka-luka
2	Pembakaran Gereja Silo yang sedang dibangun, 25 April 2002	Memprovokasi	-
3	Penyerangan di desa Soya, 28 April 2002	Dilakukan oleh kelompok tak dikenal, belakangan diketahui ada keterlibatan para preman bertujuan mengacau Maluku Pasca Malino.	Korban meninggal 12 orang
4	Sepanjang Malam terdengar bunyi tembakan dan letusan, 4 Mei 2002	Ketegangan akibat penangkapan Panglima Laskar Jihad Ja'far Uar thalib di Surabaya.	-
5	Saling Menyerang dua desa Kristen di Saparua, 8 Mei 2002	Perselisihan antar warga	Korban meninggal 4 orang

6	Pembakaran rumah Ketua delegasi Islam di Malino, Tamrin Elly, 12 Mei 2002	Kemungkinan dilakukan oleh kelompok yang menolak Malino.	-
7	Serangan Terhadap <i>Speedboard</i> , 25 Mei 2002.	Dilakukan oleh para perusuh yang tidak diketahui.	5 penumpang tewas
8	Kemelut Politik di Maluku Tenggara. Saling serang antara para pendukung Calbup Heri Kudubun dan Taher Hanubun	Persaingan politik dalam perebutan jabatan Bupati.	3 orang tewas.
9	Sebuah bom meledak di lapangan Merdeka, 5 september 2002	Dilakukan oleh kelompok perusuh	4 orang tewas
10	Penembakan di desa Islam Kulur-Saparua	Balas dendam	3 orang wanita tewas
11	Penembakan sebuah sepeda motor, 3 November 2002	Balas dendam	1 tewas, 2 luka-luka
12	Aksi pelemparan bom dari sebuah angkut, 14 januari 2003	Mengacaukan keamanan	4 korban luka-luka
13	Perkelahian antara pemuda antara dua desa Kristen, Passo dan Wai, 19 Maret 2003	Perselisihan antar pemuda	2 orang luka-luka
14	Saling serang antara dua desa Islam di Seram Barat, 20 Maret 2003	Perselisihan antara pemuda	4 orang luka-luka
15	Bentrokan antara kelompok FKM/RMS dan sebagian Masyarakat di Jalan Diponegoro, 25 April 2003	Provokasi oleh FKM dan kelompok yang menyebut diri pro NKRI	7 orang meninggal dunia. Dan puluhan luka-luka.
16	Serangan Kepada Pos Polisi di Desa Loki	Akasi provokasi	4 orang tewas

Sumber: diolah dari data *Lintas Kerusuhan Maluku*, Crisis Center Keuskupan Amboina, 2003

Hal lain yang mesti diamati adalah suasana psikologis masyarakat pasca Malino. Ketika terjadi bentrokan atau kekerasan di tengah masyarakat, mereka sering menuntut agar pemerintah segera menindak para perusuh sesuai dengan semangat Perjanjian Malino. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan yang dimuat media massa lokal di Ambon. Seperti pernyataan seorang warga tentang kerusuhan antara para pendukung FKM dan masyarakat, yang dimuat dalam kolom Suara Anda, Harian Ambon Express.

Kerusuhan *kamaren* itu karena aparat keamanan bertindak *seng* (tidak) tegas terhadap para anggota FKM yang separatis itu. *Dorang* (mereka) dibiarkan seenaknya melakukan upacara, mengibarkan bendera RMS, padahal sudah dilarang dalam perjanjian Malino. *Katorang* (kami) minta supaya pemerintah

menegakkan komitmen-komitmen Perjanjian Malino (Ibrahim Hatala, warga Batu Merah).¹⁷⁵

Atau pernyataan lain dari seorang warga Kristen tentang penyerangan di pemukiman Kristen di Desa Soya dalam Suara Maluku.

Beta benar-benar seng mangarti mengapa hal itu bisa terjadi. Apa kerjanya aparat keamanan. Ada info para penyerang sangat terlatih. Yang bisa melakukan penyusupan begitu hanya tentara, atau bisa juga orang-orang yang dilatih tentara. Pemerintah harus segera membongkar kasus ini atau Perjanjian Malino itu katong bubarkan saja (Simon Siahaya, warga Soya).¹⁷⁶

Meskipun masyarakat sangat geram dengan beberapa insiden yang terjadi, namun mereka masih berharap agar pemerintah betul-betul menjalankan komitmen-komitmen yang telah disepakati di Malino. Ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor *determinan* dalam proses penghentian Konflik Maluku pasca perjanjian Malino. Beberapa faktor tersebut adalah keberhasilan membubarkan Laskar Jihad dan menangkap aktifis-aktifis FKM, penegakan hukum dan keamanan yang diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi secara bertahap. Berikut akan dideskripsikan ketiga hal tersebut.

1. Pembubaran Laskar Jihad dan FKM

Sebagai konsekwensi penolakan Laskar Jihad terhadap perjanjian Malino, panglima Laskar Jihad, Ja'far Umar Thalib akhirnya ditangkap aparat keamanan di Bandara Juanda Surabaya pada tanggal 4 Mei 2002 dan ditahan di Jakarta. Ia kemudian dibebaskan setelah berjanji membubarkan organisasi yang dipimpinnya. Pada tanggal 3-7 Oktober 2002 pimpinan Laskar Jihad yang sedang mengadakan

¹⁷⁵ *Ambon Express*, 26 April 2004

¹⁷⁶ *Suara Maluku*, 2 Mei 2002

pertemuan di Jogjakarta memutuskan untuk mengembalikan anggota Laskar Jihad secara bertahap dari Ambon.

Di Ambon berita pembubaran Laskar Jihad diumumkan lewat pengeras suara di Mesjid Amal Shaleh, Kebun Cengkeh, Radio Suara Perjuangan Muslim Maluku (SPMM) dan selebaran-selebaran yang ditempel di mesjid-mesjid. Radio SPMM milik Laskar Jihad yang selama ini menjadi sumber informasi tandingan bagi RRI/TVRI Ambon yang lebih didominasi pihak Kristen karena berada di wilayahnya juga ditutup pemerintah. Beberapa aktifitas kegiatan sosial seperti sekolah dan tempat-tempat pengajian yang ditinggal Laskar Jihad, dilanjutkan oleh masyarakat setempat.

Alasan pembubaran Laskar Jihad secara sukarela oleh para pemimpinnya sesungguhnya tidak jelas. Dalam maklumat pembubaran Laskar Jihad, disampaikan bahwa alasan pembubaran Laskar Jihad adalah 1) kondisi Ambon dinilai sudah semakin kondusif dan umat Islam Maluku dipandang sudah cukup kuat untuk membela dirinya dari serangan musuh, dan 2) adanya fatwa dari seorang ulama Saudi Arabiyah yang menyebutkan bahwa sudah tiba saatnya bagi Laskar Jihad untuk dibubarkan.¹⁷⁷ Alasan tersebut mungkin hanya alat pembenaran tetapi tidak mustahil yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan internal yang dihadapi dalam hal pembiayaan dan tekanan-tekanan politik yang semakin gencar kepada Laskar Jihad pasca Perjanjian Malino.

Bagi kelompok yang menolak Malino, seperti dikemukakan Irwan Patty, pelunakan sikap Laskar Jihad lebih disebabkan oleh komitmen moral yang telah

¹⁷⁷Laporan Tim Penyelidik Independen Untuk konflik Maluku, 2003.

mereka sampaikan ketika bertemu Wapres Hamzah Haz, bukan karena mentaati Perjanjian Malino. Sebagaimana diketahui, Wapres Hamzah Haz pernah mengunjungi Ja'far Umar Thalib sewaktu ditahan di Jakarta dan dalam kunjungan tersebut Ia meminta agar Laskar Jihad sebaiknya membubarkan diri secara sukarela.

“....dan sebagai bentuk ketundukannya kepada Wapres Hamzah Haz yang dianggapnya sebagai seorang ulama yang dihormati, Jafar Umar Thalib berjanji menarik semua anggota Laskar Jihad dari Ambon. Ja'far menempati janji itu dengan mengeluarkan instruksi pembubaran Laskar Jihad terhitung sejak 14 Oktober 2002.”¹⁷⁸

Apapun alasan yang diajukan, pembubaran Laskar Jihad merupakan bagian dari komitmen Malino. Keterlibatan Wapres Hamzah Haz ketika meminta Ja'far Umar Thalib membubarkan anggota-anggotanya merupakan bagian dari implementasi Perjanjian Malino.

Adapun Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang juga menolak mentaati butir-butir Perjanjian Malino, tokoh-tokolnya satu demi satu mulai ditangkap aparat keamanan sebagai bagian dari implementasi kesepakatan Malino. Bersamaan dengan penangkapan Panglima Laskar Jihad, Ketua Presidium FKM Dr. Alex Manuputy juga ditangkap dan dibawa ke Jakarta dan diajukan ke pengadilan. Ia divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat empat tahun penjara. Namun dalam masa penangguhan penahanannya, Manuputy berhasil melarikan diri ke Amerika dan tetap berada di negara tersebut hingga saat ini. Pelarian tokoh kunci FKM tersebut sangat disayangkan oleh berbagai pihak, karena ia akan melakukan kampanye negatif tentang Indonesia di luar negeri dan itu pasti sangat merugikan kepentingan nasional.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Drs. Irwan Patty, M.Si di Ambon, 17 Desember 2005

Sebagian aktifis FKM/RMS seperti Sekretaris Eksekutif Moses Tuanakota dan rekan-rekannya, juga ditangkap aparat keamanan. Ketika terjadi kerusuhan yang bertepatan dengan ulang tahun RMS, 25 April 2004 yang menewaskan puluhan korban jiwa, banyak aktifis FKM/RMS ditangkap aparat keamanan, termasuk di antaranya Pimpinan Yudikatif FKM Semy Waileruny. Sejak saat itu, aktifis dan simpatisan FKM/RMS di Ambon dapat dikatakan sudah sangat berkurang.

Pembubaran dan pemulangan Laskar Jihad serta penangkapan terhadap eksponen FKM telah membuat situasi keamanan di Maluku semakin kondusif. Seiring dengan itu, mulai muncul kepercayaan dari masyarakat kedua belah pihak bahwa perdamaian akan benar-benar bisa diwujudkan di Maluku.

2. Penegakan Hukum dan Keamanan.

Secara sistematis pemulihan keamanan di Maluku dilakukan dengan pembentukan Forum Koordinasi Intelegijen TNI, Polri dan Kejaksaan dengan koordinator Asintel Kodam XIV Pattimura dalam upaya mendeteksi dan menelawani aksi para perusuh. Untuk kasus-kasus penyerangan telah dikirimkan tim penyelidikan gabungan TNI-Polri ke lokasi-lokasi tempat kejadian perkara untuk pengungkapan pelakunya. Dibentuk pos-pos keamanan bersama TNI Polri untuk mengantisipasi pertentangan antara aparat TNI dan Polri di lapangan. Untuk menindak tegas aparat lokal yang telah terkontaminasi kerusuhan, dilakukan rotasi personil dengan personil baru yang didatangkan dari luar Maluku. Upaya keamanan lainnya adalah pelaksanaan *sweeping* senjata api dan bahan peledak yang berada di tangan masyarakat oleh satuan gabungan TNI-Polri dan instansi terkait. Seiring dengan itu, masyarakat secara sukarela mulai menyerahkan senjata dan bahan

peledak yang dimiliki. Selama periode Juni 2002 hingga Desember 2004 senjata api organik dan rakitan yang diserahkan oleh kelompok Muslim maupun Kristen sebanyak 673 buah, sedangkan bahan peledak sebanyak 1620 buah.¹⁷⁹ Selain senjata api juga diserahkan senjata-senjata tradisional seperti *parang*, panah dan tombak.

Dalam bidang hukum, pemerintah melakukan mutasi atau *rolling* aparat penyidik yang ada di Maluku dengan aparat dari luar Maluku. Tenaga Jaksa/Penuntut umum banyak yang ditambah dan juga dimutasi. Tercatat sebanyak 20 orang jaksa baru didatangkan dari luar Maluku. Ketersediaan tenaga hakim juga mendapatkan perhatian serius karena di Pengadilan Negeri Ambon hanya terdapat dua orang hakim, sementara di Pengadilan Negeri Masohi Maluku Tengah tidak ada tenaga hakim selama konflik. Pemerintah mendatangkan 19 orang hakim dari luar Maluku untuk mengadili berbagai kasus selama konflik.¹⁸⁰ Aparat keamanan dan aparat hukum juga didorong untuk mempercepat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara, terutama perkara-perkara kerusuhan, memberesi lalu lintas di pusat kegiatan masyarakat, melakukan pengawasan daerah perbatasan dengan menempatkan pasukan penyekat, menindak tegas dan menangkap atau melumpuhkan perusuh atau penghasut dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang-orang asing yang masuk dan keluar dari Maluku.

Kondisi keamanan yang semakin kondusif tersebut dapat dinilai dari kesuksesan pemerintah daerah menggelar agenda politik penting seperti pemilihan Gubernur Maluku pada 20 Agustus 2003 yang akhirnya menempatkan Karel Albert

¹⁷⁹ www.pemprov-maluku.org. Situs pemerintah Provinsi Maluku. diakses pada tanggal 17 November 2005.

¹⁸⁰ *ibid*

Ralahalu (Seorang purnawirawan Jenderal beragama Kristen) dan Muhammad Latuconsina sebagai Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur yang baru. Mereka menggantikan pasangan lama Gubernur Muhammad Saleh Latuconsina dan Wakil Gubernur Paula B. Renyaan yang kalah dalam pemilihan di DPRD Maluku. Awalnya banyak pihak meragukan agenda politik lokal itu dapat berjalan dengan mulus, karena pemilihan Gubernur akan sarat dengan intrik yang bisah memicu konflik. Namun hal itu tidak terbukti, nampaknya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan kondisi damai yang mulai tercipta *pasca* Malino sangat tinggi, sehingga berbagai upaya provokasi dan intimidasi selama proses pemilihan Gubernur tidak menghasilkan tindakan kekerasan seperti yang terjadi selama konflik.

3. Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi keamanan yang semakin kondusif juga telah mendorong bergeraknya ekonomi masyarakat dan pemulihan kehidupan sosial di Maluku. Normalisasi kehidupan sosial memang masih berlangsung secara bertahap, karena secara objektif kedua komunitas Muslim dan Kristen masih hidup secara terpisah di teritori masing-masing. Meski demikian, masyarakat Muslim dan Kristen mulai melakukan kontak-kontak personal di antara mereka.

Pasar-pasar tradisional menjadi tempat terbuka pertama yang menyediakan ruang interaksi yang alamiah di antara kedua komunitas. Pasar tradisional Mardika yang terletak di garis batas antara pemukiman Islam dan Kristen yang selama konflik hancur diamuk massa, kembali difungsikan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Pasar tersebut lalu diberi nama *Pasar Bakubae* atau pasar perdamaian.

Sangat disayangkan, nama pasar yang mengandung makna simbolik tersebut tidak digunakan seterusnya sebagai nama resmi oleh pemerintah kota Ambon namun dikembalikan pada nama lama yakni Pasar Mardika.

Dalam rangka mempercepat proses pemulihan sosial, pemerintah juga melakukan program rehabilitasi yang meliputi pemulangan pengungsi dan pembangunan rumah-rumah untuk penduduk. Sejak periode September 2003, Jumlah pengungsi yang berhasil dipulangkan sebanyak 19.313 KK. Kepada yang meninggal akibat konflik juga diberikan santunan berupa uang sebesar dua juta kepada ahli warisnya. Santunan juga diberikan kepada korban cacat tetap akibat konflik dan tidak mampu mencari kerja/nafkah sebesar satu juta per jiwa.¹⁸¹

Tabel. 16
Relap Pengungsi
Provinsi Maluku Tahun 2004

No	Kab/Kota	Jumlah KK		Ket
		suda ditangani	Belum ditangani	
1	Kota Ambon	11.971	7.861	Data pengungsi Kab. SBT dan SBB, masih masuk ke Kab. Maluku Tengah. Sedangkan Kab Aru masuk ke data Pengungsi Maluku Tenggara
2	Maluku Tengah	12.472	7.115	
3	Maluku Tenggara	7.788	4.795	
4	Pulau Buru	5.442	3.729	
5	Maluku Tenggara Barat	3.230	1507	
Total		40.903	25.007	65.910

Sumber : Dinas Sosial Maluku, 2005

Depkimpraswil juga menyediakan 9000 paket bantuan perumahan dengan dana lima juta per unit. Depsos menyediakan 10.800 paket, dan Depnakertrans 1200 paket, disamping itu dilakukan pembangunan kembali kompleks perumahan Waringin (Islam) dan daerah sebelahnya (Kristen), yang dilengkapi dengan pos penjagaan di tengahnya, sedangkan sarana umum yang dibangun 241 unit Mesjid

¹⁸¹ Diolah dari data Dinas Sosial Maluku 2004

dan Gereja, 10 unit bangunan rumah sakit, pasar Mardika dan 636 pasar tradisional, 92 unit sekolah, 6 buah puskesmas, 1 unit *traumatic center*. Pembangunan kembali gedung UNPATTI lama dan membangun gedung baru, pemberian beasiswa kepada 7230 anak, dan juga bantuan kesehatan dari Depkes, TNI dan Polri.¹⁸² Dana yang dihabiskan dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat dan APBD.

D. Penghentian konflik dan Agenda Perdamaian Selanjutnya.

Secara faktual dampak terbesar dari pelaksanaan Perjanjian Malino adalah berhentinya aksi-aksi kekerasan dan pemulihan keamanan di seluruh Maluku. Indikatornya dapat dilihat pada langkah pemerintah mencabut pelaksanaan Darurat Sipil di Maluku pada 20 September 2003 dengan Kepres No. 27 tahun 2003 yang mencabut Kepres No. 88 tahun 2000. Kondisi keamanan yang semakin membaik juga telah mendorong berbagai langkah pembangunan dan pemulihan kehidupan sosial di Maluku secara bertahap, khususnya relokasi dan pengembalian pengungsi. Dengan demikian Perjanjian Malino telah menjadi dasar pijakan yang sangat penting dalam merajut kembali perdamaian di Maluku.

Namun harus ditegaskan bahwa perjanjian tersebut belum menyelesaikan secara mendasar faktor-faktor yang menjadi akar persoalan konflik Maluku sebagaimana yang diuraikan di Bab II penelitian ini. Jika perjanjian Malino harus diletakkan dalam konteks kebijakan penyelesaian konflik secara keseluruhan, maka

¹⁸² Diolah dari berbagai sumber termasuk Laporan Pemerintah Daerah Maluku, 2003

secara objektif perjanjian Malino masih memiliki kelemahan-kelemahan yang patut untuk diperhatikan.

Pertama, proses persiapan hingga pelaksanaan Perjanjian Malino dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, kira-kira satu bulan. Dengan demikian para pihak yang bertikai dan berunding di Malino tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan berbagai masalah yang dianggap mendasar dalam penyelesaian konflik Maluku. Padahal pengalaman kebijakan penyelesaian konflik di tempat lain dilakukan secara terencana dalam waktu yang cukup sehingga pihak-pihak yang bertikai dapat berdialog dengan baik. Dapat dimaklumi jika masih ada sebagian tokoh-tokoh di Maluku yang belum bisa menerima upaya perdamaian tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah proses pembuatan kesepakatan Malino itu sendiri yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama dua hari. Proses yang cepat ini memberikan gambaran bahwa tidak terjadi dialog kritis antara pihak yang berkonflik. Proses negosiasi untuk menemukan titik temu kepentingan antara dua pihak yang berkonflik mungkin tidak terjadi secara maksimal. Model Malino I yang diterapkan di Poso kemudian langsung diterapkan di Maluku secara instan. Padahal dalam konteks konflik Maluku, masing-masing pihak harus diberi kesempatan lebih lama untuk saling berinteraksi dan berdialog secara jujur dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan semua masalah yang terjadi di antara mereka.

Kedua, dalam keseluruhan proses perjanjian Malino, tampak adanya kecenderungan elitisme dari para tokoh yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Atau dengan kata lain Perjanjian Malino harus diakui, masih merupakan inisiatif dari atas

(*top down approach*) yang dilakukan atas inisiatif elit, dan pesertanya juga adalah elit-elit masyarakat.

Tanpa harus mereduksi peran positif dan kerja keras yang telah dilakukan pemerintah yang dimotori Menkokesra Yusuf Kalla, dapat dikatakan bahwa dalam rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Perjanjian Malino, Pemerintah Pusat masih datang dengan konsep yang menempatkan diri mereka pada posisi juru selamat atau dewa penolong bagi masyarakat yang sedang dilanda konflik. Posisi masyarakat ditempatkan pada pihak yang bersalah atas konflik yang terjadi, oleh karenanya harus ditolong. Padahal dalam realitas yang sebenarnya pemerintah juga merupakan bagian dan penyebab konflik sehingga patut untuk digugat perannya. Pola *top down approach* ini menempatkan masyarakat sebagai obyek dari sebuah proses rekonsiliasi yang dilakukan. Sempitnya ruang gerak masyarakat untuk terlibat (partisipasi) dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan menjadikan hasil yang dicapai kurang aplikatif dan fungsional di tataran masyarakat, sehingga tidak mampu menjangkau hal-hal mendasar dari konflik. Dalam konteks ini protes dari kelompok penentang Malino patut mendapatkan perhatian.

Ketiga, selain keberhasilan untuk menghentikan konflik, isi Perjanjian Malino secara substantif tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang menjadi akar persoalan konflik Maluku. Sebelas butir perjanjian yang disepakati di Malino, hanya menyentuh "persoalan kulit" yang terjadi selama konflik. Misalnya tentang isu Laskar Jihad dan FKM/RMS yang diperdebatkan cukup sengit di Malino, padahal keduanya hanyalah merupakan eksekusi yang timbul dari konflik. Membubarkan Laskar Jihad atau FKM/RMS akan menciptakan suasana yang aman

dan kondusif, namun bukan merupakan jaminan bahwa konflik tidak akan terulang lagi, karena berbagai persoalan mendasar yang menjadi akar konflik Maluku belum terpecahkan dalam 11 butir Perjanjian Malino.

Oleh karena itu, setelah konflik dihentikan maka diperlukan kerja-kerja lanjutan untuk menyelesaikan secara bijaksana berbagai faktor utama yang menjadi akar konflik Maluku, sebagaimana sudah diuraikan dalam Bab II penelitian ini. Kerja keras itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip kultural dan religiusitas yang menjadi nilai yang bisa mengikat kedua belah pihak ke dalam sebuah bingkai persaudaraan dan perdamaian yang berjangka panjang, sehingga perdamaian yang tercipta bukanlah perdamaian sesaat yang diakibatkan oleh kuatnya represi aparat keamanan, atau karena keterdesakan ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat. Akan tetapi perdamaian yang tumbuh dan dipupuk atas dasar kesadaran tentang pentingnya kondisi damai bagi pembentukan kehidupan masyarakat Maluku yang lebih damai, beradab dan sejahtera.

Dalam perspektif resolusi konflik, tahapan selanjutnya setelah mengendalikan kekerasan bersenjata dan perundingan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok-kelompok yang bertikai, maka ada dua tahapan lagi yang harus segera direalisasikan sebagai suatu proses yang tidak terputus, yakni *pertama*, pemulihan sosial terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat pasca konflik. Rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap sarana-sarana yang rusak, termasuk memulangkan semua pengungsi ke tempat asalnya, atau direlokasi ke tempat lain yang lebih nyaman. Tahap ini harus diarahkan untuk menciptakan

kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi konflik.¹⁸³

Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai di Maluku dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Seperti yang disebutkan Jhon Burton, sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (*total environment*).¹⁸⁴

Kedua adalah tahapan *peace-building* yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama, karena tahapan ini memiliki orientasi struktural dan kultural yang bertujuan untuk melakukan perombakan struktur sosial-budaya sehingga dapat mengarah kepada pembentukan komunitas perdamaian.¹⁸⁵ Proses kultural dalam rangka menciptakan perdamaian (*peace building*) yang berjangka panjang memerlukan kesadaran, ketulusan dan kesungguhan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah (baik pusat maupun daerah) dan seluruh komponen masyarakat Maluku.

¹⁸³ Lihat tulisan Vivienne Jabri, *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered* (Manchester: Manchester University Press, 1996).

¹⁸⁴ Jhon Burton, *op.cit.*

¹⁸⁵ Andi Widjajanto, *Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru*, (Global: Jurnal Politik Internasional, Vol.1, No.7, (Februari 2001).

Untuk mengawasi dan memediasi kemungkinan munculnya konflik baru, diperlukan kehadiran sebuah lembaga perdamaian di tingkat lokal yang bekerja secara terus menerus menyiapkan sistem evaluasi dan monitoring yang tepat untuk menilai perkembangan perdamaian di Maluku setiap saat. Lembaga perdamaian ini mengemban tugas khusus menyiapkan konsep-konsep pembangunan perdamaian yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial-politik, ekonomi, budaya maupun agama dengan mencari pola-pola rekonsiliasi yang tepat sesuai dengan kondisi Maluku. Hal itu dapat diadopsi dari sistem pranata lokal yang sempat muncul di masa lalu dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kekinian yang semakin dinamis pasca konflik. Lembaga semacam itu juga diperlukan untuk melakukan mediasi jika terjadi insiden-insiden yang mengarah kepada konflik baru. Jadi sekali lagi, keberhasilan Perjanjian Malino dalam menghentikan konflik harus menjadi kesempatan emas untuk merangkai kembali semangat dan nilai baru yang bisa menyumbang kepada perdamaian yang langgeng di Maluku.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Sejak konflik Maluku meletus pada 19 Januari 1999, telah banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun sebagaimana kita saksikan kebijakan-kebijakan tersebut tidak berhasil menghentikan konflik. Bahkan yang terjadi sebaliknya, konflik terus berlangsung dengan tingkat kekerasan dan kerusakan yang sangat besar.

Kebijakan pemerintah yang cukup berhasil mengurangi dan menghentikan konflik Maluku adalah mendorong para pihak yang bertikai untuk berunding di Malino 11-12 Februari 2002. Perjanjian di Malino diprakarsai oleh Menkokesra Yusuf Kalla dan diikuti oleh 70 orang tokoh dari delegasi Islam maupun Kristen. Mereka berhasil mensepakati 11 butir pernyataan perdamaian yang dikenal dengan **Perjanjian Maluku di Malino**. Upaya serius dan penting dari Menkokesra Yusuf Kalla, dan pada tahap tertentu juga Menkopolkam Susilo Bambang Yudoyono dalam menggagas pelaksanaan Perjanjian Maluku di Malino merupakan sebuah prestasi pemerintah yang patut dihargai. Sebab melalui perjanjian tersebut, secara gradual konflik Maluku dapat diatasi dan upaya untuk merajut kembali perdamaian Maluku yang terkoyak dapat kembali dilakukan.

Pelaksanaan Perjanjian Malino adalah kebijakan persuasive yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Maluku. Momentum pelaksanaan Perjanjian Malino dilangsungkan dalam kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan dan lelah akibat konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, intervensi pemerintah untuk mendorong pelaksanaan Perjanjian Malino dan menghadirkan para pihak yang

bertikai untuk berdialog secara damai merupakan kebijakan yang sangat diperlukan di tengah kegagalan berbagai kebijakan yang pernah diambil sebelumnya.

Penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan dua masalah pokok penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan.

Pertama, Pelaksanaan Perjanjian Malino telah berlangsung dalam suasana damai, dialogis dan demokratis. Kedua pihak (Muslim dan Kristen) yang awalnya bertahan dengan pendapatnya masing-masing, khususnya terhadap dua isu krusial yakni keberadaan Laskar Jihad dan Front Kedaulatan Maluku (FKM) akhirnya dapat saling menerima pendapat dan tuntutan masing-masing, dan bersedia pula mengurangi bagian tertentu dari tuntutan mereka. Hal itu bisa terjadi karena 1) kedua delegasi menyadari bahwa penghentian konflik merupakan prasyarat mutlak untuk menggagas langkah-langkah perdamaian selanjutnya, 2) berbagai isu konflik yang dikemukakan oleh kedua delegasi, seperti Laskar Jihad, FKM/RMS, Laskar Kristus, Kristen RMS, peristiwa 19 Januari 1999, pengalihan agama secara paksa, pelanggaran hukum dan HAM disepakati untuk diselidiki lebih lanjut oleh sebuah tim independen sebagaimana tercantum dalam butir 6 Perjanjian Malino. Meskipun sangat demikian, disayangkan waktu yang diberikan selama proses menuju Malino bahkan selama perundingan di Malino sangatlah terbatas, sehingga belum melibatkan secara maksimal berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik. Para delegasi juga tidak berkesempatan untuk menggali lebih jauh berbagai persoalan yang menjadi penyebab konflik Maluku.

Kedua, Proses penyelesaian konflik dengan model perundingan yang dilakukan pemerintah dalam Perjanjian Malino untuk Maluku, ternyata hanya berdampak pada penghentian konflik dan penyelesaian faktor-faktor pemicu yang menjadi eksponen dari konflik. Namun belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang

menjadi potensi laten konflik Maluku, seperti i) adanya sentimen keagamaan yang berkembang sejak kolonialisme yang telah mewariskan segregasi sosial berdasarkan agama, ii) persaingan di tingkat birokrasi lokal yang tidak sehat, dan iii) kecemburuan ekonomi dan sosial akibat kebijakan ekonomi yang keliru. Dengan kata lain Perjanjian Malino hanya merupakan sebuah usaha penghentian konflik yang bersifat sementara dan selanjutnya menuntut proses lanjutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar tersebut sehingga perdamaian yang langgeng dapat tercipta kembali di Maluku.

B. Implikasi Teoritik.

Berdasarkan analisa dan data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pertama, tentang teori penyebab konflik dari Clifort Geertz yang menyatakan bahwa konflik di negara berkembang sebagian besar disebabkan oleh sentimen primordialisme. Menurut Geertz, ikatan primordial akan membentuk sentimen dan loyalitas primordial yang menghasilkan solidaritas yang kuat antar sesama anggota kelompok. Solidaritas dalam kelompok primordial atas dasar kesamaan suku/ras dan agama menghasilkan ikatan sosial yang amat kuat di antara anggota masyarakat sehingga membuat mereka bersedia membela kelompoknya dengan pengorbanan apapun.

Secara faktual, penelitian membenarkan teori primordial yang dikemukakan Geertz. Dalam konflik Maluku, pihak-pihak yang bertikai rela mengorban harta benda bahkan jiwa dan raga untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan primordialnya, yakni agama. Pembakaran dan pengrusakan terhadap simbol-simbol keagamaan yang

penting seperti gereja dan masjid dianggap sebagai serangan kepada kelompoknya, sehingga memicu kemarahan masyarakat untuk berperang menuntut peratnggungjawaban dan membela simbol-simbol tersebut.

Catatan lain yang perlu ditambahkan adalah pentingnya mencermati pengaruh factor-faktor eksternal dalam menjelaskan teori primordial. Dalam kasus konflik Maluku ada tiga variabel determinan, yakni kepentingan politik, kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan provokasi pihak luar. Kombinasi antara tiga factor tersebut membakar sentimen keagamaan masyarakat Maluku yang dikenal agresif, untuk menyulut anarkisme dalam bentuk-bentuk kekerasan yang sangat menakutkan.

Kedua, Kebijakan penyelesaian konflik haruslah dilihat sebagai kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena sebelas butir Perjanjian Malino belum mampu menjangkau berbagai persoalan mendasar dari konflik, sehingga perdamaian yang tercipta pasca Malino bukan merupakan jaminan bahwa kondisi damai tersebut akan langgeng. Jadi seperti yang disyaratkan Jhon Borthon, usaha penyelesaian konflik harus masuk ke akar persoalan dari suatu konflik, agar dapat diidentifikasi masalah-masalah mendasar dan proses penyelesaiannya. Dalam pendekatan teoritik resolusi konflik, dua catatan perlu diberikan. 1) dalam setiap proses penyelesaian konflik, mediator harus mendalami akar persoalan dari suatu konflik dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pihak yang bertikai untuk menggali masalah-masalah krusial yang menyebabkan konflik di antara mereka, 2) bahwa proses penciptaan perdamaian (*peace building*) merupakan proses yang memerlukan tahapan dan waktu yang panjang, sesuai kondisi dan karakter konflik itu sendiri.

C. Saran dan Rekomendasi.

Sumbangan terbesar dari Perjanjian Malino adalah berhentinya konflik dan kekerasan dan semakin terciptanya suasana damai di Maluku dari waktu ke waktu. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa apa yang dicapai dalam perjanjian tersebut serta implementasinya di lapangan belum menyelesaikan secara mendasar faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai akar persoalan konflik Maluku. Padahal seperti yang sudah diuraikan di muka, konflik Maluku berakar pada berbagai persoalan-persoalan mendasar yang telah terbentuk dalam kurun waktu yang lama.

Oleh karena itu dalam hal kebijakan penyelesaian konflik dengan model perundingan seperti yang dilakukan pemerintah untuk Maluku, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, keterlibatan yang maksimal dari semua unsur yang terlibat dalam konflik. Para elit yang berundingan haruslah para tokoh yang memiliki legitimasi yang kuat dan memiliki akses kepada kelompok-kelompok yang bertikai. Dengan demikian apa yang disepakati oleh elit yang berunding mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bertikai sehingga secara sukarela mereka mau mentaati hasil kesepakatan tersebut.

Kedua, metodologi perundingan harus dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pihak yang berunding untuk melakukan sosialisasi dan menggali aspirasi dari komunitasnya. Demikian pula waktu pelaksanaan mesti diatur agar para pihak yang berunding dapat berdialog secara kritis dan dialogis sehingga tergali berbagai persoalan yang menjadi akar konflik dan cara-cara penyelesaiannya.

Ketiga, Kecenderungan pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia dengan pendekatan *koorsif* harus dikurangi, sebaliknya perlu mengedepankan pendekatan persuasif. Model Perjanjian Malino dalam menyelesaikan konflik SARA

seperti yang dilakukan dalam konflik Maluku dan Poso dapat diadopsi sebagai bagian dari kebijakan resolusi konflik yang perlu dikedepankan pemerintah di masa depan. Tentu saja harus dikembangkan dan diperkaya dari segi metodologi, konsep perundingan, implementasi dan pengawasan pasca perundingan perdamaian.

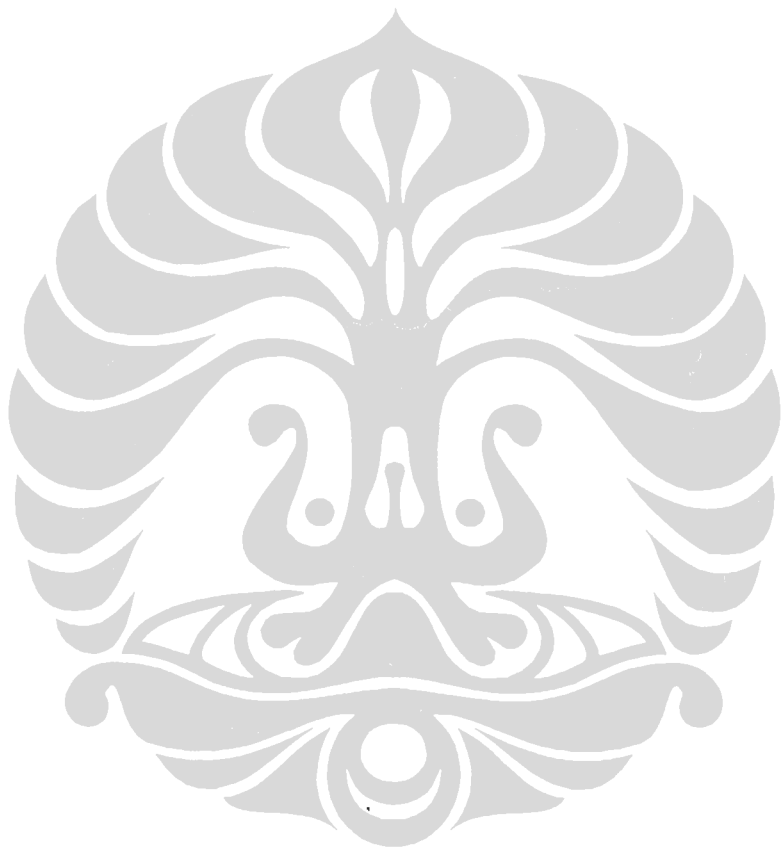
Keempat, situasi damai yang sudah tercipta di Maluku saat ini, harus dimanfaatkan untuk melakukan langkah-langkah yang bisa menciptakan tatanan politik, ekonomi, sosial dan keagamaan yang lebih harmonis dan demokratis di Maluku. Untuk itu hal-hal yang perlu dibenahi sebagai berikut:

1. Penataan sistem politik dan birokrasi secara rasional dengan mempertimbangkan secara cermat aspek rekrutment dan pengkaderan berdasarkan kualitas profesionalitas dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyegerakan proses pembangunan ekonomi masyarakat, dan memberdayakan seluruh masyarakat pasca konflik. Masyarakat lokal yang tidak terbiasa dalam bidang perdagangan dan bisnis dapat diberikan pelatihan-pelatihan manajerial sehingga mereka mampu bersaing secara sehat di bidang tersebut dengan masyarakat pendatang. Hal ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang ekstrim di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
3. Membangun dialog keagamaan untuk menumbuhkan sikap beragama yang inklusif, plural, egaliter dan toleran sehingga mampu mengeleminir menguatnya sentimen keagamaan di tengah masyarakat.
4. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus bisa menciptakan komunitas yang heterogen. Pembauran masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dan etnis pada areal pemukiman yang sama akan menumbuhkan interaksi dan interelasi yang positif di tengah masyarakat. Sebaliknya pemukiman penduduk

yang homogen berdasarkan teritori keagamaan, suku dan negeri seperti yang terjadi di Ambon, terbukti sangat potensial melahirkan segregasi sosial yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

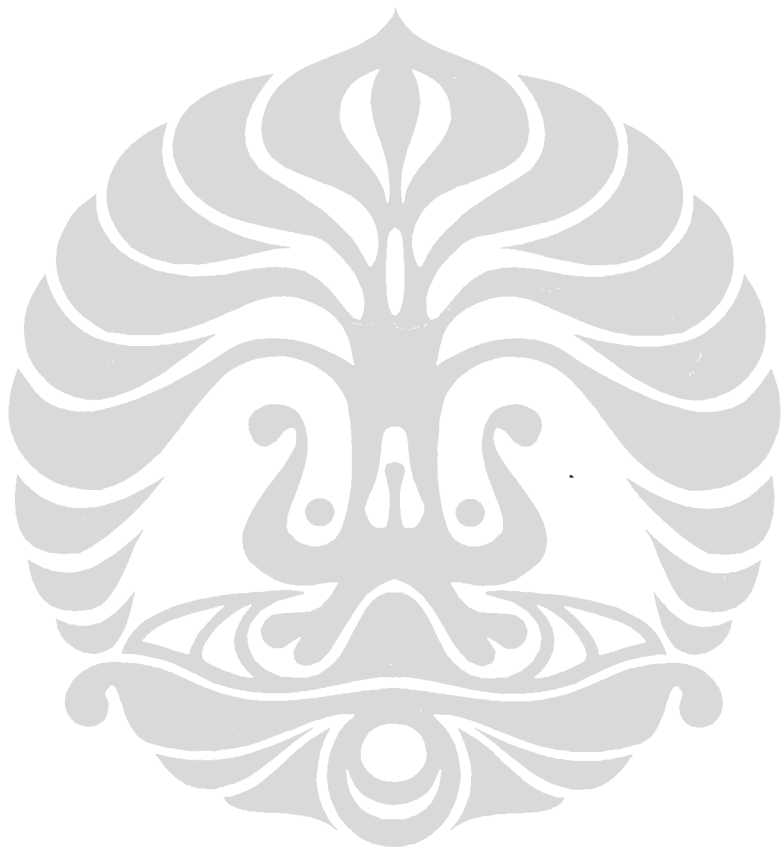
5. Untuk melanjutkan proses perdamaian yang telah tercipta di Maluku pasca Perjanjian Malino, perlu dibentuk sebuah lembaga perdamaian yang secara formal memfasilitasi proses dialog perdamaian yang berkelanjutan dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang telah mengakibatkan terjadinya konflik di Maluku. Lembaga dimaksud akan bekerja secara terencana dengan program-program praksis yang dapat mendorong penciptaan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama yang kondusif dan demokratis. Pemerintah dapat memanfaatkan atau meminta pertimbangan dari lembaga perdamaian tersebut untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang secara sinergis mendorong terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini menemukan berbagai persoalan lain yang perlu diteliti lebih lanjut. Masalah yang paling krusial adalah bagaimana menjelaskan keterlibatan militer dalam konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku. Indikasi tentang keterlibatan tersebut memang ditemukan, namun penelitian ini belum mampu mengungkap secara lebih bentuk keterlibatan militer tersebut. Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar temuan awal tersebut dapat menjadi bahan masukan yang dapat diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, gambaran yang jelas tentang faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab konflik Maluku dapat diperoleh, sehingga kebijakan untuk menangani konflik Maluku, lebih mudah untuk dilakukan. *Semoga!*



Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik., *Peran Nilai-nilai Budaya dan Struktur Sosial Terhadap Integrasi Nasional*, dalam Ignas Kleden (edit) *Timur dan Barat di Indonesia Perspektif Integrasi Baru*, (Jakarta: The Go Institute, 2000).
- Adicondro, George Junus, *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 20004).
- Azra, Azumardi., Pengantar dalam buku *Merajut Damai di Maluku (Telaah Konflik Antar Umat 1999-2000)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia dan Yayasan Pustaka Umat, 2000).
- A. Levine, Robert dan Donalt T. Campbell, *Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes, Group Behavior*, (New York: Jhon Williems and Sons Inc, 1972).
- Adjamsyah, S., *Konflik Berlatar Belakang Etnis dan Agama di Maluku*, (Bndung: Forum Rektor, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2000)
- Burton, Jon, *Conflict: Resolution and Provention*, (New York: St. Martin's Press, 1990).
- Cahuvel, Richard., *Nationalits, Soldier and Separatists*, (Leiden: KITLV Press, 1990).
- Ecip, S. Sinansari, *Bila Cengkeh Tak Berbunga (Membuka Rusuh Ambon)*, (Jakarta: Cahaya Timur, 2003)
- Hugh Mail, oliver Ramshbotham dan Tom woodhouse, *Resolusi Damai dan Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002)
- International Dictionary, Meriam – Webster Inc. Publisher, 1993
- Kasman Hi. Ahmad dan Herman Oesman , *Damai yang Terkoyak*, (Jakarta: Kelompok Studi LPAM Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara dan Madani Press, 2000).
- Kastor, Rustam., *Selamatkan Maluku dari Ancaman Ideologi Separatis RMS*, (Jakarta, KPM, 2004)
- Levine, Robert A. dan Campbell, Donalt T., *Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes, Group Behavior*, (New York: Jhon Williems and Sons Inc, 1972).



- Lestaluhi, Maryam., *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imprealisme di daerah Maluku*, (Bandung; Al-Maarif, 1988).
- L.Z. Leirisa, *Tiga Pengertian Istilah Maluku dalam Sejarah*, dalam *Bunga Rampai Sejarah Maluku (I)*, (Jakarta; Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, 1973)
- Marasabessy, Suadi, *Maluku Baru; Suatu Wujud Ideal Masyarakat Maluku Pasca Konflik*, (Jakarta; Kelompok Kerja Masalah Maluku, 2002)
- Moleong L.J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Nahumarury, Abdullah., *Manajemen Pengelolaan Senjata dalam Konflik Maluku*, (Tesis-UGM: 2005)
- Peris, John., *Tragedi Maluku, Sebuah Krisis Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Pelly, Usman., *Pengukuran Intensitas Potensi Konflik Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: jurnal Analisis CSIS, tahun XXII, No. 3, 1993).
- Prasetyo, Eko., *Memahami Wajah Para Pembela Agama, Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Arus Global*, (Yogyakarta: Insist, 2002)
- Rauf, Maswadi., *Konsensus Politik, Sebuah Penjajagan Teoritis*, (Jakarta: Ditjen Dikti, 2000).
- Ratnawati , Tri., *Mencari Perdamaian di Maluku*, dalam WAI. Stockof, dkk., *Konflik Komunal di Indonesia* , (Jakarta: INIS Universitas Leiden bekerjasama dengan IAIN Jakarta, 2003).
- Reily' Ben (edit), *Democracy and deep-Rooted Conflict: Option for Negotiator*, (International IDEA, 2000).
- Ritzer,George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta; Rajawali Press, 1992)
- Rizal, Andi Syamsu, *Konflik Komunal dan Ketersingkirkan Sosial I*, (Jakarta; Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdiknas, 2001)
- Santoso, Thomas., *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Surbakti, Ramlan., *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Garsindi, 1992).
- Sanapia, Faisal., *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).
- Taufiq A. Tuhana, *Konflik Maluku*, (Yogyakarta: Gamal Global Media, 2000)

Tajudin, Mohamunad Zulfan, *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia, 1990-2001*, (Jakarta: UNDP, 2002)

Tim Depdagri, *Maluku; Profil Provinsi Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bhakti Nusantara, 1992).

Tumargor, Rusdi., *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial; Studi Pemulusuran Idea tentang Kawasan Komunitas Krisis Suatu Bangsa dan Perubahan Kebijakan*, (Jakarta: LEMLIT dan LMP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)

Ukhrowi, Zaim, dkk., *Merajut Damai di Maluku; Telaah Konflik antar Umat 1999 – 2000*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Utama, 2000)

Vivienne, Jabri, *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered* (Manchester: Manchester University Press, 1996).

Widjajanto, Andi., *Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru*, (Global: Jurnal Politik Internasional, Vol.1, No.7, (Februari2001).

Jurnal

Kanjoli, edisi Juli-September 2005

Analisis CSIS, tahun XXII, No. 3, 1993.

Antropologi Indonesia XXVII, 74, Mei-Agustus 2004

Global: Jurnal Politik Internasional, Vol.1, No.7, (Februari2001).

ICG Asia Report. No. 31, Januari 2002

Makalah

Aditjondro, George J., *Orang-Orang Jakarta Di Balik Tragedi Maluku*, (Jakarta, 2000)

Azra, Azumardi., *Muslim and Christian Relation in Contemporary Indonesia*, makalah pada Komprensi tentang "Christian and Muslim in The Commonwealth", Windsor, Inggris, 6-9 Juli 2000.

Amal Tomagola, Tamrin dan Jacky Manuputy, *Fase Terbaru Konflik Ambon*. Jakarta, September 2004

Brata, Aloysius Gunadi Brata, *Konflik di Masa Krisis; Studi Empiris Determinasi Keadilan Sosio-Ekonomi*, Yogyakarta, Januari 20002.

El Fatih A. Abdel Salam, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik* Associate Professor, Department of Political Sciences, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia dalam www.groups.yahoo.com/group/sosiologi_profetik).

Marasabessy, Hasyim, *Kebijakan Departemen Agama tentang Kerukunan Umat Beragama di Maluku*, Ambon, 2003.

Margawati, Margawangi dan Tony Aryanto, *Konflik Antaragama atau Politisasi Agama?*, Makassar, Agustus 2000.

Tawainela, M. Nur., *Motivasi dan Partisipasi Generasi Muda dalam Pembangunan Bangsa*, Ambon, 2005

Jamu'in, Maarif., *Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, Surabaya, 8 april 2000.

Trijono, Lambang., *Konflik Tidak, Rujukpun Tidak*, Yogyakarta, 2001.

Titaley, Sammy., *Suatu "Keanehan" yang Nyata*, Jakarta, 2003

Tim PSPK, *Pertikaian Antaretnik dan Keberadaan TNI (Kasus Ambon-Maluku)*, Jakarta, 25 Mei 2000.

Kliping Koran dan Majalah

Ambon Ekspres, 26 April 2004

Kompas, 16 Februari 2002.

Tempo Interaktif, 6 Mei 2004

Suara Maluku, 2 Mei 2002

Tekad, 1 Februari 1999.

Dokumen-dokumen

Eksponen Peserta Pertemuan Maluku di Malino, *Pokok-Pokok Pikiran Hasil Evaluasi Perjanjian Maluku di Malino*, Jakarta 25 Agustus 2005.

Delegasi Islam, *Pandangan Umat Islam Terhadap Persoalan Konflik Kekerasan di Maluku*, (Malino, 11 Februari 2002)

Pokok-pokok Pikiran Umat Islam Maluku (Ambon, 25 januari 2002)

Pokok-pokok Pikiran Umat Islam Maluku (Pengurus Pusat Badan Imarat Muslim Maluku (BIMM),

Visi Masyarakat Kristen Maluku tentang Penyelesaian Konflik Maluku (Ambon 29 Januari 2002)

Pokok-pokok Pikiran Dalam Rangka Proses Penghentian Pertikaian Maluku (Gereja Protestan Maluku dan Keuskupan Amboina, Jakarta, 2 September 2000)

Keuskupan Amboina, *Litas Kerusuhan Maluku No.1 : 1-15 Mei 2002* (Ambon; 2002)

DPRD Prop. Maluku, *Laporan Pokok-Pokok Kebijakan Penanganan Konflik Maluku-DPRD Maluku*, 2003

Komnas HAM, *Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi di Maluku* (KPMH), 18 Desember 2000.

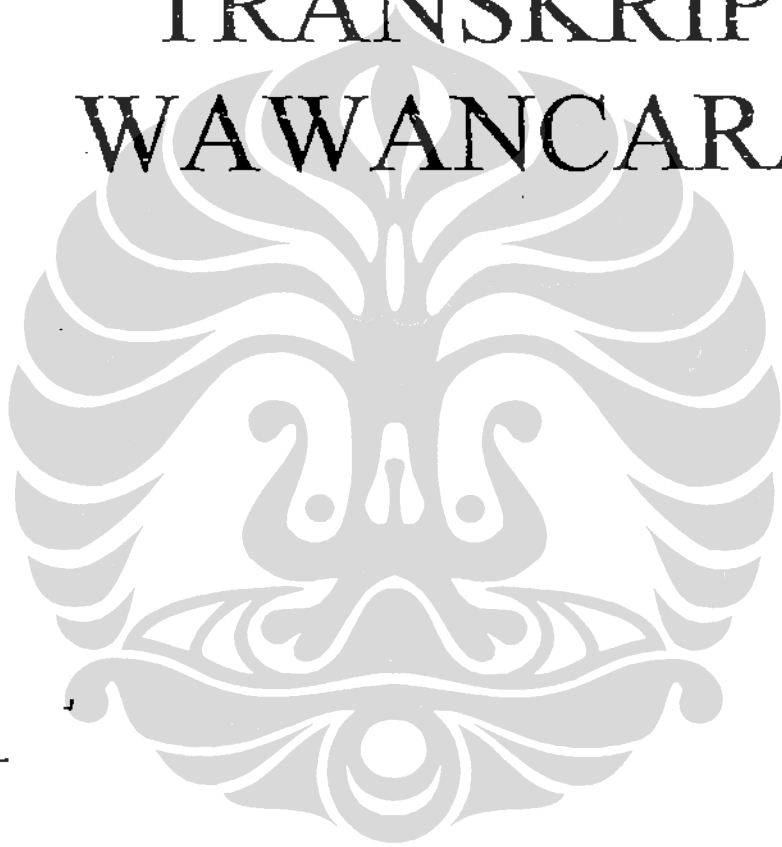
Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Notulen Hasil Pertemuan Makassar*, 12-13 Februari 2002.

UNDP, *Peace and Development Analysis, Provincial workshop Proceeding*, (Jakarta., 2004).

Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Panduan Pertemuan untuk Maluku*, 10 Januari 2002

Laporan Penanganan Pengungsi Provinsi Maluku, (Dinas Sosial Maluku 20004)

TRANSKRIP WAWANCARA



Transkrip Wawancara

Pendeta Dr. Jhon Ruhulesin.

(Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM); Anggota Delegasi Kristen).

Wawancara di Lakukan di Kantor GPM, Kompleks Gereja Maranata Ambon. 20 Desember 2004)

1. *Menurut Pak Jhon apa sebenarnya yang menyebabkan konflik Maluku.*

Pertanyaan saudara ini hanya bisa dijawab dengan suatu penelitian ilmiah yang komprehensif. Tapi kalau saudara tanya pendapat saya, maka saya bisa katakan bahwa yang mendisain konflik di Maluku sangat cerdas dan hebat. Dia mengerti betul tentang Maluku. Bahwa di Maluku ada potensi konflik yang bisa di manfaatkan untuk kepentingannya.

2. *Persoalan Apa yang anda maksud?*

Banyak sekali orang membangun teori tentang penyebab konflik Maluku. tetapi yang sangat mendasar adalah kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada persoalan ekonomi yang membuat masyarakat semakin sulit dari hari ke hari. Budaya lokal yang semakin luntur dan tidak ada kebijakan untuk memproteksi hal itu. Lalu ada juga kelompok elit nasional yang inemanaskan situasi untuk kepentingannya. Karena saat itu sedang dalam masa transisi dan menjelang pemilu. Jadi kesimpulan saya, konflik Maluku bukanlah konflik agama tetapi konflik yang memanfaatkan sentimen-sentimen keagamaan?

3. *Umat Islam menuntut penyelesaian kasus 19 Januari dan FKM/RMS. Komentar pa Jhon?*

Sebenarnya kami juga sepakat. Bahkan bila perlu dibuka semua masalah-masalah yang menjadi penyebab maupun *trigger* konflik Maluku. Bukan hanya FKM/RMS, tapi juga kssus lainnya, seperti Laskar Jihad, Tuduhan Kristen RMS, pelanggaran HAM serta isu-isu lainnya. Karena itu kita kecewa kenapa hasil penelitian Tim Independen tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

4. *Bisa diceritakan bagaimana penyelesaian konflik Maluku sebelum perundingan Malino?*

Sebelum Malino sudah banyak usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. misalnya pembentukan TIM 6 yang kemudian menghasilkan PUSAT RUJUK. Dan masih banyak lagi tim-tim lainnya. Tetapi semua itu tidak jalan dilapangan karena lemah di tingkat implementasi. Tetapi usaha-usaha penyelesaian konflik yang dilakukan sebelum Malino harus dilihat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik yang puncaknya ada di Malino itu.

5. *Ada kritik bahwa Malino hanya inisiatif elit atau tegasnya keinginan Yusuf Kalla.*

Menurut saya Perjanjian Malino adalah sebuah model penyelesaian konflik yang mempertemukan pendekatan *Top down* dan *Bottom Up*. Karena sebelum Malino para tokoh agama dan masyarakat di Maluku juga telah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik. Bahwa kemudian ada kebijakan dari YK untuk membawa ke Malino kita anggap sebagai fasilitator saja. Toh *kita-kita* juga yang berunding di Malino, Namun pemerintah juga ikut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil yang kita sepakati. Jadi perjanjian Malino adalah perjanjian *tripartit* antara pemerintah, umat Islam dan Umat Kristen.

6. *Apakah dalam penyusunan delegasi ada penentangan dari internal masyarakat Kristen?*

Memang ada suara-suara yang meragukan, seperti dari eksponen FKM. Tetapi kita tetap jalan terus.

7. *Tentang FKM/RMS banyak sekali yang menganggap sebagai provokator konflik, menurut Pa Jhon?*

Anda harus ingat sejarah RMS itu adalah sejarah tentang resistensi sekelompok orang Maluku terhadap kebijakan Pemerintahan Sukarno pasca Kemerdekaan. Dan itu melibatkan orang Islam maupun Kristen Maluku. Rapat-rapat pembentukan RMS justru dilakukan di desa Tulehu, salah satu desa Muslim terbesar di pulau Ambon. Dan Raja Tulehu Ibrahim Ohorela terlibat langsung secara intens dalam proses-proses tersebut. Saya menyebutnya "Konspirasi Tulehu". Tesis Magister saya kebetulan tentang RMS. Karena itu saya menyimpulkan bahwa RMS adalah konflik kepentingan antara mereka yang pro RIS atau pro desentralisasi dan yang pro pada negara kesatuan. Selain itu dapat juga disimpulkan konflik antara beberapa tokoh yang tidak lagi diberikan jabatan seperti yang diharapkan dalam negara kesatuan. Jadi tidak ada hubungannya dengan Agama. Dan RMS sendiri sudah lama mati. Hanya tinggal *puing-puingnya* yang sekarang masih digunakan sekelompok orang sebagai dagangan politik di negeri Belanda. (Sambil ketawa)

8. *Kalau tentang FKM?*

Ada beberapa tokoh Kristen yang merasa kecewa dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani konflik. *Kok* Maluku dibiarkan sampai seperti ini, ada orang datang dari luar Maluku dengan senjata, ada apa sebenarnya. Mereka lalu mendeklarasikan FKM. Dalam perjalanannya para eksponen FKM menggunakan atau meminjam model perlawanan RMS. Padahal itu salah. Mereka tidak mengerti sejarah RMS. Dan FKM itu hanya sekelompok kecil orang saja. Tidak semua orang Kristen simpati dengan gerakan FKM.

Selanjutnya *beta* mau bilang bawa FKM, Laskar Jihad dan isu-isu lainnya merupakan akses dari konflik yang menambah energi konflik. Isu-isu itu membuat orang lupa pada *tangan raksasa* yang mendisain konflik ini. Karena itu setelah Malino kita juga harus menyelesaikan berbagai keterbelakangan yang saat ini membuat rakyat Maluku hidup

dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sehingga para provokator dengan mudah dapat memanfaatkan kondisi tersebut.

9. *Siapa yang anda maksudkan dengan tangan raksasa?*

Wah kalau itu saya tidak tau persis. Harus tanya sama tim penyelidik Independen.

10. *Bisa diceritakan tentang dinamika yang terjadi di Malino?*

Perjanjian Malino itu menjadi bukti bahwa masyarakat Maluku sebenarnya mampu menyelesaikan masalahnya secara beradab. Dan ini terbukti para delegasi dapat meletakkan kepentingan perdamaian di atas segala perbedaan pandangan. Bahwa ada beberapa perbedaan pandangan, itu biasa. Karena bagaimanapun kedua belah pihak baru terlibat dalam sebuah konflik yang cukup tajam.

11. *Jadi tidak ada perdebatan serius?*

Oh ada... tapi saya anggap itu bagian dari dinamika sebuah perundingan untuk melahirkan hasil yang terbaik. Sekarang yang perlu kita tuntut adalah apakah pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan masalah ekonomi termasuk penanganan pengungsi dan pembangunan kembali Maluku pasca Konflik. karena saya termasuk salah satu anggota komisi yang membidani ekonomi waktu di Malino. Saya menuntut komitmen pemerintah.

12. *Kenapa Delegasi Krsiten Keberatan dengan Tindakan terhadap RMS sebagai provokator konflik.*

Pertama, begini, seperti yang sudah saya jelaskan, RMS itu sebenarnya isu pengalihan saja. Kalau kita bicara secara jujur FKM itu sudah menjadi masa lalu. Memang ada beberapa eksponennya yang masi mimpi tentang cita-cita RMS, tetapi jumlah mereka sedikit dibandingkan kita-kita yang menolak.

Kedua, kita juga perlu membaca fenomena FKM secara jujur dan bijaksana. Kelompok ini sebenarnya muncul sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah. Mengapa konflik ini begitu dahsyat dan tidak bisa dihentikan? Ada kelompok milisi sipil yang datang ke sini dan pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal tugas negara yang paling utama adalah melindungi rakyatnya dari segala ancaman dan ketidaknyamanan. Lagi pula FKM bukan kelompok bersenjata yang harus diperangi seperti pemerintah berperang dengan GAM atau OPM.

13. *Menurut anda apakah semua komitmen Malino itu suda dilaksanakan?*

Untuk keamanan, saya harus akui sekarang kita sudah relatif berhasil. Tetapi pemulangan pengungsi, pembangunan sarana dan prasarana sampai sekarang masi jalan di tempat. Banyak pengungsi yang masih berda di tempat pengungsian, padahal mereka potensial melahirkan konflik. karena itu kita mendesak pemerintah untuk segera memberesi masalah pengungsi ini. Kemudian, percepatan pembangunan juga

belum terlalu nampak. Pemerintah harus serius menangani masalah Maluku pasca konflik. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Ingat pemerintah masih punya tanggung jawab terhadap kesepakatan Malino.

14. Menurut anda apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki relasi-relasi keagamaan yang sudah terlanjur terkoyak selama konflik.

Betul, itu pekerjaan besar dan merupakan proyek bersama basudara Salam dan Sarani. Sebenarnya sejak dahulu hubungan Islam dan Kristen tidak ada masalah. Akan tetapi pengaruh politik dll., itu yang membuat hubungan keagamaan menjadi kaku dan penuh kecurigaan. Untuk masa depan kita harus menjaga agar agama di Maluku tidak lagi dianfaatkan untuk kepentingan politik.

Kita harus terus menerus mendorong tumbuhnya nilai-nilai keagamaan yang toleran, inklusif, pluralis dan humanis. Di gereja-gereja para pendeta selalu membicarakan nilai-nilai tersebut. Saya juga bangga pada kesadaran anak muda Maluku pasca konflik, mereka membentuk sebuah lembaga namanya EL-AI-EM (Lembaga Antar Iman). GPM, Keuskupan dan MUI menjadi penasihat. Ini suatu perkembangan yang mengembirakan. Sebagai pemimpin agama kami bertugas mensosialisasikan nilai-nilai yang diusung anak-anak muda itu kepada umat. Saya diundang berdiskusi dengan teman-teman di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), saya katakan masa depan Maluku sangat ditentukan oleh bangunan nilai-nilai keagamaan yang kita ciptakan hari ini. Sekarang dalam kegiatan-kegiatan Natal, kita dapat hiburan *Nasit* dari saudara-saudara kita yang Muslim. Sebagai ketua Sinode saya bangga sekali.

15. Bagaimana dengan Nilai-nilai Kultural seperti *Pela-Gandong*, apakah perlu dihidupkan kembali?

Oh iya. Saya kira nilai-nilai itu sangat menentukan cara kita beragama di Maluku. Saat ini nilai-nilai tersebut saya rasakan semakin luntur. Akhirnya kita menjadi kehilangan identitas kemalukuan. Saya pernah ditanya mengapa konflik Maluku setelah Malino bisa selesai, sementara Poso tetap bergolak hingga sekarang. Saya bilang jawabannya sederhana saja, karena di Maluku ada *orang Islam asli Maluku* dan *orang Kristen asli Maluku* yang mengerti kearifan-kearifan lokal dan kultur kemalukuan. Karena itu, kita tidak hanya tergantung pada model penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah. Tetapi kita menggunakan pola-pola kultural yang dimengerti oleh masyarakat kita. Berbeda dengan di Poso, mereka menyerahkan proses-proses mediasi sepenuhnya pada pemerintah.

Jadi kita berharap masyarakat kita bisa mengambil hikmah atas konflik yang terjadi selama lima tahun ini, dan kedepan tidak boleh terjadi lagi hal-hal seperti itu. Amen.

Transkrip Wawancara

Drs. Tony Pariela, M.Si

(Akademisi: Dosen Universitas Pattimura Ambon, Ketua Delegasi Kristen)

Wawancara dilakukan via telepon 081243000040, 24 Desember 2006.

1. *Apa saja visi dan misi delegasi Kristen dalam perjanjian Malino?*

Umat Kristen sangat menyadari bahwa konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, tidak punya manfaat apapun, selain hanya mengakibatkan rupa-rupa kerugian, kehancuran, kemerosotan dan penderitaan. Karena itu, delegasi Kristen datang ke Malino dengan satu tujuan, menghentikan konflik tanpa kekerasan. Kita ingin menyelesaikan konflik Maluku dengan cara-cara beradab dan dialogis.

2. *Bagaimana sebenarnya proses yang dilakukan menuju Malino?*

Prosesnya sebenarnya sangat sederhana saja. Pak Yusuf Kalla sebagai mediator mengajak kami berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan konflik Maluku. Beliau menawarkan Malino. Dan kami sangat respon sekali.

3. *Apakah ada penolakan dari internal masyarakat kristen?*

Memang ada beberap individu dan komponen masyarakat yang menolak, tapi ini merupakan kelompok yang sangat kecil. Seperti kelompok-kelompok yang bergabung dalam FKM.

4. *Kenapa kelompok FKM tidak dilibatkan saja sekalian dalam Malino, agar kita juga tahu, sebenarnya apa yang diinginkan mereka?*

Memang waktu itu ada juga wacana seperti itu. Tapi kami melihat FKM, termasuk juga Laskar Jihad, merupakan bagian dari masalah konflik yang juga harus diselesaikan. Jadi langkah selanjutnya bisa dilakukan setelah Malino. Kita juga perlu lihat konstelasinya, kalau mereka diajak delegasi Islam pasti menolak, jadi kita cari jalan tengah. Yang penting tujuan kita untuk menghentikan konflik dan membangun perdamaian bisa tercapai.

5. *Usulan delegasi Kristen cukup terinci, bisa dijelaskan?*

Ya kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita ingin ini perundingan terakhir dan sukses. Selama ini hasil perdamaian sangat dipengaruhi oleh implementasi di lapangan. Sementara indikator yang dipakai untuk menilai pelaksanaan perdamaian di lapangan tidak ada. Akhirnya masing-masing pihak, demikian juga pemerintah, cenderung berjalan sendiri-sendiri.

6. *Apa keinginan, unek-unek atau visi delegasi Kristen yang tidak ditampung dalam butir-butir perjanjian Malino?*

Saya kira semuanya, jalan meski ada beberapa hal yang masi menggantung, tapi itu semua diusulkan untuk diteliti lebih lanjut oleh Tim Penyelidik Independen.

Wawancara dihentikan karena sambungan telepon terputus.

Transkrip Wawancara

Pendeta. Jacky Manuputty, STI

(Tokoh Agama-Anggota Delegasi Kristen, wawancara dilakukan di Kantor Sinode GPM Maluku, 20 Desember 2005)

1. *Bagaimana sebenarnya pandangan komunitas Kristen terhadap FKM?*

FKM itu hanya merupakan gerakan sekelompok orang yang tidak mengerti tentang Maluku. FKM itu tidak banyak pengikutnya.

2. *Namun mengapa di Malino, delegasi Kristen cukup tegas mempertahankan FKM/RMS?*

Begini, pada dasarnya kami juga sangat menolak RMS/FKM. Tetapi kami tidak ingin ada rekayasa, sehingga seolah-olah FKM/RMS yang mensponsori konflik Maluku. RMS itu sudah sangat lemah dan tidak kuat lagi di Maluku. delegasi Kristen meyakini bahwa ada tangan yang tidak kelihatan baik di level nasional maupun lokal yang mendisain konflik. Kita khawatir isu RMS hanya dikdepankan sebagai kambing hitam oleh aparat keamanan untuk menutupi persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu di Malino, kami sepakat ada tindakan hukum terhadap eksponen FKM/RMS sekaligus juga harus dilakukan penelitian mendalam oleh Tim Independen apakah betul merekalah yang mendisain konflik Maluku. Ini penting untuk kebenaran dan rekonsiliasi.

Selain jangan ada penggiring opini bahwa Kristen itu identik dengan FKM/RMS, apalagi sampai muncul opini Kristen RMS, itu perlu diluruskan. Karena urusan RMS adalah urusan pembangkangan sekelompok orang terhadap negara, bukan urusan umat Kristen ataupun Gereja di Maluku.

3. *Apakah FKM merupakan sayap politik RMS?*

Itu harus dibuktikan lebih lanjut. Tetapi jika saya lihat fenomena FKM ini sebenarnya hanya merupakan resistensi kelompok tersebut terhadap kondisi konflik dan sikap pemerintah yang gamang. Semacam organisasi sosial kultural. Dan, kalau kita ikuti dari awal, sebenarnya banyak tokoh Kristen Maluku yang ikut hadir pada saat deklarasi FKM. Tetapi karena FKM diserang secara keras, maka Alex Manuputty lalu mencari ideologi perlawanan. Yang paling gampang adalah menggunakan simbol-simbol perlawanan RMS. Ini yang membuat beberapa tokoh yang hadir dalam deklarasi FKM menyatakan diri keluar, karena tidak setuju dengan pikiran-pikiran Alex.

4. *Lalu bagaimana dengan Laskar Jihad?*

Pemerintah harus bertanggung jawab karena telah membiarkan mobilisasi Laskar Jihad memasuki wilayah Maluku tanpa disertai upaya pencegahan yang serius dan nyata. Selama berada di Ambon, Laskar Jihad telah terlibat dalam berbagai kerusakan bahkan berani menerapkan hukum lain di luar hukum positif yang berlaku". Seperti

pelaksanaan hukum rajam yang pernah dipraktekkan di Ambon. Mereka juga juga ikut menyebarkan sentimen kegamaan di kalangan masyarakat dan melakukan Islamisasi paksa terhadap beberapa wilayah di Maluku.

5. *Bagaimana anda melihat isu-isu yang diperperdetkan selama proses hingga meja perundingan di Malino?*

Cukup dinamis, namun semuanya bisa dicari titik temunya. Akhir-akhir ini saya melakukan perenungan terhadap kesepakatan di Malino. Saya akhirnya menyadari bahwa apa yang kita ributkan di Malino itu semuanya bukanlah persoalan fundamental yang mengakibatkan konflik di Maluku. Kita dibuat tegang oleh kasus Laskar Jihad dan FKM/RMS. Menurut saya kita terjebak dengan isu *trigger* seperti itu. Nah, dengan situasi yang semakin membaik sekarang ini, kita mesti memulai lagi membicarakan berbagai persoalan mendasar tersebut dengan cara-cara kultural yang dimengerti oleh rakyat kebanyakan.

6. *Artinya, anda melihat Malino itu belum menyelesaikan konflik Maluku?*

Benar, perjanjian Malino itu baru sebatas menghentikan konflik. karena prosesnya adalah penghentian konflik, kami menghindari membicarakan masalah-masalah yang berat. Misalnya kita menghindari membicarakan keterlibatan militer, yang diakui atau tidak diakui mereka juga terlibat. Kita juga hindari bicara tentang masalah-masalah lainnya yang bisa menggagalkan perdamaian.

7. *Menurut anda, apa sebenarnya yang menjadi akar konflik Maluku?*

Akar konflik Maluku itu sangat beragam bentuk dan coraknya. Jika kita buat sebuah lingkaran besar, lalu di dalam lingkaran besar itu kita isi dengan lingkaran-lingkaran kecil yang banyak. Kita bisa lihat bahwa lingkaran-lingkaran kecil itulah gambaran berbagai faktor yang menyebabkan konflik Maluku. karena itu penyelesaiannya perlu dilakukan secara terencana dan hati-hati.

8. *Menurut anda apakah kondisi damai yang sudah berlansting di Maluku bisa terus dipertahankan.*

Sebagai orang Maluku kita harus bisa terus mempertankan perdamaian ini, karena tugas kita mewariskan Maluku ini kepada generasi seterusnya. Nah, ini yang harus dipikirkan.

Transkrip Wawancara

Letjen (Purn) Suadi Marasabessy, S.Ip.

(Mantan Pangdam Wirabuana, Kasum TNI dan Ketua TIM 19 Mabes TNI)

(Wawancara dilakukan di kediamannya, kawasan Cijantung Jakarta Timur, 17 Januari 2006)

1. *Dalam pandangan pak Edi sebagai seorang Militer, apa sebenarnya yang menyebabkan konflik Maluku?*

Kita harus mengkaji secara mendalam faktor-faktor apa sebenarnya yang menimbulkan konflik di Maluku. Menurut saya akar konflik Maluku itu bisa bermacam-macam. Tapi saya sering melihatnya dari aspek budaya.

Pertama, menurut saya adalah aspek karakter yang kemudian membentuk budaya orang Maluku. Maksud saya begini, Maluku itu terdiri dari ribuan pulau dan dibatasi oleh wilayah laut yang sangat luas. Hal ini membuat komunikasi di antara masyarakat Maluku sendiri menjadi terbatas. Kondisi keterisolasian ini lalu membentuk karakter orang Maluku, karakter itu seperti, tertutup, melihat orang lain sebagai ancaman, tidak kompetitif, dll.

Kedua, secara ekonomi orang Maluku cenderung tergantung pada Alam. Sejak dahulu kita mengenal Pala dan Cengkeh. Pala dan Cengkeh itu diwarisi secara turun temurun dan dipanen setiap tahun sekali. Sekali panen bisa untuk menghidupi satu keluarga dalam setahun, atau sampai tiba musim panen berikutnya. Kondisi ini telah menimbulkan karakter ketergantungan pada Alam dan lebih jauh lagi membuat orang menjadi Malas. Ketika datang orang pendatang yang umumnya cukup rajin dalam berusaha dan bekerja dan ini membuat mereka memiliki status ekonomi yang lebih baik, masyarakat Maluku lalu jadi pecemburu. Ini karakter tidak baik.

2. *Kalau mengenai masalah Agama apa bukan salah satu penyebab konflik?*

Ya, itu salah satunya. Masalah sentimen keagamaan ini sebenarnya merupakan masalah yang timbul dari politik kolonial. Menurut Ibu Maryam Lestaluhu ada 7 perang besar di Maluku, kecuali perang Pattimura, hampir semua perang itu bernuansa Agama. Nah, politik dengan memanfaatkan agama sebagai tameng inilah yang kemudian di wariskan dari waktu ke waktu. Sehingga selalu ada kecurigaan antara basudara di Maluku yang berbeda agama. Anda bisa baca bukunya.

3. *Menurut beberapa pengamat ada juga faktor politik, misalnya kepentingan politik militer yang bermain di balik konflik?*

Para pengamat seperti Tamrin Amal, atau Jorge Yunus Adicondro memang cenderung membangun teori konspirasi bahwa yang menyebabkan konflik Maluku adalah kepentingan politik Militer. Teorinya begini, Militer adalah kelompok yang paling berkuasa di Indonesia selama Orde Baru. Nah, setelah reformasi, militer tiba-tiba kehilangan pengaruh dan kekuasaan politiknya. Untuk

kembali berkuasa militer mendisain konflik dan kerusuhan di masyarakat agar masyarakat merasa tidak nyaman lalu kembali meminta militer untuk berkuasa. Sayang mereka hanya membuat asumsi dan kecurigaan. Oleh karena itu, saya bersama beberapa teman lainnya, di antaranya pak Wiranto mengajukan Pak Tamrin Amal Tomagola ke pengadilan. Dia berbicara di luar negeri bahwa yang mendisain konflik Maluku adalah Militer dan dia menyebut nama beberapa Jenderal termasuk saya dan Pak Wiranto. Ini tidak bisa kami terima. Bagaimanapun hal itu sungguh tidak bermoral. Dimana moral saya sebagai anak negeri Maluku yang lahir dan dibesarkan di Maluku, orang tua dan keluarga saya juga masih tinggal di sana, kok bisanya saya dituduh mendisain konflik.

4. *Tapi banyak kasus di Lapangan menunjukkan keterlibatan Militer?*

Misalnya apa? (*Peneliti menyebut kasus Berti*). Saya pernah menjadi ketua Tim 19 untuk penyelesaian konflik Maluku. saya memang menemukan adanya keterlibatan beberapa personil militer dalam konflik. Keterlibatan itu biasanya dalam bentuk keberpihakan terhadap kelompok tertentu. kalau tentaranya Islam, biasanya berpihak sama Islam, demikian juga sebaliknya. Tetapi harus dicatat ini hanya oknum, dan secara psikologis sebagai bagian dari eksekusi konflik. Mungkin ada saudaranya dibunuh, lalu kemudian secara psikologis dia berpihak. Jadi bukan atas perintah komandan. Nah, waktu saya menjadi ketua Tim 19, kami merekomendasikan agar semua tentara dan Polisi asli Maluku dipindahkan keluar Maluku dan diganti dengan personil dari luar Maluku yang belum terkontaminasi konflik. Tapi itu kan sulit karena masalah anggaran. Karena itu saya usulkan supaya beberapa nama tertentu saja yang dipindahkan (ia menunjukkan daftar sejumlah nama personil TNI yang terlibat konflik, namun tidak bersedia memberikan kepada penulis)

5. *Beberapa tokoh yang pernah saya wawancarai, percaya bahwa konflik Maluku merupakan desain kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik dengan konflik?*

Ia saya juga membaca banyak tulisan tentang hal itu. Menurut saya terbuka kemungkinan bagi kelompok tertentu untuk mengambil manfaat. Apakah elit politik Nasional, elit lokal, atau parpol, apalagi konflik Maluku terjadi menjelang Pemilu. Tapi analisis seperti itu perlu hati-hati, karena kita terbentur fakta-fakta empirik. Salah satu elemen yang menurut saya cukup berperan adalah RMS. Walaupun keterlibatan mereka juga harus dijelaskan secara lebih jauh.

6. *Pandangan Pak Edi tentang pelaksanaan Perjanjian Malino?*

Perjanjian Malino itu cukup baik dalam menghentikan konflik, namun tidak bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan konflik Maluku secara keeluruhan, karena model Malino yang terkesan *kejar setoran* dan elitis. Karena itu menjadi tanggung jawab kita ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang

menjadi sumber konflik Maluku, khususnya menyangkut persoalan karakter lokal kita. Saya dan teman-teman pernah menawarkan konsep "Maluku Baru". Dalam konsep tersebut terkandung pandangan tentang bagaimana membangun karakter Baru di Maluku yang bersumber pada nilai-nilai luhur yang baik dengan orientasi masa depan. Termasuk bagaimana membangkitkan semangat mencintai laut sebagai bagian dari pembangunan karakter kemalukuan.

7. *Bagaimana mewujudkan konsep-konsep tersebut?*

Kepemimpinan daerah harus diisi oleh orang-orang yang visioner, yang mengerti persoalan-persoalan mendasar di Maluku dan juga mampu membangun kebanggaan kemalukuan di tingkat lokal, nasional bahkan juga internasional. Tanpa usaha yang keras saya khawatir konflik akan berulang lagi.



1. *Apa sebenarnya yang penyebab konflik Maluku?*

Penyebab konflik Maluku itu sangat beragam. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa salah faktor lebih dominan dari yang lain. Itu perlu diselidiki dan dianalisa secara mendalam.

2. *Bisa disebut beberapa?*

Misalnya masalah agama, itu hanya salah satu tetapi tidak dominan.

3. *Banyak pihak menyebut masalah politik. Ada kecenderungan dominasi kelompok Islam di birokrasi di akhir era 1990-an. Dan anda sebagai Gubernur yang juga seorang Muslim dituduh ikut terlibat dalam penghijauan Birokrasi itu?*

Boleh saja orang menuduh, tetapi saya tidak merasa melakukan kolusi dengan menempatkan orang-orang Islam secara besar-besaran di Birokrasi. Semua ada sistem dan mekanismenya. Perubahan-perubahan kepemimpinan birokrasi merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, Ketika saya masi muda dan baru menyelesaikan pendidikan sarjana di UIB saya kembali ke Ambon untuk mengabdikan, walaupun banyak tawaran yang menggiurkan dari berbagai pihak. Ketika masuk ke PU (Dept Pekerjaan Umum) saya memulainya dari jabatan yang paling bawah, lalu Kasub, Kabag, bahkan hingga Kakanwil dan Gubernur. Apakah kenaikan pangkat saya karena kolusi? Tidak.

Kalau ada tuduhan bahwa orang Islam mulai mendominasi birokrasi saya kira berlebihan. Mereka harus belajar, bahwa setelah era 1970-an ada penambahan jumlah anak-anak muda Islam yang sudah terdidik dan potensial ingin mengabdikan di Maluku. dan mereka kemudian mencapai jabatan-jabatan tertentu itu merupakan hal yang wajar.

4. *Anda dituduh mengganti beberapa pejabat penting di Birokrasi dengan orang-orang Islam?*

Contohnya apa? Suatu saat pada masa saya menjadi gubernur, ada pergantian Kakanwil Agama Maluku. Pemerintah pusat menawarkan tiga nama. Salah satunya beragama Kristen yang sebenarnya memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan. Saya disuruh memilih salah satunya. Saya bilang sama pemerintah pusat (DEPAG) coba tunjukkan sama saya *track record* orang-orang ini. Dan ternyata saudara saya Kristen ini memiliki kasus yang sangat berat. Ketika mendengar ia akan sulit dipih, ia melakukan provokasi dan memobilisasi umat Kristiani untuk demonstrasi. Ada usaha mengaitkan agama dengan kepentingan jabatannya. Akhirnya saya kembalikan

proses pemeliharannya kepada Menteri Agama. Dan ternyata yang terpilih sebagai Kakandepag bukan dia.

Kasus ini menjadi pelajaran bahwa, agama di Maluku sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, jabatan birokrasi dan lain-lain. ini dilakukan oleh yang Islam maupun Kristen. Dan ironisnya mereka menarik-narik umat beragama sebagai tameng.

5. *Bagaimana anda mencegah hal-hal tersebut?*

Saya mencoba membuat birokrasi sehat dari hal-hal tersebut sekemampuan saya. Ketika hal itu mau dilata sudah terjadi konflik.

6. *Bisa diceritakan tentang Malino, bagaimana idenya bermula?*

Idenya muncul setelah Pelaksanaan Malino untuk Poso. Dan saya lihat cukup efektif. Secara diam-diam saya panggil tokoh-tokoh Islam maupun Kristen satu persatu untuk diskusi di kediaman Gubernur. Biasanya saya panggil tengah Malam untuk menghindari saling curiga anatar mereka. Saya bilang bagaimana ini, apa bisah kita lakukan proses perdamaian seperti kasus Poso itu. Dari hasil diskusi itu saya simpulkan mereka mau, tapi sebagian masih malu-malu untuk mengatakannya secara terus terang. Mungkin mereka takut jangan sampai diketahui massa yang lagi rentan bahwa mereka ingin berdamai. Saya mengerti hal itu. Nah pada suatu hari saya di telepon Menko Kesra Yusuf Kalla, beliau bilang "Pak Saleh, apa bisah kita buat proses perdamaian seperti di Poso". Karena saya sudah pendekatan sebelumnya saya langsung bilang. Bisah pak! Lalu beliau datang ke Ambon dan saya pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh dari Muslim maupun Kristen.

7. *Ada kritik bahwa Malino itu by accident, hanya sebuah kebetulan, tahapan-tahapannya tidak jelas.*

Ah itu tidak betul. Kita lakukan proses awal, berdialog dengan berbagai pihak, bahkan dengan tokoh-tokoh yang menentang. Kami datang untuk berbicara demi kemaslahtan masyarakat. Karena itu menurut saya, para penentang itu sangat zalim karena mereka tidak ingin berdamai. Ada tiga kali pertemuan hingga di Malino itu.

8. *Ada kesulitan selama proses-proses itu?*

Ya itu tadi, ada sekelompok orang yang tidak mau terlibat. Tapi kami jalan terus. Karena kita yakin bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang baik dan diridhai Tuhan. Ketika pertemuan di Makassar, saya semakin yakin karena semua pihak menunjukkan keinginan yang kuat untuk berdamai.

9. *Sewaktu di Malino, apa tidak terjadi tarik menarik?*

Oh ada, tapi itu kita bisa mengerti. Bagaimanapun orang-orang itu juga baru terlibat konflik yang panjang. Isu yang menjadi tarik menarik itu masalah FKM/RMS dan

Laskar Jihad. Tentang hal ini dicapai kesepakatan untuk dibubarkan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Independen untuk diteliti lebih lanjut. Menurut saya, kesuksesan terbesar dari Malino adalah mendorong penghentian konflik di Maluku. FKM dibubarkan dan diproses secara hukum, sedangkan Laskar Jihad kita pulangkan. Ada beberapa yang kita anggap terlibat masalah pidana kita proses di pengadilan.

10. *Akan tetapi setelah Malino kan ada beberapa peristiwa besar, seperti kasus Pemboman di Soya, pembakaran Kantor Gubernur?*

Iya, itu bagian yang menjadi catatan, bahwa menyelesaikan konflik tidaklah mudah. Orang-orang di Maluku belajar dari hal itu.

11. *Mengapa Malino tidak membahas hal-hal mendasar yang menjadi penyebab konflik?*

Iya, dong! Malino itu dibuat untuk menghentikan konflik. semacam gencatan senjata. Kalau kita bahas hal-hal yang sensitif saya takut terjadi *dead lock*. Nah, penyelesaian konflik secara berkelanjutan baru bisa kita lakukan setelah konflik mereda.

12. *Sebagai Gubernur, apa kebijakan anda setelah Malino.*

Kita hanya fokus pada diktum Malino. Sebagai penguasa darurat sipil, saya bubarkan FKM, Laskar Jihad dan berbagai milisi yang muncul selama konflik. Setelah itu, kita memang *cooling down*. Kalau ada perubahan-perubahan besar kita takut bisa kontra produktif.

Saya memang telah menyiapkan konsep, membentuk lembaga perdamaian sampai ke tingkat Desa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar dari konflik. ditingkat provinsi menyelesaikan masalah-masalah di Provinsi, demikian juga Kota/Kab hingga Desa, sesuai dengan problemnya masing-masing. Tapi hal itu belum sempat kita laksanakan karena keburu habis masa jabatan saya. Sayang, pemerintah yang sekarang tidak melanjutkan apa yang sudah kita gagas itu. Mereka sibuk dengan proyek-proyek fisik. Mereka lupa bahwa potensi konflik itu masih ada.

13. *Anda maju sebagai Calon Gubernur, tetapi Kalah.*

Iya, saya sebenarnya ingin menuntaskan pekerjaan-pekerjaan saya. Karena itu saya mencalonkan diri kembali. Tetapi situasi politik pasca konflik memang tidak kondusif.

14. *Harapan anda untuk Maluku ke depan?*

Masyarakat Maluku harus belajar dari peristiwa masa lalunya, bahwa konflik hanya menimbulkan penderitaan dan *loose generation*. Kita harus membangun Maluku dengan perspektif baru, agar kita tidak lagi kembali dalam nestapa konflik.

Transkrip Wawancara

Drs. Hasyim Marasabessy, SH.MH

(Kakanwil Agama Maluku, wawancara dilakukan di Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Maluku, Ambon, 23 Desember 2005)

1. *Pa Hasyim, apakah konflik Maluku ini adalah konflik Agama?*

Sama sekali bukan. Karena selama ini kehidupan agama di Maluku sangat harmonis. Menurut saya kepentingan politiklah yang telah membawa agama-agama di Maluku ke dalam konflik.

2. *Bisa dijelaskan kepentingan politik itu?*

Kepentingan para elit lokal maupun nasional. Kalau tidak ada yang mendisain konflik ini, saya yakin tidak akan berkembang sejauh ini. tapi saya mohon maaf, belum bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang bermain di balik konflik Maluku. Anda tanya sama pihak yang berkompeten.

3. *Apa yang telah dilakukan Depag Maluku dalam proses penyelesaian konflik?*

Sebenarnya kita telah mengintensifkan dialog keagamaan di antara umat beragama di Maluku. Kami telah mensponsori lebih dari 10 kali proses dialog tetapi memang suasana waktu itu, sudah sangat rumit. (PA Hasyim menyerahkan beberapa daftar kegiatan Depag)

4. *Ada isu tentang pengalihan Agama secara paksa, bagaimana persisnya?*

Kasus ini sebenarnya terdapat di kedua belah pihak. di pihak Islam menimpa saudara-saudara kita dari etnis Buton. Sementara di pihak Kristen terjadi dengan saudara-saudara kita di Kesui, Seram Timur. Tetapi itu semua karena eksekusi konflik.

5. *Delegasi Kristen di Malino, sangat keberatan dengan Kasus Islamisasi di Kesui, bisa diceritakan?*

Iya, kebetulan saya juga ikut dalam rombongan Gubernur ke Kesui untuk menyelesaikan kasus tersebut. Memang ada pemindahan agama, sebagai eksekusi konflik beberapa orang Kristen yang merasa terancam ada yang pindah agama ke Islam. Tetapi banyak juga yang tidak pindah. Ketika kami tiba di sana dengan Kapal Perang. Kita tanya satu-satu, apa ada yang dipaksa untuk masuk Islam? Ada yang jawab, mereka masuk Islam karena ketakutan. Lalu diminta kepada mereka kalau memang ada yang masuk Kristen karena terancam, silahkan naik ke atas kapal dan sementara diantar ke tempat yang aman. Dari jumlah hampir 300 orang, sebanyak 70 persen memilih naik kapal. Sedangkan 30 persen tetap memilih masuk Islam secara sukarela.

6. *Apa kegiatan Depag pasca konflik, seperti saat ini?*

Saat ini kami mengintensifkan dialog-dialog keagamaan, dari level tokoh agama, pemuda bahkan hingga ke masyarakat bawah. Kita ingin membangun pencerahan teologis agar kehidupan keagamaan yang ditampilkan lebih humanis, egaliter dan saling menghargai. Dalam bahasa Depag, kita ingin membangun toleransi antar umat seagama dan antar umat yang berbeda agama.

7. *Apa sebelumnya kehidupan keagamaan kita di Maluku ada masalah.*

Memang relatif tidak ada. Tetapi harus diakui ada juga sebagian kelompok keagamaan yang cenderung eksklusif seperti Jama'ah Tablig atau Kristen Evengils, kelompok ini cenderung puritan dan agresif dalam dakwah dan misi keagamaan, sehingga sering memicu masalah. Tetapi kelompok ini tidak terlalu besar. Saat ini kita juga mengajak diskusi kelompok tersebut untuk mencari format kehidupan keagamaan di Maluku di masa-masa depan secara bersama-sama.



Transkrip Wawancara

Tamrin Elly, SH

(Ketua Delegasi Islam Maluku di Perjanjian Malino, wawancara dilakukan dua kali. Wawancara pertama dilakukan pada 1 Desember 2004 di loby Hotel Bidakara Jakarta dan wawancara kedua dilakukan pada Maret 2006 di Plaza Senayan Jakarta)

1. Pak Thamrin, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan konflik Maluku?

Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Begini, sebagai orang Maluku, kita harus menyadari bahwa kehidupan keagamaan kita di masa lalu penuh intrik politik. Pemerintah kolonial Belanda datang dengan semangat kolonialisme dan membawa serta agama Kristen. Setelah berhasil mengkristenkan beberapa daerah di Maluku, Belanda memisahkan mereka dari saudaranya yang Muslim. Untuk memperkuat hegemoninya kelompok yang sudah berbeda agama ini sering dibenturkan. Hal ini banyak kita temukan dalam *kapata* (lagu-lagu rakyat) di Maluku Tengah.

2. Tapi sejauhmana politik kolonial itu berpengaruh pada konflik Maluku?

Yang paling nyata adalah segregasi penduduk berdasarkan agama. Seperti di Ambon, Batu Merah, Kapaha, Waihaong, Kebun Cengkeh didominasi orang Islam. Sedangkan Kudamati, Soya, Amahusu, Latuhatal, atau Paso didominasi orang Kristen. Itu kerjaan Kolonial, dan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk merubah itu. Padahal dengan relokasi pemukiman bisa diciptakan pembauran pada titik tertentu. Dengan kondisi seperti itu, ketika konflik kemarin orang-orang langsung menarik garis demarkasi.

3. Kalau pengaruh politik?

Itu sangat terasa sekali. Anda tau ketika rumah saya dibakar oleh kelompok tidak dikenal pada tanggal 12 Mei 2002, barang-barang pribadi yang sangat diincar adalah perpustakaan pribadi dan *Notebook* saya. Pekerjaan yang seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh rakyat biasa kan?. Faktor lainnya misalnya, keterlibatan militer? Sampai saat ini tidak ada klarifikasi yang jelas, misalnya mengapa Kopasus memerintahkan Berti yang Kristen untuk mengebom geraja dan beberapa daerah di wilayah Kristen? Sayang pengakuan Berti tidak ditindaklanjuti.

Selain pengaruh politik ada juga faktor ekonomi. Akibat pengaruh kolonial, Orang Ambon Kristen itu menjadi berwatak *Ambtenar*, pekerjaan lain di luar Birokrasi dan militer dianggapnya rendah. Akhirnya yang berdagang dan menguasai pasar-pasar rakyat adalah orang-orang Islam walaupun hanya kelas menengah ke bawah. Ini menimbulkan kecemburuan ekonomi

4. Ada Kritik dari eksponen penolak Malino bahwa proses menuju Malino, sangat tidak jelas. Anda juga dituduh terlalu memntingkan kelompok sendiri.

Itu sangat tidak benar. Baik saya ceritakan. Suatu saat sebelum Malino, saya diminta komentarnya tentang Perjanjian Malino untuk Poso, oleh SCTV. Saya sampaikan bahwa Yusuf Kalla itu sangat Sulawesi (*Oriented*), dia hanya mengurus perdamaian di di Poso, padahal konflik Poso adalah eksekusi dari konflik Ambon. Jadi logikanya Ambon harus diselesaikan dulu baru Poso. Berita itu keluar malam dan besoknya saya ditelepon oleh JK (Menkokesra). Dia bilang "Tam, Konflik Ambon itu lebih *complicated* dari Poso. Apa yang saya lakukan di Poso ini hanya *tes case*, kalau berhasil anda bantu saya kita urus Ambon". Jadi keterlibatan saya di Malino sejak saat itu, saya diminta menyiapkan data-data yang diperlukan dari pihak Muslim. Meski demikian, proses-proses menuju Malino sepenuhnya diatur oleh Mediator.

5. *Bagaimana proses anda menjadi Ketua Delegasi?*

Tidak hal-hal yang dipalotiking, saya diminta oleh teman-teman delegasi yang lain untuk memimpin delegasi Muslim. Ketika itu sebenarnya kelompok-kelompok yang menolak saya juga hadir, tetapi mereka setuju saja. Makanya saya heran, mereka kemudian bicara diluar saya yang atur semuanya.

6. *Kriteria apa yang digunakan dalam menyaring anggota delegasi Muslim?*

Memang ketika menyusun delegasi, kami cukup dipusingkan oleh minat dari banyak orang. Tetapi tidak mungkin kan semua berangkat. Dalam hal ini ada dua hal yang sangat kami perhatikan, *pertama*, anggota delegasi haruslah mereka yang memimpin atau mempunyai massa di lapangan. *Kedua*, calon anggota delegasi harus yang bisa berkomunikasi sehingga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan kelompoknya. Percuma kan kalau ada anggota delegasi yang hanya diam saja.

7. *Apa saja Visi delegasi Islam di Malino?*

Pertama kami ingin agar konflik berhenti, karena dengan berhentinya konflik maka hukum bisa ditegakkan. Ini yang banyak ditolak oleh teman-teman yang setuju Malino. Mereka ingin diselesaikan dulu masalah peristiwa 19 Januari 1999, baru berunding. Saya katakan, tidak ada dalam sejarah perundingan, hukum ditegakkan sebelum gencatan senjata. Jadi kita berhenti berkonflik dulu baru kita urus semua isu itu. Dan tidak ada perjanjian damai yang menang-menangan, kita harus bersedia mengurangi sebahagian dari tuntutan kita. Itu prasyarat diplomasi supaya tidak terjadi kebuntuan.

Secara pribadi saya juga korban konflik, semuanya habis. Tapi bagi saya perdamaian itu harus, demi masa depan umat dan masyarakat dan itu juga perintah agama. Sebagai seorang Muslim saya yakini ini bagian dari jihad saya. Orang sering menganggap jihad itu hanya berperang, bagi saya jihad adalah semua usaha untuk membela kebenaran.

8. *Bagaimana dinamika di Malino? Maksud saya tentang isu-isu yang diperdebatkan?*

Sebenarnya Malino itu hanya mengukuhkan berbagai isu yang sudah dibahas dalam sejumlah pertemuan pendahuluan sejak dari Ambon dan Makassar. Jadi relatif sudah ada kesamaan sudut pandang. Kami sepakat bahwa konflik harus dihentikan. Memang ada dua isu yang sempat tarik menarik, yaitu tentang Laskar Jihad dan FKM/RMS.

9. *Kenapa delegasi Islam demikian tegasnya membela Laskar Jihad? Dan kemudian akhirnya melunak?*

Karena kami tidak mau menggeser persoalan. Orang harus mengerti bahwa Laskar Jihad itu datang setelah konflik sudah cukup parah dan umat Islam sudah banyak yang korban. Mereka juga datang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, membuka Klinik kesehatan, sekolah dan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Masyarakat muslim merasakan manfaat kehadiran Laskar Jihad. Namun kami juga menyadari bahwa ada perkembangan yang memaksa Laskar Jihad juga terlibat dalam peperangan, itu tak bisa dielakkan, semua orang yang berada di Ambon, pasti perang kok. Namun sebagai bentuk niat baik dan kompromi menuju proses perdamaian, kami stuju Laskar Jihad ditarik dari Ambon. Karena itu kami juga minta FKM/RMS juga harus diusut dan dilarang. Dan pemerintah harus mengklarifikasi beberapa temuan dokumen RMS sebelum konflik apakah ada korelasi dengan terjadinya konflik.

10. *Banyak pihak menilai kedua delegasi terjebak dalam perdebatan yang tidak substansial, misalnya tentang Laskar Jihad dan FKM/RMS. Padahal kedua isu itu hanya merupakan trigger dalam anatomi konflik Maluku. Faktor-faktor lainnya seperti keterlibatan militer, masalah politik dan masalah sentimen agama tidak dipersoalkan.*

Kami sadar konflik Ambon itu sangat *complicated*, jadi tidak mungkin diselesaikan hanya oleh Malino. Karena target kita yang utama adalah mengarahkan Malino untuk penghentian konflik. Jadi kami menghindari membicarakan isu yang berat-berat yang mempersulit kesepakatan.

11. *Artinya potensi konflik masih ada, karena belum diselesaikan?*

Iya betul. Seluruh komponen di Maluku harus menyadari itu. Sekarang dalam kondisi *cooling down* ini mestinya proses perdamaian berkelanjutan itu bisa dilakukan. Sayangnya pemerintah daerah yang sekarang ini seperti tidak memiliki ikatan moral dengan Malino. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk melanjutkan proses perdamaian yang abadi di Maluku. Kebanyakan hanya sibuk mengurus proyek-proyek pembangunan fisik, yang memberikan keuntungan materi yang melimpah untuk kantong pribadi maupun kelompok, itu zalim sekali.

Transkrip Wawancara

Dr. Faried W. Husein

(Dirjen Pelayanan Medik DEPKES, Mantan Deputy I Menkokesra dan Staf Ahli Menkokesra untuk Pelaksanaan Perjanjian Malino)

Wawancara dilakukan di Kantor Departemen Kesehatan, Jakarta 14 Februari 2006

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Maluku?

Pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa hampir semua konflik sosial bernuansa SARA berakar pada kekecewaan. Akumulasi kekecewaan itu yang kemudian menimbulkan ekspresi yang bersifat anarkisme. Makanya pemerintah pada saat itu menyadari bahwa pemerintah perlu terlibat secara langsung untuk mendorong penghentian konflik.

2. Bisa dijelaskan kekecewaan itu seperti apa?

Ya kecewa dengan pemerintah pusat, daerah, sistem politik, sistem ekonomi dan pembangunan maupun hegemoni kelompok tertentu.

3. Mengapa penyelesaian konflik, khususnya konflik Maluku diurus oleh Menkokesra, bukankah itu menjadi wewenang Menkopolkam?

Karena Pak Yusuf saat itu melihat bahwa penyelesaian konflik Maluku merupakan salah satu wewenang Menkokesra. Selain itu Menkokesra juga punya konsep untuk menyelesaikan konflik Maluku seperti yang dilakukan untuk Poso. Dan yang lebih penting lagi Pak Yusuf itu *low profile* dan bisa diterima semua pihak. Karena beliau mendapat mandat dari Presiden Megawati untuk menyelesaikan Konflik Maluku.

4. Banyak yang khawatir proses penyelesaian konflik Maluku hanya merupakan common sense saja tanpa dilakukan dengan konsep yang jelas.

Oh tidak begitu, penyelesaian konflik sosial merupakan tanggung jawab negara dan kita pada waktu itu sudah menyiapkan berbagai langkah penyelesaian konflik Maluku, langkah pengendalian keamanan dengan darurat sipil dan lain sebagainya. Dan ternyata Malino adalah salah satu kebijakan yang berhasil.

5. Para penentang Malino mengatakan bahwa proses menuju Malino itu tidak jelas, tidak ada sosialisasi ke akar rumput dan tidak diberikan waktu yang cukup?

Itu tidak betul. Kami sudah melakukan proses sosialisasi dan dialog sebulan lamanya. Bahkan orang-orang yang menentang seperti Mo Attamimi dan Irwan Patty kami sudah ajak bicara. Kami bahkan membuat tiga kali pertemuan pra-Malino. Dua pertemuan pendahuluan dilakukan di Ambon dan satu pertemuan di Makassar. Lalu terakhir pertemuan puncak di Malino itu.

6. *Metodologi apa yang digunakan dalam perjanjian Malino?*

- Secara umum, kami tidak menggunakan cara-cara konvensional saja. Sebagai seorang dokter, saya pada waktu itu menyarankan untuk menggunakan gaya seorang dokter. Seorang dokter biasanya harus bisa menerima apa pun keluhan seorang pasien. Nah, tugas dokter setelah mendengar keluhan pasien lalu memeriksa kebenarannya dan mendiagnosa penyebab penyakit lalu memberikan obat yang tepat.

Dalam masalah Maluku, yang pertama kami lakukan adalah berdialog dan mendengarkan keluhan dari berbagai pihak, kadang mereka mencera dan mengumpat pemerintah juga sudaranya yang lain. Dari hasil dialog tersebut kami lalu menyimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mulai lelah berkelahi, mereka ingin damai tetapi mereka bingung bagaimana melakukannya. Karena terjadi *distrust* di antara mereka.

Setelah berdialog secara terpisah dengan pihak maupun Muslim maupun Kristen, kami mencatat keluhan-keluhan mereka, lalu diklasifikasi keluhan-keluhan yang sama dan yang berbeda. Dari situ kita lalu dialogkan lagi dengan kedua belah pihak, sampai puncaknya di Malino itu.

7. *Apa saja isu penting yang menimbulkan polimik dan bagaimana memediasi isu tersebut?*

Yang terpenting dari kedua belah pihak itu adalah mereka setuju untuk menghentikan konflik alias damai. Memang ada beberapa isu yang dipandang berbeda antara kedua belah pihak. Misalnya masalah Laskar Jihad dan FKM/RMS. Orang Islam tidak setuju Laskar Jihad dibilang penyebab konflik, dan harus dibubarkan karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tetapi delegasi Kristen, menganggap mereka itu adalah salah satu pelaku kekerasan. Sedangkan tentang FKM RMS, orang kristen menolak bahwa FKM/RMS itu didentikkan dengan orang Kristen. Sedangkan orang Islam merasa RMS adalah penyebab konflik Maluku.

Nah, kami lalu mengajak dialog kedua delegasi, kami tawarkan bahwa bagaimana kalau milisi-milisi sipil termasuk Laskar Jihad kita bubarkan demikian juga FKM/RMS, lalu kita bentuk Tim Independen untuk menyelidiki isu-isu tersebut. Akhirnya mereka sepakat dengan usul mediator tersebut.

8. *Mengapa hasil penelitian Tim Independen tidak pernah dipublikasikan?*

Pertimbangannya adalah untuk kepentingan perdamaian yang sudah tercipta sekarang di Ambon. Kita khawatir kalau dipublikasikan ada pihak-pihak yang tidak puas lalu terprovokasi dan melakukan kekerasan lagi. Mungkin 15 atau 10 tahun lagi pemerintah pasti akan mempublikasikan.

9. *Mengapa Perjanjian Malino tidak membicarakan persoalan-persoalan penting yang menjadi penyebab konflik*

Anda tau waktu perjanjian Malino itu hanya tiga hari tidak mungkin membicarakan berbagai hal. Yang penting kedua belah pihak mau berhenti berkonflik. Usulan butir-butir kesepakatan itu juga merupakan usulan delegasi, jadi kelihatannya mereka juga menghindari bicara lebih jauh tentang masalah-masalah mendasar dari konflik. Nah, menurut saya dengan kedamaian yang semakin baik di Ambon sekarang ini, mestinya mulai bisa dilakukan usaha-usaha untuk menertibkan masalah-masalah yang mengganggu di masa lalu itu. Misalnya, bagaimana membangun sikap keberagaman yang baik, pembangunan ekonomi, atau penataan sistem politik yang tidak memihak dan diskriminatif.

10: Bagaimana evaluasi Pak Faried terhadap pelaksanaan butir-butir perjanjian Malino di Maluku saat ini, karena kelihatannya tidak sistem evaluasi dan monitoring yang jelas?

Saat ini sudah berjalan dengan baik, walaupun masi banyak kekuarangan. Saya termasuk salah satu anggota pengawas. Saya kasi Hp kepada beberapa anggota masyarakat di Maluku tanpa diketahui pihak yang berwenang, saya minta orang-orang saya itu untuk melaporkan kondisi pembangunan di Ambon pasca Malino setiap saat. Memang ada sejumlah keterlambatan dan juga penyelewengan, khususnya masalah penanganan pengungsi yang sampai saat ini masi bermasalah. Sejak pertengahan tahun lalu saya dipindahkan dari Kesra saya tidak banyak mengikuti perkembangan tentang Maluku lagi.

Transkrip Wawancara

Bambang W. Soeharto, SH, M.Si

(Mantan Wakil Ketua Komnas HAM, dan Ketua Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi di Maluku serta Wakil Ketua Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku)

Wawancara dilakukan di Jakarta, Maret 2006

1. *Fak Bambang, kenapa hasil invetigasi Tim independen tidak dipublikasikan. Padahal itu sangat ditunggu masyarakat.*

Begini, Tim Independen itu ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penyelesaian, pencarian fakta dan analisa terhadap berbagai peristiwa dan isu yang diduga menjadi penyebab kerusuhan. Setelah selesai kita sampaikan laporan hasil penyelidikan kita kepada pemerintah. Nah sekarang anda yang harus tanya pada pemerintah kenapa itu tidak dipublikasikan.

2. *Kira-kira apa yang ditakutkan pemerintah?*

Anda tanya sama pemerintah (sambil kelawa)

3. *Kalau bisa dijelaskan secara umum, apa saja sebenarnya isi laporan tersebut?*

Kami melakukan penyelidikan terhadap sembilan isu yang diduga menjadi penyebab kerusuhan. Kesembilan isu tersebut meliputi: Persitiwa 19 Januari 1999, Isu tentang RMS, Isu Laskar Kristus, Isu Kristen RMS, Isu FKM, Isu Laskar Jihad, isu pengalihan gama secara paksa, isu tentang pelanggaran HAM dan berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan kerusuhan Maluku.

4. *Apa kesimpulan Tim tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap konflik Maluku?*

Secara umum bisa dibilang begini, konflik Maluku bukanlah konflik yang disebabkan oleh pertentangan agama semata, namun konflik yang terjadi antar sebagian besar warga masyarakat yang berbeda agama (Islam dan Kristen) yang dilandasi sara ketidak puasan, kourigaan sosial dan kecemasan sosial politik serta budaya yang akut antar golongan agama. Terdapat indikasi kuat bahwa agama dimanfaatkan oleh pihak lain, atau kelompok itu sendiri dalam mengobarkan permusuhan.

5. *Pihak lain itu sebenarnya siapa?*

Ya..kelompok-kelompok yang punya kepentingan politik maupun ekonomi dengan konflik Maluku.

6. *Bisa disebutkan kelompok tersebut?*

Wah saya tidak punya otoritas untuk menyampaikan hal itu. Tapi begini, untuk konflik Maluku yang begitu dahsyat terbuka peluang untuk dimanfaatkan kelompok kepentingan. Anda juga kan, dengan menulis tesis ini anda bisa mendapat gelar M.Si, jadi anda juga memanfaatkan konflik. (sambil tertawa)

7. *Diantara beberapa informan yang pernah saya wawancarai mengatakan bahwa pemerintah tidak mau mempublikasikan hasil penyelidikan Tim Independen karena memang ada kelompok kekuasaan yang terganggu dengan hasil penyelidikan tersebut.*

Saya kira tidak, asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Pertimbangan utama pemerintah adalah kondisi damai yang sudah tercipta sekarang. Mungkin hasil penyelidikan itu masi dipandang sensitif, sehingga pemerintah memutuskan untuk belum bisa mempublikasikan. Secara pribadi saya berharap semuanya bisa dibuka ke publik, sehingga kita bisa menelaah hasil-hasil investigasi tersebut, sekaligus juga bisa untuk menciptakan perdamaian di masa-masa mendatang.

8. *Sedikit tentang Perjanjian Malino, bagaimana menurut pendapat anda?*

Saya kira itu langkah yang bagus, kita harus belajar bahwa kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Sejak awal Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mengedepankan cara-cara persuasif dalam menyelesaikan konflik SARA di Indonesia.

Saya menolak pernyataan beberapa pengamat bahwa pemerintah tidak bisa menjadi mediator. Menurut saya itu keliru, justru pemerintah wajib menjadi mediator dalam konflik sosial di masyarakat, sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawabnya. Pemerintah yang mengendalikan aparat keamanan, dia bisa menggunakan aparat keamanan untuk mendukung perdamaian. Pemerintah juga memiliki fasilitas yang cukup untuk memfasilitasi negosiasi dan perundingan, dan dengan terlibat langsung, pemerintah punya tanggung jawab terhadap butir-butir kesepakatan perdamaian. Dan terbukti Malino cukup sukses, minimal setelah Malino kita melihat adanya penurunan intensitas konflik secara signifikan.

Kesuksesan Malino juga ditunjang oleh faktor kelelahan yang dihadapi masyarakat. Dalam beberapa kunjungan ke Maluku saya melihat masyarakat juga sudah lelah berkelahi, jadi momentum Malino itu sangat tepat sekali.

9. *Harapan untuk Maluku kedepan?*

Dalam pendekatan resolusi konflik kita mengenal konsep *peace building*. Nah, hasil-hasil Malino harus ditindaklanjuti dengan proses-proses selanjutnya untuk membangun kehidupan yang damai di Maluku. Masyarakat Maluku harus mengambil inisiatif untuk mengelola berbagai potensi konflik yang selama ini ada di antara mereka. Pemerintah harus mendukung dengan kebijakan yang jelas dan terarah.

Transkrip Wawancara

Drs. Irwan Patty, M.Si

(Ketua Ikatan Keluarga Muslim Nusa Ina)

(Wawancara dilakukan di Cafe Hatukau-Batu Merah Kota Ambon, 17 Desember 2005)

1. *Apa alasan mendasar sehingga anda menolak pelaksanaan Perjanjian Malino*

Sebelum menjawab pertanyaan itu saya ingin menjelaskan bahwa kelompok sebelas yang melakukan penentangan terhadap Malino, bukan menolak usaha perdamaian. Karena itu kami ingin sekali konflik Maluku yang telah berlangsung begitu lama supaya segera diakhiri. Namun kami menolak keras cara-cara yang sekedar *lip service* dan tidak bertanggung jawab. Kita ingin substansi perdamaian yang akan dicapai oleh kelompok muslim dan Kristen adalah perdamaian yang hakiki, seperti apa yang dicapai oleh bangsa Afrika selatan.

Setidaknya ada dua alasan mengapa saya bersama teman-teman yang lain menolak pelaksanaan perjanjian tersebut. *Pertama*, tentang Metodologi yang digunakan, *kedua*, substansi isi perjanjian.

2. *Bisa dijelaskan lebih rinci kedua alasan tersebut?*

- Pertama tentang metodologi yang digunakan, kami merasa sangat tidak jelas. Pihak fasilitator tidak pernah menjelaskan proses dan tahapan-tahapan yang akan digunakan. Mereka juga tidak melakukan proses sosialisasi kepada lapisan bawah. Sehingga masyarakat tidak begitu tau apa saja yang akan dilaksanakan di Malino itu. Demikian pula dengan sistem rekrutment anggota delegasi (siapa yang harus mewakili siapa) semuanya sungguh tidak jelas. Banyak tokoh-tokoh lapangan yang terlibat dan memimpin massa dalam pertikaian tidak diajak bicara. Saya pribadi memang diminta sebagai delegasi, tapi saya katakan "karena saya mewakili IKSAMUNI dan sangat besar dan luas anggotanya, maka saya minta kesempatan untuk sosialisasi ke masyarakat saya dulu. Hal ini tidak diizinkan, karena menurut YK waktunya sudah mepet. Padahal sosialisasi ini juga penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat khususnya anggota dan masyarakat saya yang berasal dari Pulau Seram. Saya juga mempertanyakan legitimasi sejumlah nama yang ikut ke Malino. Hal ini menunjukkan bahwa Malino sebenarnya hanya cerminan keinginan pemerintah pusat ataupun Yusuf Kalla semata.

Selain itu kami juga menolak perundingan dilaksanakan di Malino. Ini menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan *sense of identity*? Kami mengusulkan dilakukan di Banda atau ditempat lain yang di Maluku yang sebenarnya masi memungkinkan. Akhirnya saya berpendapat keberhasilan Malino bukan keberhasilan masyarakat Maluku tetapi keberhasilan Yusuf Kalla dan SBY.

- Yang kedua tentang Subtansi Isi Perjanjian juga tidak mencerminkan secara substansial hal-hal yang menjadi inti konflik.
 - 1) penyelesaiannya sangat parsial, kalau teman-teman Delegasi Muslim mau bicara tentang bagi-bagi kekuasaan maka menurut saya bukan saja di

UNPATTTI yang disebutkan secara jelas, tetapi juga RSU Hawallussy, Birokrasi pemerintahan, RRI, TVRI, dll., yang selama ini dikuasai oleh satu pihak. Maksud saya, kalau kita mau bicara tentang *sharing power*, maka kita harus bicara secara integral.

- 2) Kami juga kecewa karena tidak ada pembicaraan tentang kompensasi bagi korban di pulau seram. Kalau di Ambon ada kompensasi bagi rakyat yang kehilangan rumah dan harta benda, maka kenapa teman-teman yang hadir di Malino tidak pernah memikirkan nasib rakyat di Pulau Seram dan Lease yang pohon Cengkeh dan Pohan Pala-nya ditebang selama konflik. Menurut saya korban seperti ini juga harus dipikirkan.

3. *Bagaimana pendapat anda tentang dua isu krusial yang diperdebatkan di Malino, Laskar Jihad dan FKM/RMS?*

Laskar Jihad itu bukan penyebab konflik. Jadi kalau mau dipulangkan ya serahkan saja kepada umat Islam biar mereka dipulangkan. Menurut saya delegasi Islam gagal memperjuangkan aspirasi umat Islam bahwa peran Laskar Jihad itu masi penting. Sedangkan tentang FKM/RMS menurut saya ancamannya sangat real. Teman-teman di Kristen, harus menyadari hal itu. Bahkan kalau kita mau jujur di antara anggota delegasi Kristen ke Malino ada yang diindikasikan terlibat RMS.

4. *Anggota delegasi yang dimaksud terlihat RMS itu siapa saja?*

Sebaiknya *beta seng* (saya tidak) usah sebutkan nama, karena sekarang kondisinya suda cukup aman, jangan sampai menimbulkan polimik yang tidak perlu lagi. Dan juga *seng* terlalu penting bagi data kamu kan? *Ale* (anda) *mangartikan?*

5. *Jadi menurut anda kedamaian yang tercipta pasca Malino bukan merupakan hasil dari Malino?*

Begini, kalau indikatornya adalah kondisi kemanan, maka setelah Malino justru tambah kacau. Ada pengeboman di Soya, ada pembakaran kantor Gubernur, ada peristiwa penembakan dan penganiayaan. Ada pembakaran terhadap rumah Tamrin (ketua delegasi Malino). Senjata organik maupun non-organik juga masi banyak beredar di masyarakat. Orang belum mau serahkan senjata. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa setelah Malino kondisi *tamba* kacau.

6. *Lalu menurut anda faktor apa yang menyebabkan konflik berhenti sehingga tercipta perdamaian hingga sekarang?*

Saya harus akui bahwa perjanjian Malino memberikan phisikologi baru bagi masyarakat. Tapi saya harus jujur, dalam konteks konflik Maluku, Malino tidak signifikan. *Entry point* bagi penyelesaian konflik Maluku justru adalah kedatangan Wapres Hamzah Haz. Dia datang ke sini tidak menempatkan diri sebagai Wapres, tetapi sebagai ulama yang menemui umatnya yang sedang berkonflik. Dialah yang membujuk Lasakar Jihad agar bersedia meninggalkan Maluku. Dia juga yang

berbicara secara langsung dari hati ke hati dengan tokoh Islam (termasuk Jafar Umar Thalib) yang terlibat dalam konflik sehingga mereka mau menyerahkan senjata. Dan anda tau setelah itu kondisi benar-benar semakin membaik dan terus membaik hingga sekarang. Jadi sekali lagi bukan karena Malino!

7. *Bukankah keterlibatan Wapres juga bagian dari implementasi Perjanjian Malino?*

Masyarakat tidak liat posisi dia sebagai Wapres, tetapi sebagai ulama. Itu yang dikatakan Ja'far Umar Thalib.

8. *Apakah anda yakin konflik yang pernah terjadi di Maluku takkan terulang lagi?*

Menurut saya selama tidak diselesaikan persoalan-persoalan mendasarnya, seperti persaingan birokrasi, kesejahteraan rakyat dan hubungan antara masyarakat beragama di Maluku maka potensi konflik masi tetap terbuka. Karena itu perlu kejujuran dan ketulusan dalam membangun hubungan persaudaraan di antara seluruh elemen masyarakat Maluku.

9. *Maksud anda persaingan birokrasi itu seperti apa?*

Selama ini kan sudah menjadi rahasia umum, bahwa teman-teman Kristen tidak bisa menerima bahwa mereka tidak lagi dominan di berbagai level birokrasi daerah. Orang-orang Islam juga sudah mulai berkembang SDM-nya. Jadi kita perlu menata sistim politik dan birokrasi kita sehingga tidak ada perasaan merasa terancam kalau ada kelompok lain yang mulai berkembang.

10. *Maaf...! anda sekarang menjabat sebagai Kepala Bapeda di Pemda Kab. Seram Barat, banyak orang menilai itu sebagai bagian dari menjinakkan sikap-sikap radikal anda. Demikian juga Ust. Mo Attamimi juga sekarang menjadi Ketua STAIN? Bagaimana komentar anda?*

Maaf, saya dipromosikan sebagai pejabat bukan karena kompensasi Malino. Saya tegaskan bahwa saya salah satu putra daerah SBB dan secara kepangkatan memang saya layak untuk dipromosikan. Mengenai Ust. Mo, saya tidak mau berkomentar. Tanya saja sama beliau, apa betul tuduhan itu? *(sambil ketawa)*

Transkrip Wawancara.

Drs. Hasbullah Toisuta, M.Ag

Akademisi; Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon. Anggota Delegasi Malino.

(Wawancara dilakukan di kedimannya di kawasan Kebun Cengkeh Kodya Ambon, 21 Desember 2005)

1. *Bisa diceritakan bagaimana proses awal pelaksanaan perjanjian Malino*

Memang banyak yang mengkritik bahwa pelaksanaan perjanjian Malino merupakan inisiatif elit. Mereka menganggap Menkokesra Yusuf Kalla terlalu dominan pada saat itu. Pandangan seperti itu terjadi karena para pengkritik Malino tidak mendalami dengan baik proses-proses panjang sebelum Malino itu dilaksanakan. Memang Malino merupakan inisiatif Pemerintah tetapi harus diingat bahwa pada saat yang sama masyarakat juga sudah mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk menghentikan konflik. Karena itu pemerintah melalui Yusuf Kalla mulai mendorong pihak Islam dan Kristen yang bertikai untuk segera menghentikan konflik.

2. *Kalau begitu tahapan-tahapannya yang anda maksud itu seperti apa?*

Pertama, diadakan pertemuan pendahuluan. Pertemuan ini adalah pertemuan awal sebelum Malino sekaligus juga sosialisasi menjelang Malino. Tokoh-tokoh Islam maupun Kristen diundang untuk bertemu secara bergantian dengan Menkopolkam dan Menkokesra di kediaman Gubernur Maluku. Kelompok Islam yang diberikan kesempatan pertama untuk bertemu dan berdialog dengan Pemerintah menyampaikan berbagai pemikiran, uneg-uneg bahkan sering juga disertai dengan caci maki dan marah-marah. Setelah kelompok Islam keluar, kelompok Kristen juga bertemu dan berdialog dengan pemerintah mereka juga menyampaikan pemikiran, saran, kritik, uneg-uneg bahkan juga ada yang marah-marah. Dua orang staf Menkokesra Hamid Awaludin dan Farid Husein, kemudian mencatat hasil dialog tersebut lalu membuat kategorisasi berbagai pandangan yang sama, berbeda, bahkan berbeda secara ekstrim. Persamaan yang paling menonjol adalah bahwa kedua belah ingin mengakhiri konflik.

Pertemuan berikutnya adalah tahap sosialisasi yang dilakukan dengan kedua belah pihak dengan peserta yang sedikit lebih luas. Pertemuan dengan pihak Islam dilakukan di Gedung Asy'ari Alfatah Ambon. Dan pertemuan dengan pihak Kristen dilaksanakan di kompleks Gereja Maranata. Pertemuan ini mencoba mengkristalkan sejumlah masala yang menjadi perbedaan dan membuat agenda untuk pertemuan selanjutnya.

Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan pra Malino yang dilaksanakan di Makassar. Dalam pertemuan tersebut semakin diperjelas draf yang akan dibawa ke dalam perjanjian Malino. Jadi tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa ada proses yang dilalui, walaupun harus diakui bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi keinginan semua pihak.

3. *Lalu bagaimana sebenarnya umat Islam memandang konflik Maluku.*

Waktu itu kami menyadari bahwa persoalan konflik Maluku memang sangat rumit. Akumulasi dari berbagai masalah yang sangat panjang. Tetapi kita berpikir bahwa konflik ini harus dihentikan dulu baru kita selesaikan berbagai persoalan itu. Salah satu *entry point*-nya adalah menyingkap apa yang menyebabkan sehingga muncul berbagai kerusuhan khususnya pada tanggal 19 Januari 1999 itu. Pemerintah dan semua pihak termasuk militer harus jujur tentang apa sebenarnya yang terjadi. Karena itu kita sangat menyayangkan bahwa hasil-hasil investigasi Tim Independen tentang konflik Malino tidak pernah dipublikasikan.

4. *Bagaimana sistem rekrutmen delegasi Muslim*

Penentuan delegasi memang menjadi masalah yang cukup rumit. Konflik telah melahirkan pemimpin-pemimpin informal baru. Tetapi kita mencoba merekrut hampir semua pemimpin umat untuk ikut ke Malino. Ada tokoh agama, tokoh ormas, akademisi, Panglima Posko, dll. Menurut saya, tokoh-tokoh yang hadir ketika itu sudah cukup representatif mewakili umat Islam. Semua golongan dan etnis juga terwakili. Memang ada yang tidak puas, tapi saya pikir itu biasa.

5. *Ust. MO Attamimi dan Irwan Patty serta kelompoknya menolak ikut? Bagaimana sebenarnya?*

Wah itu harus tanyakan kepada mereka. Tapi yang jelas mereka sudah diajak untuk ikut sebagai delegasi. Yusuf Kalla bahkan memerlukan waktu secara khusus untuk menelpon Ust. Mo, tapi mereka sendiri yang tidak mau ikut. Alasan-alasan yang disampaikan *pun* banyak yang tidak mendasar. Tapi kita menganggap itu bagian dari perjuangan mewujudkan perdamaian. Dalam sejarah tidak ada proses berdamai yang mudah dan gratis.

6. *Apa visi yang dibawa delegasi Muslim ke Malino?*

Pertama, kita ingin ada kesepakatan untuk segera mengakhiri konflik. Ini penting, karena umat kedua belah pihak sudah sangat menderita. Jika terus dibiarkan akan semakin memperburuk keadaan. Meminjam istilah pak Yusuf Kalla, kita bisa menjadi *Paria* tertinggal dalam semua bidang. Kedua, kita ingin agar dapat diungkap dalang yang bermain di balik konflik; apa benar RMS atau siapa? Karena peristiwa tersebut sangat menyakitkan umat Islam, terjadi di hari raya Idul Fitri. Data selengkapnya bisa anda baca di visi umat Islam dalam Perjanjian Malino.

7. *Apa saja keinginan delegasi Muslim yang diakomodir dan tidak diakomodir dalam kesepakatan Malino?*

Saya kira hampir semua yang kita inginkan diakomodir dalam Malino. Walaupun ada hal tertentu yang kurang memuaskan. Misalnya tentang laskar Jihad. Kita tidak ingin

mereka dipulangkan dulu karena mereka banyak melakukan kegiatan sosial, misalnya sekolah dan rumah sakit yang sangat mengurangi penderitaan umat Islam. lagi pula mereka tidak bisa disebut sebagai penyebab konflik karena mereka datang setelah konflik itu berlangsung hampir satu tahun. Posisi mereka sama dengan organisasi sosial yang lain. tapi kalau memang disepakati untuk dipulangkan kita akan taat, sepanjang itu untuk memperkuat komitmen perdamaian.

8. *Selain alasan itu apa yang membuat sikap delegasi Islam melunak soal Isu Laskar Jihad?*

Kita ingin perundingan ini menemukan titik temu, karena kita berkomitmen pada penghentian konflik dan perdamaian. Delegasi Kristen juga melakukan hal yang sama, mereka juga tidak menolak penyebutan FKM/RMS dalam kesepakatan. Selain itu kita memang sepakat semua isu yang simpang siur itu akan diteliti lebih lanjut oleh Tim Independen yang akan dibentuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kita menyangkan kenapa hingga saat ini hasil-hasil investigasi itu tidak diumumkan.

9. *Apakah perjanjian Malino masi cukup efektif untuk melanjutkan proses perdamaian ke masa depan?*

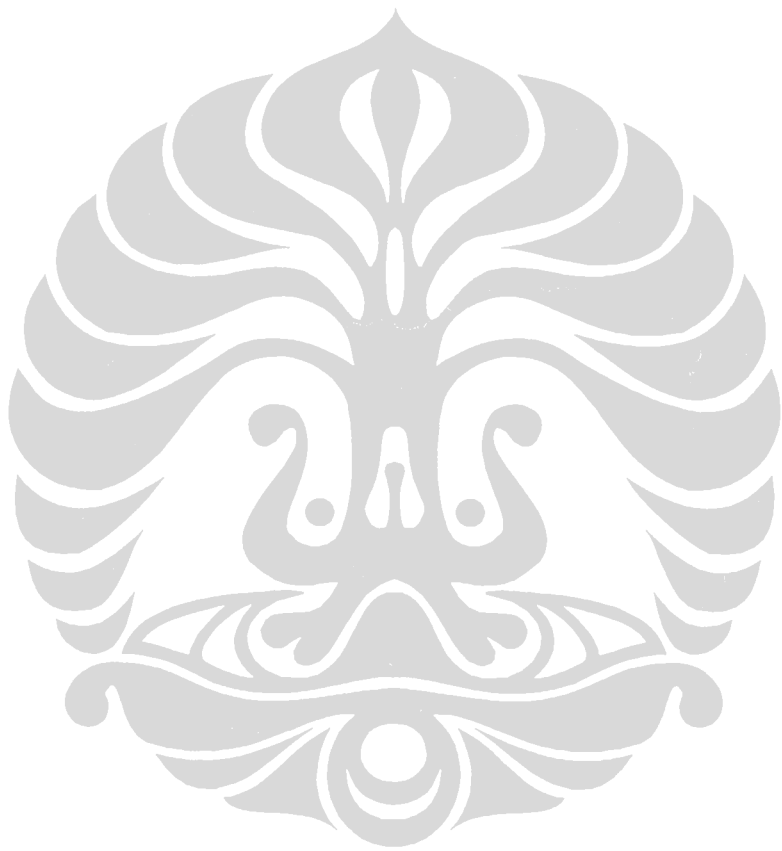
Harus diingat bahwa apa yang dicapai di Malino, hanya merupakan usaha untuk menghentikan konflik. Jadi langkah selanjutnya adalah melakukan usaha *peace building* yang bersifat menyeluruh terhadap segi kehidupan masyarakat yang menyumbang pada konflik. Seperti penataan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang selama ini menjadi ancaman potensial bagi munculnya konflik. Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki kebijakan berkenaan dengan Maluku. Kebijakan pembangunan di Maluku ini tidak bisa disamakan dengan propinsi lain. 93 % wilayah Maluku adalah laut. Kalau perhitungan DAU misalnya lebih banyak berdasarkan luas daratan, maka bagaimana dengan daerah dengan luas laut seperti Maluku. itu harus dipikirkan.

Sekarang ini kita juga melihat pemerintah tidak lagi berkomitmen dengan Malino. Karena itu beberpa waktu lalu kami bersama sejumlah eksponen Malino yang lain bertemu dengan Wapres Yusuf Kalla. Kami ingatkan kepada beliau bahwa pembangunan Maluku harus tetap di gali dari spirit Malino. Anda bisa baca pokok-poko pikiran kita dalam pertemuan tersebut di data ini (Hasbullah menyerahkan dokumen pertemuan).

Lampiran. 2

ARSIP-ARSIP PERJANJIAN MALINO





KONSEP 1
10 JANUARI 2002

PANDUAN
PERTEMUAN UNTUK MALUKU



KANTOR MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

JANUARI 2002

PANDUAN PERTEMUAN UNTUK MALUKU

LATAR BELAKANG

Konflik Maluku yang mulai tahun 1999, sudah berlangsung 3 (tiga) tahun, telah menelan ± 6.000 (enam ribu) korban jiwa yang meninggal dunia, atau 2 kali lipat dibanding korban WTC di New York, ribuan rumah musnah, ratusan mesjid dan gereja dibakar, menyebabkan adanya pengungsi lebih kurang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang atau hampir 20% dari penduduk Maluku.

Karena masalah tersebut, ekonomi rakyat menjadi sulit sehingga menyebabkan kemiskinan baru di tengah kebun cengkeh dan pala. Kerugian materi dapat mencapai triliunan rupiah dan keadaan ini merupakan suatu musibah kemanusiaan yang besar sekali.

Diawali dari konflik anak muda dalam suasana kerawanan sosial ekonomi, kemudian menjadi konflik agama yang sangat melebar. Hampir semua penduduk terlibat konflik--karena menyangkut masalah agama dan masalah tersebut menyebabkan semua pihak tidak bisa netral.

Semua pihak, baik kelompok yang beragama Islam maupun kelompok yang beragama Kristen masing-masing merasa tertindas dan merasa kalah. Dalam kaitan dengan penindasan, sebenarnya tidak jelas siapa yang menindas dan siapa yang menang.

Masing-masing pihak mempunyai nafsu amarah yang tinggi, oleh karena itu perilaku konflik semua kelompok sudah di luar batas-batas ajaran agama.

Semua kelompok merasa hanya mempertahankan diri dari serangan kelompok lain. Oleh karena itu masing-masing pihak berusaha minta bantuan baik dari dalam maupun luar negeri.

Polri dan TNI sudah berusaha keras untuk menghentikan konflik tersebut, tetapi karena sifatnya adalah seperti perang gerilya lawan gerilya di daerah yang sangat luas maka konflik sulit dihentikan.

Untuk itu telah berkali-kali dilakukan upaya perdamaian selalu gagal, karena tidak adanya kepercayaan masing-masing pihak.

Akibat dari itu semua, masyarakat Maluku hanya mempunyai 3 alternatif pilihan :

1. Konflik berlangsung terus dalam bentuk perang gerilya, teror dan pembakaran dengan korban dan penderitaan masing-masing kelompok makin bertambah. Ekonomi mandek dan pasti menambah kemiskinan.
2. Polri dan TNI bertindak keras dan repressif lagi, menimbulkan korban yang banyak pada awalnya dan selanjutnya menurun tetapi konflik tetap berjalan dalam skala kecil.
3. Penyelesaian damai dengan masing-masing kelompok, duduk berunding mencari solusi dan kemudian semua kelompok mematuhi semua hasil perundingan. Dalam kondisi seperti ini, maka para pengungsi dapat pulang dan Pemerintah akan membantu rehabilitasi sarana umum serta rumah-rumah ibadah.

Pilihan alternatif tersebut tergantung pada pilihan masing-masing pimpinan yang bertikai, karena rakyat sendiri sebagian besar sudah merasa capek, menderita serta merasa ketakutan. Selanjutnya apabila pilihan ketiga yang akan dipilih maka Pemerintah akan memfasilitasi dan melaksanakannya.

Rencana Pertemuan Pimpinan Umat Islam dan Umat Kristiani Maluku

1. Nama : PERTEMUAN UNTUK MALUKU
2. Tema : KEDAMAIAN UNTUK UMMAT
3. Waktu : 29-30 Januari 2001
4. Tempat : Malino, Sulawesi Selatan
5. Tujuan :
 - * Menghentikan konflik
 - * Menciptakan Perdamaian
 - * Rehabilitasi Sosial
6. Dasar : Direktif Bersama Menko Polkam-Menko Kesra
7. Peserta :
 - * Pimpinan Umat Islam dan Kristen di Maluku
 - * Pimpinan Kelompok-kelompok yang bertikai.

Islam :	Ketua MUI Maluku	2 orang
	Ketua Forum	2 orang
	Pimpinan Kelompok/ Faksi-faksi	20 orang
	Jumlah	24 orang
Nasrani :	Ketua Gereja Kristen Maluku	2 orang
	Ketua Gereja Katolik	2 orang
	Pimpinan Kelompok	20 orang
	Jumlah	24 orang

Catatan : Masing-masing utusan harus mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh.

8. Mediator

Ketua : Menko Kesra

Anggota : 1. Gubernur Maluku
2. Ketua DPRD Maluku
3. Wakil Gubernur Maluku
4. Gubernur Sulawesi Selatan
5. Panglima Kodam Pattimura
6. Kapolda Maluku
7. Walikota Ambon

Jumlah 7 orang

Tugas : *

- * Mengatur dan memimpin pertemuan
- * Mengarahkan pembicaraan
- * Mengambil Kesimpulan Bersama
- * Melaksanakan hasil-hasil pertemuan untuk perdamaian

9. Peninjau

: 1. Wakil Menko Polkam
2. Wakil Menteri Dalam Negeri
3. Wakil Menteri Sosial
4. Wakil Menteri Agama
5. Wakil Menteri Kimpraswil
6. Wakil Menteri Pendidikan Nasional
7. Wakil Kapolri
8. Wakil Panglima TNI
9. Ketua MUI Pusat
10. Ketua PGI Pusat
11. Ketua KWI Pusat

Jumlah 11 orang

- Tugas :
- * Mengevaluasi Seluruh Proses
 - * Memberi saran-saran ke mediator dalam hal lugasnya
 - * Dapat berbicara dakan pertemuan atas izin mediator
 - * Melaksanakan hail-hasil pertemuan untuk Kedamaian

10. Fasilitator : Gubernur Sulawesi Selatan
11. Pembiayaan : Menko Kesra/Bakornas PBP
12. Keamanan : Kapolda Sulawesi Selatan
13. Sifat Pertemuan : Tertutup

Jakarta, 10 Januari 2002.

Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat,

M. Jusuf Kalla

SUSUNAN ACARA PERTEMUAN

HARI/TANGGAL	JAM	ACARA	TEMPAT
Hari I	-	Peserta tiba di Makasar	Islam : Sahid Hotel Nasrani : Golen Hotel Mediator/Peninjau : Sedona Hotel
	20.00 – selesai	Pertemuan intern Mediator dan Peninjau	Gubernur
Hari II	07.00	Berangkat ke Malino	
	10.00 – 12.00	Pertemuan Mediator/Peninjau dengan Kelompok Islam	Hotel Celebes, Malino
	14.00 – 16.00	Pertemuan Mediator/Peninjau dengan Kelompok Kristen	Hotel Celebes, Malino
Hari III	08.00 – selesai	Pertemuan Pleno, Islam- Kristen dengan Mediator dan Peninjau	Hotel Celebes, Malino
Hari IV	-	Cadangan Waktu & Penutup	

AGENDA PERTEMUAN :

1. Keamanan :
 - * Penghentian konflik fisik
 - * Penyerahan Senjata
 - * Pos/Patroli bersama aparat
2. Sosial Ekonomi :
 - * Pengembalian Pengungsi
 - * Rehabilitasi Sarana/Perumahan
 - * Rehabilitasi Sosial/Kerukunan
3. Hukum :
 - * Sanksi Pelanggaran
 - * Pelaksanaan Proses Hukum
4. Sosial Politik :
 - * Penyelesaian Sosial Politik

RINCIAN ACARA PERTEMUAN MALUKU

Selasa, 29 Januari 2002

1. Pertemuan terpisah :
 - * Islam (10.00-12.00)
 - * Kristen (14.00-16.00)
2. Pimpinan : Mediator
3. Tujuan :
 1. Mendengarkan keinginan Islam dan Kristen
 2. Masing2 menyatukan pandangan dan usulan
 3. Mengurangi dis-informasi

Rabu, 30 Januari 2002

1. Pertemuan Pleno
2. Pimpinan : Mediator
3. Acara :
 - * Indonesia Raya
 - * Lagu Pela Gandong
 - * Doa, Hening Cipta bagi korban Maluku
 - * Doa untuk keberhasilan pertemuan
 - ♦ Islam : MUI Maluku
 - ♦ Kristen : GKM
 - * Pengantar : Menko Kesra
 - * Sambutan Selamat Datang : Gubernur Sulawesi Selatan
 - * Harapan : Gubernur Maluku
4. Acara inti :
 - Masalah Konflik Maluku
 - Pandangan/Usul-usul
 - Komisi
 - Kesimpulan

KOMISI-KOMISI

A. Kemanan Hukum

1. Topik :
 - Penghentian konflik
 - Sosialisasi
 - Penyerahan Senjata
 - Pos/Patroli Bersama
 - Kedamaian Tingkat Desa
 - Penarikan Kelompok-kelompok
 - Sangsi Pelanggaran
 - Pelaksanaan Proses Hukum
 - Tim Pengawasan
2. Anggota :
 - Deputi Kapolri
 - Kapolda Maluku (ketua)
 - Panglima Kodam Pattimura
 - Wakil Mabes TNI
 - Wanhankamnas
 - Wakil Gubernur Maluku
 - Wakil Kelompok Islam-Kristen masing2 10 orang

B. Sosial Ekonomi

1. Topik :
 - Sosialisasi
 - Pengembalian Pengungsi
 - Rehabilitasi Sarana/Perumahan
 - Santunan Sosial
 - Masalah-masalah Sosial
 - Rehabilitasi Moral, Pendidikan, Ekonomi

SARAN JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Jan 2002	Feb 2002	Maret 2002	April 2002	Mei 2002	Juni 2001	Penanggung Jawab
1.	Pertemuan Malino							
2.	Sosialisasi							
3.	Penyerahan Senjata							
4.	Kesepakatan Tingkat Desa							
5.	Pos/patroli Bersama							
6.	Tim Pemantau Daerah/ Nasional							
7.	Pengembalian Pengungsi							
8.	Rehabilitasi Sarana							
9.	Rehabilitasi Perumahan							
10	Santunan Korban							

JADWAL KEGIATAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1.	11 Januari 2002	Pertemuan dengan MUSPIDA Maluku	Kantor Menko Polkam
2.	20 Januari 2002	Pertemuan dengan masyarakat Islam dan Kristen	Ambon
3.	25 Januari 2002	Pertemuan Informal Islam dan Kristen dengan Menko Kesra	Ambon/ Makasar
4.		SIDANG KABINET	Jakarta
5.		Pertemuan Mediator/Peninjau	Makasar
6.		PERTEMUAN UNTUK MALUKU	Malino

PERJANJIAN MALUKU DI MALINO

Konflik Maluku yang sudah berlangsung lebih tiga tahun ini, telah menyebabkan korban ribuan jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat, membahayakan keutuhan NKRI serta menyuramkan masa depan masyarakat Maluku. Karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami umat Islam dan Kristen Maluku, dengan jiwa terbuka dan hati yang tulus, serta niat untuk hidup dengan kebhinnekaan dalam persatuan bangsa, bersama pemerintah Republik Indonesia, sepakat mengikat diri dalam perjanjian:

1. Mengahiri semua bentuk konflik dan kekerasan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.
3. Menolak, menentang dan menindas segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS.
4. Sebagai bagian dari NKRI maka masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, masyarakat Indonesia lainnya dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah provinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan menaati budaya setempat serta menjaga keamanan dan ketertiban.
5. Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku, dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain-lain sebagainya, demi tegaknya hukum.

7. Mengembalikan pengungsi ke tempat semula tanpa paksaan dengan segala hak-hak keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan seluruh masyarakat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, kekompakan dan ketegasan TNI/POLRI sesuai fungsi dan tugas masing-masing, mutlak perlu. Sejalan dengan itu, berbagai fasilitas TNI/POLRI harus dibangun, dilengkapi dan difungsikan kembali.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk agama di Maluku, maka segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus tetap menjunjung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.
11. Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama, karena itu, sistem rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dengan tetap memenuhi syarat kualitas yang ditentukan.

Perjanjian ini kami buat dengan tulus iklas dan bertekad untuk menjalankannya secara konsisten dan konsekwen. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tidak menjalankan isi perjanjian ini, akan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

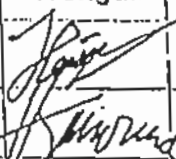
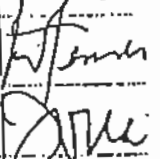
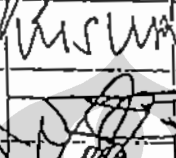
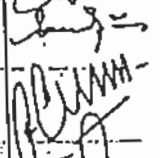
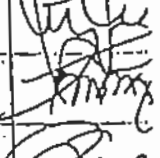
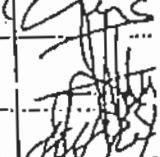
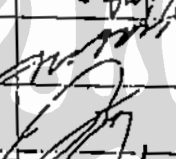
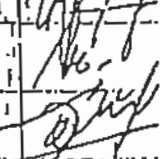
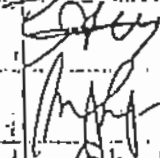
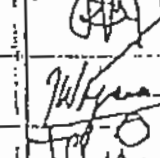
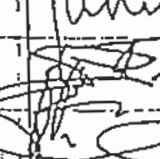
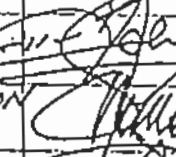
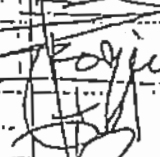
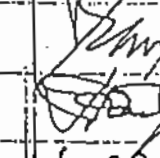
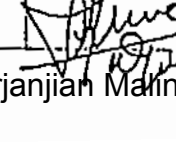
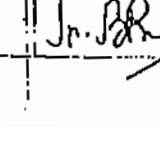
Tindak lanjut dari perjanjian ini, akan dijalankan dengan agenda serta rencana sebagai berikut :

- I. Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum (Lampiran I)
- II. Komisi Sosial Ekonomi (Lampiran II)

Pelaksanaan agenda dan rencana tersebut di atas, akan dilakukan oleh semua pihak dan akan dipantau oleh Tim Pemantau Nasional dan kelompok kerja di daerah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di :
Malino, pada tanggal 12 Februari 2002

PIHAK – PIHAK YANG BERJANJI

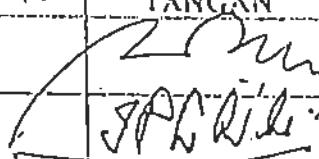
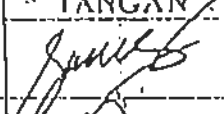
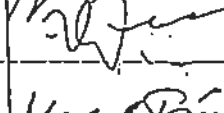
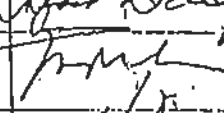
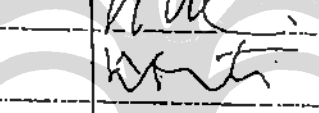
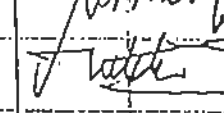
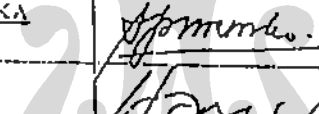
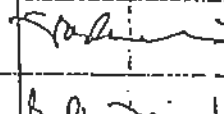
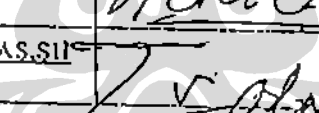
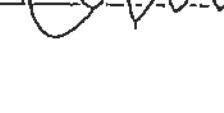
PIHAK MUSLIM			PIHAK KRISTIANI		
No. Urut	Nama/Unsur	T. Tangan	No. Urut	Nama/Unsur	T. Tangan
1	<u>Ustaz H. A. Wahab Polpoke</u> Ketua MUI		1	<u>Pdt. J. W. J. Hendriks</u> Ketua Sinode GPM	
2	<u>Thamrin Ely</u> Ketua BMM		2	<u>Tonny Pariela</u> Akademisi	
3	<u>Ir. M. Nasir Rahawarin</u> Sekjen BMM		3	<u>Pdt. S. J. Mailou</u> Sekum BPH Sinode GPM	
4	<u>Drs. Idrus Tatuhey, MS</u> Ketua Muhammadiyah		4	<u>Mgr. P. C. Mandagi, MSc</u> Uskup Amboina	
5	<u>Drs. Yakuba Karepesina</u> Ketua NU		5	<u>Pdt. Henry Lolain</u> Ketua PGPI Maluku	
6	<u>Lutfi Sanaky, SH</u> Sekr. KAHMI		6	<u>Pdt. Ricky Hltipeuw</u> Ketua BPD GBI Maluku	
7	<u>Ir. Hasan Ohiorella</u> Sekr. Satgas Amar Ma'ruf, NM		7	<u>P. Simon Wenehen, Pr</u> Sekr. Keuskupan Amboina	
8	<u>Abdul Azis Fldmatan, S.Sos</u> Sekjen FPI		8	<u>J. Maspaitella, SH</u> Ketua FKYM	
9	<u>Husein Toisuta</u> Ketua FPI		9	<u>Etty Damatubun</u> Ketua Presidium PMKRI Cab. Ambon	
10	<u>Daud Sangadji, SE</u> Ketua BMM Kota		10	<u>Raja Waraka</u> Ketua Latu Pati Kec. Amahai	
11	<u>Yusuf Laisow</u> Sekr. BMM Kota		11	<u>Raja Emus Dias Ema</u> Raja Kota Ambon	
12	<u>Drs. Hashullah Toisuta</u> Akademisi		12	<u>P. Agus Ulahay, Pr</u> Crisis Centre Katholik	
13	<u>Drs. Hadl Basalamah</u> Yayasan Alhilai		13	<u>Ny. Etta Hendriks</u> Ketua GPP Maluku	
14	<u>M. Amin Polanunu</u> Raja Wakasihu		14	<u>Raja Tuhaha</u> Ketua Latu Pati Kec. Saparua	
15	<u>Effendy Latuconsina</u> Raja Hatu Haha		15	<u>Yop Ajawila</u> Akademisi	
16	<u>Abdul Razag Opier</u> Raja Liang		16	<u>T. Leatemia</u> Akademisi	
17	<u>Abuya Rumakefing</u> Tokoh Seram Timur		17	<u>Ipl Litaay</u> Akademisi	
18	<u>Drs. Abdul Karim Rahayaan</u> Tokoh Air Salobar		18	<u>Ol Lawalaita, SH</u> Akademisi	
19	<u>Drs. Yunus Serang</u> Tokoh Banda Ely		19	<u>Filea Nova, SH</u> Akademisi	
20	<u>Kandi Gubay YUSMAN SALMON</u> Tokoh Masyarakat		20	<u>Ala Fatumanembun</u> Tokoh Masyarakat	
21	<u>H. A. Latif Hatala</u> Tokoh Batu Merah		21	<u>Edy Hukinaka</u> Tokoh Masyarakat	
22	<u>Djufar Tuanani</u> Tokoh Kailolo		22	<u>Silas Ratuanak</u> Tokoh Masyarakat	
23	<u>Talb Madura</u> Tokoh Masyarakat		23	<u>Sr. Brigitta Renyaan PBHK</u> Tokoh Perempuan	

PIHAK MUSLIM			PIHAK KRISTIANI		
No. Ur	Nama/Unsur	T. Tangan	No. Ur	Nama/Unsur	T. Tangan
4	<u>Husein Tapitapi</u> Tokoh Talake		24	<u>John Ruhuleyin</u> Tokoh Pemuda	
5	<u>Mahmud Rengifurwarin, SE</u> Tokoh Malra		25	<u>Ferry Wattimurty</u> Tokoh Pemuda	
6	<u>Abubakar Hehanussa</u> RW Airkonig		26	<u>Emang Nikljuluw</u> Akar Rumpul	
7	<u>Lapone Kasman Salamun</u> Posko Celebes Bersatu		27	<u>Femmy Souisa</u> Akar Rumpul	
8	<u>Hanafl</u> Posko Baguala		28	<u>Yanes Rimbessy</u> Akar Rumpul	
9	<u>Usman Slamet</u> Posko Kebon Cengkeh		29	<u>Elvis Talapessy</u> Akar Rumpul	
10	<u>Amir Kiat</u> Pemuda Batumerah		30	<u>Bpk. Yangkie Siahaya</u> Akar Rumpul	
11	<u>Jalil Wasahua</u> Pemuda Diponegoro		31	<u>Kris Timisella</u> Akar Rumpul	
12	<u>Daud Sialana</u> Pemuda Lei Hitu		32	<u>Jacky Manuputty</u> Tokoh Agama	
13	<u>Aly Salamessy</u> Pemuda Air Besar		33	<u>Pdt. John Sahalesis</u> Tokoh Agama	
14	<u>Drs. Alimad Leavaru</u> Pemuda Salahutu		34	<u>Benediktus Tawuruturun</u> Kepala Desa Latvuan	
15	<u>Hasan Usemahu</u> Pemuda Jl. Baru		35	<u>Hengky Hattu, SH</u> LSM	

MEDIATOR

NAMA/UNSUR	TANDA TANGAN	NAMA/UNSUR	TANDA TANGAN
<u>M. JUSUF KALIA</u> Menko KESRA		<u>SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</u> Menko POLKAM	
<u>Drs. DA'I BACHTIAR, SH</u> Kapolri		<u>H. Z. B. PALAGUNA</u> Gubernur Sulsel	
<u>DR. Ir. M. S. LATUCONSINA</u> Gubernur Maluku		<u>Dra. PAULA B. RENJAAN</u> Wakil Gubernur Maluku	
<u>Drs. SOENARKO D.A</u> Kapolda Maluku		<u>MUSTOPO</u> Pangdam Pattimura	
<u>Z. SAHUBURUA</u> Ketua DPRD Prop. Maluku		<u>Drs. M. J. PAPILAYA, MS</u> Wakil Kota Ambon	

PENINJAU

NAMA/UNSUR	TANDA TANGAN	NAMA/UNSUR	TANDA TANGAN
PROF. DR. DIN SYAMSUDDIN Sekum MUI		PASTOR I. ISMARTONO Komisi Hak / PKR KWI	
DR. I. P. LAMBE Sekum PGRI		Drs. H. ABDULLAH SUKARTA Staf Ahli Dep. Agama	
IRJEN POL. DR. S. SIMATUPANG Kabanintelkam Polri		ARIFIN TARIGAN Sekjen Wantannas	
MAYJEN. BAMBANG SOETEDJO Deputi Poltagri		Dr. FARID W. HUSAIN Deputi Menka Kesra	
DR. MULYANI A. NURHANI Irjen Depdiknas		Dr. SUMARYATI ARYOSO, SKM Dirjen Bansos	
SYAMSUL HUDA Deputi Sistas		BUDIATMADI Deputi Bakornas PII	
Ir. DJOKO KIRMANO Dirjen Perumahan dan Pemukiman		MULIANTO Dirjen Bina Keshang Depdagri	
IRJEN TNI SETYA PURWAKA Staf Ahli Menka Polkam		SOEDIRMAN Staf Ahli Menka Kesra	
DR. HAMID AWALHIDDIN Pengamat Politik		Drs. ARIF MUDATSIR MANDAN Komisi I DPR-RI	
BRIGJEN TNI MANSYORI DEAS, SH Waster Kasim TNI		AMIR SYARIFUDDIN Staf Khusus Wapres	

TERBATAS

30 Januari 2002

MALUKU

ISSUE SAMPAI DENGAN PEMBICARAAN DI AMBON TGL. 26/27-JAN-2002

PERSAMAAN MUSLIM - KRISTEN

1. Sepakat konflik diakhiri dengan dialog
2. Hukum ditegakkan secara adil
3. Pengembalian pengungsi
4. Rehabilitas Ekonomi dan sarana
5. Selesaikan situasi internal TNI/POLRI

HAL - HAL KHUSUS

I. ISLAM

1. Pembicaraan dalam rangka NKRI
2. Usut tuntas RMS / FKM
3. Teliti peristiwa 19-01-1999
4. Penyelesaian dengan jujur
5. Perbaikan pendidikan Agama dan Guru
6. L J mengabdikan pada pendidikan dan kesehatan
7. Kembalikan hak - hak perdata dari pengungsi
8. Rehab Unpatti dengan keseimbangan pimpinan
9. SPN Passo diaktifkan
10. ~~Personal~~
11. ~~Relakun~~

II. KRISTEN

1. Negara tidak mampu selesaikan konflik
2. Issue RMS hanya alternatif apabila negara tidak mampu menyelesaikan konflik
3. Ada Konspirasi pusat
4. L J yang datang ke Ambon agar dipulangkan
5. Ada Islamisasi di beberapa tempat
6. TMM Investigasi Independen Nasional untuk RMS, LJ dan 19/1/1999
7. Penyelesaian dengan dasar kemanusiaan, Hukum, Demokrasi dan Kebudayaan
8. Asrama TANTUI agar dibangun kembali

MALUKU

ISSUE SAMPAI DENGAN PEMBICARAAN DI MAKASSAR TGL. 30 JAN 2002

PERSAMAAN PANDANGAN MUSLIM-KRISTEN

1. Sepakat mengakhiri konflik melalui dialog
2. Hukum ditegakkan secara adil dan tegas
3. Pengembalian pengungsi
4. Rehabilitasi ekonomi dan sarana
5. Menyelesaikan situasi internal TNI/POLRI
6. Membentuk tim investigasi independent Nasional untuk megusut tuntas
FKM/RMS, LJ dan peristiwa 19 Januari 1999
7. Penyelesaian persoalan dengan jujur
8. Perbaikan pendidikan agama dan guru
9. Mengembalikan hak hak perdata para pengungsi
10. Rehabilitasi UNPATTI dengan prinsip keadilan rekrutmen sesuai syarat
kualitas yang di tetapkan
11. SPN Passo diaktifkan secara umum
12. Penylelesaian konflik dilakukan dengan dasar hukum, kemanusiaan,
demokrasi, dan kebudayaan.
13. Asrama Tantui dan fasilitas TNI/POLRI dikembalikan sesuai dengan
fungsinya.
14. Kristen :
Islamisasi di beberapa tempat
Islam :
Tidak ada dan tidak akan terjadi

MASIH BELUM ADA PERSAMAAN PANDANGAN

1. Keberadaan Laskar Jihad di Maluku
2. Keberadaan FKM/RMS

Mu.
JK 30/1.2

No.	Materi	Tuntutan Kriston	Tuntutan Islam	Tawaran Pemecanan
1	Kedudukan Jihad	Penjahat Negara / Minta Keluar	Diperlukan & Terbuka bagi Sesama Warga Negara	- It's better to say - Jangan pamerin paku - Jangan pamerin k - Jangan pamerin k - Jangan pamerin k - Jangan pamerin k
2	TNI / POLRI	Menolak TNI AD yang di BKO dan di Ganti POLRI	Menerima TNI AD Menolak Dikotomi TNI / Polri	- Jangan pamerin k - Jangan pamerin k - Jangan pamerin k - Jangan pamerin k - Jangan pamerin k
3	PBB	Masuk Ke Maluku sebagai Alternatif Terakhir	Menolak	- Telap
4	Laskar Kristus		Ada dan Menolak	- Telap
5	Proses Hukum	Harus Berjalan	Harus Berjalan	- Telap
6	Komisi Kebenaran	Tingkat PBB	Tingkat Nasional	- Telap
7	Gubernur	Diganti	Di Pertahankan	- Klaim klaim - Klaim klaim
8	Pangdam	Diganti		- Dikalahkan - Dikalahkan
9	Tugas Pemerintahan	Gagal	Berhasil/Mendukung	- Berhasil di - Gagal di
10	Darurat Sipil	Di Evaluasi	Diperpanjang	- Telap - Telap
11	Separatis / RMS	Jangan dikembangkan karena Kami Bukan RMS	Ada Eksistensi RMS	- Telap
12	Perbaikan Sosial Ekonomi	Perlu	Perlu	- Telap
13	Adat / Kultural	Pendekatan Adat Budaya Revitalisasi Struktural dan Normatif dari Desa-desas Adat		- Telap
14	Peranan POKJA	Menerima	Menerima untuk Pra Dialog	- Telap
15	Individual		Tingkat dan tingkat & STAN	- Tawaran
16	Politik Penerima		- Dikalahkan - Dikalahkan	- Dikalahkan - Dikalahkan

... Pandangan Ummat Islam
Terhadap Persoalan Konflik Kekerasan di Maluku
(Disampaikan di Pertemuan Malino tanggal 11 Februari 2002)

Latar Belakang

Seperti juga upaya penyelesaian (yang berkali-kali gagal karena penolakan satu pihak), konflik kekerasan bukanlah hal baru dalam sejarah hubungan antar ummat beragama di Maluku. Akan tetapi, selain karena penyederhanaan persoalan, metode yang selama ini dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian tidak pernah mendekati aspek potensi konflik yang mendasar. Itulah sebabnya, pada kesempatan ini ada baiknya kita gunakan untuk mendudukan persoalan konflik kekerasan ini secara jernih dan transparan. Tidak bisa tidak (tanpa bermaksud semata-mata mengorek luka lama), kita harus melihat perspektif sejarah kehadiran agama-agama yang telah mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat Maluku. Islam dibawa oleh para mubaligh Melayu pada pertengahan abad 15, sedangkan Nasrani dibawa oleh Imperialis/Kolonialis Eropah pada abad 16. Islam dan Nasrani, Melayu dan Barat berinteraksi dan tidak jarang berbenturan di Maluku.

Karya pribumi tua "Hikayat Tanah Hitu" yang ditulis dengan huruf Arab dialek Melayu secara gamblang melukiskan perjumpaan Islam dan Nasrani (sering ditulis Kafir) pada awal kedatangan imperialis/kolonialis di Maluku. Pada Alkissah XX surat 35 dari Hikayat Tanah Hitu tercatat antara lain *"Dan menang kafir kepada Islampun demikian lagi, karena perang sabil di tanah Ambon itu tujuh puluh tahun dari pada perang Don Duarde sehingga datang perang Antoni Furtado"*.

Akibat strategi perluasan wilayah tersebut banyak negeri-negeri Islam yang kemudian menjadi negeri-negeri Nasrani. Salah satu kepata (sastra bertutur) dalam bahasa Uli Hatuhaha yang masih hidup sampai sekarang menggambarkan episode sejarah tersebut antara lain sebagai berikut :

*"Henamasa Waia isi loto Hunimua o
Isi uri tasibeha salane kutika o
Isi pa - vlo ruma - o rumasinggi sopa - o
Epaune siresi kiberatua irarolo - o
Upu ana - e upu ana - e masu-masu sokia upu - ana - e
Wele-wele uria isi wele-wele
Mai hanu hiti inhi oi lotoing sopa - e
Waia isi tatou Hitu - a"*

Artinya : "Dizaman dulu orang Wai tinggal di Hunimua
Setiap saat mereka berdoa memuji nama Tuhan (bertasbih)
Mereka juga membangun mesjid yang sangat diagungkan
Mesjid itu menaungi orang di waktu sembahyang
Setalu mereka membangunkan keluarganya bila mura telah berkicau
Mereka dipanggil untuk pergi sembahyang bila terdengar azan subuh

Segera mereka bangun dan menuju ke mesjid
Agama mereka seperti orang Hitu (agama Islam)
(Maryam R.L. Lestaluhu : 1987)

Kapata lain dari jazirah Hitu juga melukiskan hal yang mirip sebagai berikut :

*"Topu kelane, haria topu kelane
Topu isilame, haria topu kelane
Halonga Isilame, jadi Halonga Nasrane
Topu Isilame, haria topu kelane"*

Artinya : "Peganglah erat-erat, mari pegang erat-erat
Pegang agama Islam, mari pegang erat-erat
Karena Halong yang Islam, jadi Halong Nasrani
Pegang Agama Islam, mari pegang erat-erat"
(M Amin Ely : 1982)

Setelah berhasil melakukan strategi perluasan wilayah, dimulailah taktik adu domba melalui bantuan fasilitas dan pendidikan menjadikan kelompok Nasrani Maluku sebagai anak emas meraih posisi-posisi kunci dan hak-hak istimewa ditengah masyarakat Maluku, khususnya di lapisan birokrasi pemerintahan (Nico Schulte Nordholt : 2000). Dilain pihak hal itu juga menimbulkan rasa superioritas kelompok Nasrani Maluku yang menganggap dirinya lebih tinggi ketimbang sesama orang Indonesia lainnya bahkan mendambakan kesederajatan dengan orang Eropah (Richard Chauvel :1985).

Posisi anak emas tersebut mulai terganggu ketika menghadapi kenyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berupaya memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS) pada 25 April 1950.

Richard Chauvel (1985) menyebutkan bahwa : *"Mengenai hubungan antara kedua masyarakat agama, RMS sebetulnya merupakan suatu usaha untuk mempertahankan dominasi Kristen dalam masyarakat Ambon. Pada waktu itu, desas-desus yang disebarakan Soumpokil seolah-olah ada paksaan untuk pindah masuk Islam, langsung mengena pada rasa takut orang Kristen yang telah berakar, bahwa mereka akan tenggelam ditengah-tengah mayoritas Indonesia yang Islam"*

Sudah tentu akan dikatakan bahwa ada beberapa partisipan Islam disana. Tetapi justeru dengan cara merekrut segelintir kecil tokoh Islam yang tidak terlalu populer untuk berfungsi sekedarnya sebagai etalase *window shopping* menjadi pembenaran adanya rasa superioritas kelompok. Cara-cara tersebut terus dipraktekkan sampai dengan pembentukan FKM atau kegiatan lain akhir-akhir ini dimana ada satu dua orang Islam dilibatkan untuk kemudian muncul klaim secara luas bahwa : "Ah, orang Islam juga terlibat kok". Tetapi yang memegang kendali hegemoni adalah mereka yang merasa superior itulah.

Jadi, hegemoni ternyata merupakan kata kunci yang sangat menentukan dikalangan Nasrani yang harus dipertahankan. Oleh karena itu setiap hambatan yang merintanginya harus diantisipasi oleh mereka. Ds A N Radjawane seorang tokoh pendeta Nasrani

Maluku yang sekarang menjadi Anggota DPR/MPR RI melihat hubungan pela gandong dan toleransi serta kerukunan yang berlebihan-lebihan sangat menghambat upaya Kristenisasi terhadap kalangan Islam, malah menganjurkan konfrontasi. Kata Radjawane : *"Gereja haruslah menekankan kepada anggota akan tugas pekabaran injil dikalangan Islam, tantangan Islam yang mengancam Kekristenan di Maluku haruslah dihidupkan lebih dahulu diantara anggota jemaat"* (Islam di Ambon dan Haruku, dalam Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini : 1964)

Radjawane barangkali kurang memperlihatkan rasa frustrasinya melihat kenyataan bahwa Islam yang dihadapi Gereja Protestan Maluku (GPM) menurutnya adalah Islam sebagai suatu kuasa politik yang pengaruhnya besar sekali dewasa ini. Sebaliknya bahkan memacu motifasi untuk terus berkonfrontasi. Tetapi frustrasi yang tampak pada beberapa kelompok di dalam Gereja Maluku, malah lebih dikobarkan bukannya diredam sebagaimana dianjurkan oleh nilai-nilai dan norma-norma Kristen (Nico Schulte Nordholt : 2000)

Kita menjadi paham betul mengapa massa kelompok Nasrani Maluku berikat kepala merah dengan bersemangat mengangkat senjata pada tanggal 19 Januari 1999 sambil menyanyikan lagu Cinta Tuhanku :

*"Bila ku ingat cinta Tuhanku
Ku tidak mau mundur lagi
Bila kuingat cinta Tuhanku
Ku tidak mau mundur lagi*

*Sungguh tidak mau
Ku tidak mau mundur lagi
Sungguh tidak mau
Ku tidak mau mundur lagi"*

Dibawah pimpinan Panglima Laskar Kristus Agus Wattimena - seperti yang diakuinya kepada wartawati Stevanie dari TV Belanda (NOS) - pada awal konflik kekerasan Agus dengan pasukannya berhasil membunuh banyak orang Islam, membumi hanguskan pemukiman, angkutan rakyat (angkot dan becak) dan sarana perbelanjaan di kawasan Islam. Kepada majalah Times Agus Wattimena mengaku memiliki 60.000 pasukan, tetapi belakangan kepada Harian Siwalima dia menyebutkan angka 50.000. Sayang Agus Wattimena kemudian tewas secara misterius, padahal dalam rangka investigasi dan penegakan hukum, dialah salah satu tokoh kunci yang bisa mengungkap konflik kekerasan di Maluku.

Hal yang menarik ialah bahwa konflik 19 Januari 1999 seakan dirancang memiliki slogan dan issue. Usir BBM- JS (Buton Bugis Makassar- Jawa Sumatera) merupakan slogan yang dituliskan dimana-mana dan diteriakkan pada pertemuan di gereja-gereja. Sementara topik penting (*issue*) yang mendasarinya ialah bahwa terjadi marginalisasi Nasrani di birokrasi pemerintahan, dominasi ekonomi, dan daya dukung kota Ambon

yang melemah akibat ketimpangan jumlah penduduk. Antara slogan dan issue memiliki kaitan yang erat untuk menggalang solidaritas, dan memotifasi gerakan.

Duduk Perkara Beberapa Persoalan

Akar Masalah

Kalau akar masalah pertikaian di Maluku dianggap sebagai *crucial point*, karena kedua belah pihak yang bertikai masih bertahan pada sikap bahwa masing-masing mereka bukanlah pemrakarsa kerusuhan, maka untuk menemukan kebenaran tidak ada jalan lain kecuali melalui proses penegakan hukum. Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam kasus kriminal antara Nursalim dan Yopi samasekali tidak menyebutkan bahwa itulah akar persoalan pertikaian Maluku. Oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk menjadi pembenaran bahwa vonis yang diterima Nursalim yang beragama Islam secara otomatis berarti bahwa kerusuhan tersebut direncanakan oleh umat Islam.

Tetapi dengan menghargai azas praduga tak bersalah, mari kita lihat fakta-fakta sebagai berikut.

- a. Kawasan yang mengalami kehancuran terbesar pada tahap awal kerusuhan adalah kawasan pemukiman Islam di pinggiran kota, kampung Waringin, dan pasar Mardika, termasuk rumah-rumah pejabat/tokoh Islam di Karang Panjang, Batugantung dan Manggadua.
- b. *Central Issue* yang didengungkan pada kerusuhan awal adalah usir orang Buton, Bugis, Makassar, Jawa, Kalimantan, dan Padang yang nota bene adalah penganut Islam. Dewasa ini jumlah pengungsi yang terbanyak berada di luar Maluku adalah umat Islam, sebanyak 147.000 di Sulawesi Tenggara. Tidak terhitung yang ada di Jawa, Sulawesi Selatan dan lain-lain. Sedangkan pengungsi Kristen Maluku hanya 7.200 orang yang berada di Irian dan Sulawesi Utara. Dengan demikian, korban pengusiran terbesar adalah umat Islam, bukan Kristen. Artinya korban pelanggaran Hak Azasi Manusia pertama kali dialami oleh umat Islam, karena diusir dari tempat tinggalnya. *Article 13 Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan : "1, *Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.* 2, *Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.* (1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan batas-batas tiap negara. 2, Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.)
- c. Kalangan intelektual Kristen menyebutkan bahwa penyebab kerusuhan adalah karena terjadinya marginalisasi di pemerintahan, dominasi ekonomi, dan ketimpangan kependudukan, yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial. Katanya jabatan-jabatan penting dikuasai orang Islam, pasar didominasi orang Islam, migrasi dari luar Maluku telah merubah komposisi demografis sehingga umat Islam menjadi mayoritas. Akibatnya terjadi

kecemburuan sosial oleh umat Kristen. Kalau orang Kristen cemburu terhadap "kemajuan" yang dicapai umat Islam, apakah logis kalau kerusuhan dibuat oleh orang Islam ?

Kalau yang mengambil prakarsa kerusuhan adalah kelompok Kristen, dan yang menjadi korban adalah umat Islam, apakah masuk akal kalau orang Kristen diberi suaka politik, dan mengkampanyekan keseluruh penjuru dunia bahwa mereka ditindas ? Padahal mereka hidup bebas, melakukan hak-hak demokrasi seperti unjuk rasa dengan leluasa tanpa diganggu mayoritas Islam di Indonesia.

Siapa yang melanggengkan konflik ?

Kalau umat Kristen menolak dialog dengan kelompok Islam, menolak makan malam bersama kelompok Islam, dan menolak naik pesawat bersama kelompok Islam, tidak ada arti lain selain ingin melanggengkan konflik. Artinya, dengan melanggengkan konflik sekaligus menciptakan opini di dunia internasional bahwa pemerintah dan TNI/Polri tidak berhasil mengamankan Maluku. Dan karena itu, diperlukan intervensi pasukan PBB.

Orang Asing, LSM dan PBB

Umat Islam Maluku tidak apriori terhadap "orang maupun lembaga asing", juga terhadap lembaga internasional. Buktinya, kami masih tetap berhubungan dengan orang asing yang bekerja di LSM asing maupun lembaga-lembaga perwakilan PBB. Bahkan wartawan asing yang datang ke kawasan pemukiman Islam mendapat keleluasan. Yang kita tolak ialah campur tangan politik terhadap urusan dalam negeri kami.

Lasykar Jihad

Kritik terhadap apa yang dinamakan Lasykar Jihad Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljama'ah lebih cenderung didramatisasi untuk mencapai target pembentukan opini publik yang pada akhirnya mendukung tuntutan intervensi pasukan PBB. Dalam kenyataannya, kegiatan Lasykar Jihad tidak berbeda jauh dengan LSM yang juga bergerak di Maluku dewasa ini. Tujuan utama Lasykar Jihad datang ke Maluku adalah untuk memberikan bantuan sosial keagamaan khusus kepada umat Islam yang menjadi korban kerusuhan. Mereka membangun Puskesmas-Puskesmas, karena satu-satunya Rumah Sakit yang efektif melayani umat Islam hanya Rumah Sakit "Bersalin" Alfatah. Di bidang pendidikan, Lasykar Jihad membuka kursus bimbingan belajar, sekolah alternatif dan pemberian beasiswa bagi anak-anak korban kerusuhan. Ketidaksiapan pemerintah kotamadya Ambon menanggulangi sampah telah dibantu oleh Lasykar Jihad. Begitu pula kegiatan pendampingan secara Islam terhadap masyarakat dalam bentuk da'wah sangat intensif dilakukan oleh Lasykar Jihad. Lalu kalau LSM asing maupun nasional dan lokal, bebas bekerja disini, apa alasannya mengusir Lasykar Jihad ?

Desas-desus Keterlibatan TNI/Polri

Tentang desas-desus keterlibatan TNI/Polri dalam kerusuhan Maluku, kami yakin bahwa secara institusional itu hanya merupakan analisis para pengamat, bukan fakta yang terbukti. Bahwa ada oknum TNI/Polri yang terlibat, hal itu sulit dihindari karena kerusuhan Maluku diformulasikan sebagai konflik antar komunitas agama. TNI/Polri hanya dijadikan kambing hitam untuk menyudutkan negara Indonesia agar PBB melakukan intervensi.

Islamisasi dan Kristenisasi

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256 menyebutkan "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),".

Surat An Nahl ayat 125 : "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah...."

Surat Al Kahfi ayat 29 : "Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu ; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".

Dari penggalan tiga surat diatas inaka Ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa tindakan pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang mengikuti agama Islam tidak dibenarkan.

2. Tata cara pengislaman terhadap seseorang atau sekelompok orang, sesuai ajaran Islam ialah dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat "Saya bersaksi bahwa tiada tuhan lain yang disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah".

Pengucapan tersebut harus disaksikan minimal oleh dua orang.

Setelah pengucapan Syahadat dilakukan penyunatan.

Diluar ketentuan tersebut bukanlah pengislaman.

3. *Article 18 Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) mencantumkan : "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance".

(Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk

menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri)

Semua instrumen-instrumen umum yang merupakan suplemen terhadap "*Universal Declaration of Human Rights*" seperti "Piagam Afrika (di Nairobi 27 Juni 1981)", "Konvensi Amerika (di San Jose 22 November 1969)", "Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar" (di Roma 4 November 1950), dan "Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (Resolusi Majelis Umum PBB pada 25 November 1981)", tetap berada pada kerangka dasar sebagaimana yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

4. Upaya pembentukan opini publik akhir-akhir ini seakan-akan telah terjadi pemaksaan dan pengislaman adalah untuk menggugat umat Islam agar tidak mengikuti cara-cara Kristenisasi seperti yang dipraktekkan selama ini di Indonesia. Padahal Islam sangat memberikan toleransi dan kebebasan kepada umat manusia untuk menjatuhkan pilihan agamanya, sebagaimana pula yang diatur oleh *Universal Declaration of Human Rights*. Islam dan Hak-hak Asasi Manusia sejalan dalam hal ini.

5. Dalam konteks kerusuhan di Maluku, upaya Kristenisasi bukan samasekali tidak terjadi. Cukup banyak umat Islam yang karena terdesak telah berganti agamanya menjadi Kristen, tetapi banyak pula yang berhasil menyelamatkan diri.

Kasus desa Leihari pada awal kerusuhan tanggal 18 Februari 1999 berdasarkan laporan Usman Wally kepada Satgas Penanggulangan Korban Peristiwa Idul Fitri Berdarah MUI Maluku (tgl 23/2/1999), adalah contoh bagaimana upaya Kristenisasi itu dilakukan ketika penduduk desa tersebut terdesak. Mereka kemudian berhasil di evakuasi oleh aparat keamanan keluar dari Leihari. Tetapi umat Islam tidak pernah menggembar-gemborkan persoalan ini.

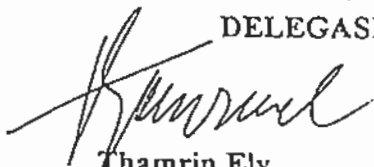
Juga tidak menggembar-gemborkan tentang upaya Pimpinan Pesantren Kiyai Haji Syahroni di Pasahari Seram Utara yang melindungi dan memberi makan para pengungsi Kristen tanpa meminta mereka untuk masuk Islam. Dan mereka berbahagia disana.

6. Kasus Islamisasi yang menyangkut sejumlah kecil orang bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar yang terjadi di Maluku sebagaimana yang disangkakan oleh tokoh-tokoh Kristen. Pelanggaran HAM terbesar adalah upaya pengusiran orang-orang Buton Bugis Makassar (BBM) dalam jumlah ratusan ribu, yang sampai sekarang belum kembali ke Maluku.

Maka untuk memahami dan menganalisis situasi dan kondisi Maluku dewasa ini untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian konflik secara komprehensif dan paripurna dibutuhkan perubahan sikap dan perilaku yang sesuai dengan paham kebangsaan Indonesia, dan moralitas agama.

Malino 11 Februari 2002

DELEGASI ISLAM MALUKU



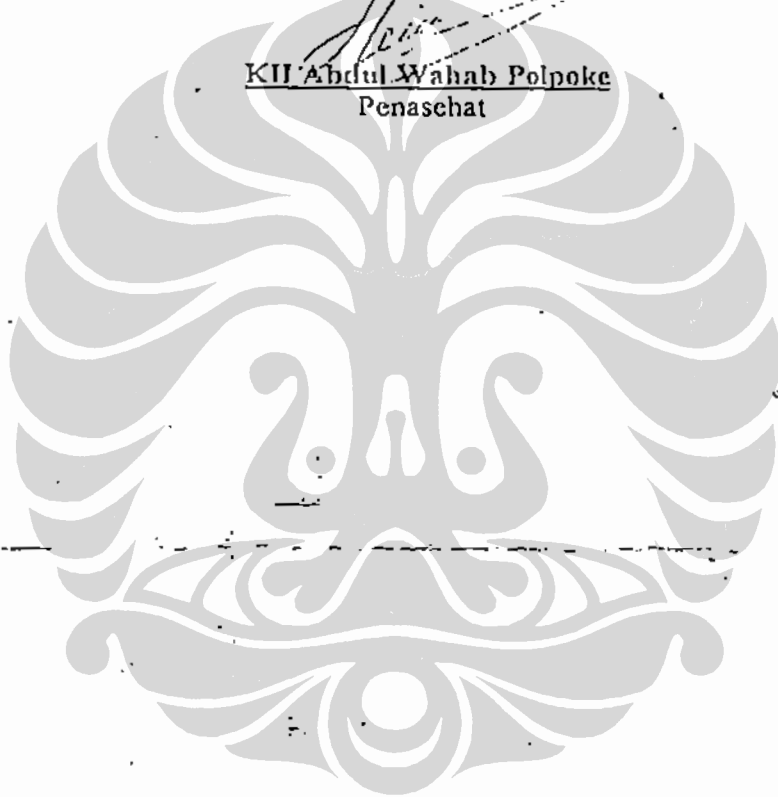
Thamrin Ely
Ketua



M Nasir Rahawarin
Sekretaris



KII Abdul Wahab Polpoke
Penasehat



PERTEMUAN UNTUK MALUKU

VISI MASYARAKAT KRISTEN MALUKU TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK

A. Pendahuluan: Merambah jalan perundingan

Maluku telah menjadi salah satu pusat konflik dan pusat krisis regional maupun nasional yang multi-dimensional terburuk di awal abad XXI. Apa pun namanya, konflik yang telah mengeksploitasi sentimen keagamaan dengan melibakan simbol keagamaan serta kelompok masyarakat yang berbeda agama, telah menelan korban puluhan ribu orang, menimbulkan kerugian harta benda yang tak ternilai, memporak-porandakan nilai-nilai dan tata hidup, pranata sosial dan budaya, serta sarana dan sendi perekonomian, yang telah dibangun sejak ratusan tahun yang silam. Masalah-masalah yang dilimbukannya sudah sangat rumit. Berbagai faktor penentu yang saling mempengaruhi seperti agama, ideologi, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, telah menjadikan spektrum masalah menjadi lebih luas dan lebih kompleks, serta menimbulkan berbagai kebutuhan yang mendesak seperti penegakan hukum dan keadilan, pemulihan dan jaminan keamanan, rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan ekonomi, penegakan hak-hak dan martabat serta hak-hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

Umat Kristen, sebagai manusia, warga masyarakat dan Gereja, yang ditempatkan Allah di Indonesia, khususnya di Maluku, mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab fundamental untuk ikut menyelesaikan konflik ini, bersama dengan segenap komponen masyarakat dan bangsa lainnya, termasuk sesama manusia yang beragama Islam. Kita ditempatkan oleh Allah yang satu dan sama untuk hidup di Maluku secara berdampingan sebagai sesama ciptaanNya, sesama saudara, sebangsa dan se-Tanah Air. Apalagi Rakyat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara imperatif telah menugaskan pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik sosial yang berkepanjangan itu secara adil, nyata, dan menyeluruh serta mendorong masyarakat yang berakhlak agar pro-aktif melakukan rekonsiliasi untuk memperlakukan dan memantapkan integrasi nasional (Keputusan MPR Nomor IV Tahun 1999).

Kami umat Kristen sungguh menyedari, bahwa konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun lebih, tidak punya manfaat apapun, selain hanya mengakibatkan rupa-rupa kerugian, kehancuran, kemerosotan, dan penderitaan. Oleh karena itu, konflik ini harus dihenlkan. Konflik yang tidak jelas ujung pangkalnya ini, segera harus diselesaikan dengan tanpa kekerasan. Penghentian konflik ini harus diupayakan dengan cara-cara yang beradab dan dialogis, sebab dengan belatut-latutnya kekerasan cenderung melahirkan kekerasan-kekerasan baru yang mungkin lebih dahsyat. Ini bukanlah cara yang terpuji dan terhormat. Jalan dialog dan perundingan adalah jalan yang sungguh-sungguh beradab. Untuk itu, maka jalan dialog dan perundingan mesti secara fundamental diletakkan pada perjuangan moral kemanusiaan, sikap saling percaya, keterbukaan, kejujuran dan kelulusan serta semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang luhur. Untuk itulah pula, maka seluruh proses dialog dan perundingan mesti dimuarakkan pada visi atau perspektif-perspektif fundamental sebagaimana dijelaskan berikut ini.

6. Perspektif

1. Perspektif Kemanusiaan:

Sesungguhnya semua agama anti kekerasan. Inti misi agama yang fundamental adalah kemanusiaan. Tuhan menempatkan manusia sebagai ciptaan paling mulia, serupa dengan citra Allah sendiri. Oleh sebab itu kekerasan terhadap manusia apapun bentuknya adalah perbuatan dosa. Semua agama mengajarkan perlindungannya hormat kepada kehidupan dan kemanusiaan. Ini berarti, mengakui hak azasi manusia akan hidup, keamanan dan perkembangan bebas kepribadiannya. Tidak ada hak untuk menganiaya dan menindas orang lain fisik atau psikis. Tidak ada bangsa, negara, ras, atau pun agama yang berhak membenci, mendiskriminasi, menyingkirkan atau mengusir, apalagi menghancurkan suatu kelompok hanya karena berbeda agama, etnis, budaya atau pun perbedaan adaptasi ekonomi. Karenanya, konflik antar manusia, termasuk manusia beragama, harus diselesaikan tanpa kekerasan dalam kerangka keadilan, solidaritas dan hormat kepada kemanusiaan.

2. Perspektif Solidaritas dan Keadilan:

Berdasarkan prinsip bahwa tidak ada perdamaian tanpa keadilan, maka seluruh proses perundingan dalam kerangka penyelesaian konflik ini harus dibuat lebih adil. Emansipasi dan partisipasi semua pihak diperlukan. Jangan sampai ada kelompok yang merasa dimarginalisasi atau termarginalisasi. Keadilan harus ditegakkan. Karenanya, bagaimana misalnya semua kekuatan ekonomi dan politik bermanfaat untuk semua orang daripada kepentingan kelompok atau perorangan. Kepedulian kepada korban tindak kekerasan, para pengungsi, mereka yang hilang, mereka yang terlindas, mereka yang tersingkir, mereka yang suaranya dibungkamkan, mereka yang menderita, harus menjadi tolak ukur dari legakunya solidaritas dan keadilan.

3. Perspektif Kesamaan Hak dan Kedudukan:

Laki-laki dan perempuan, kelompok masyarakat yang berbeda agama, etnis, budaya atau pun berbeda adaptasi ekonomi merupakan prinsip-prinsip hak azasi manusia yang harus diwujudkan dalam pergaulan sosial dan dalam pengambilan keputusan publik. Eksploitasi dan diskriminasi adalah penghinaan paling besar terhadap kemanusiaan. Karenanya, perundingan dalam kerangka penyelesaian konflik ini, kesamaan dan keselaraan harus menjadi prinsip bersama yang utama, dimana setiap orang, setiap kelompok diperlakukan sama sebagai warga negara yang tidak diletakkan atas dasar apapun yang diskriminatif.

4. Perspektif Tolereansi dan Kebenaran:

Prinsip atau perspektif ini mutlak diperlukan untuk membangun hidup bersama yang damai. Kebebasan tanpa kendali akan membawa bangsa ini terjerembab kedalam anarkisme dan radikalisme total. Karenanya, kita memerlukan kebebasan yang dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi. Kita juga harus terus mencari kebenaran dalam kejujuran daripada menyebarkan pandangan ideologis sempit. Kita tidak hanya harus menyebarkan kebenaran yang dapat dipercayai, tetapi kita sendiri harus menjadi manusia yang pantas dipercayai, karena tidak mendistorsi kebenaran untuk kepentingan sempit, dan formalistik. Komunikasi yang jujur

kita dalam konteks pluralitas masyarakat, harus tumbuh diantara masyarakat, khususnya sesama warga bangsa di Maluku.

5. Perspektif Revitalisasi semangat, jiwa dan wawasan kebangsaan:

Maluku yang bersatu, damai, adil, makmur dan sejahtera, serta yang menjunjung tegaknya harkat dan martabat manusia, hanya mungkin tercipta bila kita terus menerus mengabdikan semangat, jiwa dan wawasan kebangsaan. Kita memerlukan solidaritas agama, etnis atau budaya. Namun, realitas solidaritas yang sifatnya parsial itu; entah itu solidaritas agama, etnis, kelompok atau budaya, mesti dilelakan dalam kerangka solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan. Bangsa yang gagal membangun dengan baik solidaritas kemanusiaan dan kebangsaan, apalagi seperti Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika ini, cepat atau lambat akan runtuh.

6. Perspektif Saling Memaafkan:

Hakekat manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak terbebas dari kekeliruan dan kesalahan. Eksistensi manusia yang penuh dengan kelemahan karena kemanusiaannya, siapapun dia dan apapun latar belakang keyakinan agamanya, seyogianya menjadi kesadaran bersama untuk membuka pembatas ruing primordialisme sempit dan sikap fatalistik. Kenyataan yang selama ini menyakit relasi-relasi sosial kemanusiaan khususnya sebagai akibat konflik berkepanjangan di Maluku, seharusnya dijembatani melalui upaya bersama untuk saling memahami dan feruama saling memaafkan. Sesungguhnya tidak ada salupun alasan yang logis dan teologis untuk saling meniadakan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Dengan mengedepankan perspektif ini dalam penyelesaian konflik Maluku, tidak berarti bahwa proses penegakan hukum harus diabaikan. Justru sebaliknya, penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dalam kerangka kepastian hukum, harus tetap menjadi satu-satunya pilar acuan untuk membangun rasa hormat terhadap harkat dan martabat manusia Indonesia.

3. Penjabaran Agenda Perundingan

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR DETERMINAN
I. Keamanan		
A. Penghentian Kontak Fisik	- Kesepakatan tidak menyerang - Tidak melakukan penembakan - Tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun	- Pembentukan pos, patroli terpadu, TNI, Polri - Siskamling Terpadu Plus - Tindakan tegas (Tidak dikailikan dengan kelompok)
B. Non Fisik	- Penghentian segala bentuk provokasi - Eliminasi pembusukan ke/dari dalam	- Tindakan tegas terhadap sumber-sumber provokasi (media massa + mimbar agama, dll) - Pengawasan internal/eksternal komunitas
C. Penyerahan Senjata	- Kesepakatan penyerahan senjata dalam jangka tertentu	- Sosialisasi - Jaminan keamanan dari negara - Tim penampung terpadu
D. Peran TNI/POLRI	- Netralitas dan profesionalisme	- Pembentukan tim pemantau/pengawas
E. Pos Patroli Terpadu Plus	- Pembentukan pos/patroli plus di wilayah penyekat, fasilitas publik dan jalur transportasi	- Keseniusan TNI/Polri - Dukungan aktif masyarakat
F. Laskar Jihad & lain-lain Laskar	- Mengeliminir gerakan radikal dan pemujungan ke daerah asal masing-masing	- Sikap tegas Pemerintah - Sikap tegas TNI/POLRI

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR DETERMINAN
II. SOSIAL EKONOMI A. Pengembalian Pengungsi	- Kepastian waktu pengembalian pengungsi ke tempat asal sesuai hak kepemilikan - Jaminan keamanan optimal - Jaminan kesejahteraan selama 6 (enam) bulan - Pemberdayaan ekonomi pengungsi	- Tanggung jawab negara termasuk pemberian kompensasi - Kesiapan TNI/Polri - Dukungan masyarakat sekitar - Kesiapan Pemerintah dan Pemda - Penyediaan modal usaha dan pendampingan
3. Rehabilitasi Fisik	- Pembangunan kembali rumah penduduk, rumah ibadah dan fasilitas umum/sosial - Revalidasi korban cacat akibat konflik - Pemberdayaan ekonomi korban cacat	- Ketersediaan dana yang memadai - Kelancaran dan keamanan pasokan bahan bangunan (beton) - Stabilitas wilayah penukiman & sekitarnya - Standar rumah yang memadai - Dana, sarana dan pelayanan dari negara - Penyediaan modal usaha dan pendampingan
C. Rehabilitasi Non Fisik	- Penanganan secara berencana kerusakan mental (traumatis)	- Tersedia trauma center yang kompeten dan terpadu
D. Rehabilitasi Sosial/Kerukunan	- Terbangunnya kepercayaan diantara warga kedua komunitas	- Revitalisasi lembaga adat melalui Perda - Revitalisasi perilaku keberagamaan - Pengakuan terhadap realitas kemiskinan

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR DETERMINAN
<u>C. HUKUM</u> A. Supremasi Hukum	- Penyelesaian masalah sesuai prosedur hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum - Terlibit kehidupan masyarakat - Pencarian orang hilang - Penyelesaian pemaksaan pemindahan agama - Penyelesaian kepemilikan hak tanah/rumah individual - Tindak tegas Laskar Jihad dan lain-lain Laskar - Tindak tegas kebenaran isu RMS	- Tersedianya sarana dan prasarana seperti SDM - Jaminan keamanan bagi aparat hukum dan perlindungan saksi - Penegakan hukum pada tindakan kriminal murni (tidak diperluas dan pelaku harus ditangkap) - Penegakan sanksi secara konsekuen dan konsisten - Proses penyadaran masyarakat - Penertiban lalu lintas dan pasar kaget - Penertiban pendudukan - Keseriusan Polri menindaklanjuti laporan masyarakat - Transparansi dan akuntabilitas laporan - Jaminan kebebasan dan perlindungan kehidupan beragama - Kepastian jaminan pemenuhan - Ganti rugi menurut harga dasar tanah - Perfuna tim falsiran - Sikap tegas Pemerintah (t. jawab negara) - Konsistensi penegakan hukum oleh aparat - Sikap tegas Pemerintah (t. jawab negara) - Konsistensi penegakan hukum oleh aparat

ASPEK	INDIKATOR	FAKTOR DETERMINAN
D. HAM	- Penyelesaian pelanggaran HAM - Mengungkap akar masalah sejak 19 Januari 1999	- Pembentukan komisi penyelidik independen - Peradilan Ad Hoc HAM Maluku - Pembentukan Komda HAM Maluku - Tanggung jawab negara - Benluk tim investigasi independen - Sikap tegas aparat penegak hukum
E. SOSIAL POLITIK		
A. Penyelesaian Sosial Politik	- Pembentukan kesadaran berpolitik secara demokratis - Pengembangan semangat kebangsaan dan keberagaman - Refungsionalisasi Lembaga-lembaga Adat - Mendorong perhatian Pemerintah dalam rangka special treatment untuk pemulihan Maluku	- Berfungsinya lembaga-lembaga politik secara demokratis - Revitalisasi dan redefinisi jiwa, wawasan semangat kebangsaan dan keberagaman - Mempercepat produk-produk Peraturan Daerah mengenai Refungsionalisasi Lembaga Adat - Dukungan politik yang konsisten

D. Identifikasi Kemungkinan Hambatan Dalam Proses Perundingan:

1. Kelidakpercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian konflik Maluku.
2. Indikasi adanya kepentingan yang baik secara langsung maupun tidak, ikut melanggengkan konflik Maluku.
3. Mengadopsi masalah sebagai persoalan kelompok besar atau komunitas.
4. Penguasaan senjata api, senjata tajam dan lain-lain bahan peledak yang dimiliki warga sipil, sehingga berpotensi melahirkan kekacauan yang mengganggu jalannya proses perundingan.
5. Pembusukan dari dalam yang menciptakan iklim yang tidak kondusif sehingga mengganggu proses perundingan.
6. Kemungkinan intervensi pihak luar yang tidak berkepentingan ke dalam proses perundingan.
7. Kemungkinan ketidakseriusan pemerintah (sekedar *lipis service*).
8. Kemungkinan diujukannya prasyarat perundingan oleh salah satu atau kedua kelompok yang sulit dipenuhi.
9. Adanya gangguan berupa penyerangan atau aksi teror.
10. Kemungkinan terjadinya benturan antara oknum aparat keamanan yang melibatkan kelompoknya masing-masing.
11. Kemungkinan dilakukannya provokasi media, baik media cetak maupun elektronik.

E. Rekomendasi (Saran Tindak):

1. Merujuk pada Jadwal Kegiatan yang telah disarankan, maka pengambilan pengungsi yang direncanakan dimulai pada minggu kedua bulan Maret 2002 dan berakhir pada bulan Juni 2002, sebaiknya dapat diperlimbangkan secara matang. Masalah ini terkait dengan:
 - a. Keberhasilan langkah-langkah sosialisasi.
 - b. Kemampuan dalam menciptakan kesepakatan tingkat desa.
 - c. Kesiapan fasilitas dalam rangka pemulangan pengungsi.
 Hal-hal tersebut perlu dikemukakan, mengingat kondisi geografi Maluku yang terdiri kepulauan, dan terbalasnya berbagai fasilitas yang tersedia untuk mendukung langkah-langkah sehubungan dengan implementasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Oleh sebab itu, dianjurkan agar kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pendekatan kepulauan.
2. Sehubungan dengan rencana pemulangan pengungsi yang ditenggari akan menghadapi berbagai kendala, maka Pemerintah patut memperlimbangkan kemungkinan melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi dalam rangka pemberdayaan mereka di lokasi pengungsian masing-masing.
3. Mengingat tingkat kompleksitas dan sensitivitas masalah yang sementara dihadapi oleh rakyat Indonesia di Provinsi Maluku, maka seyogianya Pemerintah dapat memperlimbangkan perlakuan khusus dengan berbagai implikasi pendanaannya kepada Daerah Maluku dalam konteks upaya mendukung pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini mengingat situasi keterpurukan khususnya dalam bidang ekonomi yang dihadapi masyarakat selama lebih dari tiga tahun konflik.
4. Dalam rangka meminimalkan berbagai potensi konflik di dalam masyarakat sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelesaian konflik Maluku, maka Pemerintah diminta untuk secara resmi melakukan klarifikasi atas sejumlah masalah dan isu sebagai berikut:

{ Peristiwa 19 Januari 1999.

Bukan saja saudara-saudara Muslim yang secara demonstratif menuntut adanya kejelasan tentang peristiwa 19 Januari 1999; kalangan Kristen pun merasa sangat berkepentingan dengan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal tersebut. Bagi kalangan Muslim, peristiwa pada tanggal dimaksud secara apriori sudah dijadikan tuduhan bahwa warga Kristen-lah yang merencanakannya terlebih dahulu. Sementara bagi warga Kristen, apa yang sesungguhnya terjadi sama sekali tidak diketahui, bahkan beberapa kalangan Kristen yang mempunyai pengalaman traumatis saat itu, meyakini bahwa kalangan Muslim-lah yang sebelumnya memulai penyerangan awal pada tanggal tersebut.

Untuk menjembatani tuntutan kedua belah pihak, maka Pemerintah telah berkali-kali diminta untuk membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengungkapkan kasus tersebut di atas. Akan tetapi hingga kini, ternyata permintaan itu tidak pernah dipenuhi.

{ Apa yang dinamakan isu "Republik Maluku Selatan (RMS)".

RMS merupakan isu yang disebut-sebut "bermain" dalam konflik Maluku. Isu ini dilansir oleh beberapa petinggi TNI, kemudian diadopsi dan semakin disebar-luaskan oleh beberapa pimpinan sipil serta pimpinan agama dari komunitas tertentu. Isu RMS ini telah dijadikan sebagai alasan pembenar bagi kehadiran apa yang dinamakan Laskar Jihad (LJ) Ahlus Sunnah Waljamaah pimpinan Jafar Umar Thalib dan laskar-laskar lainnya untuk "katanya" berperang membela kepentingan Islam dan Negara Indonesia melawan apa yang mereka sebut sebagai "separatisme Kristen RMS" di Maluku.

Gereja berpendapat bahwa isu tersebut sangat tidak berdasar, bahkan sangat tidak logis. Ini merupakan isu siluman yang disusupkan masuk semula-mula untuk meramalkan konflik dan mengimbangi perjuangan ideologis kelompok radikal-fundamentalis LJ dan lain-lain dalam upaya bersama merubah tatanan dasar negara sesuai Proklamasi 1945. Menurut hemal kami, instrumen-instrumen intelejen negara yang berada di Provinsi Maluku seharusnya dapat menjelaskan secara rinci dan gamblang mengenai persoalan RMS (dengan asumsi tidak terjadi pemutar-balikan fakta di lapangan). Jika hal tersebut sudah dilakukan dan ternyata membenarkan isu ini, Gereja berpendapat negara melalui Pemerintah harus membuat klarifikasi yang jelas dan akurat kepada publik disertai bukti konkrit tentang keterlibatan RMS dalam konflik Maluku. Dan, sekalipun (kata kunci) "RMS" memang ada di Maluku sesuai dengan latar belakang konteks sejarah berdirinya, ketika para pengikut federalisme di Maluku merasa kecewa terhadap solusi pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT), bermufakat di Desa Islam, Tulehu pada tanggal 24 April 1950 untuk memproklamasikan RMS pada tanggal 25 April 1950, maka Gereja mendesak Pemerintah untuk menuntaskannya melalui prosedur hukum yang lazim berlaku; dan sekali lagi, sekalipun (kata kunci) RMS benar-benar ada, maka realita ini bukan merupakan kewenangan LJ atau laskar lainnya, tetapi adalah kewenangan aparat keamanan dan hukum negara. Dengan demikian, Gereja mendesak pula agar Pemerintah menyalakan sikap tegas alas claim yang sering dijadikan alasan pembenar bagi LJ dan lain-lain laskar untuk hadir dan mengemas perjuangan kepentingan ideologisnya dengan menunggangi konflik Maluku.

1 Laskar Jihad (LJ) dan Laskar lainnya

Kehadiran LJ dan laskar lainnya di Maluku ternyata telah memperparah situasi konflik. Disamping sentimen agama yang dijadikan alasan kehadiran mereka, juga kalanya untuk memerangi gerakan separatis Kristen RMS. Bahkan arti RMS dengan sengaja "diplesetkan" oleh mereka menjadi Republik Maluku Selatan (Kristen).

Pertanyaan yang hingga kini tidak terjawab dalam komunitas Kristen adalah, bagaimana mungkin Pemerintah membiarkan mobilisasi LJ memasuki wilayah Maluku tanpa disertai upaya pencegahan yang serius dan nyata? Padahal ketika Gus Dur masih berkedudukan sebagai Presiden RI, beliau dengan jelas telah mengeluarkan perintah yang berisi larangan LJ mendatangi Maluku. Herannya ialah, perintah itu diabaikan sama sekali oleh seluruh jajaran aparat keamanan di berbagai pintu keluar dan masuk pada berbagai wilayah Indonesia.

Eksistensi LJ tersebut semakin membingungkan ketika Amin Rais, seorang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat menyempatkan diri hadir dan berorasi dalam konsolidasi LJ di Lapangan Parkir Timur Senayan pada apa yang disebut Tabliq Akbar Sejuta Umat. Demikian pula halnya dengan pandangan Menkopolsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam perlemuan terbalas di Bandara Pattimura Ambon, yang konon menyebabkan pentingnya kehadiran LJ di Maluku untuk mengimbangi kekuatan Kristen, karena jika LJ dilantik, dikualirkan komunitas Kristen akan melakukan penyerangan terhadap komunitas Muslim. Begitu pula dengan figur seorang Jafar Umar Thalib yang menamakan dirinya sebagai Panglima Laskar Jihad Ahlus Sunnah Waljamaah. Siapakah sebenarnya dia? Atau sekalipun dia bukan siapa-siapa, maka siapakah orang kuai dibalik Jafar Umar Thalib? Sebab sangat sukar dibayangkan bila seorang Jafar Umar Thalib yang sementara berstatus tahanan rumah (di Jakarta) dapat melakukan perjalanan ke Maluku bahkan sempat berkhulbah membakar semangat perang dari komunitas Muslim di Maluku.

Oleh sebab itu menurut pandangan Gereja, disamping klarifikasi Pemerintah alas kehadiran LJ dan lain-lain laskar di Maluku, mereka harus dengan segera dilantik atau jika dipandang penting, harus dipaksa keluar dari seluruh wilayah Maluku. Kehadiran mereka hanya untuk menyebarkan paham garis keras kepercayaan Islam yang di masa mendatang akan menjadi ancaman bersama seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk dan cinta damai. Apalagi mengingat pelaksanaan Syariat Islam berupa hukum rajam yang pernah dipraktikkan di Ambon, adalah di luar sistem hukum pidana positif Indonesia, serta berbagai perbuatan melakukan Islamisasi Paksa pada beberapa wilayah Provinsi Maluku.

1 Terorisme

Pasca penyerangan WTC dan Pentagon, 11 september 2001, Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya mulai gencor mengkampanyekan perang anti terorisme. Terkait dengan ini, maka berbagai berita yang dilansir media massa menyebutkan adanya jaringan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden yang masuk ke Indonesia terutama di Poso dan Maluku. Dalam hubungan ini, meskipun Pemerintah Indonesia sudah menyalakan pandangannya, tetapi masih terlihat adanya perbedaan yang harus diluruskan secara resmi. Apakah betul kelompok radikal-fundamentalis

Maluku, DR. M. S. Luluconsina, yang ketika tiba di Bandara Pattimura mencolok menyerahkan paspornya untuk diperiksa: adegan mana sempat disaksikan oleh banyak orang pada saat itu.

Demikian halnya dengan aksi-aksi teror bom dan penembakan yang terjadi di Maluku, yang terlihat dilakukan secara profesional dan pelakunya tidak pernah tertangkap. Bahkan jika ada pelaku yang tertangkap, proses hukumnya tidak pernah jelas. Begitu pula dengan nasib 12 (dua belas) anggota LJ yang tertangkap hidup oleh YonGab dan SGI pada saat LJ tersebut melakukan penyerangan ke Gunung Nona: dimanakah mereka?

Gereja percaya dan meyakini bahwa, jika Pemerintah secara jujur dan terbuka berkehendak baik melakukan klarifikasi atas berbagai masalah dan isu tersebut di atas, maka dengan sendirinya akan sangat membantu proses penyelesaian konflik Maluku.

F. Penutup:

Bilakah cengkih dan pala berbunga lagi, bilakah terumbu karang menghiasi taman laut Maluku, menjadi perlantayan yang terus lahir dari seliap dada anak Maluku.

Perlantayan-perlantayan yang sarai dengan harapan akan datangny masa depan baru yang penuh pengharapan.

Perlantayan-perlantayan fundamental ini, menanti kita semua untuk merajut kembali sebuah masa depan bersama yang gemilang melalui perundingan ini.

*"Ragukan bahwa matahari itu berputar,
Ragukan bahwa bintang itu api,
Ragukan bahwa kebenaran itu dusta,
Tapi, jangan pernah ragukan cintaku"*

Ambon, 29 Januari 2002

Atas Nama
MASYARAKAT KRISTEN MALUKU

PdI. DR. I. W. J. HENDRIKS

Mgr. P. C. MANDAGI, MSC